



REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2009
(Audited)

MEI 2010

INDEKS	ISI	i
INDEKS	TABEL	ii
INDEKS	GRAFIK	iii
INDEKS	DAFTAR	v
INDEKS	SINGKATAN	vii
INDEKS	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	x
RINGKASAN		1
I. LAPORAN REALISASI		4
APBN		
II.		6
NERACA		
III. LAPORAN ARUS		8
KAS		
IV. CATATAN ATAS LAPORAN		10
KEUANGAN		
A. PENJELASAN		10
UMUM		
A.1. DASAR HUKUM		10
A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO		10
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN		36
A.4. KEBIJAKAN		40
AKUNTANSI		
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI		52
APBN		
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI		52
APBN		

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI	53
APBN	
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA	73
C. PENJELASAN ATAS POS-POS	78
NERACA	
C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM	78
C.2. PENJELASAN PER POS	79
NERACA	
C.3. CATATAN PENTING LAINNYA	132
C.4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL	150
PELAPORAN	
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS	151
KAS	
D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS	151
D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS	153
KAS	
DAFTAR	171

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2009	171
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2009	182
3. Laporan Realisasi Dana Perimbangan TA 2009	204
4. Daftar Saldo Kas di KPPN per 31 Desember 2009	257
5. Saldo Rekening Pemerintah Lainnya di BI per 31 Desember 2009	262
6. Laporan Penerimaan Pemerintah Sektor Migas	264
7. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009	274
8. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2009	276
9. Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2009	278
10. Piutang Pajak per 31 Desember 2009	280
11. Piutang PNBPN per 31 Desember 2009	282
12. Piutang PNBPN Minyak Bumi dan Gas Alam per 31 Desember 2009	283
13. Bagian Lancar Tagihan TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2009	286
14. Piutang yang Berasal dari Kewajiban Bank Dalam Likuidasi	287
15. Persediaan pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2009	288
16. Piutang RDI/RPD/SLA	290
17. Pokok Pinjaman Pendanaan KUMK Periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009	291
18. Piutang Bunga dan Denda Pinjaman Pendanaan KUMK Periode per 31 Desember 2009	292
19. Penyertaan Modal Negara Pada BUMN	294
20. Penyertaan Modal Negara Pada Non BUMN	302
21. Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Regional	303
22. Aset Tetap pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2009	304
23. Tagihan TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2009	316
24. Aset Tak Berwujud pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2009	317
25. Saldo Rekening Khusus Pemerintah per 31 Desember 2009	319
26. Rekening Dana Cadangan per 31 Desember 2009	325
27. Aset Lain-lain pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2009	326
28. Ringkasan Aset Negara yang Dikelola PPA per 31 Desember 2009	328
29. Aset Eks BPPN yang Dikelola Tim Koordinasi	331
30. Aset KKKS per 31 Desember 2009	333
31. Utang Kepada Pihak Ketiga pada pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2009	335
32. Bagian Lancar Surat Berharga Negara per 31 Desember 2009	337
33. Utang Bunga Obligasi Negara per 31 Desember 2009	338
34. Surat Berharga Negara Jangka Pendek Dalam Negeri per 31 Desember 2009	341
35. Surat Berharga Negara Jangka Panjang Dalam Negeri per 31 Desember 2009	342

36. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara	345
37. Ikhtisar Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya	353
38. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU per 31 Desember 2009	360
39. Ikhtisar Laporan Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga	366
40. Rekapitulasi Hasil Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina s.d. 31 Desember 2009	368
41. Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2008	376
42. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara Tahun 2009	387

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BDL	: Bank Dalam Likuidasi
BEJ	: Bursa Efek Jakarta
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BI	: Bank Indonesia
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	: Badan Layanan Umum
BPMIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	: Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	: Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CFO	: <i>Chief Financial Officer</i>
CGI	: <i>Consultative Group on Indonesia</i>
COO	: <i>Chief Operating Officer</i>
CPI	: <i>Consumer Price Index</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAU	: Dana Abadi Umat
DBH	: Dana Bagi Hasil
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
EDI	: <i>Electronic Data Exchange</i>
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
HTI	: Hutan Tanaman Industri
INDRA	: <i>Indonesian Debt Restructuring Agency</i>
KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	: Kiriman Uang
KUHR	: Kredit Usaha Hutan Rakyat

KUMK	: Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	: Kas Umum Negara
KUTPA	: Kredit Usaha Tani Persuteraan Alam
LAK	: Laporan Arus Kas
LDKP	: Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	: <i>Loan to Deposit Ratio</i>
LKP	: Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	: Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MAK	: Mata Anggaran Pengeluaran
MAP	: Mata Anggaran Penerimaan
MPN	: Modul Penerimaan Negara
MP3	: Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NoD	: <i>Notice of Disbursement</i>
NPL	: <i>Non-Performing Loan</i>
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
PFK	: Perhitungan Pihak Ketiga
PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	: <i>Past Service Liability</i>
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PT PPA	: PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	: <i>Recovery of Aceh Nias Trust Fund</i>
RDI	: Rekening Dana Investasi
RPD	: Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSUP	: Rumah Sakit Umum Pusat
SIMAK BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SA-BUN	: Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAKUN	: Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	: Sistem Akuntansi Umum
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
SIAP	: Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	: <i>Singapore Interbank Offered Rate</i>
SIKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SLA	: <i>Subsidiary Loan Agreement</i>
SPKPB	: Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk

SP3	:	Surat Permintaan Pengesahan Pembukuan
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
SUN	:	Surat Utang Negara
TA	:	Tahun Anggaran
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THT	:	Tabungan Hari Tua
TP	:	Tim Pemberesan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	:	<i>Treasury Single Account</i>
TSP	:	Tempat Simpan Pinjam
USD	:	<i>United State Dollar</i>
USP	:	Usaha Simpan Pinjam
UP	:	Uang Persediaan



REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 26 Tahun 2009, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2009 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, menurut PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah juga menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara interim yaitu semesteran.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP Tahun 2009 ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBN), dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset Pemerintah.

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2009 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2009 - 31 Desember 2009.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2009 adalah sebesar Rp848,76 triliun atau 97,45 persen dari APBN-P. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2009 adalah sebesar Rp937,38 triliun atau 93,66 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp628,81 triliun atau 90,93 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp308,59 triliun atau 99,77 persen dari APBN-P. Dalam Belanja Negara termasuk anggaran dana stimulus fiskal sebesar Rp11,70 triliun dengan realisasi sebesar Rp10,76 triliun. Selain itu, pada TA 2009 terdapat Suspen Belanja sebesar minus Rp15,63 miliar.

Realisasi Defisit Anggaran TA 2009 adalah sebesar Rp88,62 triliun atau 68,25 persen dari APBN-P. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2009 adalah sebesar Rp112,58 triliun atau 86,71 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp23,96 triliun. Dalam realisasi Pembiayaan tersebut termasuk realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan stimulus fiskal sebesar Rp500 miliar.

Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2009 dan 2008 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)			TA 2008 (<i>Audited</i>)
	UU No. 26/2009	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	871,00	848,76	97,45%	981,61
Belanja Negara	1.000,84	937,38	93,66%	985,73
Belanja Pemerintah Pusat	691,54	628,81	90,93%	693,36
Transfer ke Daerah	309,31	308,59	99,77%	292,43
Suspen Belanja Negara	-	(0,02)	-	(0,06)
Surplus (Defisit) Anggaran	(129,84)	(88,62)	68,25%	4,12
Pembiayaan Neto	129,84	112,58	86,71%	84,07
SiLPA (SiKPA)		23,96	-	79,95

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2009.

Jumlah Aset per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp2.122,89 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp231,38 triliun; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp737,04 triliun; Aset Tetap sebesar Rp979,00 triliun; dan Aset Lainnya sebesar Rp175,47 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp1.681,71 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp187,84 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.493,87 triliun.

Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp441,18 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp43,54 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp397,64 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
Aset	2.122,89	2.071,70
Aset Lancar	231,38	264,09
Investasi Jangka Panjang	737,04	712,04
Aset Tetap	979,00	673,34
Aset Lainnya	175,47	422,23
Kewajiban	1.681,71	1.693,69
Kewajiban Jangka Pendek	187,84	181,34
Kewajiban Jangka Panjang	1.493,87	1.512,35
Ekuitas Dana Neto	441,18	378,01
Ekuitas Dana Lancar	43,54	82,75
Ekuitas Dana Investasi	397,64	295,26

3. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2009 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2009.

Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN) & Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kas Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp46,06 triliun yang berarti terdapat penurunan sebesar Rp29,77 triliun dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp75,83 triliun. Penurunan saldo kas tersebut berasal dari penambahan koreksi saldo awal Rp1,75 triliun, penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp12,88 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp75,74 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp112,58 triliun, penurunan kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp2,84 triliun, dan pengurangan karena penggunaan SAL sebesar Rp51,86 triliun, dan penyesuaian pembukuan sebesar minus Rp0,79 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas TA 2009 dan TA 2008 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Saldo Awal Kas BUN, KPPN, dan BLU	75,83	24,06
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(12,88)	68,56
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(75,74)	(72,68)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	112,58	84,07
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(2,84)	(28,17)
Pengunaan SAL	(51,86)	-
Penyesuaian Pembukuan	(0,79)	(0,01)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(31,52)	51,77
Koreksi Saldo Awal Kas	1,75	
Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU	46,06	75,83

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.



REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN REALISASI APBN
(AUDITED)**

I. LAPORAN REALISASI APBN (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2009 (Audited)			TA 2008 (Audited)
		Anggaran (UU 26/2009)	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.2.1				
I. Penerimaan Perpajakan	B.2.1.1	651.954.823.000.000	619.922.172.626.415	95,09%	658.700.790.664.236
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	631.931.723.000.000	601.251.757.069.894	95,15%	622.358.691.313.241
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	20.023.100.000.000	18.670.415.556.521	93,24%	36.342.099.350.995
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	218.037.632.535.000	227.174.419.064.671	104,19%	320.604.629.562.680
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	138.653.364.017.000	138.959.235.946.131	100,22%	224.463.006.839.205
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	B.2.1.2.2	28.614.667.131.000	26.049.543.069.440	91,04%	29.088.370.115.749
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	44.878.693.567.000	53.796.110.943.059	119,87%	63.318.958.421.619
4. Pendapatan BLU	B.2.1.2.4	5.890.907.820.000	8.369.529.106.041	142,08%	3.734.294.186.107
III. Penerimaan Hibah	B.2.1.3	1.006.535.744.000	1.666.643.504.397	165,58%	2.304.013.099.221
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		870.998.991.279.000	848.763.235.195.483	97,45%	981.609.433.326.137
B. Belanja Negara	B.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	691.535.743.610.000	628.812.419.834.203	90,93%	693.355.992.079.878
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	133.709.200.205.000	127.669.748.683.930	95,48%	112.829.875.523.789
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	85.463.999.998.500	80.667.925.311.049	94,39%	55.963.472.418.939
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	73.381.514.544.500	75.870.754.036.420	103,39%	72.772.477.031.152
4. Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	109.590.059.288.000	93.782.062.890.134	85,58%	88.429.807.846.898
5. Subsidi	B.2.2.1.5	158.117.854.544.000	138.082.160.271.329	87,33%	275.291.454.173.929
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	31.578.000.000	-	0,00%	-
6. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	77.932.499.991.000	73.813.555.200.705	94,71%	57.740.756.298.045
7. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	53.309.037.039.000	38.926.213.440.636	73,02%	30.328.148.787.126
II. Transfer ke Daerah	B.2.2.2	309.308.178.072.000	308.585.231.982.937	99,77%	292.433.480.615.255
1. Dana Perimbangan	B.2.2.2.1	285.053.052.916.000	287.251.462.978.937	100,77%	278.714.658.866.600

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -4-

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 (*Audited*)

Uraian	Catatan	TA 2009 (<i>Audited</i>)			TA 2008 (<i>Audited</i>)
		Anggaran (UU 26/2009)	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1	73.819.364.116.000	76.129.947.578.937	103,13%	78.420.167.295.600
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.2	186.414.100.000.000	186.414.100.000.000	100,00%	179.507.144.871.000
c. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.1.3	24.819.588.800.000	24.707.415.400.000	99,55%	20.787.346.700.000
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	B.2.2.2.2	24.255.125.156.000	21.333.769.004.000	87,96%	13.718.821.748.655
a. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.2.1	9.526.564.000.000	9.526.564.000.000	100,00%	7.510.285.794.000
b. Dana Penyesuaian	B.2.2.2.2.2	14.728.561.156.000	11.807.205.004.000	80,17%	6.208.535.954.655
III. Suspen Belanja Negara	B.2.2.3	-	(15.632.247.373)		(58.721.608.520)
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)		1.000.843.921.682.000	937.382.019.569.767	93,66%	985.730.751.086.613
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	B.2.3	(129.844.930.403.000)	(88.618.784.374.284)	68,25%	(4.121.317.760.476)
D. Pembiayaan	B.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri	B.2.4.1	142.569.169.663.000	124.999.182.482.469	87,68%	102.477.625.080.058
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	56.566.160.569.000	53.049.247.755.837	93,78%	299.999.999.959
2. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.2	835.400.000.000	690.333.091.255	82,64%	2.902.038.528.402
3. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.3	99.256.576.171.000	99.470.897.644.002	100,22%	85.916.261.326.762
4. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.4	(14.088.967.077.000)	(13.084.949.775.291)	92,87%	(2.500.020.000.000)
5. Pembiayaan Lain-lain	B.2.4.1.5	-	(15.126.346.233.334)	-	15.859.345.224.935
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	B.2.4.2	(12.724.239.260.000)	(12.415.871.067.054)	97,58%	(18.405.877.014.053)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	69.299.157.364.000	58.662.045.806.549	84,65%	50.218.749.931.906
a. Penarikan Pinjaman Program	B.2.4.2.1.1	30.315.500.000.000	28.937.702.908.655	95,46%	30.100.439.755.174
b. Penarikan Pinjaman Proyek	B.2.4.2.1.2	38.983.657.364.000	29.724.342.897.894	76,25%	20.118.310.176.732
2. Penerusan Pinjaman	B.2.4.2.2	(12.991.696.624.000)	(3.046.803.016.526)	23,45%	(5.189.316.203.882)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(69.031.700.000.000)	(68.031.113.857.077)	98,55%	(63.435.310.742.077)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		129.844.930.403.000	112.583.311.415.415	86,71%	84.071.748.066.005
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA) (D+C)	B.2.5	-	23.964.527.041.131	-	79.950.430.305.529



REPUBLIK INDONESIA

**NERACA
(AUDITED)**

II. NERACA (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
 PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2009 (Audited)	31 Des 2008 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank			
Rekening Kas BUN di BI	C.2.1	32.185.520.242.213	67.707.599.065.065
Rekening Kas di KPPN	C.2.2	8.309.379.301.258	6.755.052.343.271
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.3	32.218.505.711.694	35.642.938.767.447
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.4	1.036.241.894.537	1.154.712.127.961
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.5	1.040.200.195.970	1.308.388.040.590
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.6	901.887.427.630	-
Kas pada BLU	C.2.7	5.676.975.379.101	2.389.096.828.525
Jumlah Kas dan Bank		81.368.710.152.403	114.957.787.172.859
Piutang			
Uang Muka dari Rekening BUN	C.2.8	5.560.724.882.615	3.726.790.367.113
Piutang Pajak	C.2.9	63.658.918.330.257	55.545.222.477.952
Piutang Bukan Pajak	C.2.10	21.859.930.458.886	35.553.438.348.026
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.2.11	107.946.353	29.352.684
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.2.12	30.620.839.227	5.799.034.235
Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang	C.2.13	5.067.629.170.009	22.657.399.160.000
Uang Muka Belanja	C.2.14	197.622.609.348	139.810.228.392
Piutang dari Kegiatan BLU	C.2.15	1.520.445.115.328	1.453.920.244.591
Piutang Lain-lain	C.2.16	15.492.809.289.778	12.023.319.207.884
Jumlah Piutang		113.388.808.641.801	131.105.728.420.877
Investasi Jangka Pendek BLU	C.2.17	11.770.000.000	328.585.000.000
Persediaan	C.2.18	36.606.824.405.660	17.701.765.092.694
Jumlah Aset Lancar		231.376.113.199.863	264.093.865.686.430
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Non Permanen			
Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah	C.2.19	56.829.949.663.857	50.671.978.070.000
Dana Bergulir	C.2.20	5.447.163.620.088	7.357.677.113.340
Investasi Non Permanen Lainnya	C.2.21	1.297.107.854.426	1.128.448.515.668
Jumlah Investasi Non Permanen		63.574.221.138.371	59.158.103.699.008
Investasi Permanen			
Investasi Permanen PMN	C.2.22	555.416.111.508.201	486.062.370.590.619
Investasi Permanen BLU	C.2.23	6.637.194.500	6.637.194.500
Investasi Permanen Lainnya	C.2.24	118.042.412.825.796	166.808.229.147.871
Jumlah Investasi Permanen		673.465.161.528.497	652.877.236.932.990
Jumlah Investasi Jangka Panjang		737.039.382.666.868	712.035.340.631.998
Aset Tetap	C.2.25		
Tanah		468.627.411.873.568	280.977.933.438.987
Peralatan dan Mesin		145.766.663.539.492	129.575.007.951.398
Gedung dan Bangunan		123.197.516.471.880	109.119.623.581.182
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		186.921.467.820.342	107.366.714.600.033
Aset Tetap Lainnya		5.885.891.367.838	6.706.750.989.988
Konstruksi Dalam Pengerjaan		48.605.173.225.576	39.595.391.073.396
Jumlah Aset Tetap		979.004.124.298.696	673.341.421.634.984
Aset Lainnya	C.2.26		
Tagihan Penjualan Angsuran		217.273.759	554.504.816
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		47.520.521.456	32.729.236.792
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		83.647.500.000	501.250.000
Penerusan Pinjaman		78.561.103.000	-
Aset Tak Berwujud		7.031.604.402.391	4.347.118.670.932
Dana yang Dibatasi Penggunaannya		34.471.434.956.330	30.544.739.790.835

Uraian	Catatan	31 Des 2009 (Audited)	31 Des 2008 (Audited)
Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan		5.565.054.549.000	4.572.815.302.821
Dana Penjaminan		172.808.669.214	167.595.976.198
Aset Lain-lain		128.016.653.185.957	382.566.112.776.071
Jumlah Aset Lainnya		175.467.502.161.107	422.232.167.508.465
JUMLAH ASET		2.122.887.122.326.534	2.071.702.795.461.877
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	C.2.27	906.088.090.285	233.349.390.887
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.28	22.310.440.584.286	15.593.144.334.899
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.29	1.943.343.103.544	249.306.008.127
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.2.30	92.505.447.212.104	106.497.354.480.067
Utang Biaya Pinjaman	C.2.31	18.526.547.819.139	20.627.684.251.052
Utang Subsidi	C.2.32	15.717.145.891.103	12.503.315.266.224
Utang Surat Perbendaharaan Negara	C.2.33	26.515.739.064.000	9.581.589.685.000
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.34	4.763.707.423	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.35	9.409.771.849.034	16.057.521.906.234
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		187.839.287.320.918	181.343.265.322.490
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan	C.2.36	901.496.354.102.092	855.087.515.005.382
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	C.2.37	-	1.398.608.374.973
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	C.2.38	2.826.956.396.635	
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		904.323.310.498.727	856.486.123.380.355
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	C.2.39	559.498.473.496.215	655.861.868.010.166
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	C.2.40	30.047.323.267.503	-
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		589.545.796.763.718	655.861.868.010.166
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		1.493.869.107.262.445	1.512.347.991.390.521
JUMLAH KEWAJIBAN		1.681.708.394.583.363	1.693.691.256.713.011
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar			
SAL Awal Setelah Penyesuaian	C.2.41	43.347.021.844.114	13.370.514.138.408
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	C.2.42	23.176.900.581.685	79.950.430.305.529
Dana Lancar Lainnya	C.2.43	2.821.340.491.184	4.723.164.674.583
Cadangan Piutang	C.2.44	113.388.808.641.800	131.105.728.420.877
Cadangan Persediaan	C.2.45	36.606.824.405.660	17.701.765.092.694
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.2.46	7.522.179.004.649	5.632.683.677.853
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran	C.2.47		
Utang Jangka Pendek		(175.176.238.495.688)	(149.373.584.063.086)
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.2.48	(4.763.707.423)	-
Selisih Kurs Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.2.49	(8.145.246.887.035)	(20.360.101.882.918)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		43.536.825.878.946	82.750.600.363.941
Ekuitas Dana Investasi			
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	C.2.50	737.039.382.666.868	712.035.340.631.998
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.2.51	979.004.124.298.695	673.341.421.634.984
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.2.52	175.467.502.161.107	422.232.167.508.465
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran			(1.314.489.164.736.406)
Utang Jangka Panjang	C.2.53	(1.397.804.839.153.172)	()
Selisih Kurs Utang Jangka Panjang	C.2.54	(96.064.268.109.273)	(197.858.826.654.115)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		397.641.901.864.225	295.260.938.384.926
EKUITAS DANA NETO		441.178.727.743.171	378.011.538.748.866
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.122.887.122.326.534	2.071.702.795.461.877



REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)

III. LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Perpajakan	D.2.1		
a. Pajak Penghasilan		317.614.988.311.624	327.497.716.210.755
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah		193.067.541.998.775	209.647.424.433.640
c. Pajak Bumi dan Bangunan		24.270.191.705.513	25.354.279.618.301
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		6.464.517.415.416	5.573.095.008.708
e. Cukai		56.718.468.581.956	51.251.752.624.651
g. Pajak Lainnya		3.116.049.056.610	3.034.423.417.186
h. Pajak Perdagangan Internasional		18.663.227.993.605	36.342.099.350.995
Total Penerimaan Perpajakan		619.914.985.063.499	658.700.790.664.236
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	D.2.2		
a. Penerimaan Sumber Daya Alam		138.959.235.946.131	224.463.006.839.205
b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN		26.049.543.069.440	29.088.370.115.749
c. PNBP Lainnya		62.056.202.381.435	66.964.396.171.290
Total PNBP		227.064.981.397.006	320.515.773.126.244
3. Penerimaan Hibah	D.2.3	1.666.643.504.397	2.304.013.099.221
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		848.646.609.964.902	981.520.576.889.701
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Pegawai	D.2.4	127.663.323.688.725	112.773.501.584.283
2. Belanja Barang	D.2.5	80.664.398.161.767	55.887.772.437.813
3. Bunga Utang	D.2.6	93.781.932.422.813	88.352.325.843.120
4. Subsidi	D.2.7	138.074.972.708.413	275.289.975.892.789
5. Bantuan Sosial	D.2.8	73.796.894.379.034	56.929.790.831.588
6. Belanja Lain-Lain	D.2.9	38.955.711.251.756	31.096.657.038.061
7. Bagi Hasil Pajak	D.2.10	39.269.126.575.424	37.878.955.602.847
8. Bagi Hasil Sumber Daya Alam	D.2.11	36.860.821.003.513	40.739.618.901.261
9. Dana Alokasi Umum	D.2.12	186.414.100.000.000	179.507.144.871.000
10. Dana Alokasi Khusus	D.2.13	24.707.415.400.000	20.787.346.700.000
11. Dana Otonomi Khusus	D.2.14	9.526.564.000.000	7.510.285.794.000
12. Dana Penyesuaian	D.2.15	11.807.205.004.000	6.208.535.954.655
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		861.522.464.595.445	912.961.911.451.417
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		(12.875.854.630.543)	68.558.665.438.284
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
I. Arus Kas Masuk			
Penjualan Aset	D.2.16	109.437.667.665	88.856.436.436
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		109.437.667.665	88.856.436.436
II. Arus Kas Keluar			
Belanja Aset Tetap	D.2.17	75.852.367.411.406	72.768.839.635.196
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		75.852.367.411.406	72.768.839.635.196
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (B.I - B.II)		(75.742.929.743.741)	(72.679.983.198.760)

Uraian	Catatan	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.18	202.277.266.498.995	135.897.341.832.205
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	D.2.19	58.662.045.806.549	50.218.749.931.906
3. Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.20	3.133.897.417.553	-
4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	D.2.21	38.352.484.545.170	55.419.279.930.448
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		302.425.694.268.267	241.535.371.694.559
II. Arus Kas Keluar			
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.22	49.066.788.007.901	46.779.041.977.082
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	D.2.23	68.031.113.857.077	63.435.310.742.077
3. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	D.2.24	13.084.949.775.291	2.500.020.000.000
4. Penerusan Pinjaman	D.2.25	6.180.700.434.079	5.189.316.203.882
5. Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	D.2.26	53.478.830.778.504	39.559.934.705.513
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		189.842.382.852.852	157.463.623.628.554
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (C.I – C.II)		112.583.311.415.415	84.071.748.066.005
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	D.2.27	956.696.291.231	(244.155.293.370)
2. PFK Prefinancing dan PFK Lainnya	D.2.28	(2.500.000.000.000)	(13.385.978.626.337)
3. Kiriman Uang	D.2.29	(1.545.543.155.898)	(9.716.396.322.032)
4. Transito	D.2.30	249.015.454.434	172.401.563.427
5. Penempatan Dana Pemerintah	D.2.31	-	(5.000.000.000.000)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		(2.839.831.410.233)	(28.174.128.678.312)
Penggunaan SAL		(51.857.136.912.000)	-
Penyesuaian Pembukuan		(787.626.459.446)	(8.519.253.365)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS		(31.520.067.740.548)	51.767.782.373.852
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU		75.830.197.373.908	24.062.415.000.056
Koreksi Saldo Awal BLU		1.752.616.411.054	-
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU setelah Koreksi		77.582.813.784.962	24.062.415.000.056
SALDO AKHIR KAS BUN, KPPN, DAN BLU		46.062.746.044.414	75.830.197.373.908
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.3	32.218.505.711.694	35.642.938.767.447
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.4	1.036.241.894.537	1.154.712.127.961
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.5	1.040.200.195.970	1.308.388.040.590
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.6	901.887.427.630	-
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	D.1	109.128.878.158	1.021.550.862.953
SALDO AKHIR KAS DAN BANK		81.368.710.152.403	114.957.787.172.859



REPUBLIK INDONESIA

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(AUDITED)**

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*AUDITED*)

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

Antisipasi kebijakan terhadap kondisi eksternal telah mendukung stabilisasi perekonomian tahun 2009

Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2009 relatif stabil walaupun masih dalam tahap pemulihan dampak melesunya perekonomian global. Kinerja perekonomian masih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni krisis ekonomi global dan ketidakpastian yang tinggi seperti berbagai perubahan dinamis yang terjadi pada perekonomian dunia. Hal-hal seperti kenaikan harga pangan dan komoditi dunia dan fluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional telah mendasari berbagai kebijakan perekonomian yang diambil baik oleh otoritas fiskal maupun otoritas moneter. Berbagai kebijakan tersebut telah memberikan dampak bagi sektor riil sebagai salah satu sektor pendorong pertumbuhan ekonomi.

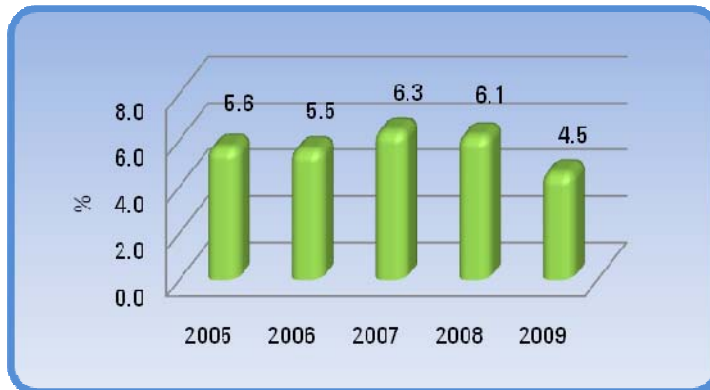
Berbagai faktor pendukung stabilisasi domestik

Poin penting yang mempengaruhi kinerja makroekonomi pada tahun 2009 adalah pelaksanaan pesta demokrasi yang cukup aman terutama dalam kaitannya untuk memberikan sentimen positif bagi investor dan pasar. APBN sebagai instrumen stabilisasi bersama-sama dengan paket Dokumen stimulus fiskal tahun 2009 yang diluncurkan Pemerintah sebagai antisipasi atas dampak krisis ekonomi telah berhasil mendukung stabilisasi perekonomian domestik secara umum.

Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5 persen

Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 yang menganut prinsip pertumbuhan ekonomi disertai dengan pemerataan (*growth with equity*) mencapai 4,5 persen yakni lebih tinggi dari yang ditargetkan dalam APBN-P TA 2009 sebesar 4,3 persen. Target APBN-P tersebut turun dari yang ditargetkan APBN sebesar 6,0 persen dan Dokumen Stimulus Fiskal sebesar 4,5 persen. Penurunan target tersebut juga didasarkan pada proyeksi akan masih adanya lanjutan dampak krisis ekonomi global tahun sebelumnya. Angka

pertumbuhan ekonomi tahun 2009 menurun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang berada di kisaran 6,1 persen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan ini antara lain adalah tekanan pelemahan permintaan global yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekspor dan investasi. Perbandingan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun dapat dilihat pada Grafik 1.



Sumber: BPS

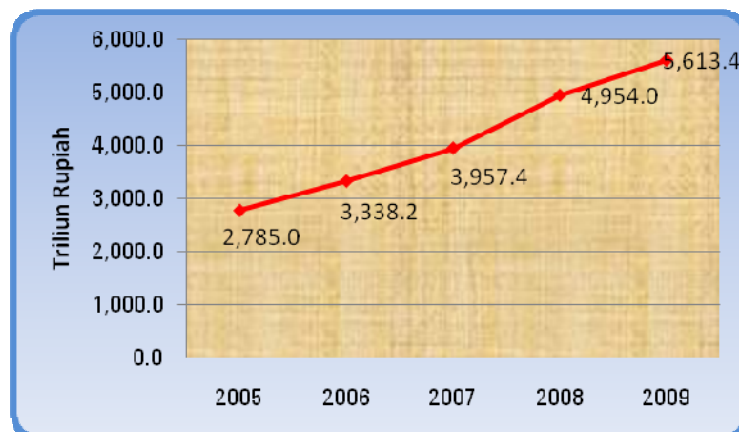
Grafik 1: Pertumbuhan Ekonomi Selama Tahun 2005 -2009

*Sumber-sumber
pertumbuhan ekonomi*

Capaian tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2009 dengan tingkat pertumbuhan 4,5 persen dimaksud antara lain didukung oleh sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yaitu konsumsi rumah tangga sebesar 4,9 persen, konsumsi Pemerintah 15,7 persen, pembentukan modal tetap bruto 3,3 persen dengan komponen ekspor tumbuh minus 9,7 persen dan impor minus 15,0 persen.

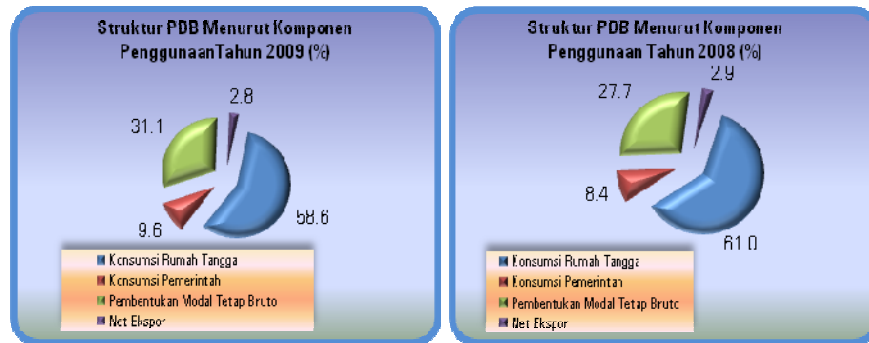
*PDB tahun 2009 sebesar
Rp5.613,4 triliun*

Total PDB selama tahun 2009 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.613,4 triliun. Angka ini naik sebesar 13,31 persen dibandingkan dengan PDB tahun 2008 senilai Rp4.954 triliun dan sebesar 41,85 persen dibandingkan PDB tahun 2007 senilai Rp3.957,4 triliun. (lihat Grafik 2)



Sumber : BPS

Grafik 2: Tren PDB Selama Tahun 2005-2009

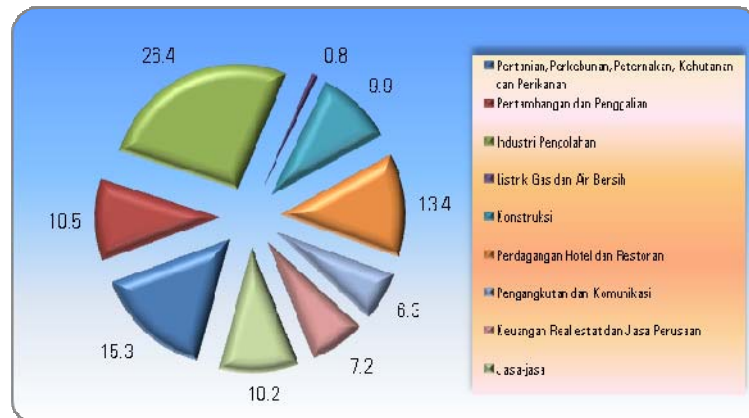


Sumber: BPS

Grafik 3: Struktur PDB menurut Komponen Penggunaan Tahun 2009 dan 2008

Komposisi PDB tahun 2009 yang didominasi konsumsi rumah tangga

Adapun komposisi PDB tahun 2009 menurut komponen penggunaan (Grafik 3) didominasi oleh konsumsi rumah tangga sebesar 58,6 persen, diikuti oleh konsumsi pemerintah 9,6 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi fisik sebesar 31,1 persen dan ekspor senilai 24,1 persen. Sedangkan untuk penyediaan dari impor sebesar 21,3 persen. Cukup tingginya konsumsi rumah tangga di tahun 2009 antara lain dipengaruhi oleh faktor pengeluaran pemilu dan kebijakan pemerintah. Dari grafik di atas, terlihat bahwa kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap total PDB tahun 2009 menurun cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, konsumsi pemerintah dan investasi meningkat, ekspor netto juga meningkat cukup signifikan.



Sumber: BPS

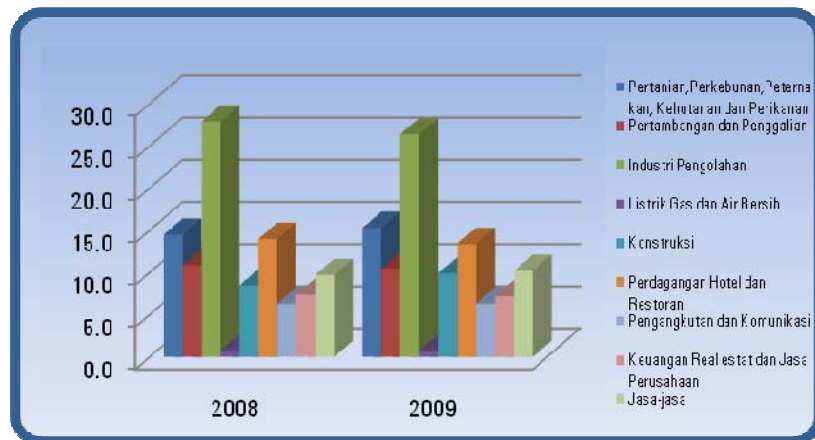
Grafik 4: Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009

Sektor Industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar untuk PDB berdasarkan lapangan usaha tahun 2009

Komponen PDB menurut lapangan usaha (Grafik 4) didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 26,4 persen, diikuti oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 15,3 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 13,4 persen, sektor pertambangan dan penggalian 10,5 persen, sektor jasa-jasa 10,2 persen, sektor konstruksi 9,9 persen, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan 7,2 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi 6,3 persen serta sektor listrik, gas dan air bersih 0,8 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi beberapa peningkatan antara lain pada sektor pertanian, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi. (lihat Grafik 5)

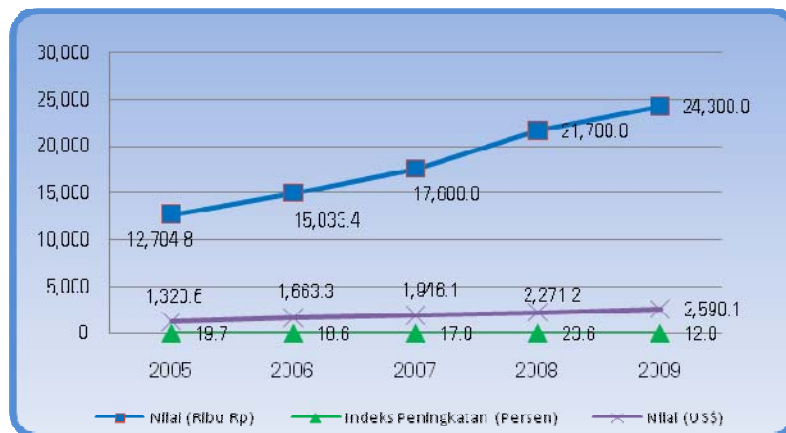
Seperti diketahui, nilai nominal PDB meningkat walaupun pertumbuhan ekonomi turun dibandingkan tahun 2008. Meningkatnya nilai nominal PDB mempengaruhi PDB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 yang mencapai Rp24,3 juta atau USD2.590,1 yang meningkat dibandingkan PDB per kapita pada tahun 2008 yang hanya

mencapai Rp21,7 juta atau USD2.271,2. Perkembangan PDB per kapita dapat dilihat pada Grafik 6.



Sumber: BPS

Grafik 5: Perbandingan Struktur PDB menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 dan 2009



Sumber: BPS

Grafik 6: Perbandingan PDB Per Kapita Selama Tahun 2005 -2009

Persepsi risiko investasi yang baik
Realisasi PMDN dan PMA tahun 2009

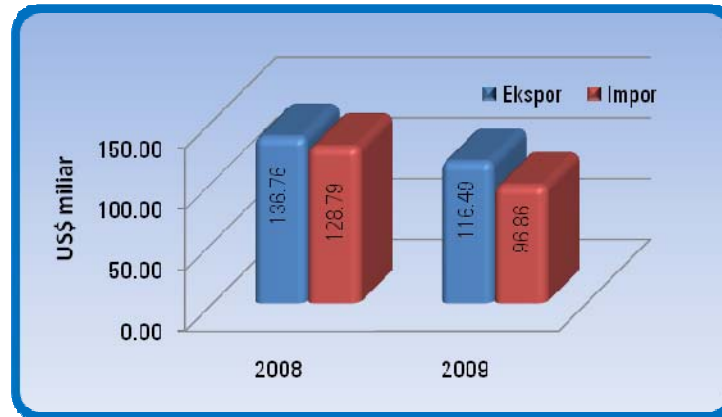
Persepsi risiko investasi secara umum di Indonesia relatif baik sepanjang tahun, meskipun sempat memburuk sebagai akibat krisis utang Dubai World pada awal Desember 2009. Persepsi risiko investasi yang stabil sejalan dengan terjadinya pemulihan di pasar keuangan global.

Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sampai dengan bulan Desember 2009 mencapai Rp37,80 triliun atau naik 85,66 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008 senilai Rp17,44 triliun dengan jumlah proyek sebanyak 248 proyek. Sedangkan untuk periode tahun 2008, realisasi investasi PMDN sebesar Rp20,36 triliun. Sementara itu, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai USD10,82 miliar, atau mengalami penurunan sebesar 27,24 persen dari realisasi sebelumnya yakni USD14,87 miliar. Namun dari sisi jumlah proyek, PMA melonjak dari 1.138 proyek menjadi 1.221 proyek.

Ekonomi nasional yang dikembangkan berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) telah

Realisasi ekspor tahun 2009 sebesar 116,49 USD miliar

mampu mencapai realisasi ekspor tahun 2009 secara kumulatif dari bulan Januari s.d. Desember senilai USD116,49 miliar yang turun sebesar 14,82 persen dibandingkan realisasi tahun 2008 yang mencapai USD136,76 miliar. Realisasi ekspor bersumber dari realisasi ekspor migas senilai USD19,02 miliar dan realisasi ekspor non migas sebesar USD97,47 miliar. Angka ekspor yang menurun adalah dampak penurunan permintaan dari China, Jepang, dan Amerika Serikat sebagai negara utama tujuan ekspor.



Realisasi impor sebesar
98,86 USD miliar

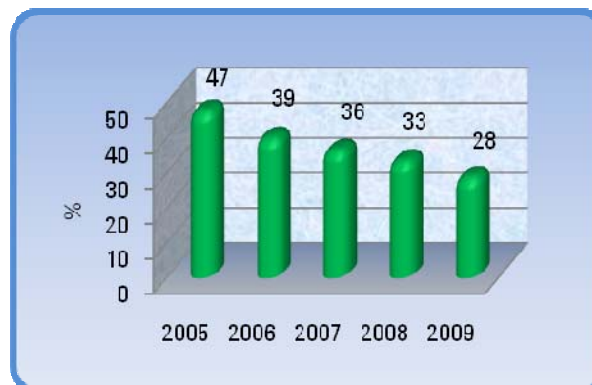
Sumber : BPS

Grafik 7: Perbandingan Ekspor Tahun 2008 dan 2009

Pengendalian rasio utang
terhadap PDB yang
semakin membaik

Realisasi impor tahun 2009 juga turun tajam dari USD128,79 miliar pada tahun 2008 menjadi USD96,86 miliar. Penurunan sebesar 24,79 persen tersebut bersumber dari realisasi impor migas sebesar USD18,99 miliar dan impor non migas senilai USD77,87 miliar.

Indikator yang turut berkontribusi pada kondisi perekonomian Indonesia adalah pengendalian rasio utang terhadap kemampuan perekonomian secara nasional yang diukur melalui PDB. Rasio utang terhadap PDB tahun 2009 terkendali di angka 28 persen, menurun dibandingkan tahun 2008 yang berada pada level 33 persen (Grafik 8). Dalam lima tahun terakhir, rasio utang terhadap PDB cenderung semakin menurun. Menurunnya rasio utang terhadap PDB mencerminkan bahwa perekonomian mampu mengantisipasi berbagai risiko terutama risiko *default* yang terkait dengan utang. Pengendalian rasio utang dapat tercapai dengan melakukan strategi pengelolaan utang yang tepat, optimalisasi pembiayaan dalam negeri, dan optimalisasi pendapatan negara.



Kinerja NPI yang
mencatat surplus

Sumber : BPS dan Kementerian Keuangan

Grafik 8: Rasio Utang terhadap PDB

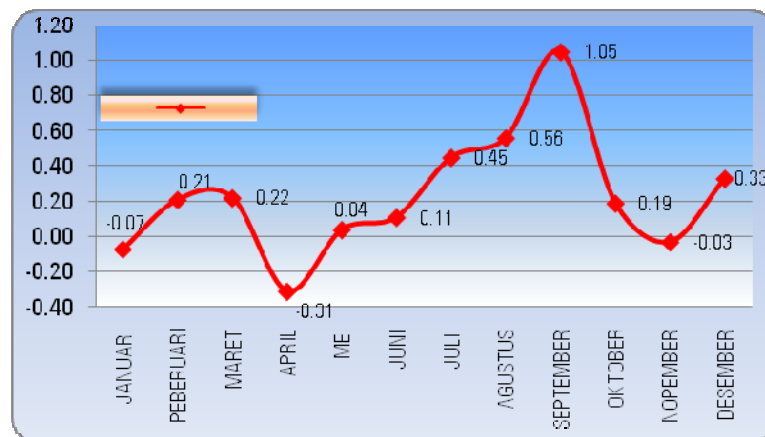
Peningkatan cadangan
devisa tahun 2009

Inflasi sebesar 2,78
persen

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang mencatat surplus didukung oleh perbaikan transaksi berjalan maupun neraca transaksi modal dan finansial. Menurunnya impor merupakan faktor utama surplus pada NPI. Menurunnya impor sebagai akibat dari menurunnya kebutuhan bahan baku impor untuk industri yang berorientasi ekspor maupun menurunnya impor barang-barang konsumsi. Selain itu kinerja NPI juga didukung oleh arus modal masuk ke dalam negeri yang cukup besar akibat membaiknya tingkat kepercayaan internasional terhadap perekonomian domestik.

Surplus neraca modal dan finansial sebesar USD3,67 miliar secara keseluruhan juga turut berkontribusi terhadap peningkatan cadangan devisa pada tahun 2009 yang terealisasi sebesar USD66,1 miliar atau setara dengan 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Cadangan devisa tersebut meningkat 28,1 persen dari realisasi cadangan devisa tahun 2008 yang hanya mencapai USD51,6 miliar. Peningkatan cadangan devisa merupakan sinyal daya tahan perekonomian nasional terhadap tekanan dari sektor eksternal.

Laju inflasi sepanjang tahun 2009 terkendali yakni sebesar 2,78 persen (yoy). Inflasi tersebut berada di bawah target yang ditetapkan Pemerintah yaitu sebesar 4,5 persen. Inflasi tahun 2009 tersebut menurun dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2008 yang mencapai 11,06 persen (yoy). Sumber penurunan angka inflasi berasal dari faktor fundamental dan non-fundamental. Dari sisi fundamental adalah rendahnya inflasi inti yang diakibatkan oleh membaiknya ekspektasi inflasi dan terjaga pasokan kebutuhan pokok. Sedangkan dari sisi non-fundamental, penurunan tersebut diakibatkan oleh rendahnya inflasi *volatile food* sebagai dampak menurunnya harga komoditi internasional termasuk dukungan Pemerintah dalam menjaga pasokan bahan pangan dan rendahnya komponen harga-harga yang ditentukan Pemerintah (*administered prices*). Tren laju inflasi sepanjang tahun 2009 dapat dilihat pada Grafik 9.



Sumber: BPS

Grafik 9: Tren Laju Inflasi Bulanan Tahun 2009

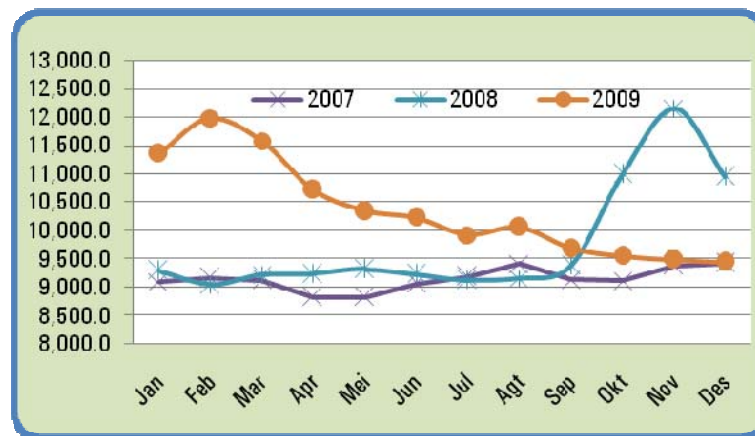
Rata-rata nilai tukar
Rupiah selama tahun
2009 Rp10.408/USD

Adapun sumbangan kelompok pengeluaran terhadap inflasi nasional sebesar 2,78 persen selama tahun 2009 antara lain berasal dari andil kelompok bahan makanan sebesar 0,82 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 1,27 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,45 persen; kelompok sandang 0,44 persen; kelompok kesehatan 0,17 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,29 persen. Sedangkan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan sumbangan deflasi 0,66 persen.

Mata uang rupiah sepanjang tahun 2009 terapresiasi sebagai akibat optimisme pemulihan perekonomian global. Pada akhir tahun, nilai tukar Rupiah berada pada

kisaran Rp9.400 per USD. Angka ini terapresiasi sekitar 14,15 persen dibandingkan dengan nilai tukar Rupiah terhadap USD pada akhir tahun 2008 yakni Rp10.950/USD. Rata-rata nilai tukar Rupiah selama tahun 2009 berada pada Rp10.408/USD. Pada akhir tahun, nilai tukar Rupiah yang stabil diindikasikan melalui volatilitas Rupiah yang menurun dari 0,60 persen di bulan November 2009 menjadi 0,20 persen di bulan Desember 2009. Faktor-faktor yang mendorong penguatan Rupiah selama tahun 2009 adalah kembali meningkatnya arus modal masuk seperti dari pasar saham dan obligasi sebagai akibat membaiknya *risk appetite* investor dan pulihnya kondisi perekonomian global. Di samping itu, penguatan tersebut juga merupakan hasil dari berbagai kebijakan penanganan krisis yang dilakukan Pemerintah, dukungan kerja sama antar bank sentral melalui *Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA)* dan sentimen positif suksesnya pelaksanaan pemilu legislatif.

Sertifikat Bank Indonesia
(SBI)



Sumber: BI

Grafik 10: Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Tahun 2009

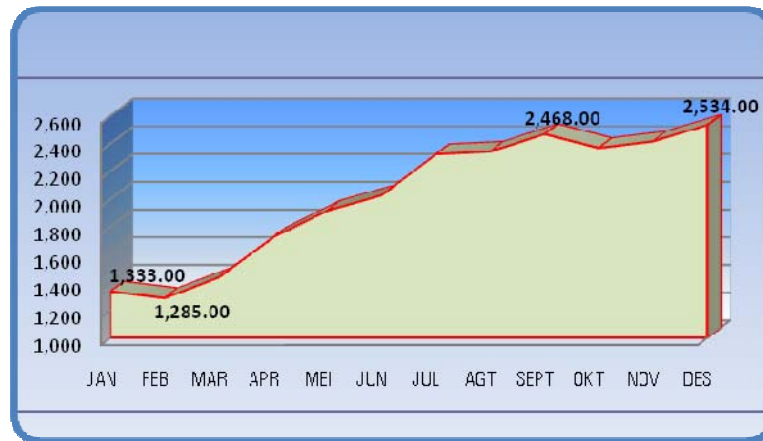
Indeks Harga Saham
Gabungan

Suku bunga SBI 3 bulan pada akhir tahun 2009 senilai 6,59 persen mengalami penurunan dibandingkan *rate* pada tahun 2008 sebesar 11,08 persen. Suku bunga SBI 1 bulan juga cenderung menurun yang pada akhir tahun berada pada level 6,46 persen. Dalam upaya stabilitas makroekonomi, sepanjang tahun 2009 ini Bank Indonesia telah beberapa kali menyesuaikan BI *Rate* dengan menetapkan kebijakan moneter yang longgar sejalan dengan tekanan inflasi yang menurun. Penurunan BI *Rate* telah dimulai pada awal tahun Januari 2009 menjadi 8,75 persen dan terus sampai dengan 6,75 persen pada bulan Juli 2009 menjadi 6,5 persen pada bulan Desember 2009. Penurunan suku bunga tersebut menjadi sinyal bagi perbankan untuk melakukan penyesuaian yang pada gilirannya dapat mendorong investasi dan pertumbuhan sektor riil.

Indikator stabilitas makroekonomi lainnya yakni Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang tahun 2009 menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Posisi terbaik IHSG sejak krisis keuangan telah terlihat sejak Juni 2009 dimana indeks berada di posisi 2.027. Sampai dengan akhir tahun 2009, IHSG terus bergerak positif dan mencapai posisi pada level 2.534. Angka tersebut naik dibandingkan IHSG akhir tahun 2008 yang ditutup pada level 1.355 (lihat Grafik11).

Kinerja perbankan yang stabil

Lifting minyak



Sumber: BI

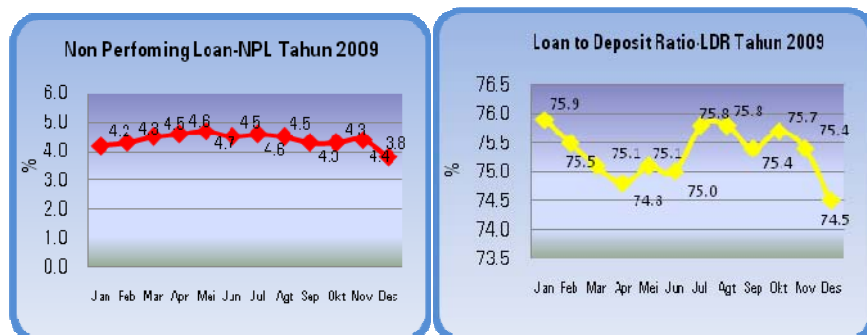
Grafik 11: Tren Laju IHSI Bulanan Tahun 2009

Kondisi perbankan menunjukkan kinerja yang positif antara lain tercermin dari stabilnya indikator-indikator utama kinerja perbankan yakni rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio-CAR*) yang berada di level 17,4 persen. Sedangkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bulan Desember 2009 mencapai sebesar 74,5 persen dan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan-NPL*) terjaga di bawah 5 persen yakni sepanjang tahun 2009 berada di kisaran 3,8 persen s.d 4,7 persen (lihat Grafik 12).

Selama tahun 2009 lifting minyak mentah Indonesia mencapai 952 ribu barel per hari lebih rendah daripada target APBN-P sebesar 0,96 juta barel per hari. Potensi sumur minyak yang ada serta investasi di bidang eksplorasi dan eksploitasi merupakan *determinan lifting* minyak mentah yang dihasilkan. Terkait dengan itu tantangan pencapaian target antara lain terkait dengan permasalahan perijinan yang berdampak pada pemasangan pipa dan tertundanya pembangunan fasilitas produksi, dan terjadinya pencurian fasilitas produksi.

Harga minyak mentah Indonesia

Dampak dan tujuan stimulus fiskal tahun 2009



Sumber: BI

Grafik 12: Tren NPL dan LDR Bulanan Tahun 2009

Harga minyak mentah Indonesia sepanjang tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selama tahun 2009, perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia bergerak secara tajam yakni dari rata-rata USD80 per barel dalam APBN 2009, menjadi rata-rata USD45 per barel dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009 menjadi rata-rata USD 61 per barel dalam APBN-P TA 2009. Pada awal tahun 2009, rata-rata harga ICP berada di kisaran USD41,9 per barel yang terus meningkat menjadi USD68,9 per barel pada bulan Juni 2009. Realisasi harga minyak mentah Indonesia tahun 2009

rata-rata mencapai USD61,5 per barel.

Stimulasi fiskal yang dikurcurkan oleh Pemerintah selama tahun 2009 sebesar Rp73,3 triliun telah mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai dampak perbaikan infrastruktur dan meningkatnya kemampuan produksi nasional. Paket stimulus fiskal yang diluncurkan Pemerintah sebagai antisipasi pelemahan ekonomi dunia memiliki tujuan yaitu: (1) untuk mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat (*purchasing power*) agar laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2009 tetap terjaga di atas 5,0 persen; (2) untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing dunia usaha dari gejolak ekonomi global yang pada gilirannya mampu mencegah PHK massal; dan (3) untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus menyerap dampak PHK massal melalui kebijakan peningkatan pembangunan infrastruktur yang padat karya (lihat Boks 1). Di samping telah memberikan *multiplier effect* dari stimulus fiskal dimaksud, hasil nyata dari pengucuran paket stimulus fiskal diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2010.

Boks 1: Realisasi Stimulus Fiskal dan Dampaknya terhadap Perekonomian Nasional

Stimulus fiskal yang merupakan kebijakan *countercyclical* yang diluncurkan oleh Pemerintah pada tahun 2009 sebagai langkah antisipasi dampak krisis ekonomi global dan mempersiapkan fondasi perekonomian yang kuat telah menunjukkan hasil yang positif. Total stimulus sebesar Rp73,3 triliun yang terdiri dari penghematan pembayaran pajak (*tax saving*) sebesar Rp43 triliun, subsidi sebesar Rp13,3 triliun, dan subsidi bukan pajak sebesar Rp17,0 triliun (termasuk belanja infrastruktur dan PMN sebesar Rp12,2 triliun) tersebut telah memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian domestik yang stabil sepanjang tahun 2009.

Untuk alokasi pemotongan pajak yang diberikan untuk penurunan dan penyederhanaan perpajakan, penurunan PPh Badan sebesar Rp43 triliun sampai dengan Desember 2009 telah terealisasi sebesar Rp43 triliun atau 100 persen. Melalui alokasi penurunan tarif perpajakan, pendapatan riil masyarakat meningkat dan mendorong daya beli. Stimulus perpajakan dalam bentuk penurunan PPh Badan telah berdampak pada peningkatan daya saing dan daya tahan usaha.

Pada periode yang sama, stimulus fiskal untuk subsidi terealisasi sebesar Rp2,8 triliun atau sekitar 21,4 persen. Salah satu bentuk subsidi yakni subsidi PPN atas minyak goreng dilakukan untuk menurunkan dan menstabilkan harga minyak goreng di pasar domestik, serta untuk mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah. Bentuk subsidi yang lain adalah subsidi PPN untuk bahan bakar nabati (BBN) yang bertujuan untuk menurunkan harga BBN dan meningkatkan kemampuan BBN agar dapat bersaing dengan harga bahan bakar minyak (BBM) dari fosil yang tidak terbaharukan. Dalam jangka panjang, pemberian subsidi akan mengurangi ketergantungan akan BBM dari fosil.

Alokasi subsidi bukan pajak ditargetkan untuk menurunkan beban masyarakat khususnya biaya transportasi dimana Pemerintah telah menurunkan harga solar bersubsidi sebesar Rp300/liter dari Rp4.800/liter menjadi Rp4.500/liter mulai tanggal 15 Januari 2009. Alokasi juga ditargetkan untuk menurunkan biaya produksi dimana Pemerintah memberikan potongan tarif listrik untuk industri sebesar Rp1,4 triliun. Di samping itu, dari total alokasi subsidi bukan pajak tersebut terdapat stimulus paket belanja sebesar Rp12,2 triliun. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, penyerapan belanja tersebut terserap sebesar Rp11,3 triliun atau sekitar 92,6 persen dari total pagu senilai Rp12,2 triliun. Penyerapan belanja stimulus fiskal terbesar ada pada Departemen Kesehatan dan Menpera yang telah merealisasikan hampir 100 persen. Sedangkan Departemen PU yang memperoleh pagu terbesar dari stimulus fiskal yakni sebesar Rp6.601 miliar dapat menyerap 93,33 persen.

Alokasi stimulus khususnya pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum, bidang perhubungan, bidang energi, bidang perumahan rakyat, pasar, rehabilitasi infrastruktur jalan usaha tani dan irigasi tingkat usaha tani, peningkatan pelatihan bidang ketenagakerjaan dan rehabilitasi gudang penyimpanan bahan pokok juga telah berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

Walaupun tidak mencapai total pagu, realisasi stimulus fiskal telah memberikan dampak positif bagi berbagai dinamika yang terjadi dalam perekonomian domestik selama tahun 2009.

Peran strategis kebijakan fiskal dan reformasi manajemen keuangan negara

Buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran bagi Kementerian Negara/Lembaga

Hasil pembangunan ekonomi yang menekan angka kemiskinan dan pengangguran

Peran strategis kebijakan fiskal adalah peran alokasi, redistribusi dan stabilisasi perekonomian. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dipergunakan untuk mempengaruhi sektor-sektor perekonomian untuk mencapai tujuan pertumbuhan perekonomian. Salah satu paradigma baru yang diterapkan dalam reformasi penganggaran adalah diperkenalkannya proyeksi fiskal jangka menengah yang antara lain bertujuan untuk menjamin kesinambungan fiskal dan mensinkronkan antara kebijakan dan pengeluaran. Proyeksi fiskal jangka menengah dengan menggunakan kerangka APBN Jangka Menengah (*Medium Term Budget Framework*) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF).

Penurunan angka kemiskinan

Di pertengahan tahun 2009, Pemerintah melalui SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. 0142/M.PPN/06/2009 – SE 1848/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009 telah mengeluarkan Buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang merupakan pedoman bagi setiap Kementerian Teknis untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran terutama pada saat Pemerintah masih dalam masa transisi perubahan sistem penganggaran. Buku Pedoman tersebut terdiri 5 buku yakni Buku 1 tentang Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan, Buku 2 tentang Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, Buku 3 tentang Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Buku 4 tentang Format Baru RKA K/L, dan Buku 5 tentang Jadwal Pelaksanaan Penerapan. Dalam rangka penerapan tersebut, Pemerintah pada tahun 2009 juga telah menetapkan 6 (enam) K/L sebagai *pilot project* yaitu meliputi: (1) Kementerian Keuangan; (2) Kementerian Pendidikan Nasional; (3) Kementerian Pekerjaan Umum; (4) Kementerian Kesehatan; (5) Kementerian Pertanian; (6) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Upaya pengentasan penyakit ekonomi yang terus dilakukan oleh Pemerintah diimplementasikan melalui harmonisasi dan sinergi program dan anggaran penanggulangan kemiskinan dalam tiga cluster. Pada cluster pertama yakni cluster Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran, Pemerintah telah memberikan bantuan melalui penyediaan beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan bagi Lanjut Usia dan Cacat Ganda terlantar, Bantuan Bencana alam, Bantuan Langsung Tunai sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, dan Beasiswa untuk anak dari rumah tangga sasaran. Pada cluster kedua yakni cluster Pemberdayaan Masyarakat yang berfokus pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Pemerintah telah melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan desa-desa. Pada cluster ketiga yakni cluster Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta perbaikan iklim berusaha dan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pemerintah telah meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk perbaikan iklim berusaha dan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kemiskinan adalah multisektor problem yang membutuhkan upaya penanganan lintas sektoral sehingga koordinasi perlu ditingkatkan.

Berbagai upaya pembangunan ekonomi 230 juta manusia Indonesia dan ekonomi tanah air seluas 8 juta km persegi yang dilakukan Pemerintah telah berdampak pada penurunan angka kemiskinan dari 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 14,1 persen pada Maret 2009. Angka kemiskinan tahun 2009 tersebut yang sebesar 32,53 juta jiwa ini turun 2,43 juta jiwa dibandingkan angka kemiskinan tahun 2008. Kemiskinan yang dalam RPJMN 2004-2009 didefinisikan sebagai kondisi yang membuat seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat merupakan salah satu penyakit perekonomian terus dientaskan. Begitu juga dengan tingkat pengangguran yang menurun dari 9,9 persen pada tahun 2004 menjadi 8,1 persen pada Februari 2009.

Komitmen Pemerintah dalam perekonomian dari perspektif global

Boks 2: Kredit Usaha Rakyat

Sejalan dengan program penurunan tingkat kemiskinan, Pemerintah juga melakukan program jaminan kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk mengakses pembiayaan melalui program KUR. Sebagai fasilitas pembiayaan yang dilakukan melalui UMKM dan Koperasi, KUR yang diluncurkan sejak tahun 2007 memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bantuan kepada pemilik usaha namun belum *bankable*. Adapun UMKM dan Koperasi yang memiliki akses terhadap KUR adalah UMKM dan Koperasi yang bergerak di sektor usaha produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Penyaluran KUR dapat dilakukan baik secara langsung yakni dengan mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana maupun secara tidak langsung yakni melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi ataupun melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerja sama dengan Bank Pelaksana.

Realisasi penyaluran KUR per 30 Desember 2009 senilai Rp17.189,3 miliar kepada 2.374.908 debitur dan rata-rata kredit Rp7,24 juta. (Sumber Kementerian Koperasi dan UKM)

Tantangan dalam implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM adalah terkait dengan efektivitas penyaluran KUR dan pendampingannya serta memperkuat usaha masyarakat berpendapatan rendah.

Pada tahun 2009, sebagai tahun kedua pelaksanaan KUR, pemerintah menambah alokasi anggaran untuk penjaminan KUR. Kebijakan ini diharapkan dapat menambah jumlah debitur dan perkembangan UMKM dan Koperasi sebagai sektor yang mampu memberikan kesempatan kerja. Alokasi penjaminan KUR dalam bentuk Imbal Jasa Penjaminan KUR kepada PT. Askrido dan PT. Jamkrindo yang bertindak selaku Penjamin atas kredit/pembiayaan bagi UMKM yang disalurkan Bank Pelaksana dalam rangka KUR.

Realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2009 sebesar Rp848,76 triliun

Di samping berbagai upaya yang dilakukan untuk mengamankan perekonomian dari sisi domestik, pemerintah juga mengambil berbagai *measures* dalam tatanan global seperti komitmen dalam G-20 dalam rangka melakukan reformasi sistem keuangan seperti menganggarkan dana untuk biaya rekapitalisasi perbankan, restrukturisasi aset bermasalah, dan paket stimulus ekonomi. Pemerintah juga melalui forum ASEAN+3 (Jepang, China dan Korea Selatan) telah bersepakat untuk membentuk cadangan bersama (*reserve pooling*) untuk memberikan kemudahan akses likuiditas valas bagi anggota-anggota ASEAN dan membentuk dana bersama (*pooling fund*) dengan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB).

Pajak yang mendominasi sumber penerimaan negara

Dengan berbagai penyesuaian sebagai dampak krisis ekonomi global, pengaruh terhadap berbagai sektor ekonomi dirasakan cukup signifikan. Berikut adalah tabel asumsi dasar ABPN dan realisasi di tahun 2009.

Tabel 1
Asumsi Dasar APBN dan Realisasi TA 2009

Indikator	Asumsi Dasar APBN TA 2009	Dokumen Stimulus	APBN-P 2009	Realisasi TA 2009
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,0	4,5	4,3	4,5
Tingkat Inflasi (%)	6,2	6,0	4,5	2,78

Rata-rata Nilai Tukar Rupiah (Rp)	9.400	11.000	10.500	10.408
Suku Bunga SBI 3 bulan (%)	7,5	7,5	7,5	6,59
Harga Minyak (USD/Barel)	80	45	61	61,5
Produksi Minyak (Juta Barel/hari)	0,96	0,96	0,96	0,95

KOMPOSISI REALISASI APBN TAHUN ANGGARAN 2009

1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Pada TA 2009, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp848,76 triliun yakni sebesar 97,45 persen dari yang ditargetkan Rp871,00 triliun. Angka ini turun dari realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2008 yang mencapai Rp981,61 triliun. Realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2009 tersebut berasal dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp619,92 triliun, realisasi PNBPN sebesar Rp227,17 triliun, dan realisasi hibah sebesar Rp1,67 triliun.

Sama seperti tahun sebelumnya, Pendapatan negara dan hibah tahun 2009 masih didominasi oleh penerimaan perpajakan yakni 73,04 persen dari total penerimaan, yang diikuti dengan realisasi PNBPN sebesar 26,76 persen dan realisasi hibah sebesar 0,19 persen. Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar Rp619,92 triliun menurun dari realisasi tahun 2008 sebesar Rp658,70 triliun. Perlambatan ekonomi domestik dan global yang berdampak pada menurunnya PPN dan pajak internasional adalah salah satu faktor penurunan penerimaan perpajakan. Sumber penerimaan negara yang lain seperti PNBPN dan hibah juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2008.

Dengan demikian, *tax ratio* yakni rasio pajak terhadap PDB tahun 2009 mengalami penurunan menjadi sebesar 11,04 persen, dibandingkan *tax ratio* tahun 2008 sebesar 13,30 persen terhadap PDB.

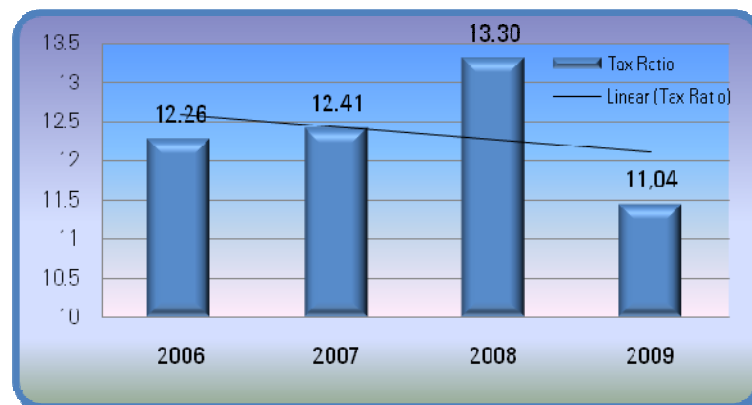
Tax ratio tahun 2009

Pokok-pokok kebijakan umum perpajakan

Realisasi PNBPN sebesar Rp227,17 triliun

Pencapaian target PNBPN yang dipengaruhi asumsi harga ICP dan kebijakan di bidang PNBPN

Realisasi penerimaan SDA Rp138,96 triliun



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan & BPS

Grafik 13: Tren Tax Ratio Tahun 2006 - 2009

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2009 didukung oleh 4 kebijakan umum perpajakan yakni program intensifikasi perpajakan, program ekstensifikasi perpajakan, pelaksanaan amandemen UU PPh dan PPN, serta *law enforcement*. Kebijakan intensifikasi dilakukan antara lain melalui kegiatan *mapping*, *profiling*, *benchmarking*, pemanfaatan data pihak ketiga, dan Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP).

Kebijakan ekstensifikasi pada tahun 2009 ditujukan untuk memperluas basis pajak

*Realisasi penerimaan
laba BUMN Rp26,05
triliun*

melalui perluasan sasaran pada sektor properti untuk perumahan dan apartemen. Untuk kebijakan *law enforcement* dalam tahun 2009, dilakukan dengan melanjutkan program pemeriksaan yang dititikberatkan pada perorangan dan badan hukum. Selain itu, *law enforcement* juga dilakukan melalui penagihan yang difokuskan kepada penertiban administrasi penagihan, serta pemetaan dan pengelompokan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

*Realisasi PNBP lainnya
senilai Rp53,80 triliun*

Selain keempat kebijakan utama tersebut, dalam tahun 2009 Pemerintah melaksanakan amandemen UU PPh. Amandemen UU PPh tersebut antara lain: (1) perluasan lapisan tarif dan penurunan tarif PPh OP, serta penyederhanaan lapisan tarif dan penurunan tarif PPh badan; (2) kenaikan PTKP dari Rp13,2 juta menjadi Rp15,8 juta; dan (3) pemberian fasilitas tarif khusus bagi WP UMKM (50 persen dari tarif normal).

*Realisasi pendapatan
BLU Rp8,37 triliun*

Realisasi PNBP tahun 2009 sebesar Rp227,17 triliun tercapai lebih besar dari target APBN-P sebesar Rp218,04 triliun. Realisasi PNBP ini turun sebesar 29,14 persen dari realisasi PNBP tahun 2008 senilai Rp320,60 triliun. Adapun total realisasi PNBP tahun 2009 berasal dari realisasi penerimaan SDA sebesar Rp138,96 triliun, penerimaan laba BUMN sebesar Rp26,05 triliun dan realisasi PNBP lainnya sebesar Rp53,80 triliun serta realisasi Pendapatan BLU sebesar Rp8,37 triliun. Realisasi tahun 2009 yang lebih besar dari target terutama bersumber dari kenaikan PNBP SDA Non-Migas dan PNBP lainnya.

Pencapaian target PNBP sangat dipengaruhi oleh asumsi harga ICP, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, dan rata-rata asumsi lifting minyak Indonesia. Di samping itu, pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP juga turut berperan bagi pencapaian realisasi PNBP dalam APBN-P tahun 2009. Kebijakan tersebut antara lain penyempurnaan PP tentang tarif dan jenis PNBP pada masing-masing K/L. Dalam tahun 2009 telah dilakukan penyempurnaan beberapa PP tentang jenis dan tarif PNBP pada K/L.

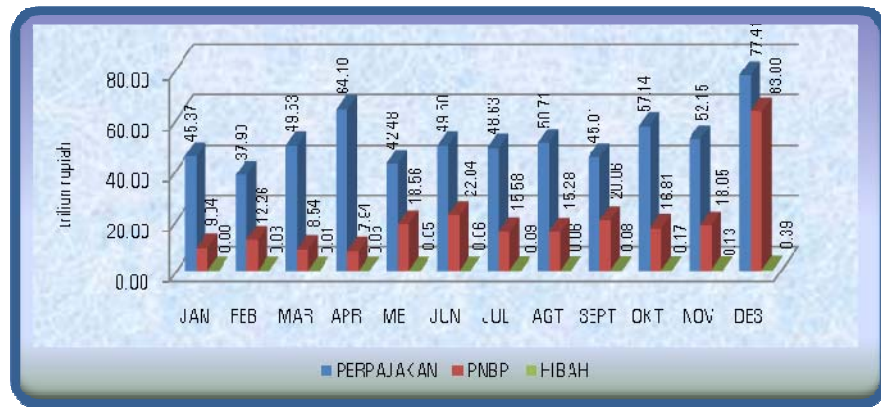
*Peningkatan volume
belanja negara yang
terrealisasi Rp937,38
triliun*

Realisasi penerimaan SDA tahun 2009 senilai Rp138,96 triliun yakni terealisasi 100,22 persen dari target APBN-P tahun 2009 sebesar Rp138,65 triliun. Realisasi ini turun 38,09 persen dari realisasi tahun 2008 yang mencapai sebesar Rp224,46 triliun. Realisasi penerimaan SDA bersumber dari SDA migas 90,50 persen dan SDA non migas 9,50 persen SDA migas sendiri yang mencapai nilai Rp125,75 triliun terdiri dari realisasi minyak bumi sebesar Rp90,06 triliun dan realisasi gas bumi sebesar Rp35,70 triliun. Sedangkan SDA non migas terealisasi sebesar Rp13,21 triliun yang terdiri dari realisasi pertambangan umum sebesar Rp10,37 triliun, realisasi penerimaan kehutanan sebesar Rp2,35 triliun, realisasi penerimaan perikanan sebesar Rp92,04 miliar, realisasi penerimaan panas bumi sebesar Rp400,39 miliar.

Realisasi penerimaan laba BUMN tahun 2009 sebesar Rp26,05 triliun atau 91,04 persen target APBN-P tahun 2009 sebesar Rp28,61 triliun dan turun 10,45 persen dari realisasi penerimaan laba BUMN tahun 2008 senilai Rp29,09 triliun.

Realisasi PNBP lainnya tahun 2009 terealisasi senilai Rp53,80 triliun. Angka ini turun 15,04 persen dari realisasi PNBP lainnya tahun 2008 yang mencapai nilai Rp63,32 triliun.

Realisasi Pendapatan BLU sepanjang tahun 2009 mencapai Rp8,37 triliun, terealisasi 142,08 persen dari targetnya yakni Rp5,89 triliun. Realisasi tersebut berasal dari realisasi pendapatan jasa layanan umum sebesar Rp7,67 triliun, realisasi pendapatan hibah layanan umum senilai Rp46,05 miliar, realisasi pendapatan hasil kerja sama BLU Rp206,49 miliar dan realisasi pendapatan BLU lainnya Rp447,57 miliar. Adapun perkembangan pendapatan negara dan hibah selama tahun 2009 dapat dilihat dari Grafik 14.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

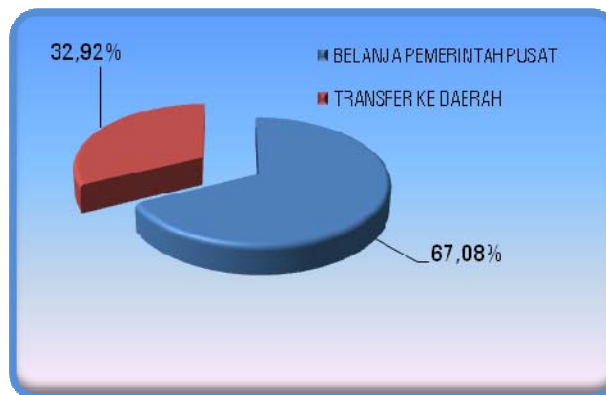
Grafik 14: Tren Pendapatan Negara dan Hibah Bulanan TA 2009

2. BELANJA NEGARA

Komposisi belanja
Pemerintah Pusat

Peningkatan kualitas
belanja Pemerintah

Realisasi belanja negara tahun 2009 terealisasi sebesar Rp937,38 triliun atau 93,66 persen dari target APBN. Realisasi belanja negara berasal dari belanja pemerintah pusat senilai Rp628,81 triliun atau 67,08 persen dari total belanja negara dan realisasi transfer ke daerah Rp308,58 triliun atau 32,92 persen dari total belanja negara (lihat Grafik 15). Realisasi belanja negara tahun 2009 lebih rendah dari target APBN-P sebesar Rp1.000,84 triliun terutama akibat lebih rendahnya realisasi beberapa komponen belanja dari target antara lain belanja pembayaran kewajiban utang, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka realisasi tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi belanja negara tahun 2008 yang berada di level Rp985,73 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Depkeu

Grafik 15: Komposisi Belanja Negara TA 2009

Kebijakan alokasi belanja
Pemerintah tahun 2009

Meningkatnya volume belanja negara di tahun 2009 telah dibarengi dengan peningkatan kualitas belanja yang dilakukan Pemerintah melalui: (1) perbaikan efisiensi dan penajaman prioritas belanja, (2) penyusunan anggaran berbasis kinerja; (3) penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah. Sedangkan prioritas belanja negara dalam tahun 2009 diarahkan pada: (1) peningkatan anggaran pendidikan, (2) perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan, (3) peningkatan stimulus melalui pembangunan sarana dan prasarana pembangunan, dan (4) perlindungan sosial melalui program BOS dan beasiswa pendidikan, Kamkesmas, PNPM, dan BLT.

Selama tahun 2009, komposisi belanja Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut: belanja pegawai terealisasi Rp127,67 triliun atau 20,30 persen dari total belanja

Pemerintah Pusat, realisasi belanja barang Rp80,67 triliun atau 12,83 persen, realisasi belanja modal Rp75,87 triliun atau 12,07 persen, realisasi belanja pembayaran bunga utang Rp93,78 triliun atau 14,91 persen, realisasi belanja subsidi Rp138,08 triliun atau 21,96 persen, realisasi belanja bantuan sosial Rp73,81 triliun atau 11,73 persen dan realisasi belanja lain-lain Rp38,93 triliun atau 6,19 persen.

Di tahun 2009, alokasi belanja pegawai mengalami kenaikan. Belanja pegawai adalah pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap penyelenggara negara, baik dalam bentuk uang maupun barang yang harus dibayarkan kepada aparatur negara sebagai imbalan atas pekerjaannya. Kenaikan alokasi ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan dan kontribusi sosial. Sedangkan kebijakan alokasi belanja barang tahun 2009 yang juga meningkat antara lain dalam rangka penyediaan belanja operasional bagi satuan kerja baru, penyediaan dana operasional pengamanan pemilu 2009, dan efisiensi dalam pemeliharaan aset negara. Sedangkan alokasi kewajiban pembayaran bunga utang dilakukan Pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga utang secara tepat waktu seperti pemanfaatan dan pengelolaan utang akan dilakukan secara bijaksana, agar beban pembayaran bunga cicilan pokok utang di masa-masa mendatang tetap dalam batas kemampuan ekonomi. Alokasi anggaran bantuan sosial tahun 2009 terdiri dari alokasi dana penanggulangan bencana alam, alokasi bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai kementerian negara/lembaga dan alokasi dana penanggulangan bencana alam.

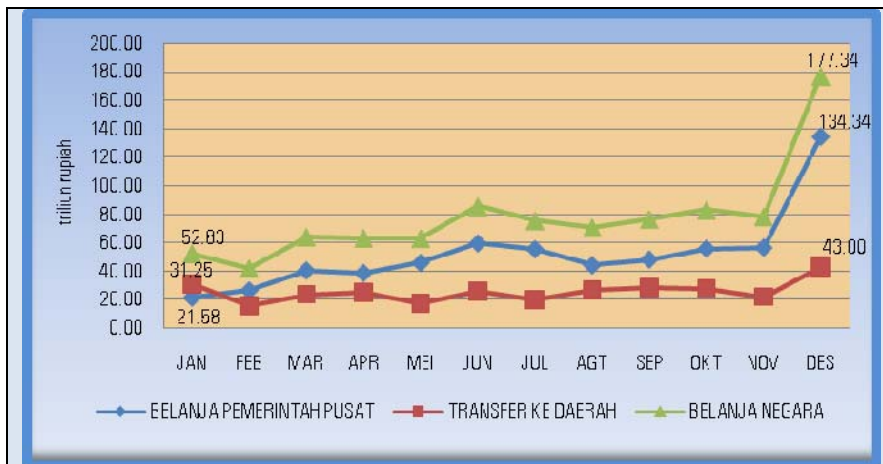
APBN sebagai piranti kebijakan Pemerintah yakni memiliki fungsi stabilisasi antara lain digunakan untuk penyediaan berbagai jenis subsidi baik berupa subsidi harga barang-barang kebutuhan pokok (*price subsidies*), maupun subsidi ke objek sasaran (*targeted subsidies*). Realisasi belanja subsidi tahun 2009 yang mencapai Rp138,08 triliun dialokasikan untuk subsidi perusahaan negara Rp137,01 triliun yakni antara lain untuk subsidi BBM dan non-BBM dan subsidi perusahaan swasta Rp1,07 triliun.

Boks 3: Tren Penyerapan Anggaran Belanja TA 2009

Penyerapan anggaran belanja yang cenderung tidak optimal dari tahun ke tahun (*underspending of budget appropriations*) dan tren penyerapannya yang cenderung tereskalasi pada akhir tahun menjadi beberapa isu penting dalam aspek pelaksanaan anggaran. Reformasi manajemen keuangan negara mengakomodasi kendala tersebut dengan memperkenalkan berbagai *best practice* terutama terkait dengan penganggaran dan aspek perbendaharaan yang menekankan pada manajemen kas yang efisien.

Peningkatan nilai nominal yang dialokasikan dari tahun ke tahun dalam APBN adalah penjelasan yang dapat diberikan terkait dengan fenomena terjadinya gap yang signifikan antara pagu dan realisasinya. Pemerintah juga mencermati dan terus memperbaiki proses kerja yang ditengarai juga menjadi penyebab tren penyerapan yang tidak optimal. Salah satu kendala di area ini adalah proses pengadaan barang dan jasa yang rigid yang mensyaratkan *procurement formalities* dalam mekanisme pencairan dana. Dengan penguatan *treasury function* dalam reformasi telah terobservasi bahwa tren penyerapan anggaran dari tahun ke tahun semakin membaik.

Penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat berfluktuasi dari bulan ke bulan sepanjang tahun 2008. Tren belanja negara merupakan jumlah dari tren belanja pemerintah pusat dan tren transfer ke daerah.



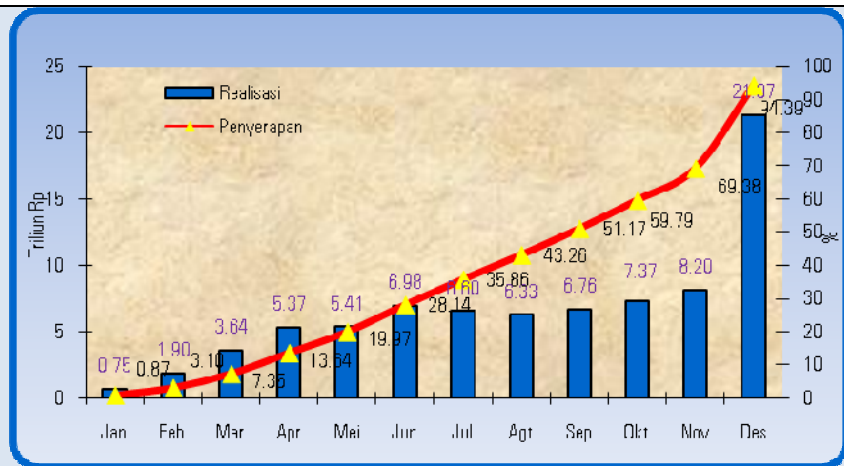
Grafik 16: Tren Belanja Negara Bulanan TA 2009

Tren realisasi tersebut dari awal tahun terus meningkat sampai bulan Maret dan semakin meningkat pada bulan Juni selanjutnya terus turun sampai bulan Agustus, kembali naik sampai bulan November serta meningkat tajam pada bulan Desember dengan nilai realisasi tertinggi sebesar Rp177,34 triliun. Secara umum, nilai serapan per bulan untuk belanja negara rata-rata di atas Rp52,40 triliun.



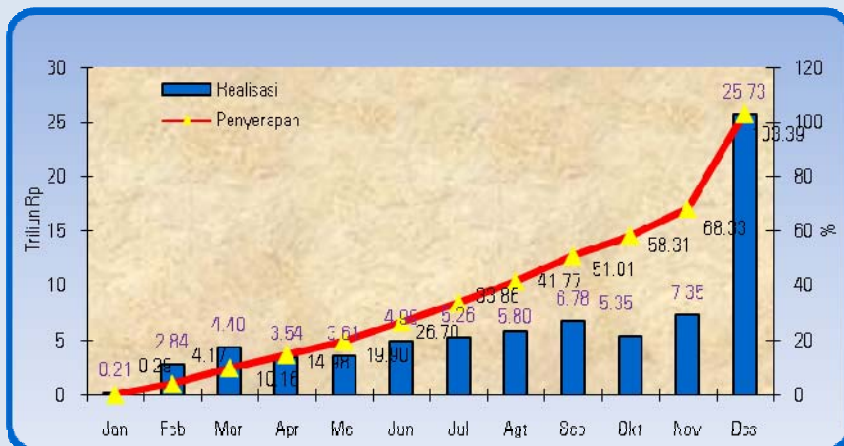
Grafik 17: Tren Belanja Pegawai Bulanan TA 2009

Tren belanja pegawai sepanjang tahun berfluktuasi dengan tingkat penyerapan tertinggi pada bulan Juni 2009 yakni sebesar Rp17,22 triliun. Selanjutnya, setelah bulan tersebut tren pencairan belanja pegawai relatif stabil dengan pencairan akhir tahun mencapai Rp7,89 triliun. Tren penyerapan belanja pegawai tidak banyak berbeda dengan tren penyerapan belanja pegawai tahun sebelumnya yang juga mencapai titik tertinggi di bulan Juni.



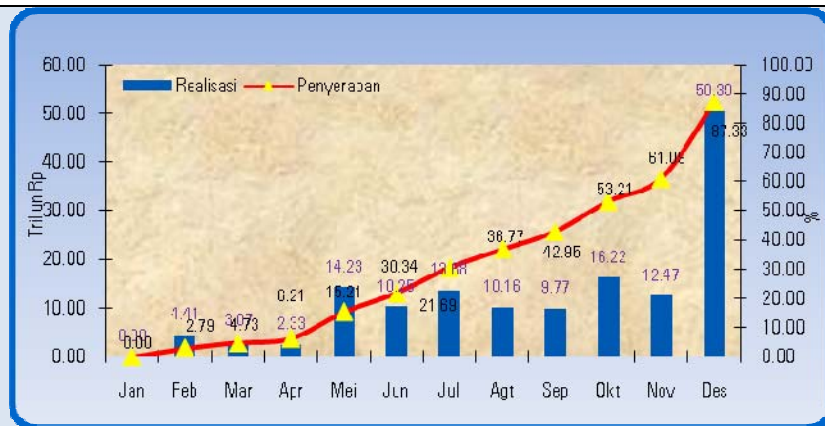
Grafik 18: Tren Belanja Barang Bulanan TA 2009

Jika realisasi belanja pegawai terfluktuasi sepanjang tahun, demikian juga realisasi belanja barang. Namun demikian, tren pencairan belanja barang sedikit berbeda dimana mengalami kecenderungan naik dengan realisasi terendah di bulan Januari sebesar Rp0,75 triliun dan mencapai puncaknya pada akhir tahun senilai Rp21,37 triliun.



Grafik 19: Tren Belanja Modal Bulanan TA 2009

Belanja modal yang berkontribusi sekitar 11,67 persen dari total belanja pemerintah pusat memiliki tren yang tidak jauh berbeda dengan tren realisasi belanja barang. Pada akhir tahun realisasi pencairan belanja modal melonjak tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Realisasi belanja modal bulan Desember 2009 mencapai Rp25,73 triliun yakni 33,06 persen dari total pagu senilai Rp73,38 triliun atau 33,91 persen dari total realisasi senilai Rp75,87 triliun.



Grafik 20: Tren Belanja Subsidi Bulanan TA 2009

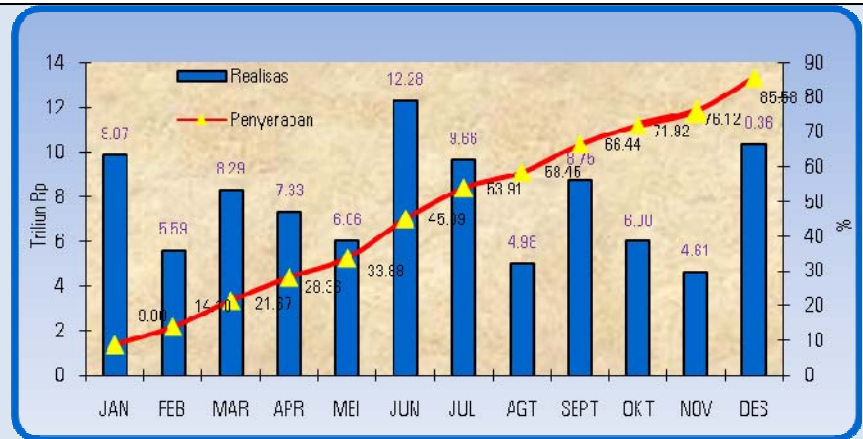
Tren belanja subsidi banyak dipengaruhi kebijakan pemerintah. Di awal tahun sejalan dengan menurunnya subsidi BBM. Belanja subsidi sepanjang tahun 2009 berfluktuasi, penyerapan baru terjadi pada bulan Februari sebesar Rp4,41 triliun atau sekitar 2,79 persen dari total pagu sebesar Rp158,12 triliun dan kemudian turun sampai bulan April serta meningkat secara tajam pada bulan Mei sebesar Rp14,23 triliun atau sekitar 9 persen. Pada bulan Desember realisasi belanja subsidi berada di angka Rp50,39 triliun atau sekitar 31,87 persen dari total pagu atau 36,49 persen dari total realisasi sebesar Rp138,08 triliun.



Grafik 21: Tren Belanja Bantuan Sosial Bulanan TA 2009

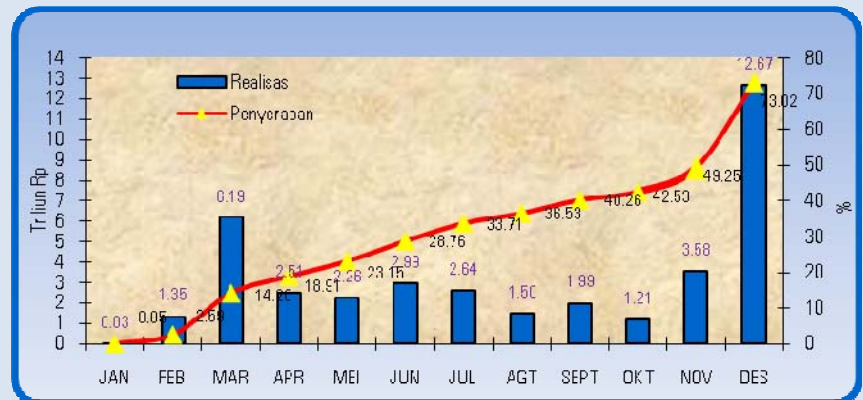
Tren belanja bansos juga meningkat semakin tinggi pada akhir tahun terealisasi Rp16,18 triliun dibanding bulan November sebesar Rp10,42 triliun.

Tingkat absorpsi belanja dan akuntabilitas



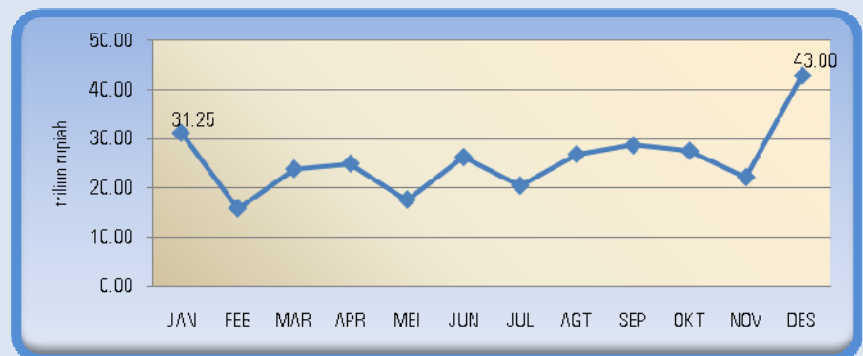
Grafik 22: Tren Belanja Bunga Utang Bulanan TA 2009

Tren realisasi belanja bunga utang banyak dipengaruhi oleh profil utang Pemerintah. Di awal tahun realisasi belanja bunga utang sebesar Rp9,87 triliun berfluktuasi dan pada akhir tahun terealisasi sebesar Rp10,36 triliun.



Grafik 23: Tren Belanja Lain-lain Bulanan TA 2009

Realisasi belanja lain-lain cukup rendah di awal tahun dan melonjak tajam di bulan Maret sebesar Rp6,19 triliun. Realisasi sepanjang tahun berfluktuasi dan mengalami realisasi terbesar pada bulan Desember 2009 senilai Rp12,67 triliun.



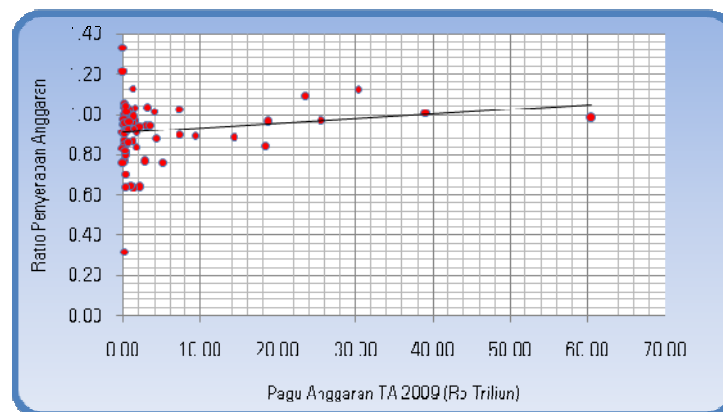
Grafik 24: Tren Transfer ke Daerah Bulanan TA 2009

Kebijakan transfer ke daerah sebagai instrumen utama kebijakan desentralisasi fiskal

Sama seperti belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah juga menunjukkan fluktuasi di sepanjang tahun 2009. Transfer ke daerah terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Tren serapan dana perimbangan transfer ke daerah berfluktuasi dari bulan ke bulan. Pada awal tahun, serapan berada di angka Rp31,25 triliun untuk selanjutnya **berfluktuasi sampai dengan** bulan November di angka Rp22,18 triliun dan **kembali naik** di akhir tahun dengan nilai serapan Rp43,00 triliun. Total dana APBN yang terserap untuk dana perimbangan sepanjang tahun senilai Rp287,25 triliun dengan nilai rata-rata serapan per bulan di atas Rp23,93 triliun. Serapan dana otonomi khusus dan penyesuaian diawali pada bulan April senilai Rp3,00 triliun untuk selanjutnya turun secara tajam sampai bulan Juli di angka Rp0,28 triliun dan kemudian naik kembali sampai bulan Nopember di angka Rp2,33 triliun. Di akhir tahun serapan mencapai puncaknya dengan nilai Rp7,53 triliun. Total dana APBN yang terserap untuk dana otonomi khusus dan penyesuaian senilai Rp21,33 triliun dengan nilai rata-rata serapan per bulan di atas Rp1,78 triliun.

Penyerapan anggaran belanja selain dapat dikaji melalui tren serapan per bulan (lihat boks 2) juga dapat dikaji terhadap pagu yang dialokasikan. Kajian serapan terhadap pagu juga dapat dikaitkan dengan akuntabilitas keuangan negara. Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi dialokasikan melalui belanja yang dikelola oleh Kementerian Teknis dan belanja yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Adapun rasio penyerapan anggaran khusus yang dikelola oleh K/L terlihat pada Grafik 25.

Selama tahun 2009, secara kumulatif lebih dari 50 persen total K/L mampu mengabsorpsi anggarannya di atas 60 persen dari pagu. Terdapat juga beberapa K/L yang memiliki daya serap rendah khususnya K/L yang memiliki alokasi pagu yang relatif rendah. Pada grafik juga terlihat bahwa tiga K/L yang memiliki pagu terbesar memiliki tingkat serapan yang cukup tinggi berada di atas 90 persen.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 25: Plot Diagram Rasio Penyerapan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Dengan paradigma yang memberikan fleksibilitas melalui pemberian kewenangan penuh untuk mengelola anggaran bagi para pengguna anggaran, kewajiban pertanggungjawaban juga semakin mendapat perhatian. Melalui reformasi manajemen keuangan negara, Pemerintah berupaya untuk memperbaiki tingkat absorpsi yang tidak lain merupakan pencerminan perencanaan yang matang. Tingkat serapan yang tinggi dari setiap Kementerian Teknis juga dibarengi dengan tuntutan pencapaian output dari

Defisit tahun 2009
sebesar Rp88,62 triliun
atau 1,58 persen terhadap
PDB

penggunaan dana publik yang tertuang dalam laporan akuntabilitas tahun 2009. Opini audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) semakin membaik dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2008 hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan pertanggungjawaban masing-masing K/L adalah sebagai berikut: kementerian negara/lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 35 K/L, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 30 K/L dan opini disclaimer sebanyak 18 K/L. Angka tersebut membaik dibandingkan opini terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah tahun 2007 dimana opini WTP hanya diperoleh 16 K/L dan 31 K/L memperoleh opini WDP. Hal tersebut menunjukkan *progress* positif dari berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang berbasis pada *output*.

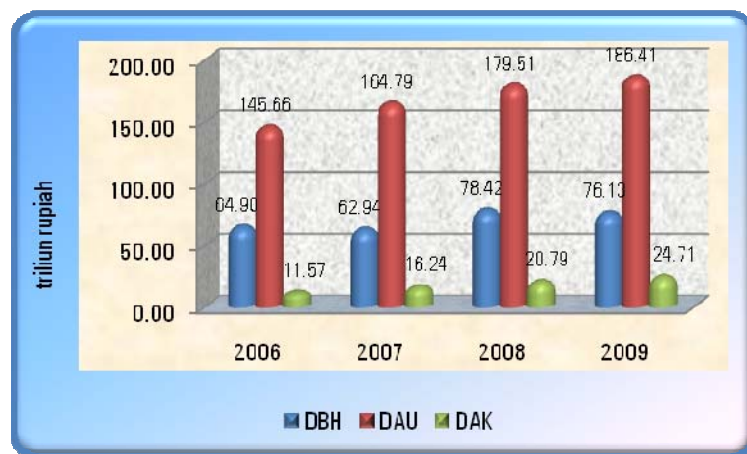
Instrumen utama kebijakan desentralisasi fiskal yakni kebijakan transfer ke daerah pada tahun 2009 mencapai nilai Rp308,58 triliun, yang terdiri dari realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp287,25 triliun dan realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian senilai Rp21,33 triliun. Prinsip desentralisasi fiskal yang dianut oleh Pemerintah adalah mengurangi *vertical fiscal imbalance* dan *horizontal fiscal imbalance*, meningkatkan kualitas *service delivery* dan mengurangi *gap* pelayanan publik antardaerah, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nasional, penegakan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan alokasi transfer ke daerah, dan mendukung *fiscal sustainability* dalam kebijakan ekonomi secara makro. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, daerah juga memiliki *taxing power* yakni kewenangan memungut pajak. Terkait dengan penguatan *taxing power*, dilakukan kebijakan antara lain penyelarasan perpajakan dan retribusi daerah dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memperluas basis pajak daerah.

Komposisi transfer ke daerah didominasi oleh Dana Perimbangan mencapai 93,09 persen dan sisanya berupa Dana Otonomi Khusus sebesar 6,91 persen.

Dana Perimbangan terdiri Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran DBH tahun 2009 terealisasi sebesar Rp76,13 triliun. Angka tersebut hanya turun sekitar 2,92 persen dari realisasi DBH tahun 2008 yang mencapai nilai Rp78,42 triliun. Sedangkan realisasi DAU yang merupakan komponen terbesar dana transfer ke daerah pada tahun 2009 mencapai Rp186,41 triliun yang meningkat dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp179,51 triliun. Realisasi DAK tahun 2009 tercatat sebesar Rp24,71 triliun meningkat dari realisasi tahun sebelumnya Rp20,79 triliun. Perbandingan realisasi Dana Perimbangan selama 4 tahun terakhir adalah sebagaimana terlihat Grafik 26.

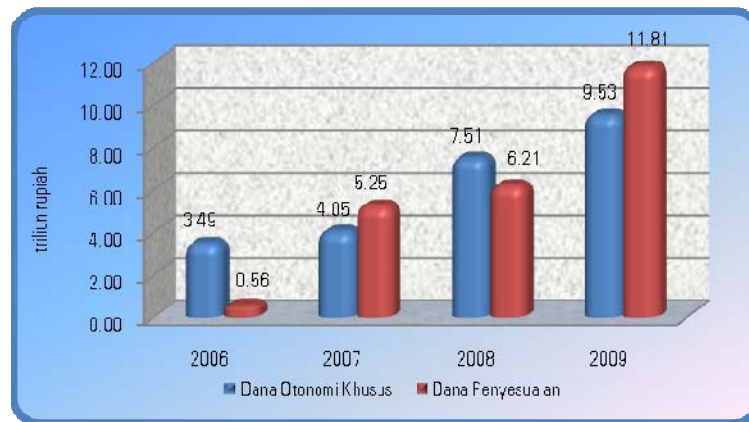
Kesimbangan primer
Rp5,16 triliun

Total pembiayaan tahun
2009 sebesar Rp112,58
triliun



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 26: Perbandingan DBH, DAU, dan DAK TA 2006 - 2009

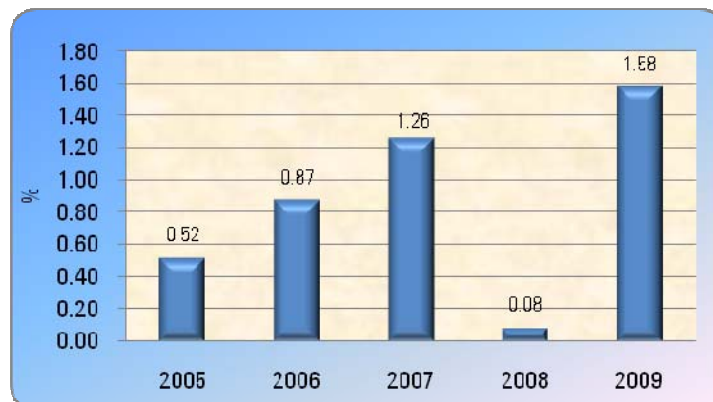


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 27: Perbandingan Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian TA 2006 - 2009

3. PEMBIAYAAN

Defisit APBN-P TA 2009 mencapai Rp88,62 triliun atau sekitar 1,58 persen dari PDB lebih rendah dari target defisit anggaran dalam APBN-P sebesar Rp129,84 triliun. Kinerja tersebut sejalan dengan dinamika kondisi ekonomi makro yang positif dan dampak kebijakan fiskal yang dilakukan Pemerintah. Di samping itu secara spesifik, kebijakan defisit anggaran tahun 2009 diarahkan dalam rangka konsolidasi fiskal dengan mempertahankan adanya stimulus bagi perekonomian. Kebijakan penurunan defisit sejalan dengan upaya-upaya meningkatkan penerimaan negara, reformulasi dana perimbangan yang adil dengan tujuan membagi beban antara pemerintah pusat dan daerah serta upaya penurunan belanja subsidi.

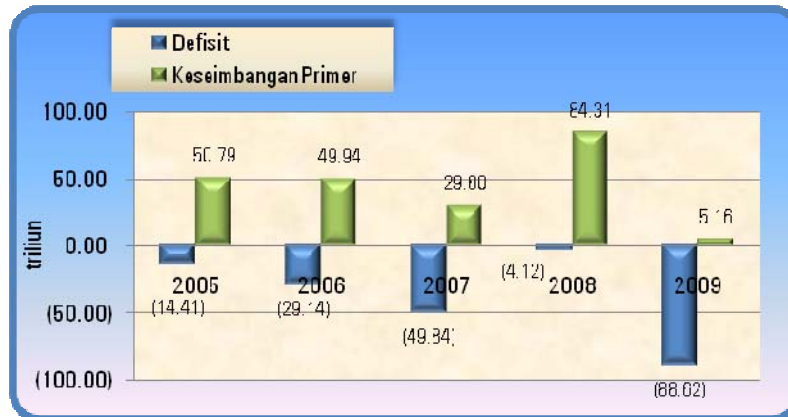


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan & BPS

Grafik 28: Tren Rasio Defisit Terhadap PDB 2005 - 2009

Keseimbangan primer yang merupakan selisih dari pendapatan termasuk hibah dengan pengeluaran yang tidak memiliki komponen bunga (pinjaman neto) tahun 2009 sebesar Rp5,16 triliun. Realisasi keseimbangan primer yang menurun dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp84,31 triliun menunjukkan terjadinya peningkatan belanja pembayaran kewajiban utang bersama-sama dengan meningkatnya defisit akibat penurunan pendapatan yang tidak sejalan dengan meningkatnya belanja negara dibandingkan tahun yang lalu.

Defisit yang meningkat mengakibatkan peningkatan realisasi pembiayaan yang pada tahun 2009 mencapai nilai Rp112,58 triliun. Angka ini lebih rendah dari target perkiraan pembiayaan anggaran yang tertuang dalam APBN-P sebesar Rp129,84 triliun. Pembiayaan yang merupakan penggalangan dana yang dilakukan Pemerintah dari dalam negeri maupun luar negeri tahun 2009 ini melonjak tajam dibandingkan realisasi pembiayaan tahun 2008 yang hanya sebesar Rp84,07 triliun.



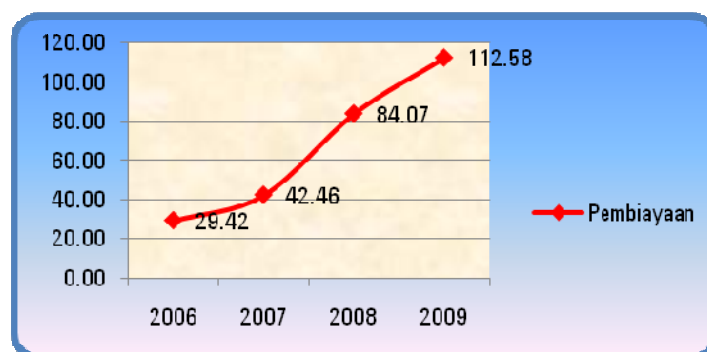
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 29: Defisit dan Keseimbangan Primer Tahun 2005 - 2009

Di tahun 2009, realisasi pembiayaan dalam negeri mencapai nilai Rp124,99 triliun dan realisasi pembiayaan luar negeri sebesar minus Rp12,41 triliun. Komponen realisasi pembiayaan dalam negeri terdiri dari realisasi Rekening Pemerintah Rp53,05 triliun, realisasi Privatisasi dan Penjualan Aset Program Resrtukturisasi Rp0,69 triliun, realisasi penerimaan penjualan Surat Berharga Negara (Neto) Rp99,47 triliun dan realisasi penyertaan modal negara/dana investasi pemerintah minus Rp13,08 triliun, dan pembiayaan lain-lain sebesar minus Rp15,13 triliun. Sumber pembiayaan yang mempengaruhi realisasi pembiayaan tahun 2009 antara lain adalah realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp99,47 triliun dan penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp58,66 triliun.

Untuk membiayai defisit, pemerintah juga menggalang pembiayaan yang berasal dari luar negeri berupa penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp58,66 triliun, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar minus Rp68,03 triliun, dan penerusan pinjaman minus Rp3,05 triliun.

Tahun 2009, APBN memiliki SiLPA sebesar Rp23,96 triliun, turun jika dibandingkan realisasi SiLPA tahun 2008 sebesar Rp79,95 triliun. Nilai SiLPA tersebut merupakan implikasi dari lebih rendahnya realisasi defisit tahun 2009 dibandingkan dengan targetnya.



Grafik 30: Tren Pembiayaan TA 2006 - 2009

Salah satu indikator tercapainya tujuan reformasi adalah semakin andalnya data dan informasi pemerintah. Keandalan data dan informasi tersebut antara lain terindikasi pada besaran nilai suspen yang semakin menurun. Suspen yang merupakan perbedaan pencatatan antara Kementerian Teknis dan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dari tahun ke tahun terus menurun. Penurunan angka tersebut meningkatkan keandalan data LKPP sebagai hasil dari mekanisme saling uji (*check and balance*) yang semakin baik. Suspen di tahun 2009 senilai minus Rp15,63 miliar, sedangkan tahun 2008 sebesar minus Rp58,72 miliar dan tahun 2007 sebesar minus Rp236,53 miliar

Tabel 2
Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2008 dan 2009

Uraian	TA 2008		TA 2009			
	APBN-P	Realisasi	APBN	Dok. Stimulus	APBN-P	Realisasi
Penerimaan Perpajakan	609,23	658,70	725,84	661,76	651,95	619,92
PNBP	282,81	320,60	258,94	185,87	218,04	227,17
Penerimaan Hibah	2,95	2,30	0,94	0,94	1,01	1,67
Pendapatan Negara dan Hibah	894,99	981,61	985,72	848,57	870,99	848,76
Belanja Pemerintah Pusat	697,07	693,36	716,38	685,04	691,54	628,81
Transfer ke Daerah	292,42	292,43	320,69	303,05	309,31	308,58
Total Belanja Negara	989,49	985,73	1.037,07	988,09	1.000,84	937,38
Surplus (Defisit) Anggaran	(94,50)	(4,12)	(51,34)	(139,52)	(129,84)	(88,62)
Pembiayaan Neto	94,50	84,07	51,34	139,52	129,84	112,58

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Boks 4. Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Sektor Riil TA. 2009

Salah satu cara untuk menilai dampak kebijakan APBN terhadap ekonomi makro adalah dengan melihat dampak langsung besaran-besaran APBN pada sektor riil. Sektor riil sebagai salah satu motor penggerak dalam perekonomian dipengaruhi oleh berbagai kebijakan Pemerintah. Peran Pemerintah dalam memacu perekonomian nasional tersebut tercipta melalui berbagai kebijakan yang diambil baik yang bersifat ekspansif pada saat ekonomi lesu ataupun kontraktif pada saat ekonomi sedang tumbuh.

Dalam tahun 2009, upaya Pemerintah dalam mendorong sektor riil dilakukan melalui peningkatan investasi dan peran swasta dalam meningkatkan kemampuan daya saing di berbagai bidang seperti bidang sumber daya air, transportasi, energi, pos dan telekomunikasi, perumahan dan pemukiman dan pembangunan jalan dan jembatan. Adapun kebijakan dalam berbagai bidang tersebut antara lain optimalisasi fungsi sarana dan prasarana, peningkatan kinerja, mendorong investasi, dan pemanfaatan infrastruktur.

Adapun dampak besaran-besaran APBN terhadap sektor riil dapat dikaji dengan mengelompokkan belanja APBN dalam dua kelompok yakni konsumsi pemerintah dan pembentukan modal domestik bruto.

Tabel 3
Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Sektor Riil Tahun 2009

No	Rincian	Tahun 2009		Tahun 2008	
		Real (Rp triliun)	Persentase thd PDB	Real (Rp triliun)	Persentase thd PDB
1	Konsumsi Pemerintah (a-b)	463,05	8,2	362,99	7,3
	a. Belanja Barang dan Jasa	494,13	8,8	396,51	8,0
	Belanja Pegawai	127,67	2,3	112,83	2,3
	Belanja Barang	80,67	1,4	55,96	1,1
	Belanja Rutin Daerah	246,86	4,4	197,39	4,0
	Belanja Lainnya	38,93	0,7	30,33	0,6
	b. Pendapatan Barang dan Jasa	31,09	0,6	33,53	0,7
2.	Pembentukan Modal Domestik Bruto	137,59	2,5	167,81	3,4
	Pemerintah Pusat	75,87	1,4	72,77	1,5
	Pemerintah Daerah	61,72	1,1	95,04	1,9
	Jumlah 1 dan 2	600,64	10,7	530,80	10,7

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Dampak kebijakan fiskal yakni intervensi pemerintah melalui pembelanjaan publik dan perpajakan terhadap sektor riil pada tahun 2009 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni mencapai Rp600,64 triliun, meningkat dari senilai Rp530,80 triliun pada tahun 2008.

Komponen konsumsi pemerintah dalam APBN TA 2009 mencapai Rp463,05 triliun atau sekitar 8,2 persen terhadap PDB, meningkat 27,6 persen dari realisasi konsumsi pemerintah tahun 2008. Realisasi Pembentukan Modal Domestik Bruto (PMDB) sebesar Rp137,59 triliun atau 2,5 persen terhadap PDB yang bersumber dari realisasi belanja modal pemerintah pusat yang mencapai Rp75,87 triliun (1,4 persen PDB) dan realisasi belanja modal dari anggaran yang ditransfer ke daerah sebesar Rp61,72 triliun (1,1 persen PDB). Dengan demikian, dampak APBN TA 2009 terhadap sektor riil mencapai Rp600,64 triliun atau sebesar 10,7 persen dari PDB.

Tabel 4
Persentase Anggaran dan Realisasi APBN terhadap PDB TA 2009

Uraian	2009			
	APBN-P (Rp triliun)	% thd PDB	Real (Rp triliun)	% thd PDB
Pendapatan Negara dan Hibah				
1. Penerimaan Perpajakan	651,95	11,61	619,92	11,04%
a. Pajak Dalam Negeri	631,93	11,26	601,25	10,71%
b. Pajak Perdagangan Internasional	20,02	0,36	18,67	0,33%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	218,04	3,88	227,17	4,05%
a. SDA	138,65	2,47	138,96	2,48%
b. Bagian Laba BUMN	28,61	0,51	26,05	0,46%
c. PNBK Lainnya	44,88	0,80	53,80	0,96%
d. Pendapatan BLU	5,89	0,10	8,37	0,15%
3. Hibah	1,01	0,02	1,67	0,03%
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	871,00	15,52	848,76	15,12%
Belanja Negara				
1. Belanja Pemerintah Pusat	691,54	12,32	628,81	11,20%
a. Belanja Pegawai	133,71	2,38	127,67	2,27%
b. Belanja Barang	85,46	1,52	80,67	1,44%
c. Belanja Modal	73,38	1,31	75,87	1,35%
d. Pembayaran Bunga Utang	109,59	1,95	93,78	1,67%

e. Subsidi	158,12	2,82	138,08	2,46%
f. Belanja Hibah	0,03	0,56	-	
g. Bantuan Sosial	77,93	1,39	73,81	1,31%
h. Belanja Lain-lain	53,31	0,95	38,93	0,69%
2. Transfer ke Daerah	309,31	5,51	308,58	5,50%
a. Dana Perimbangan	285,05	5,08	287,25	5,12%
i. DBH	73,82	1,32	76,13	1,36%
ii. DAU	186,41	3,32	186,41	3,32%
iii. DAK	24,82	0,44	24,71	0,44%
b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	24,26	0,43	21,33	0,38%
i. Dana Otonomi Khusus	9,53	0,17	9,53	0,17%
ii. Dana Penyesuaian	14,73	0,26	11,81	0,21%
Jumlah Belanja Negara	1.000,84	17,83	937,38	16,70%
Defisit Anggaran	(129,84)	(2,31)	(88,62)	(1,58%)
Pembiayaan	129,84	2,31	112,58	2,01%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Tabel 5
Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2009 dan 2008

No	Indikator	2009	2008	Ket
1	Nilai PDB Harga Konstan (Rp Triliun)	2.177,0	2.082,1	(1)
2	Nilai PDB Harga yang Berlaku (Rp Triliun)	5.613,4	4.954,0	(1)
3	PDB per kapita (Rp Juta)	24,3	21,7	(1)
4	Pertumbuhan PDB (%)	4,5	6,1	(1)
5	Inflasi (%)	2,78	11,1	(1)
6	Total ekspor (USD miliar)	116,49	136,8	(1)
7	Ekspor Non Migas (USD miliar)	97,47	107,8	(1)
8	Total Impor (USD miliar)	96,86	128,8	(1)
9	Impor Non Migas (USD miliar)	77,87	98,3	(1)
10	Cadangan Devisa (USD Miliar, akhir tahun)	66,1	51,6	(2)
11	Rupiah/USD	10.408	10.950	(2)
12	Total Pendapatan Negara (Rp Triliun)	870,22	981,6	(4)
13	Total Belanja Negara (Rp Triliun)	958,84	985,7	(4)
14	Defisit Anggaran (Rp Triliun)	(88,62)	(4,1)	(4)
15	Uang Beredar (Rp Triliun)			
	a. Arti Sempit (M1)	506,06	466,4	(2)
	b. Arti Luas (M2)	1.865,06	1.883,9	(2)
16	Kredit Perbankan (Rp Triliun)	1.408,67	1.315,7	(2)
17	Suku Bunga (% per tahun)			

	a. SBI 1 bulan	6,46	9,2	(2)
	b. SBI 3 bulan	6,59	10,75	(2)
	c. Deposito 1 bulan	6,87	8,2	(2)
	d. Kredit Modal Kerja	13,69	15,2	(2)
	e. Kredit Investasi	12,96	14,4	(2)
18	Realisasi Investasi			
	a. Domestik (Rp Triliun)	37,80	20,36	(5)
	b. Asing (USD Miliar)	10,82	14,87	(5)
19	IHSG BEJ	2.534,0	1.355,0	(2)
20	Peringkat Daya Saing Indonesia	42	55	(5)
21	Rasio Utang terhadap PDB (DSR, %)	28	33	(3)

Keterangan:

Sumber :

- (1) *Badan Pusat Statistik*
- (2) *Bank Indonesia*
- (3) *Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan*
- (4) *Laporan Realisasi APBN, Kementerian Keuangan*
- (5) *Badan Koordinasi Penanaman Modal*

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan kementerian negara/lembaga (K/L), beserta jenjang struktural di bawahnya seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja pengguna dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. LKPP disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL), laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan data lainnya dari unit-unit yang terkait.

Untuk LKPP Tahun 2009, entitas pelaporan keuangan tingkat K/L dan BUN, serta entitas akuntansi tingkat satuan kerja (satker) di bawahnya yang dicakup meliputi:

*Daftar entitas
pelaporan keuangan
tingkat kementerian
negara/lembaga*

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	2
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	36
4	BA 005	Mahkamah Agung	796
5	BA 006	Kejaksaan Agung	500
6	BA 007	Sekretariat Negara	17
7	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	742
8	BA 011	Kementerian Luar Negeri	131
9	BA 012	Kementerian Pertahanan	254
10	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	755
11	BA 015	Kementerian Keuangan	1.057
12	BA 018	Kementerian Pertanian	3.024
13	BA 019	Kementerian Perindustrian	180
14	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	90
15	BA 022	Kementerian Perhubungan	736
16	BA 023	Kementerian Pendidikan Nasional	402
17	BA 024	Kementerian Kesehatan	621
18	BA 025	Kementerian Agama	4.028
19	BA 026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	960
20	BA 027	Kementerian Sosial	247
21	BA 029	Kementerian Kehutanan	358
22	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	763
23	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum	1.068
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1
27	BA 040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	85
28	BA 041	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	1
29	BA 042	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	11
30	BA 043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	47
31	BA 044	Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	130
32	BA 047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	7
33	BA 048	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	1
34	BA 050	Badan Intelijen Negara	1
35	BA 051	Lembaga Sandi Negara	1
36	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1
37	BA 054	Badan Pusat Statistik	475
38	BA 055	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan	1

		Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	
No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker
39	BA 056	Badan Pertanahan Nasional	449
40	BA 057	Perpustakaan Nasional	33
41	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	56
42	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.068
43	BA 063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	39
44	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	1
45	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1
46	BA 066	Badan Narkotika Nasional	10
47	BA 067	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	179
48	BA 068	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	42
49	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1
50	BA 075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	185
51	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	504
52	BA 077	Mahkamah Konstitusi	1
53	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1
54	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	50
55	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	22
56	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	24
57	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	19
58	BA 083	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	4
59	BA 084	Badan Standarisasi Nasional	1
60	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3
61	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	12
62	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	30
63	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	13
64	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	31
65	BA 090	Kementerian Perdagangan	209
66	BA 091	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	7
67	BA 092	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	34
68	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1
69	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	2
70	BA 100	Komisi Yudisial	1
71	BA 103	Badan Nasional Penanganan Bencana	1
72	BA 104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	20
73	BA 105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1
74	BA 999	Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:	
	BA 999.01	Utang Pemerintah *)	1
	BA 999.02	Hibah *)	1
	BA 999.03	Investasi Pemerintah *)	1
	BA 999.04	Penerusan Pinjaman *)	1
	BA 999.05	Transfer ke Daerah *)	3
	BA 999.06	Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain *)	2.474
		Total Satuan Kerja	23.070

*) BA tersebut merupakan entitas pelaporan, dan laporan keuangan BA tersebut dikonsolidasikan menjadi LKBUN.

LKPP Tahun 2009 ini mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut:

- ❖ transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan stimulus fiskal dan dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas

pembantuan;

- ❖ transaksi pelaksanaan APBN pada beberapa unit-unit fiskal register/kuasi organisasi Pemerintah, seperti pada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam), Otorita Asahan, LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan LPP Radio Republik Indonesia (RRI); dan
- ❖ transaksi keuangan terbatas dari unit-unit fiskal register yang tidak menggunakan dana APBN, namun mengelola aset Pemerintah, seperti Badan Pengelola Minyak dan Gas (BPMIGAS), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BP3 Taman Mini Indonesia.

LKPP Tahun 2009 ini tidak mencakup entitas:

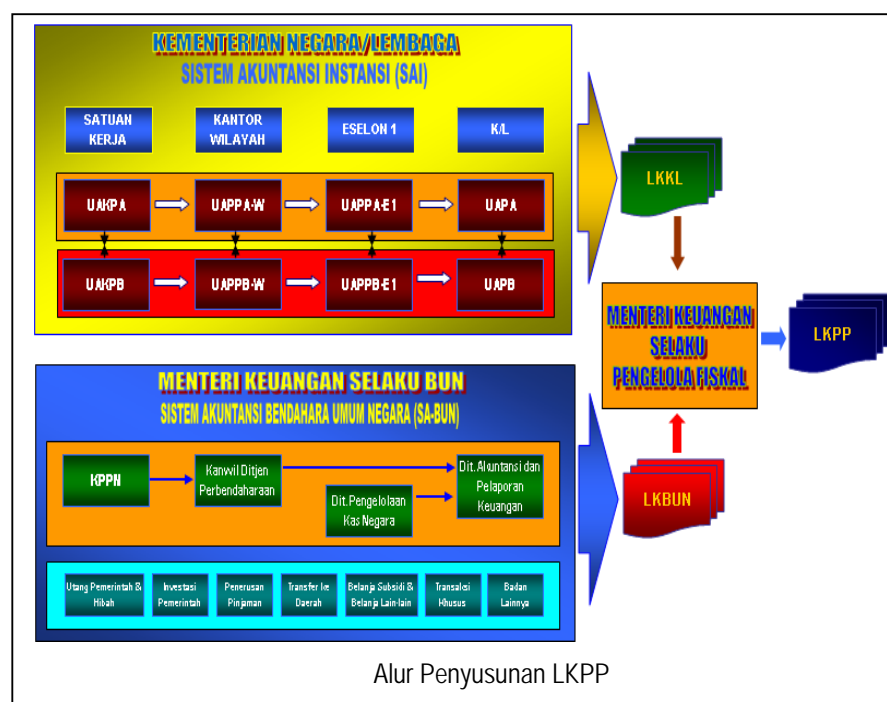
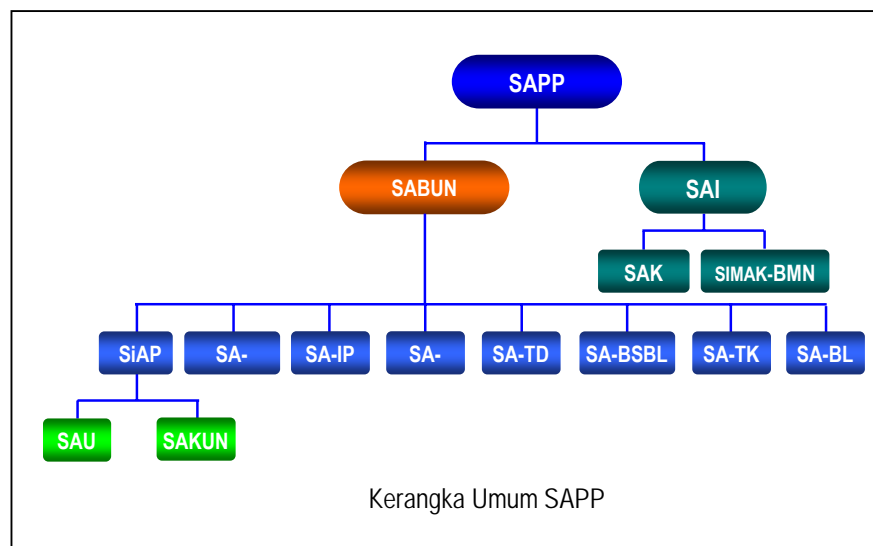
- ❖ Pemerintahan Daerah;
- ❖ Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- ❖ Badan Hukum Milik Negara (BHMN);
- ❖ Badan Hukum Pendidikan (BHP); dan
- ❖ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun, penyertaan modal (investasi) pemerintah pada perusahaan negara (BUMN dan Non BUMN), BHMN, dan BHP, nilainya disajikan sebagai investasi pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/Badan Lainnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat K/L (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan neraca.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H), Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP), Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD), Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL), Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK), dan Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL). SiAP terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN diselenggarakan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat, sedangkan SAU diselenggarakan untuk membukukan data yang akan direkonsiliasi dengan data yang dibukukan SAI. Selain Laporan Arus Kas, Menteri Keuangan selaku BUN juga menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca atas transaksi Utang Pemerintah, Hibah, Penerusan Pinjaman, Investasi/Penyertaan Modal, Transfer ke Daerah, Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain, dan Pembiayaan yang dikonsolidasikan ke dalam LKPP.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.



SAPP dirancang untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Laporan Realisasi APBN disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

- ❖ Angka realisasi Pendapatan Negara dan Hibah yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2009 berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh

Menteri Keuangan selaku BUN sebagai pembukuan intrakomtabel atas seluruh penerimaan uang yang riil masuk ke Kas Negara. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) data BUN.

- ❖ Angka realisasi Belanja Negara yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2009 berdasarkan kompilasi realisasi belanja negara seluruh entitas K/L, di mana pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Sedangkan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh BUN (data SAU) berfungsi sebagai penguji (kontrol) data belanja K/L.
- ❖ Angka realisasi Pembiayaan yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2009 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagai pembukuan intrakomtabel atas seluruh penerimaan uang yang riil masuk ke Kas Negara.

2. Neraca

Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan kompilasi Neraca K/L, Neraca BUN, dan unit register, serta unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset pemerintah. Khusus data mengenai Kas Umum Negara dan Non Anggaran, Penyertaan Modal Negara, Surat Berharga Negara, dan utang luar negeri didasarkan pada Neraca BUN yang disusun melalui SA-BUN. Sedangkan khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan Arus Kas TA 2009 mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN (rekening 502.000000, rekening 600.502411, dan rekening 600.502111), termasuk transaksi pendapatan dan belanja operasional pada BLU. Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan SAKUN yang merupakan subsistem dari SiAP.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, dan Laporan Arus Kas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

*Pendapatan diakui
pada saat kas diterima
pada KUN*

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LKPP Tahun 2009 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian,

dalam penyusunan LKPP telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN

Pengecualian terhadap azas bruto pada penyusunan LKPP Tahun 2009 adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi (600.000.411) dan Rekening Panas Bumi (508.000.084). Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai, karena penerimaan migas pada rekening 600.000.411 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *under/over lifting*, *Domestic Market Obligation* (DMO) *fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penerimaan migas pada rekening 600.000.411 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084 setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan". Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

(3) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan

(4) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas serta diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan.

Kas dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke kas negara disajikan sebagai Kas di Bendahara Penerimaan. Bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Penerimaan disajikan sebagai bagian dari Kas di Bendahara Penerimaan.

Bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Pengeluaran, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, serta kas penerimaan hibah dan dana yang berasal dari SPM-LS Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan disajikan sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas.

Kas di BLU yang merupakan dana kelolaan yang belum digulirkan disajikan sebagai Aset Lainnya.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang PNBP, Piutang Pajak, Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan piutang lainnya yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam piutang lainnya adalah piutang bunga atas penerusan pinjaman Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD). Pada LKPP Tahun 2009 ini, Pemerintah belum menerapkan kebijakan pencadangan/penyisihan atas piutang, namun untuk penyajian Piutang Pajak sudah memperhitungkan penyisihan.

Nilai persediaan didasarkan pada perhitungan fisik pada tanggal pelaporan. Termasuk dalam persediaan adalah barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2009 meliputi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek yang disajikan pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2009 adalah investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang ada di BLU.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruskanpinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA), dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD, dan Pemda. Saldo penerusan pinjaman yang berasal dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) sebelum tahun 2009, masih disajikan sebagai Investasi Non Permanen. Namun, saldo penerusan pinjaman yang berasal dari NPPP tahun 2009 dan setelah tahun 2009 disajikan sebagai Aset Lainnya.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.
- Seluruh pencairan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) eks dana Surat Utang (SU) 005 yang disalurkan melalui dua pola sebagai berikut:
 - a. Dana SU-005 dipinjamkan langsung oleh Pemerintah kepada Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) yang ditunjuk oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan dalam rangka pendanaan KUMK; dan
 - b. Dana SU-005 dipinjamkan kepada BUMN Pengelola dan

selanjutnya diteruskan kepada LKP yang ditunjuk oleh BUMN Pengelola yang bersangkutan dalam rangka pendanaan KUMK.

Selain itu, dana kelolaan beserta nilai tambahnya yang dikelola oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) di Kementerian Keuangan yang berasal dari BA 099-Penyertaan Modal Negara (sekarang BA 999.03-Investasi Pemerintah) disajikan sebagai investasi non permanen dalam LKPP, sesuai dengan PSAP Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi Paragraf 16. Sedangkan dana kelolaan BLU yang masih berupa kas disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan pada pos Aset Lainnya.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara/Badan Hukum Milik Negara (BUMN/BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. Termasuk dalam investasi permanen adalah nilai ekuitas (kekayaan bersih) Bank Indonesia (BI).

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. Aset-aset yang berstatus BPYBDS yang telah dilaporkan pada neraca K/L akan dieliminasi pada saat konsolidasi LKPP.

Penyertaan Pemerintah pada lembaga internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN/BHMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya (*cost method*).

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

SAP telah mengatur mengenai depresiasi, tapi aset tetap dalam LKPP ini belum didepresiasi.

Aset lainnya terdiri dari TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Penjaminan, dan Aset Lain-lain.

c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L per 31 Desember 2009 dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2009.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran.

Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi diperlakukan sebagai penambah nilai Aset Tetap.

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, Pemerintah menetapkan bahwa dalam penyusunan LKPP Tahun 2009, seluruh aset tetap yang dikelola oleh K/L selaku pengguna barang **belum disusutkan/didepresiasi**. Hal ini disebabkan antara lain belum diselesaikannya inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap pada seluruh K/L secara nasional.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Penjaminan, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan Tagihan TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti yang disimpan pada rekening cadangan subsidi/PSO, rekening cadangan Dana Bagi Hasil, rekening dana reboisasi, rekening penjaminan, rekening khusus, Dana Abadi Umat, dan kas besi perwakilan RI di luar negeri.

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan Tim Koordinasi, dan aset pemerintah yang digunakan oleh KKKS minyak dan gas bumi (aset KKKS). Di samping itu, piutang macet K/L yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Aset KKKS yang disajikan pada LKPP Tahun 2009 adalah berupa tanah yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian yang secara substansi nilai dan status telah jelas pada Pemerintah. Aset KKKS berupa aset non tanah dan persediaan tidak disajikan karena belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, belum dapat diidentifikasi nilai *cost recovery*-nya, serta belum ada penyerahan kepada Pemerintah. Perlakuan ini berubah dibandingkan LKPP Tahun 2008 yang menyajikan aset non tanah dan persediaan, walaupun jelas nilai dan statusnya. Aset KKKS berupa aset non tanah dan persediaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan dan piutang penerusan pinjaman yang berasal dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) tahun 2009 dan setelah tahun 2009.

(5) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber

pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga/Biaya Pinjaman (*accrued interest*), Utang Subsidi, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan Utang Jangka Pendek Lainnya. SPN adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan.

Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2009 disajikan sebagai bagian lancar.

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000.411 dan 508.000.084, seperti *under lifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada kontraktor kontrak kerjasama berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama BPMIGAS.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rates bonds*, *variable rates bonds*, *zero coupon bonds*, *international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Fixed Rate (FR) Bonds adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Variable Rate (VR) Bonds adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka 3 (tiga) bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Zero Coupon (ZC) Bonds adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual

secara diskonto. Berdasarkan posisi akhir tahun 2009, terdapat 3 seri ZC dengan outstanding berkisar dari Rp1,36 triliun sampai dengan Rp5,8 triliun dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Zero Coupon dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI) merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU002, SU004, SU007, dan SRBI01

SU-002 dan SU-004 adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).

SU-007 adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tunggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. angsuran pokok SU007 diamortisasi secara semiannually dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).

SRBI-01 adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI01 adalah tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik 2 (dua) kali setahun.

International Bonds adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya aqad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

*Kewajiban kontinjensi
diungkapkan dalam
catatan penting
lainnya*

*Ekuitas Dana terdiri
dari Ekuitas Dana
Lancar dan Ekuitas*

Dana Investasi

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs rupiah terhadap USD yang terakhir.

Kurs Valuta Asing

SAP telah mengatur penyajian utang kepada pegawai (*past service liability*). Namun demikian, penyajian utang Pemerintah di neraca belum mencakup utang kepada pegawai terkait kompensasi Pemerintah sebagai pemberi kerja, kepada pegawai sebagai pekerja atas jasa yang telah diberikan. *Past service liability (unfunded liability)* berupa pensiun dan tunjangan hari tua (THT) diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada LKPP ini.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

(6) Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

Utang kontinjensi pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan pembangunan Proyek Monorail Jakarta, tanggungan kelebihan biaya pengadaan tanah sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan pada proyek pembangunan jalan tol, dan jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan utang kontinjensi Pemerintah yang bersifat implisit seperti intervensi Pemerintah apabila perbankan mengalami kebangkrutan belum diungkapkan dalam LKPP.

(7) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

(8) Kurs Valuta Asing

Menurut PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 62, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

- Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a. transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
 - b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Dalam penyusunan LKPP Tahun 2009, transaksi dalam mata uang USD dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang USD tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Hal ini disebabkan Pemerintah memiliki rekening dalam mata uang USD di BI, sehingga dalam melakukan transaksi Pemerintah tidak harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Namun, transaksi dalam mata uang asing selain USD dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tunai (*spot rate*) pada tanggal transaksi. Hal ini disebabkan Pemerintah tidak memiliki rekening dalam mata uang asing selain USD di BI, sehingga dalam melakukan transaksi, Pemerintah harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kurs tengah BI (Rupiah terhadap 1 USD) pada 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp10.950 dan Rp9.400.

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. LKPP Tahun 2009 ini menyajikan selisih kurs atas kewajiban dalam mata uang asing sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan dalam Neraca.

Selisih kurs terkait dengan bagian lancar utang luar negeri disajikan pada ekuitas dana lancar, sedangkan selisih kurs yang terkait dengan utang jangka panjang luar negeri dan SBN Valas disajikan pada ekuitas dana investasi. Penyajian selisih kurs pada ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi untuk jangka panjang luar negeri dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang setiap utang per mata uang asing.

(9) Transaksi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP)

BM-DTP adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh Pemerintah dengan pagu

anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Transaksi BM-DTP merupakan transaksi non kas, sehingga hanya dicatat dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran dan tidak dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Arus Kas.

(10) Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua

Sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN TA 2009, Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrua. Informasi tentang pendapatan dan belanja secara akrua dimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapan akuntansi berbasis akrua yang dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih Pemerintah dalam penganggaran berbasis kas. Menindaklanjuti amanat UU tersebut, Pemerintah menyajikan Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua sebagai suplemen LKPP.

(11) Aset/kewajiban Eks BRR NAD-Nias

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah 4 (empat) tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR-NAD Nias sebagai suatu organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2009, Neraca Likuidasi BRR NAD-Nias belum selesai disusun karena Neraca Penutup BRR NAD-Nias belum selesai diaudit oleh BPK, sehingga aset/kewajiban eks BRR NAD-Nias yang disajikan pada LKPP Tahun 2009 ini adalah aset/kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008.

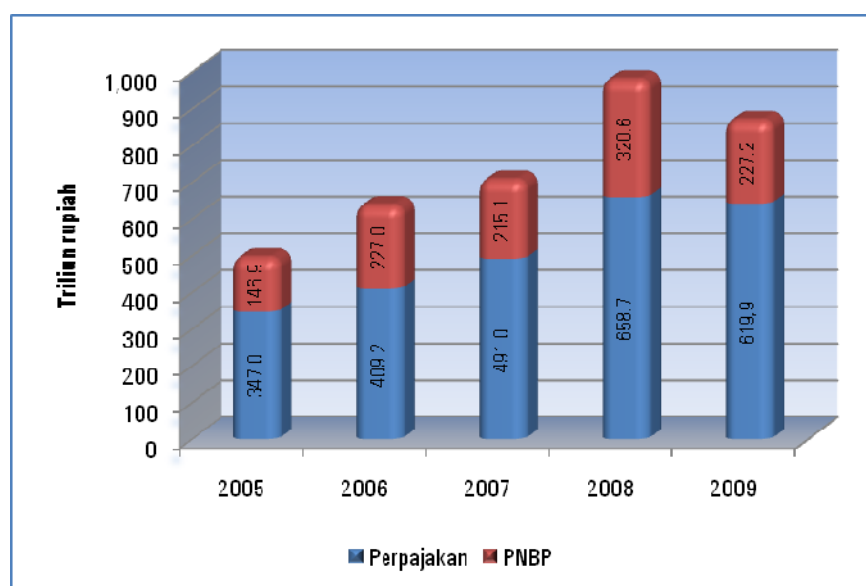
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2009 adalah sebesar Rp848.763.235.195.483, yang berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp619.922.172.626.415, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp227.174.419.064.671, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp1.666.643.504.397.

Untuk pertama kalinya dalam periode lima tahun terakhir Pendapatan Negara mengalami penurunan terutama PPh Migas dan PNBP sektor migas yang disebabkan oleh turunnya harga minyak.

Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP pada TA 2009 mengalami penurunan, hal ini berbeda dengan tren 5 (lima) tahun sebelumnya yang selalu menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana terlihat pada Grafik 31.

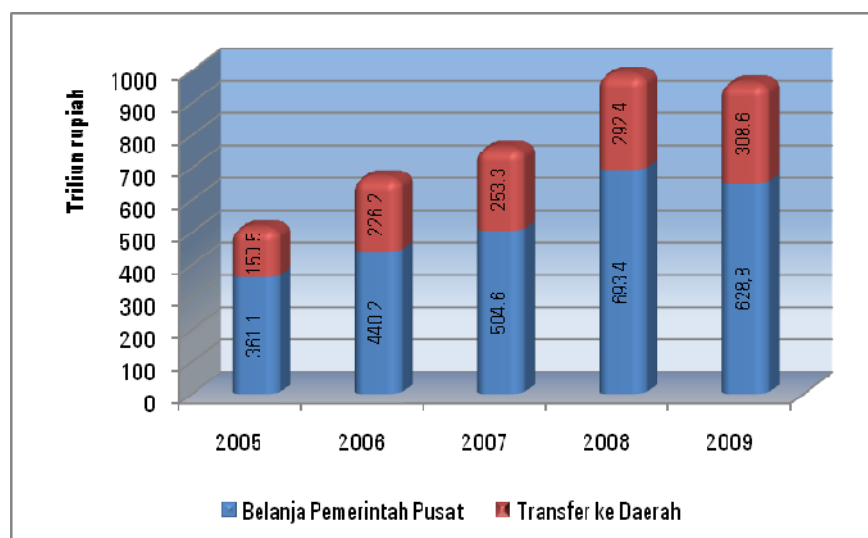


Grafik 31: Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2005-2009

Sementara itu, Belanja Negara dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja negara dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja negara, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting kenegaraan. Belanja Negara meliputi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Transfer ke Daerah bertujuan untuk mendukung dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2009 sebesar Rp937.382.019.569.767 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp628.812.419.834.203, Transfer ke Daerah sebesar Rp308.585.231.982.937, dan terdapat Suspen sebesar minus Rp15.632.247.373. Realisasi Belanja Negara tersebut termasuk realisasi [anggaran program stimulus fiskal](#) sebesar [Rp10.764.480.367.371](#).

Perkembangan realisasi Belanja Negara selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana terlihat pada Grafik 32.



Grafik 32: Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2005-2009

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp848.763.235.195.483 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp937.382.019.569.767, maka terjadi Defisit Anggaran pada TA 2009 sebesar Rp88.618.784.374.284.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2009 adalah sebesar Rp112.583.311.415.415, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp124.999.182.482.469 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp12.415.871.067.054. Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) tersebut termasuk realisasi anggaran program stimulus fiskal sebesar Rp500.000.000.000.

Realisasi Pembiayaan Neto yang melebihi Defisit Anggaran mengakibatkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2009 sebesar Rp23.964.527.041.131.

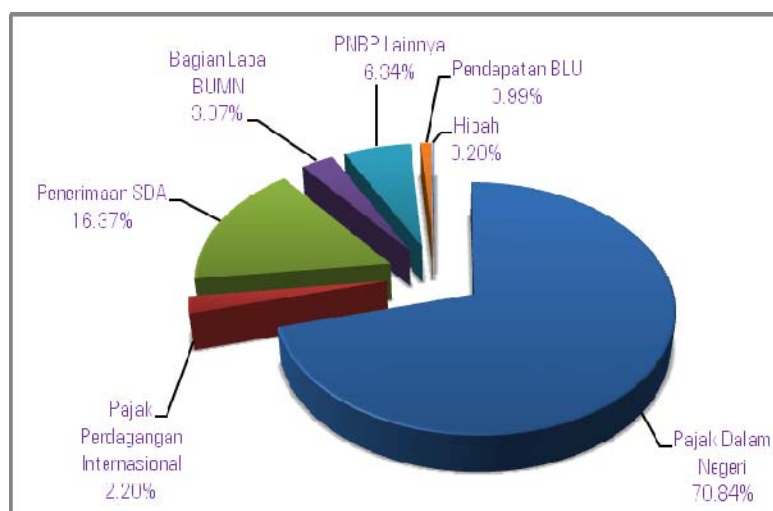
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah Rp848,76 triliun

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2009 adalah sebesar Rp848.763.235.195.483, berarti mencapai 97,45 persen dari APBN-P sebesar Rp870.998.991.279.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBPN, dan Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2009 dapat dilihat pada Grafik 33.



Grafik 33: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2009

Penerimaan
perpajakan
Rp619,92 triliun

B.2.1.1. Penerimaan Perpajakan

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2009 adalah sebesar Rp619.922.172.626.415 atau mencapai 95,09 persen dari APBN-P sebesar Rp651.954.823.000.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2009 lebih kecil Rp38.778.618.037.821 atau 5,89 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2008. Penurunan Penerimaan Perpajakan pada TA 2009 disebabkan oleh penurunan Pajak Penghasilan (PPH), Bea Masuk, dan Pajak/Pungutan Ekspor. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional.

Penerimaan pajak
dalam negeri
Rp601,25 triliun

B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2009 adalah sebesar Rp601.251.757.069.894 atau mencapai 95,15 persen dari APBN-P sebesar Rp631.931.723.000.000. Hal ini berarti realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2009 lebih kecil Rp21.106.934.243.347 atau 3,39 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2008. Besarnya realisasi Pajak Dalam Negeri ini adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
PPh Migas	50.043.674.210.538	77.018.903.127.805
PPh Nonmigas	267.539.660.156.223	249.837.362.107.152
PPh Fiskal	31.653.944.863	641.450.975.798
PPN dan PPnBM	193.067.541.998.775	209.647.424.433.640
PBB	24.270.191.705.513	25.354.279.618.301
BPHTB	6.464.517.415.416	5.573.095.008.708
Cukai	56.718.468.581.956	51.251.752.624.651
Pajak Lainnya	3.116.049.056.610	3.034.423.417.186
Jumlah	601.251.757.069.894	622.358.691.313.241

Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri tersebut termasuk penerimaan atas Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) dalam bentuk Subsidi Pajak (*Lihat Catatan B.2.2.1. Belanja Subsidi*), yaitu PPh sebesar Rp2.836.295.455.367, PPN sebesar Rp4.834.982.670.647, dan BPHTB sebesar Rp495.139.763.106.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

Pajak perdagangan
internasional
Rp18,67 triliun

B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2009 adalah sebesar Rp18.670.415.556.521, atau mencapai 93,24 persen dari APBN-P sebesar Rp20.023.100.000.000. Hal ini berarti Pajak Perdagangan Internasional TA 2009 lebih kecil Rp17.671.683.794.474 atau 48,63 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2008. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional adalah (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Bea Masuk	18.105.460.808.196	22.763.778.701.766
Pajak/Pungutan Ekspor	564.954.748.325	13.578.320.649.229
Jumlah	18.670.415.556.521	36.342.099.350.995

PNBP Rp227,17 triliun

Dalam realisasi Penerimaan Bea Masuk TA 2009, termasuk Penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) sebesar Rp7.187.562.916.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP TA 2009 adalah sebesar Rp227.174.419.064.671 atau mencapai 104,19 persen dari APBN-P sebesar Rp218.037.632.535.000. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2009 lebih kecil Rp93.430.210.498.009 atau 29,14 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2008. Penurunan realisasi PNBP ini disebabkan oleh penurunan Pendapatan Minyak Bumi sebagai imbas turunnya harga minyak. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; (iii) PNBP Lainnya; dan (iv) Pendapatan BLU.

Penerimaan SDA Rp138,96 triliun

B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2009 adalah sebesar Rp138.959.235.946.131, atau mencapai 100,22 persen dari APBN-P sebesar Rp138.653.364.017.000. Hal ini berarti Penerimaan SDA TA 2009 lebih kecil Rp85.503.770.893.074 atau 38,09 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2008.

Penurunan Penerimaan SDA terutama pada Pendapatan Minyak Bumi yang disebabkan oleh turunnya harga rata-rata minyak mentah Indonesia, di mana pada tahun 2008 rata-rata harga minyak mentah Indonesia mencapai USD101,31 per barrel sementara pada tahun 2009 harganya turun hingga pada level USD 58,55 per barrel.

Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Minyak Bumi	90.055.956.098.738	169.022.232.949.516
Pendapatan Gas Bumi	35.696.003.511.600	42.594.738.596.246
Pendapatan Pertambangan Umum	10.369.410.930.584	9.511.320.109.439
Pendapatan Kehutanan	2.345.432.302.758	2.315.527.436.916
Pendapatan Perikanan	92.039.435.895	77.803.662.790
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	400.393.666.556	941.384.084.298
Jumlah	138.959.235.946.131	224.463.006.839.205

Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Rp26,05 triliun

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

B.2.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2009 adalah sebesar Rp26.049.543.069.440 atau 91,04 persen dari APBN-P sebesar Rp28.614.667.131.000. Hal ini berarti Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN TA 2009 lebih kecil Rp3.038.827.046.309 atau turun 10,45 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2008.

Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Pend. Laba BUMN Perbankan	3.309.326.563.398	4.505.885.921.805
Pend. Laba BUMN Non Perbankan	22.740.216.506.042	24.582.484.193.944
Jumlah	26.049.543.069.440	29.088.370.115.749

Penurunan Pendapatan Pemerintah atas Laba BUMN TA 2009 antara lain disebabkan:

- Untuk sektor Perbankan, penurunan Pendapatan Laba BUMN sebesar 26,55% terkait dengan adanya tekanan krisis ekonomi global yang telah mempengaruhi laba BUMN perbankan, diantaranya terkait dengan hal-hal sebagai berikut:
 - Adanya antisipasi peningkatan *Non Performing Loans (NPL)* menjadi komponen pengurang laba BUMN perbankan sehubungan dengan cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif, akan menyebabkan Laba BUMN berkurang.
 - Adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum yang mengurangi laba BUMN perbankan.

Selain itu, Pemerintah melakukan penyesuaian *payout ratio* terhadap beberapa BUMN perbankan yang membutuhkan tambahan *capital expenditure* untuk kegiatan investasi. Kebijakan penyesuaian *payout ratio* BUMN perbankan tersebut akan dikompensasi melalui upaya penyaluran kredit dengan tingkat suku bunga rendah dan pengurangan dana simpanan dalam bentuk SBI. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mendorong pertumbuhan kredit di tengah perlemahan perekonomian.

- Untuk sektor Non Perbankan, penurunan Pendapatan Laba BUMN sebesar 7,49% disebabkan penerimaan Laba Dividen dari PT Pertamina tahun 2009 hanya terealisasi sebesar Rp10.472,49 miliar, sisanya sebesar Rp905 miliar belum dibayar sampai dengan akhir tahun 2009, serta volatilitas nilai tukar Rupiah pada tahun 2009 yang berdampak pada berkurangnya perolehan laba BUMN.

Daftar 10 besar BUMN penghasil dividen TA 2009 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5
Daftar 10 Besar BUMN Penghasil Dividen TA 2009

No.	BUMN	Jumlah (Rp)	% dari Total Pend. Laba BUMN
1	PT Pertamina	10.472.488.776.340	40,20%
2	PT Telkom Tbk	3.339.660.084.397	12,82%
3	PT Freeport Indonesia	2.086.889.865.000	8,01%
4	Bank Mandiri Tbk	1.514.242.415.000	5,81%
5	Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.504.300.000.000	5,77%
6	PT Semen Gresik Tbk	826.510.665.140	3,17%
7	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	702.725.762.253	2,70%
8	PT Batubara Bukit Asam Tbk	655.862.707.500	2,52%
9	PT PELINDO II	559.748.841.379	2,15%
10	PT Timah Tbk	436.266.350.000	1,67%
	Total 10 BUMN	22.098.695.467.009	84,83%

*PNBP Lainnya
Rp53,80 triliun*

B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBPN Lainnya TA 2009 adalah sebesar Rp53.796.110.943.059 atau 119,87 persen dari APBN-P sebesar Rp44.878.693.567.000. Hal ini berarti realisasi PNBPN Lainnya TA 2009 lebih kecil Rp9.522.847.478.560 atau turun 15,04 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2008. Realisasi PNBPN Lainnya ini terdiri dari (dalam Rp):

*Pendapatan BLU
Rp8,37 triliun*

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Penjualan dan Sewa	16.486.605.692.279	19.921.267.890.997
Pendapatan Jasa	20.373.389.201.155	16.109.119.953.280
Pendapatan Bunga	2.739.388.420.831	498.956.999.716
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	163.745.970.532	483.533.775.811
Pendapatan Pendidikan	3.257.742.968.625	4.144.460.220.207
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	635.620.302.960	581.543.822.550
Pendapatan Iuran dan Denda	605.357.951.326	648.294.535.990
Pendapatan Lain-lain	9.534.260.435.351	20.931.781.223.068
Jumlah	53.796.110.943.059	63.318.958.421.619

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

B.2.1.2.4. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2009 adalah Rp8.369.529.106.041 atau 142,08 persen dari APBN-P sebesar Rp5.890.907.820.000. Hal ini berarti realisasi Pendapatan BLU TA 2009 lebih besar Rp4.635.234.919.934 atau naik 124,13 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2008. Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari (dalam Rp):

*Penerimaan Hibah
Rp1,67 triliun*

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	7.669.417.926.128	3.479.603.274.201
Pendapatan Hibah BLU	46.050.792.391	-
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	206.485.914.133	165.335.270.375
Pendapatan BLU Lainnya	447.574.473.389	89.355.641.531
Jumlah	8.369.529.106.041	3.734.294.186.107

*Belanja Negara
Rp937,38 triliun*

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

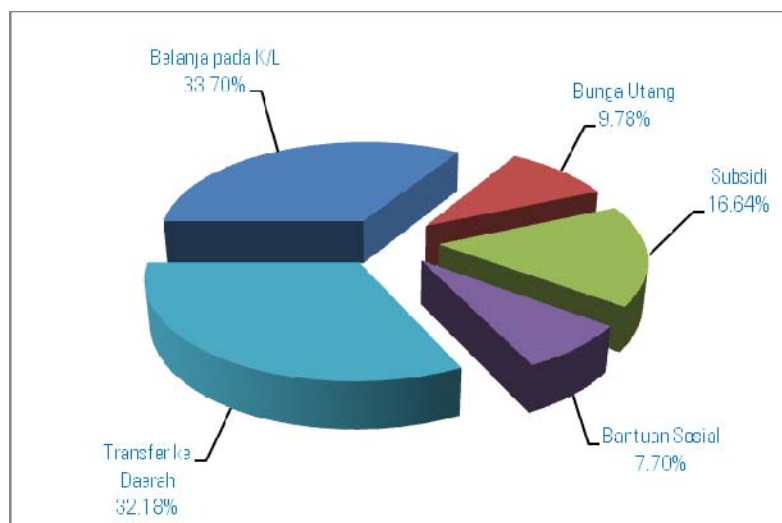
Realisasi Penerimaan Hibah TA 2009 adalah sebesar Rp1.666.643.504.397 atau 165,58 persen dari APBN-P sebesar Rp1.006.535.744.000. Hal ini berarti Penerimaan Hibah TA 2009 lebih kecil Rp637.369.594.824 atau turun 27,66 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2008. *Lihat Catatan Penting Lainnya.*

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

B.2.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara TA 2009 adalah sebesar Rp937.382.019.569.767 atau 93,66 persen dari APBN-P sebesar Rp1.000.843.921.682.000. Belanja Negara TA 2009 lebih kecil Rp48.348.731.516.846 atau turun 4,90 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2008. Realisasi Belanja Negara terdiri dari (i) Belanja Pemerintah Pusat dan (ii) Transfer ke Daerah.

Berdasarkan alokasi peruntukannya, komposisi Belanja Negara TA 2009 dapat disajikan pada Grafik 34.



Grafik 34: Komposisi Alokasi Belanja Negara TA 2009

Alokasi untuk kementerian negara/lembaga (K/L), antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2009 adalah sebesar Rp628.812.419.834.203 atau 90,93 persen dari APBN-P sebesar Rp691.535.743.610.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2009 lebih kecil Rp64.543.572.245.675 atau turun 9,31 persen dari Realisasi TA 2008.

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

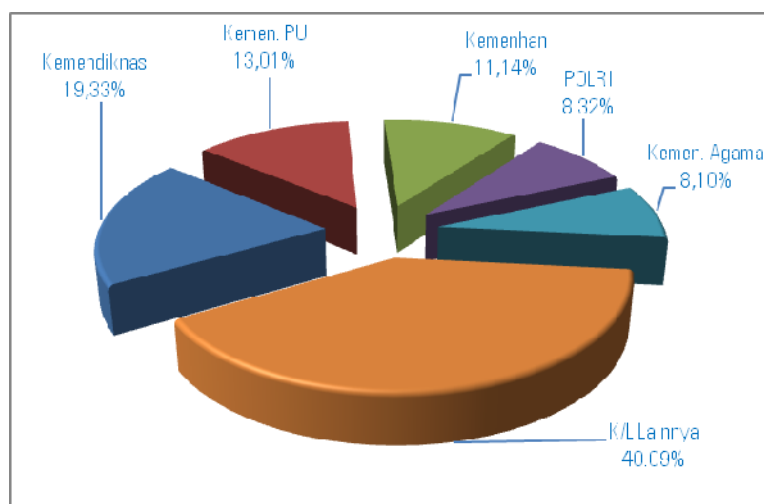
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat menurut Bagian Anggaran (BA) terbagi menjadi BA Bendahara Umum Negara (BA-BUN) dan BA Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2009 pada BA 999 (BA-BUN) adalah sebesar Rp320.756.053.088.883 atau 51,01 persen dan pada BA K/L sebesar Rp308.056.366.745.320 atau 47,37 persen.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2009 pada BA K/L terbesar adalah Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp59.558.589.918.948 atau 19,33 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L, atau 9,16 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat.

Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 dalam TA 2009 dapat dilihat pada Grafik 35.

Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi



Grafik 35: Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2009

Laporan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam **Daftar 2**.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi pada TA 2009 dan 2008 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 7.

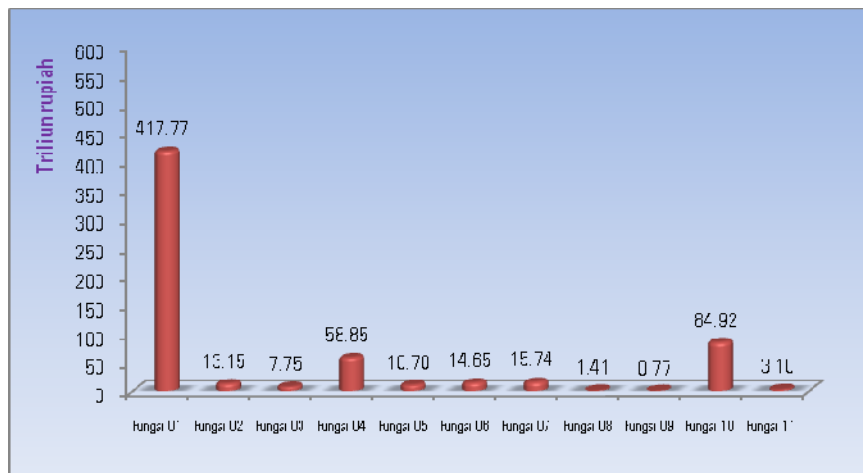
Tabel 7
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2009 dan 2008
(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
01	Pelayanan Umum	417.771.920.565.487	534.568.682.409.369
02	Pertahanan	13.145.658.918.442	9.158.461.735.835
03	Ketertiban dan Keamanan	7.753.909.923.164	7.019.192.561.913
04	Ekonomi	58.845.148.894.736	50.484.770.309.021
05	Lingkungan Hidup	10.703.048.446.259	5.315.103.004.522
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	14.648.539.216.890	12.448.653.570.344
07	Kesehatan	15.743.133.970.199	14.038.943.551.628
08	Pariwisata dan Budaya	1.406.162.235.677	1.293.674.296.484
09	Agama	773.459.042.026	745.676.710.392
10	Pendidikan	84.919.493.686.757	55.297.963.120.090
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	3.102.255.711.903	2.986.353.813.893
	Total *)	628.812.419.834.203	693.355.992.079.878

*) Termasuk realisasi sebesar minus Rp310.777.337 pada TA 2009 dan minus Rp1.483.003.613 pada TA 2008 yang tidak dapat diketahui kode fungsinya.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2009 yang terbesar digunakan untuk Fungsi Pelayanan Umum yaitu sebesar Rp417.771.920.565.487 atau 66,44 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat, sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 36.

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja



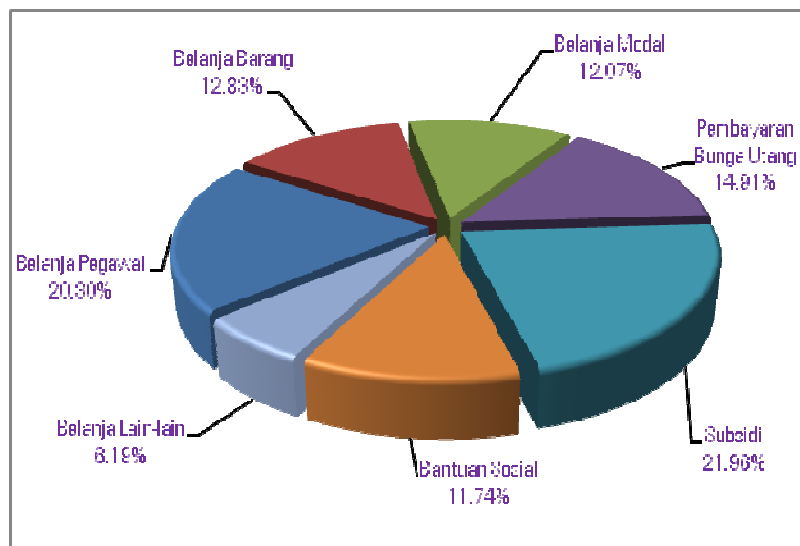
Grafik 36: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2009

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Fungsi dapat dilihat dalam Daftar 2.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 37.

*Belanja Pegawai
Rp127,67 triliun*



Grafik 37: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis TA 2009

*Belanja Barang
Rp80,67 triliun*

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2009 adalah sebesar Rp127.669.748.683.930 atau 95,48 persen dari APBN-P sebesar Rp133.709.200.001.500. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2009 lebih besar Rp14.839.873.160.141 atau naik 13,15 persen dari realisasi TA 2008. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	36.225.865.653.994	31.365.119.645.847
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	33.234.829.816.559	29.708.942.979.981
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	690.802.202.799	687.753.813.438
Belanja Gaji Dokter PTT	348.126.250.000	349.393.395.000
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	154.169.383.193	103.294.411.028
Belanja Honorarium	1.941.403.493.806	7.187.769.317.290
Belanja Lembur	391.846.042.842	298.942.454.972
Belanja Vakasi	229.888.017.283	279.177.392.699
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	5.932.860.284.322	5.546.193.118.866
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	46.845.082.652.853	36.083.577.322.048
Belanja Asuransi Kesehatan	1.390.972.995.080	1.022.149.284.620
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	131.075.484.000	131.075.484.000
Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dep. Hub. Pada PT KAI	152.826.407.199	66.486.904.000
Jumlah	127.669.748.683.930	112.829.875.523.789

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2009 adalah sebesar Rp80.667.925.311.049 atau 94,39 persen dari APBN-P sebesar Rp85.463.999.998.500. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2009 lebih besar Rp24.704.452.892.110 atau naik 44,14 persen dari Realisasi TA 2008. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut (dalam Rp):

*Belanja Modal
Rp75,87 triliun*

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Belanja Barang Operasional	19.383.210.565.028	17.164.304.009.026
Belanja Barang Non Operasional	23.643.232.204.400	11.188.633.047.361
Belanja Jasa	10.388.805.299.226	9.041.116.782.270
Belanja Pemeliharaan	6.910.170.300.648	4.906.538.593.629
Belanja Perjalanan DN	13.614.084.449.797	9.926.570.333.706
Belanja Perjalanan LN	1.544.661.594.161	1.201.778.530.043
Belanja Barang BLU	5.183.760.897.789	2.534.531.122.904
Jumlah	80.667.925.311.049	55.963.472.418.939

Belanja Barang BLU sebesar Rp5.183.760.897.789 terdiri dari:

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.938.043.400.317	1.124.056.074.470
Belanja Barang	1.994.450.012.080	1.138.569.925.203
Belanja Jasa	218.906.954.863	44.362.417.657
Belanja Pemeliharaan	241.276.720.907	82.618.004.069
Belanja Perjalanan	88.438.375.713	16.647.010.276
Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya	702.645.433.909	128.277.691.229
Total	5.183.760.897.789	2.534.531.122.904

B.2.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2009 adalah sebesar Rp75.870.754.036.420 yang berarti 103,39 persen dari APBN-P sebesar Rp73.381.514.544.500. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2009 lebih tinggi Rp3.098.277.005.268 atau naik 4,26 persen dari Realisasi TA 2008. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Pembayaran Bunga Utang Rp93,78 triliun

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Belanja Modal Tanah	1.736.542.685.303	1.440.073.011.841
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.146.954.953.487	19.990.419.918.864
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.289.266.576.469	13.849.430.018.881
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	37.548.690.215.824	31.511.280.416.297
Belanja Pemeliharaan yang Dikapitalisasi	0	1.058.519.998.511
Belanja Modal Fisik Lainnya	2.428.958.869.161	2.865.220.648.689
Dana Bergulir	0	1.825.712.210.400
Belanja Modal BLU	720.340.736.176	231.820.807.669
Jumlah	75.870.754.036.420	72.772.477.031.152

Realisasi Belanja Modal yang melebihi 3,14 persen dari APBN-P disebabkan adanya luncuran dan percepatan penarikan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, hibah baru yang belum ditetapkan dalam APBN, dan revisi/perubahan antar jenis belanja yang sesuai UU APBN-P TA 2009 dapat dilakukan oleh Pemerintah (lihat **Catatan Penting Lainnya**).

Belanja Modal BLU terdiri dari:

Belanja Subsidi Rp159,54 triliun

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Belanja Modal Tanah	50.638.238.956	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	353.585.006.446	174.021.305.654
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	297.554.949.750	45.265.704.744
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.056.865.650	96.695.000
Belanja Modal Fisik Lainnya	13.505.675.374	12.437.102.271
Total	720.340.736.176	231.820.807.669

B.2.2.1.4. Pembayaran Bunga Utang

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2009 adalah sebesar Rp93.782.062.890.134 yang berarti 85,58 persen dari APBN-P sebesar Rp109.590.059.288.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2009 lebih besar Rp5.352.255.043.236 atau naik 6,05 persen dari Realisasi TA 2008. Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2008 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Bunga dan Biaya SUN dan SBSN DN	62.699.051.770.028	58.977.831.579.583
Bunga dan Biaya SUN dan SBSN Valas	11.584.193.719.616	6.208.035.267.396
Bunga Pinjaman Luar Negeri	18.441.989.564.186	21.641.592.976.975
Biaya/Kewajiban Lainnya Pinjaman LN	-	693.213.930.000
Pembayaran Denda (Imbalan Bunga)	1.056.827.836.304	909.134.092.944
Jumlah	93.782.062.890.134	88.429.807.846.898

B.2.2.1.5. Subsidi

Realisasi Subsidi TA 2009 adalah sebesar Rp138.082.160.271.329 yang berarti 87,33 persen dari APBN-P sebesar Rp158.117.854.544.000. Realisasi Belanja Subsidi TA 2009 ini lebih kecil Rp137.209.293.902.600 atau turun 49,84 persen dari Realisasi TA 2008. Rincian realisasi Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Subsidi Premium	15.216.887.265.203	43.551.933.137.000
Subsidi Minyak Solar	10.439.461.737.208	44.056.881.348.000
Subsidi Minyak Tanah	11.480.104.459.718	47.607.321.799.000
Subsidi Elpiji	7.902.937.128.861	3.890.570.345.016
Subsidi Pangan	12.987.000.000.000	11.795.911.990.000
Subsidi Listrik	49.546.467.923.878	83.906.513.000.000
Subsidi Benih	1.597.202.452.230	985.248.967.000
Subsidi Pupuk	18.321.055.599.873	15.163.887.671.937
Subsidi Perawatan Beras	-	300.000.000.000
Subsidi Pengawasan Pupuk	7.976.846.509	17.568.618.940
Subsidi PPh	2.836.295.455.367	1.300.000.000.000
Subsidi PPN	4.834.982.670.647	19.714.630.640.803
Subsidi BM-DTP	7.187.562.916	3.573.882.791
Subsidi BPHTB	495.139.763.106	103.344.748.900
Subsidi Minyak Goreng	-	225.709.201.000
Subsidi PT KAI	514.771.498.849	688.415.000.000
Subsidi PELNI	600.000.000.000	850.000.000.000
Subsidi PT Pos dan Giro	174.998.848.000	150.000.000.000
Subsidi PSO Lainnya	49.659.492.612	40.700.000.000
Subsidi Bunga KPR	774.790.546.352	799.982.599.542
Subsidi Bunga Ketahanan Pangan	120.626.306.000	2.724.469.000
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	27.610.029.000	-
Subsidi Bunga Kredit Program lainnya	-	74.886.780.000
Subsidi Imbalan Jasa Penjamin KUR	143.172.494.000	61.649.975.000
Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	2.720.654.000	-
Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias	1.111.537.000	-
Jumlah	138.082.160.271.329	275.291.454.173.929

Belanja Hibah Rp0

Belanja Bantuan Sosial Rp73,81 triliun

Dalam realisasi Subsidi tersebut, terdapat pembayaran beberapa jenis subsidi yang dananya belum tersalurkan sampai dengan akhir TA 2009, dan ditempatkan pada rekening dana cadangan subsidi/PSO sebesar Rp8.301.052.226.909 (Lihat *Catatan C.2.25*). Penempatan dana cadangan tersebut dilakukan karena dokumen penagihan dari pihak penerima subsidi belum selesai diverifikasi. Setelah verifikasi selesai, maka dana cadangan subsidi tersebut akan dibayarkan kepada penerima. Rincian penempatan dana atas realisasi Subsidi adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Subsidi Premium	672.697.576.336
Subsidi Minyak Tanah	360.903.902.457
Subsidi Minyak Solar	509.086.127.020
Subsidi LPG	596.428.709.593
Subsidi Pangan	1.018.799.117.700
Subsidi Pupuk	4.238.172.212.781
Subsidi Benih	577.464.581.022
Subsidi PELNI	150.000.000.000

Belanja Lain-lain
Rp38,93 triliun

Subsidi PT KAI	133.750.000.000
Subsidi PT Pos dan Giro	43.750.000.000
Jumlah	8.301.052.226.909

B.2.2.1.6. Belanja Hibah

Pada TA 2009 ini belum terjadi realisasi Belanja Hibah. Belanja Hibah dalam APBN-P dianggarkan sebesar Rp31.578.201.000 untuk penerusan hibah kepada pemerintah daerah. Namun demikian, pemberian hibah dari K/L kepada daerah berupa barang diungkapkan pada *Catatan Penting Lainnya*.

B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2009 adalah sebesar Rp73.813.555.200.705 yang berarti 94,71 persen dari APBN-P sebesar Rp77.932.499.991.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2009 ini lebih besar Rp16.072.798.902.660 atau naik 27,84 persen dari Realisasi TA 2008. Rincian realisasi Bantuan Sosial adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM	4.430.598.244.500	3.854.327.887.827
Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/ Lembaga/Guru	43.937.607.762.546	28.087.421.885.113
Belanja Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga	3.993.054.369.577	3.535.238.762.941
Belanja Bantuan Beasiswa	4.986.085.220.991	3.425.801.851.202
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan	69.281.135.000	240.272.600.991
Belanja Lembaga Sosial Lainnya	16.396.928.468.091	18.597.693.309.971
Jumlah	73.813.555.200.705	57.740.756.298.045

Transfer ke Daerah
Rp308,59 triliun

B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2009 adalah sebesar Rp38.926.213.440.636 yang berarti 73,02 persen dari APBN-P sebesar Rp53.309.037.039.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2009 lebih besar Rp8.598.064.653.510 atau naik 28,35 persen dari Realisasi TA 2008. Rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Belanja untuk Rekonstruksi NAD-Nias	2.167.894.148.658	1.248.011.905
Belanja Pemilu/Sidang Tahunan	522.618.822.374	1.961.239.902.080
Belanja Cadangan Tunjangan beras PNS/TNI/Polri	2.560.316.000	12.302.535.600
Belanja Cadangan Dana Reboisasi	307.536.874.653	1.864.007.763.765
Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Kontijensi)	166.867.298.926	1.502.700.000
Belanja Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP	913.533.850.904	905.489.544.449
Belanja Dana Penunjang (PHLN)	333.169.450	-
Belanja Non Modal Otorita Batam	2.494.720.556	52.720.709.692
Jasa Surveyor	322.021.223.920	367.735.876.931
Jasa Perbendaharaan	7.908.981.849	5.555.019.355
Jasa Pelayanan Bank Operasional	-	653.182.350
Belanja TVRI	534.478.886.095	341.116.855.605
Belanja RRI	558.900.740.318	525.071.406.483
Belanja Pengembalian Penerimaan Hibah	-	10.356.393.697

Dana Perimbangan
Rp287,25 triliun

karena Pengeluaran <i>Ineligible</i>		
Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM	3.732.513.800.000	13.312.640.600.000
Belanja Lain-lain	29.686.550.606.933	10.966.508.285.214
Jumlah	38.926.213.440.636	30.328.148.787.126

DBH Rp76,13 triliun

B.2.2.2. Transfer ke Daerah

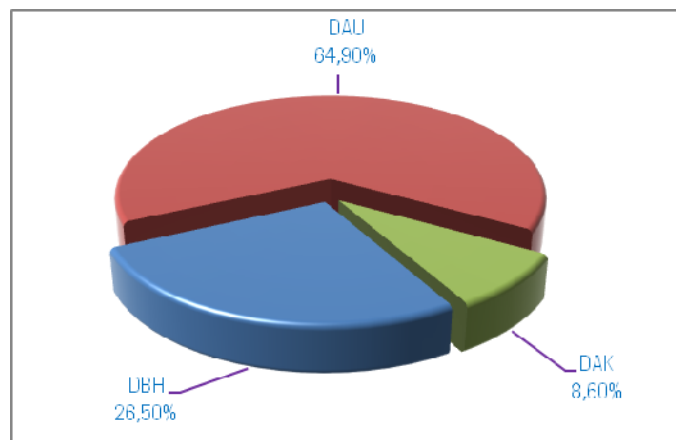
Realisasi Transfer ke Daerah TA 2009 adalah sebesar Rp308.585.231.982.937, yang berarti 99,77 persen dari APBN-P sebesar Rp309.308.178.072.000. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2009 ini lebih besar Rp16.151.751.367.682 atau naik 5,52 persen dari Realisasi TA 2008. Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

B.2.2.2.1. Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan TA 2009 adalah sebesar Rp287.251.462.978.937 yang berarti 100,77 persen dari APBN-P sebesar Rp285.053.052.916.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2009 ini lebih besar Rp8.536.804.112.337 atau naik 3,06 persen dari realisasi TA 2008. Dana Perimbangan terdiri dari (i) Dana Bagi Hasil (DBH), (ii) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (iii) Dana Alokasi Khusus (DAK). Komposisi realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Grafik 38.

DAU Rp186,41 triliun

DAK Rp24,71 triliun



Grafik 38: Komposisi Realisasi Dana Perimbangan TA 2009

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Daftar 3.

B.2.2.2.1.1. Dana Bagi Hasil

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2009 adalah sebesar Rp76.129.947.578.937, yang berarti 103,13 persen dari APBN-P sebesar Rp73.819.364.116.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2009 lebih kecil Rp2.290.219.716.663 atau turun 2,92 persen dari realisasi TA 2008. Terlampauinya realisasi DBH tersebut disebabkan oleh kenaikan DBH Perpajakan, terutama DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang didasarkan pada realisasi Penerimaan PBB yang melampaui anggarannya. Realisasi DBH terdiri dari Bagi Hasil Perpajakan sebesar Rp39.269.126.575.424, Bagi Hasil SDA sebesar Rp35.795.751.823.513 dan Bagi Hasil Cukai Rp1.065.069.180.000.

Dana Otonomi
Khusus dan
penyesuaian
Rp21,33 triliun

Dari realisasi DBH TA 2009 tersebut, terdapat DBH SDA Migas, Pertambangan

*Dana Otonomi
Khusus Rp9,53 triliun*

Umum, Panas Bumi, dan Kehutanan yang dananya belum tersalurkan kepada pemerintah daerah sampai dengan akhir TA 2009, dan ditempatkan pada rekening dana cadangan DBH TA 2009 sebesar Rp9.013.485.322.284 (Lihat **Catatan C.2.25**). Penempatan dana cadangan tersebut dilakukan karena masih dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi daerah penerima oleh DJPK, pemerintah daerah, dan pihak/kementerian terkait. Setelah rekonsiliasi/verifikasi selesai, maka dana cadangan DBH tersebut akan dibayarkan kepada pemerintah daerah.

B.2.2.2.1.2. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2009 adalah sebesar Rp186.414.100.000.000, yang berarti 100,00 persen dari APBN-P sebesar Rp186.414.100.000.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2009 lebih besar Rp6.906.955.129.000 atau naik 3,85 persen dari realisasi TA 2008.

B.2.2.2.1.3. Dana Alokasi Khusus

*Dana Penyesuaian
Rp11,81 triliun*

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2009 adalah sebesar Rp24.707.415.400.000, yang berarti 99,55 persen dari APBN-P sebesar Rp24.819.588.800.000. Hal ini berarti realisasi DAK TA 2009 lebih besar Rp3.920.068.700.000 atau naik 18,86 persen dari realisasi TA 2008.

DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah Daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Pada TA 2009, DAK dialokasikan untuk membantu Daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana perdesaan, dan perdagangan.

B.2.2.2.2. Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian

*Suspen sebesar minus
Rp15,63 miliar*

Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2009 adalah sebesar Rp21.333.769.004.000, yang berarti 87,96 persen dari APBN-P sebesar Rp24.255.125.156.000. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian terdiri dari (i) Dana Otonomi Khusus, dan (ii) Dana Penyesuaian.

B.2.2.2.2.1. Dana Otonomi Khusus

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2009 adalah sebesar Rp9.526.564.000.000, yang berarti 100 persen dari APBN-P sebesar Rp9.526.564.000.000. Dana Otonomi Khusus tersebut terdiri dari:

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)
Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi NAD	3.728.282.000.000
Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua	4.079.797.400.000
Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua Barat	1.718.484.600.000
Jumlah	9.526.564.000.000

B.2.2.2.2. Dana Penyesuaian

Realisasi Dana Penyesuaian TA 2009 adalah sebesar Rp11.807.205.004.000, yang berarti 80,17 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp14.728.561.156.000. Realisasi Dana Penyesuaian TA 2009 tersebut terdiri dari:

*Defisit Anggaran
Rp88,62 triliun*

Uraian	Jumlah (Rp)
Dana Penyesuaian Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan	6.993.185.324.000
Dana Untuk guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	4.575.458.550.000
Dana Penyesuaian Selisih Perhitungan DAK	197.125.935.000
Dana Penyesuaian Selisih Perhitungan Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya (DPIL)	41.435.195.000
Jumlah	11.807.205.004.000

B.2.2.3. Suspen

Suspen merupakan perkiraan (akun) yang menampung perbedaan pencatatan realisasi APBN menurut kementerian negara/lembaga (K/L) dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Angka Suspen yang dilaporkan timbul karena perbedaan pencatatan realisasi Belanja Negara. Sementara bila terdapat selisih/perbedaan pencatatan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, maka data yang digunakan adalah data BUN yang dapat ditelusuri ke kas yang diterima. Jumlah suspen TA 2009 adalah sebesar minus Rp15.632.247.373 yang berarti realisasi belanja yang dilaporkan K/L lebih besar dari data belanja yang dicatat BUN. Suspen TA 2009 lebih kecil dibandingkan dengan suspen TA 2008 sebesar Rp58.721.608.520. Rincian suspen adalah sebagai berikut (dalam Rp):

*Pembiayaan (Neto)
Rp112,58 triliun*

*Pembiayaan DN
Rp125,00 triliun*

*Rekening
Pemerintah Rp53,05
triliun*

Uraian	Bendahara Umum Negara (BUN)	Kementerian Negara/Lembaga (KL)	Selisih (BUN – K/L)
Belanja Pemerintah Pusat			
Belanja Pegawai	127.663.323.688.725	127.669.748.683.930	(6.424.995.205)
Belanja Barang	80.664.398.161.767	80.667.925.311.049	(3.527.149.282)
Belanja Modal	75.852.367.411.406	75.870.754.036.420	(18.386.625.014)
Bunga Utang	93.781.932.422.813	93.782.062.890.134	(130.467.321)
Subsidi *)	138.082.160.271.329	138.082.160.271.329	-
Bantuan Sosial	73.796.894.379.034	73.813.555.200.705	(16.660.821.671)
Belanja lain-lain	38.955.711.251.756	38.926.213.440.636	29.497.811.120
Suspen			(15.632.247.373)

*) Realisasi Subsidi menurut BUN, termasuk realisasi BM-DTP sebesar Rp7.187.562.916 yang tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas.

Suspen tersebut dapat disebabkan kesalahan pencatatan baik oleh Kuasa BUN maupun oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada K/L.

B.2.3. Defisit Anggaran

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara & Hibah dan realisasi Belanja Negara TA 2009 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Defisit Anggaran TA 2009 adalah sebesar Rp88.618.784.374.284, yang berarti 68,25 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp129.844.930.403.000, dengan perhitungan sebagai berikut:

Pembiayaan PPAPR
Rp690,33 miliar

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Pendapatan Negara dan Hibah	848.763.235.195.483	981.609.433.326.137
Belanja Negara	937.382.019.569.767	985.730.751.086.613
Defisit Anggaran	(88.618.784.374.284)	(4.121.317.760.476)

B.2.4. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan TA 2009 adalah sebesar Rp112.583.311.415.415 yang berarti 86,71 persen dari APBN-P sebesar Rp129.844.930.403.000. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

SBN (Neto) Rp99,47
triliun

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2009 adalah sebesar Rp124.999.182.482.469, yang berarti 87,68 persen dari APBN-P sebesar Rp142.569.169.663.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Rekening Pemerintah, (ii) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (iii) Surat Berharga Negara (Neto), (iv) Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah, dan (v) Pembiayaan Lain-lain.

B.2.4.1.1. Rekening Pemerintah

Pembiayaan dari Rekening Pemerintah adalah penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang terkait dengan penerimaan dan pengembalian dari rekening-rekening pemerintah lainnya yang dikelola/dikuasai oleh Menteri Keuangan sebagai BUN. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rekening Pemerintah TA 2009 adalah sebesar Rp53.049.247.755.837, atau 93,78 persen dari APBN-P sebesar Rp56.566.160.569.000. Rincian Pembiayaan Rekening Pemerintah adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Penerimaan dari Rekening SAL	51.857.136.912.000	-
Penerimaan dari RDI	571.128.144.837	299.999.999.959
Penerimaan dari Rekening Pembangunan Hutan	620.982.699.000	-
Jumlah	53.049.247.755.837	299.999.999.959

Dalam pagu anggaran Pembiayaan Rekening Pemerintah sebesar Rp56.566.160.569.000 termasuk anggaran Penerimaan dari Rekening RDI sebesar Rp3.690.000.000.000 yang sebagian realisasinya, yaitu sebesar Rp3.133.897.417.553 disajikan pada kelompok Pembiayaan Luar Negeri Negeri (*Lihat Catatan B.2.4.2.2*)

PMN/ Dana Investasi
Pemerintah Rp13,08
triliun

B.2.4.1.2. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi (PPAPR) TA 2009 sebesar Rp690.333.091.255, atau 82,64 persen dari APBN-P sebesar Rp835.400.000.000.

Program privatisasi dilakukan pemerintah dengan tujuan utama yaitu untuk peningkatan kinerja BUMN. Peningkatan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas modal BUMN dan pelepasan kepemilikan pemerintah kepada swasta agar BUMN lebih mampu bersaing. Penjualan Aset Program Restrukturisasi dilakukan oleh PT PPA melalui penjualan aset pasca dibubarkannya BPPN.

B.2.4.1.3. Surat Berharga Negara (Neto)

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2009 adalah sebesar Rp99.470.897.644.002 atau 100,22 persen dari APBN-P TA 2009 sebesar Rp99.256.576.171.000. Pembiayaan dari SBN mencakup Penerbitan SBN dalam valas sesuai dengan penjelasan UU No. 26 Tahun 2009 tentang Perubahan APBN yang menyatakan bahwa SBN (Neto) merupakan selisih antara penerbitan dengan pembayaran pokok dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar Internasional. Rincian Pembiayaan dari SBN Neto TA 2009 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Pembiayaan Lain-lain minus Rp15,13 triliun

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Penerimaan		
Penerbitan/Penjualan SPN	25.200.000.000.000	10.012.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	65.974.730.000.000	76.791.640.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	1.027.625.034.000	1.248.846.053.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas	39.770.426.000.000	39.309.830.431.500
Penerbitan/Penjualan SBSN - DN	9.519.290.000.000	4.699.700.000.000
Penerbitan/Penjualan SBSN - Valas	7.031.748.227.903	616.621.652.444
Imbalan Dibayar di muka SBSN - DN	13.866.390.000	16.665.166.900
Total Penerimaan	148.537.685.651.903	132.695.303.303.844
Pengeluaran		
Pelunasan SPN	(10.512.000.000.000)	(4.168.800.000.000)
Pelunasan Obligasi DN	(26.262.207.106.001)	(33.658.981.400.000)
Pembelian Kembali Obligasi DN	(11.466.000.000.000)	(6.946.000.000.000)
Utang Bunga Obligasi Negara DN	(809.915.735.000)	(1.394.674.134.000)
Imbalan Dibayar di muka SBSN - DN	(16.665.166.900)	-
Utang Bunga Obligasi Negara - Valas	-	(610.586.443.082)
Total Pengeluaran	(49.066.788.007.901)	(46.779.041.977.082)
Jumlah Surat Berharga Negara (Neto)	99.470.897.644.002	85.916.261.326.762

Pembiayaan LN (Neto) minus Rp12,42 triliun

B.2.4.1.4. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah

Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah TA 2009 adalah sebesar Rp13.084.949.775.291 yang berarti 92,87 persen dari APBN-P TA 2009 sebesar Rp14.088.967.077.000. Rincian pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2009 adalah:

Penarikan Pinjaman LN (Bruto) Rp58,66 triliun

Uraian	Jumlah (Rp)
PMN untuk BUMN	11.673.967.076.291
Investasi Pemerintah untuk BLU PIP	500.000.000.000
Dana Bergulir	910.982.699.000
Jumlah	13.084.949.775.291

PMN untuk BUMN sebesar Rp11.673.967.076.291, terdiri dari:

Penarikan Pinjaman Program Rp28,94 triliun

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyertaan pada PT Pertamina	9.136.361.936.291
Penyertaan pada Lembaga Penjaminan Infrastruktur	1.000.000.000.000
Penyertaan pada PT Perusahaan Pengelola Aset	1.000.000.000.000
Penyertaan pada Perum Jamkrindo	250.000.000.000
Penyertaan pada PT Askrindo	250.000.000.000
Penyertaan pada PTPN II	37.605.131.000
Jumlah	11.673.967.076.291

Dana Bergulir sebesar Rp910.982.699.000 disalurkan kepada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp620.982.699.000 dan BLU Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp290.000.000.000.

B.2.4.1.5. Pembiayaan Lain-lain

Pembiayaan Lain-lain dalam TA 2009 sebesar minus Rp15.126.346.233.334 berasal dari penyesuaian penambahan dan penurunan saldo rekening khusus karena selisih kurs, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening KUN Rekening Valuta USD Karena selisih Kurs	38.352.484.545.170	55.419.279.930.448
Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening KUN dalam Valuta USD Karena Selisih Kurs	(53.478.830.778.504)	(39.559.934.705.513)
Jumlah	(15.126.346.233.334)	15.859.345.224.935

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2009 adalah sebesar minus Rp12.415.871.067.054, yang berarti 97,58 persen dari APBN-P sebesar minus Rp12.724.239.260.000. Pembiayaan Luar Negeri berasal dari penarikan pinjaman luar negeri bruto setelah dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

*Penarikan Pinjaman
Proyek Rp29,72
triliun*

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) TA 2009 adalah sebesar Rp58.662.045.806.549 yang berarti 84,65 persen dari APBN-P sebesar Rp69.299.157.364.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman program, dan (ii) penarikan pinjaman proyek.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program

Realisasi Pinjaman Program TA 2009 adalah sebesar Rp28.937.702.908.655, yang berarti 95,46 persen dari APBN-P sebesar Rp30.315.500.000.000.

Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai (*cash financing*) yang memerlukan *policy matrix* untuk pencairannya. *Policy matrix* adalah suatu *set of policy* yang menjadi *collateral* pinjaman program yang harus dipenuhi agar pinjaman dapat dicairkan. Pinjaman program digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit tunai APBN. Besarnya pinjaman program dilakukan dengan mempertimbangkan defisit pada suatu tahun anggaran.

Berikut adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2009 dan 2008 (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Penarikan Pinjaman Program dari OECF	6.093.227.594.800	5.831.748.614.400
Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya	3.043.500.000.000	2.190.000.000.000
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	15.050.575.313.855	12.927.191.140.774
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	4.750.400.000.000	9.151.500.000.000
Jumlah	28.937.702.908.655	30.100.439.755.174

Realisasi Penarikan Pinjaman Program ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.02 (Utang Pemerintah), dengan selisih sebesar minus Rp134.697.106.000. Selisih ini antara lain disebabkan adanya perbedaan saat pengakuan penerimaan pinjaman (selisih kurs) antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dengan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA 999.02. Rincian perbedaan tersebut adalah (dalam Rp):

Uraian	Data BUN	Data BA 999	Selisih
Penarikan Pinjaman Program dari OECF	6.093.227.594.800	6.134.874.700.800	(41.647.106.000)
Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya	3.043.500.000.000	3.025.500.000.000	18.000.000.000
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	15.050.575.313.855	15.139.525.313.855	(88.950.000.000)
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	4.750.400.000.000	4.772.500.000.000	(22.100.000.000)
Jumlah	28.937.702.908.655	29.072.400.014.655	(134.697.106.000)

*Penerusan Pinjaman
LN (Neto) minus
Rp3,05 triliun*

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek

Realisasi Pinjaman Proyek TA 2009 adalah sebesar Rp29.724.342.897.894, yang berarti 76,25 persen dari APBN-P sebesar Rp38.983.657.364.000.

Pinjaman Proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang merupakan kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Bappenas dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kegiatan prioritas ini disusun Bappenas berdasarkan usulan dari K/L, pemerintah daerah, dan BUMN.

Berikut adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2009 dan 2008 (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	12.322.925.734.667	7.677.549.041.030
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	8.224.672.697.242	5.873.858.103.991
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	5.270.208.271.880	4.274.539.437.119
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya	3.906.536.194.105	2.292.363.594.592
Jumlah	29.724.342.897.894	20.118.310.176.732

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.02 (Utang Pemerintah), dengan selisih sebesar Rp5.145.715.840.147. Rincian perbedaan tersebut adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Data BUN	Data BA 999	Selisih
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	12.322.925.734.667	7.731.130.448.848	4.591.795.285.819
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	8.224.672.697.242	11.034.303.819.484	(2.809.631.122.242)
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	5.270.208.271.880	2.946.693.233.879	2.323.515.038.001
Penarikan Pinjaman Proyek Komersial	-	2.866.499.555.536	(2.866.499.555.536)
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya	3.906.536.194.105	-	3.906.536.194.105
Jumlah	29.724.342.897.894	24.578.627.057.747	5.145.715.840.147

*Pembayaran Cicilan
Pokok Utang LN
Rp68,03 triliun*

Selisih tersebut disebabkan antara lain adanya perbedaan saat pengakuan (*timing difference*) penerimaan pinjaman antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dengan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA 999.02. Penjelasan selisih tersebut adalah:

Uraian	Jumlah (Rp)
Notice of Disbursement (NoD) tahun 2008 yang SP3-nya diterbitkan tahun 2009	4.534.908.691.601
NoD tahun 2010 yang SP3-nya diterbitkan tahun 2009	81.784.246.204
NoD pada KPPN Khusus NAD yang belum diterbitkan SP3-nya	(111.322.361.681)
Penarikan Pinjaman tahun 2009 berdasarkan Letter of Credit (LC)	(384.102.667.706)
SP2D Reksus tahun 2009	615.819.424.536

SiLPA Rp23,96 triliun

Reklasifikasi Pinjaman menjadi Penerimaan Hibah	234.422.930.999
Selisih kurs antara SP3 dan NoD tahun 2009	59.867.238.240
Selisih yang masih dalam penelusuran	114.338.337.954
Jumlah	5.145.715.840.147

B.2.4.2.2. Penerusan Pinjaman Luar Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri (Neto) TA 2009 adalah sebesar minus Rp3.046.803.016.526, yang berasal dari selisih Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dan Pengeluaran Penerusan Pinjaman dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN:		
Penerimaan Penerusan Pinjaman LN kepada Daerah	54.241.853.891	-
Penerimaan Penerusan Pinjaman LN kepada BUMD	209.662.828.985	-
Penerimaan Penerusan Pinjaman LN kepada BUMN	2.869.992.734.677	-
Total Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN	3.133.897.417.553	-
Pengeluaran Penerusan Pinjaman LN: *)		
Penerusan Pinjaman LN kepada Daerah	(26.698.929.640)	(52.554.927.667)
Penerusan Pinjaman LN kepada BUMD	-	(22.967.349.787)
Penerusan Pinjaman LN kepada BUMN	(6.154.001.504.439)	(5.113.793.926.428)
Total Pengeluaran Penerusan Pinjaman LN	(6.180.700.434.079)	(5.189.316.203.882)
Penerusan Pinjaman LN (Neto)	(3.046.803.016.526)	(5.189.316.203.882)

*) Pengeluaran Penerusan Pinjaman pada TA 2008 disajikan sebagai Pembiayaan Dalam Negeri.

Dalam APBN-P TA 2009, Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN dianggarkan dalam kelompok Pembiayaan Dalam Negeri sebagai Penerimaan Dana Investasi tergabung dengan Penerimaan dari RDI (*Catatan B.2.4.1.1*) dengan total sebesar Rp3.690.000.000.000. Dengan demikian, persentase realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN ditambah dengan Penerimaan dari RDI adalah sebesar 100,41 persen dari APBN-P.

Penerusan Pinjaman LN pada APBN-P TA 2009 dianggarkan sebesar Rp12.991.696.614.000, sehingga persentase realisasi Penerusan Pinjaman LN adalah sebesar 47,57 persen dari APBN-P.

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2009 adalah sebesar Rp68.031.113.857.077, atau 98,55 persen dari APBN-P sebesar Rp69.031.700.000.000. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2009, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Cicilan Pokok Utang LN -Pinjaman Program	(8.755.976.968.919)	(5.866.722.194.538)
Cicilan Pokok Utang LN -Pinjaman Proyek	(59.275.136.888.158)	(57.490.860.565.371)
Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran <i>Ineligible</i>	-	(77.727.982.168)
Jumlah	(68.031.113.857.077)	(63.435.310.742.077)

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp88.618.784.374.284 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp112.583.311.415.415 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp23.964.527.041.131, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Surplus (Defisit)	(88.618.784.374.284)	(4.121.317.760.476)
Pembiayaan Neto	112.583.311.415.415	84.071.748.066.005
SiLPA (SiKPA)	23.964.527.041.131	79.950.430.305.529

Nilai SiLPA tersebut belum termasuk beberapa penyesuaian (*Lihat Catatan C.2.41*).

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA**1. Pagu Anggaran Belanja**

Realisasi anggaran belanja dimungkinkan melampaui pagu yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P, dan hal tersebut dapat ditetapkan Pemerintah tanpa memerlukan terlebih dahulu persetujuan DPR dengan menerbitkan tambahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Penambahan pagu tersebut terjadi karena:

- adanya realisasi penerimaan PNBPN yang melampaui target;
- adanya luncturan dan percepatan penarikan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sepanjang perjanjian PHLN yang bersangkutan sudah disetujui dalam APBN tahun anggaran bersangkutan; dan
- adanya penerimaan hibah baru sesudah UU APBN ditetapkan yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah, yang diperkenankan sejak disahkannya UU Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009.

Dasar hukum yang memungkinkan terlampauinya realisasi belanja pada TA 2009 dari pagu APBN-P adalah:

- Pasal 15 ayat (1) huruf b dan c UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN TA 2009, yang berbunyi:

"Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat berupa perubahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan perubahan pinjaman dan hibah luar negeri sebagai akibat dari luncturan dan percepatan penarikan PHLN ditetapkan oleh Pemerintah."

- Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN TA 2009, yang menyatakan bahwa hibah baru yang belum disetujui dalam APBN TA 2009 dapat ditambahkan ke pagu K/L dengan penetapan oleh Pemerintah (tidak memerlukan persetujuan DPR).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan DIPA, yang menyatakan bahwa revisi/perubahan antarjenis belanja diperkenankan, sepanjang perubahan tersebut merupakan "perubahan/ralat karena kesalahan administrasi, termasuk ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja". Artinya pergeseran dari jenis

belanja non-modal ke jenis belanja modal diperkenankan sepanjang memenuhi syarat tersebut, meskipun hal itu dapat mengakibatkan lebih tingginya realisasi belanja modal dari pagu belanja modal yang ditetapkan dalam UU APBN/APBN-P.

2. Informasi Pendapatan dan Belanja Akrua

Sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN TA 2009, Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual. Informasi tentang pendapatan dan belanja secara akrual dimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapan akuntansi berbasis akrual yang dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih Pemerintah dalam penganggaran berbasis kas. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua disajikan secara tersendiri dalam Suplemen LKPP Tahun 2009 ini.

3. Laporan Realisasi Stimulus Fiskal

Sampai dengan akhir TA 2009, dari Rp12,2 triliun anggaran belanja dan pembiayaan yang dialokasikan untuk program stimulus fiskal, telah terealisasi sebesar Rp11.264.480.116.671 atau 92,33 persen. Rincian anggaran dan realisasi dana stimulus fiskal adalah sebagai berikut (dalam Rp):

BA	Kementerian Negara/Lembaga	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
018	Kementerian Pertanian	260.000.000.000	239.617.164.059	20.382.835.941
020	Kementerian ESDM	500.000.000.000	491.713.158.166	8.286.841.834
023	Kementerian Perhubungan	2.198.800.000.000	2.099.824.227.247	98.975.772.753
024	Kementerian Kesehatan	150.000.000.000	149.782.526.500	217.473.500
026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	300.000.000.000	257.188.261.665	42.811.738.335
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	100.000.000.000	96.825.118.584	3.174.881.416
033	Kementerian Pekerjaan Umum	6.601.200.000.000	6.236.412.325.773	364.787.674.227
044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	100.000.000.000	94.943.057.493	5.056.942.507
090	Kementerian Perdagangan	335.000.000.000	325.666.857.916	9.333.142.084
091	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	400.000.000.000	386.157.324.968	13.842.675.032
999	Bendahara Umum Negara *)	1.255.000.000.000	886.350.345.000	368.649.655.000
Total		12.200.000.000.000	11.264.480.367.371	935.519.632.629

*) Termasuk Penyertaan Modal Negara untuk Perum Jamkrindo dan PT Askrindo dengan anggaran dan realisasi masing-masing sebesar Rp500.000.000.000.

Laporan Stimulus Fiskal secara lebih lengkap disajikan secara tersendiri dalam Suplemen LKPP Tahun 2009 ini.

4. Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan TA 2009, dengan rincian sebagai berikut:

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi (dalam Rp)	
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan
010	Kementerian Dalam Negeri	573.365.164.498	6.485.121.522.182
018	Kementerian Pertanian	814.305.027.899	2.284.902.980.897
019	Kementerian Perindustrian	59.348.374.819	49.084.848.617

020	Kementerian ESDM	31.333.410.360	0
023	Kementerian Pendidikan Nasional	31.154.323.961.710	183.092.758.755
024	Kementerian Kesehatan	487.995.726.185	1.065.185.739.389
026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	544.759.875.816	996.781.382.008
027	Kementerian Sosial	604.621.916.481	55.024.544.806
029	Kementerian Kehutanan	68.580.461.236	0
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	219.493.003.037	679.776.203.308
033	Kementerian Pekerjaan Umum	53.663.190.682	1.774.745.922.757
040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	14.089.525.700	37.201.611.423
043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	14.998.247.541	0
044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	125.102.405.830	106.096.997.293
057	Perpustakaan Nasional	64.905.565.744	0
067	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	0	504.566.100.131
087	Arsip Nasional Republik Indonesia	3.668.429.550	0
090	Kementerian Perdagangan	51.329.280.011	416.962.778.493
092	Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga	140.646.557.131	0
104	Badan Nasional P2TKI	0	3.285.893.800
Total		35.026.530.124.230	14.641.829.283.859

5. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep "*enterprising the government*" dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyeter surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai biasa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun dan mengintegrasikan RBA dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU, minimal terdiri dari laporan operasional/laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan instansi PK BLU tersebut harus dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga,

yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam LKPP.

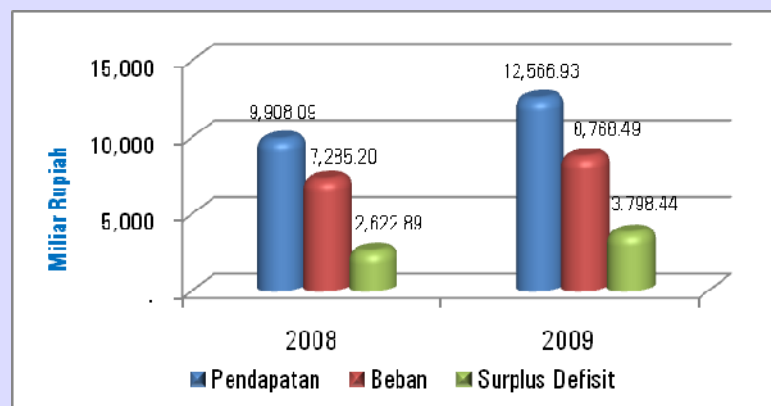
Sampai dengan Desember 2009, terdapat 84 instansi pemerintah yang telah menerapkan PK BLU pada 17 K/L, yaitu:

No.	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1.	Sekretariat Negara	2
2.	Kementerian Keuangan	2
3.	Kementerian EDSM	1
4.	Kementerian Perindustrian	1
5.	Kementerian Perhubungan	4
6.	Kementerian Pendidikan Nasional	18
7.	Kementerian Kesehatan	34
8.	Kementerian Agama	10
9.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3
10.	Kementerian Kehutanan	1
11.	Kementerian Pekerjaan Umum	1
12.	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	1
13.	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	2
14.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1
15.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
16.	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	1
17.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1
	Jumlah BLU	84

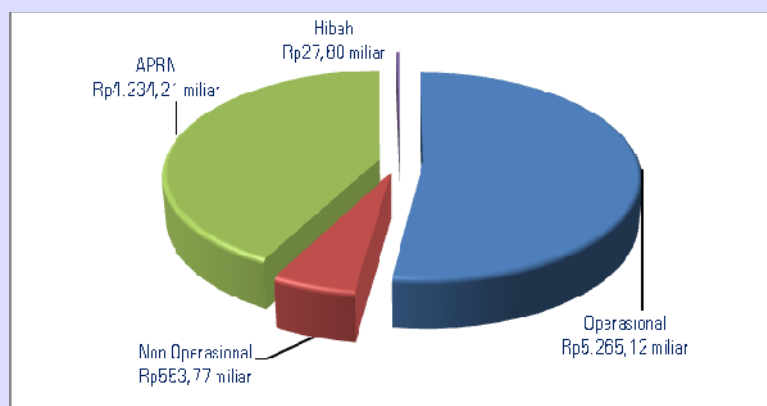
Ditinjau dari bidang layanan, dari 84 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

- 28 BLU bidang kesehatan;
- 4 BLU bidang pembiayaan;
- 1 BLU bidang telekomunikasi;
- 45 BLU bidang pendidikan;
- 3 BLU bidang teknologi;
- 2 BLU bidang pengelolaan kawasan; dan
- 1 BLU bidang lain-lain.

Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU Tahun 2009 dan 2008 serta komposisi pendapatan BLU pada TA 2009 berdasarkan laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terlihat pada Grafik 39 dan Grafik 40.



Grafik 39: Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2009 dan TA 2008



Grafik 40: Komposisi Pendapatan BLU TA 2009

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan secara lengkap pada Daftar 38.

6. Penerimaan dan Belanja Hibah

Sejak TA 2009, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah, Penerimaan Hibah baik hibah melalui Bendahara Umum Negara maupun hibah langsung ke K/L, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran BA 999.02 (Hibah), bukan lagi oleh masing-masing K/L.

Berdasarkan LRA BA 999.02 jumlah penerimaan hibah sebesar Rp3.341.684.022.866 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Hibah	Jumlah (Rp)
Hibah Luar Negeri	
Hibah Luar Negeri - Barang	160.933.283.318
Hibah Luar Negeri - Bilateral	620.284.252.483
Hibah Luar Negeri - Jasa	30.654.634.283
Hibah Luar Negeri - Lainnya	3.353.955.059
Hibah Luar Negeri - Multilateral	2.574.300.293.378
Pengembalian Multilateral	(51.648.257.115)
Hibah Dalam Negeri	
Hibah Dalam Negeri - Barang	3.805.861.460
Jumlah Pendapatan Hibah	3.341.684.022.866

Selain itu, hibah berupa pemberian barang yang dilakukan oleh K/L kepada Pemda adalah sebagai berikut:

No.	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah (Rp)
1.	Kementerian Perdagangan	19.805.579.728
2.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.180.800.000
3.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	16.979.896.425
4.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	21.648.123.029
Total		59.614.399.182

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

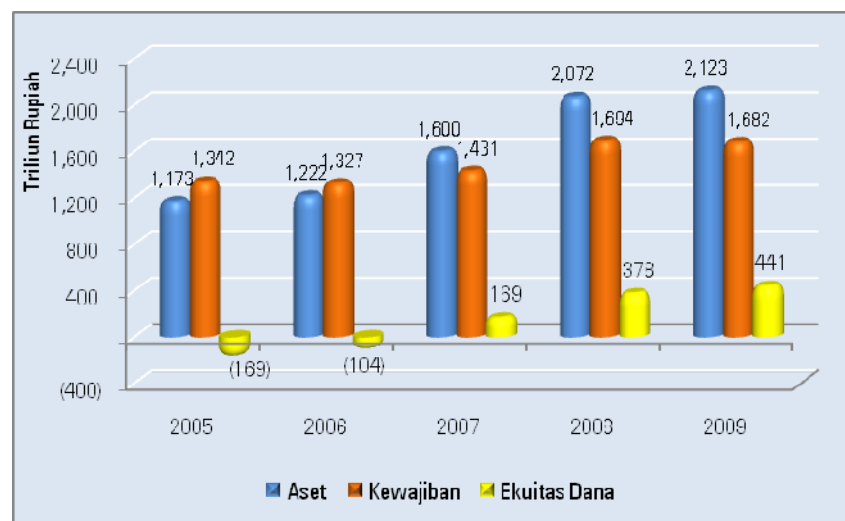
Posisi Neraca secara umum

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
Aset Lancar	231.376.113.199.863	264.093.865.686.430
Investasi Jangka Panjang	737.039.382.666.868	712.035.340.631.998
Aset Tetap	979.004.124.298.696	673.341.421.634.984
Aset Lainnya	175.467.502.161.107	422.232.167.508.465
Jumlah Aset	2.122.887.122.326.534	2.071.702.795.461.877
Kewajiban Jangka Pendek	187.839.287.320.918	181.343.265.322.490
Kewajiban Jangka Panjang	1.493.869.107.262.445	1.512.347.991.390.521
Jumlah Kewajiban	1.681.708.394.583.363	1.693.691.256.713.011
Ekuitas Dana Lancar	43.536.825.878.946	82.750.600.363.940
Ekuitas Dana Investasi	397.641.901.864.225	295.260.938.384.926
Jumlah Ekuitas Dana Neto	441.178.727.743.171	378.011.538.748.866
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.122.887.122.326.534	2.071.702.795.461.877

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Grafik 41.

Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir



Grafik 41: Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2005 - 2009

Grafik di atas menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun berturut-turut, nilai Ekuitas Dana selalu meningkat. Ekuitas Dana per 31 Desember 2009 naik 91,10 persen dari posisi 31 Desember 2008.

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

Rekening Kas BUN di BI
Rp32,18 triliun

C.2.1. Rekening Kas BUN di Bank Indonesia

Jumlah Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp32.185.520.242.213 dan Rp67.707.599.065.065 merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Rekening	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
Rekening BUN No. 502.000000	2.054.801.169.448	25.863.449.877.816
Rekening KUN dalam Valuta USD No. 600.502411 (USD1,948,220.54)	18.313.273.076	41.844.149.187.249
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah No. 519.000122	20.704.179.322.101	-
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD No. 608.001411 (Ekuivalen USD 942,062,678.34)	8.855.389.176.396	-
Rekening Penempatan dalam Valuta YEN No. 608.000111 (Ekuivalen JPY 678,011,668.00)	68.956.634.284	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam Rupiah No. 519000124	606.723.757	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam USD No. 609022411	483.248.862.430	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam EURO No. 609000991	25.080.721	-
Jumlah	32.185.520.242.213	67.707.599.065.065

Rekening Kas di KPPN
Rp8,31 triliun

C.2.2. Rekening Kas di KPPN

Jumlah Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp8.309.379.301.258 dan Rp6.755.052.343.271 merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia.

Daftar Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada Daftar 4.

RPL Rp32,22 triliun

C.2.3. Rekening Pemerintah Lainnya

Jumlah Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp32.218.505.711.694 dan Rp35.642.938.767.447 merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Bank	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
1. Bank Indonesia	17.183.034.878.370	20.642.938.767.447
2. Bank Umum	15.035.470.833.324	15.000.000.000.000
Jumlah	32.218.505.711.694	35.642.938.767.447

1. Rekening Pemerintah Lainnya di BI, terdiri dari (dalam Rp):

Rekening	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
Rekening RDI/RPD	1.653.866.298.449	73.154.205.459
Rekening SAL	5.870.514.138.408	3.370.514.138.408
Rekening Panas Bumi	190.638.768.900	86.635.248.233
Rek. Hasil Minyak Perjanjian KPS	8.718.692.283.486	15.613.890.374.629
Rek. Pemerintah Lainnya	749.323.389.127	1.498.744.800.718
Jumlah	17.183.034.878.370	20.642.938.767.447

Rincian lebih lengkap masing-masing rekening dapat dilihat pada **Daftar 5**.

Khusus Saldo Rekening Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp8.718.692.283.486 merupakan Kas BUN dalam bentuk valas pada Rekening No. 600.000.411, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah. Transaksi (mutasi) arus masuk dan keluar kas dari Rekening No. 600.000.411 tersebut disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8
Mutasi Rekening Nomor 600.000.411 Tahun 2009 dan 2008

*Mutasi Rekening Migas
No.600.000.411*

URAIAN	31-12-2009 ((Audited))		31-12-2008 (Audited)	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	1.425.926.062	15.613.890,37	17.297.550	162.925,61
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PPh Migas dan Penerimaan Bag Pemerintah	10.903.640.790	111.658.653,23	19.304.274.632	184.973.457,34
2. Koreksi Kurs Pembukuan Kredit/Debit ^{a)}	-	11.884.032,76	-	23.717.705,69
3. Pengembalian Dana Talangan	-	-	1.070.000.000	9.967.160,00
4. Koreksi Pembukuan ^{g)}	66.928.156	744.405,91	849.959.578	7.803.118,81
5. Penerimaan lain-lain ^{d)}	2.265.065	23.062,50	1.033.578	9.425,77
Total Penerimaan	10.972.834.011	124.310.154,39	21.225.267.614	226.470.867,61
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD:				
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda via BO III	1.621.629.855	15.788.800,00	1.711.986.004	16.345.200,00
b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda	7.896.727	79.254,51	7.230.344	71.715,63
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN No. 502.600411				
• PPh Minyak Bumi (MAP 411111)	1.513.416.013	15.620.430,59	3.075.097.058	29.634.966,04
• PPh Gas Alam (MAP 411112)	2.973.481.012	30.742.781,51	4.851.817.836	47.383.937,09
• Pendapatan Minyak Bumi (MAP 421111)	172.270.072	1.936.707,53	2.645.821.861	25.390.077,82
• Pendapatan Gas Alam (MAP 421211)	2.432.299.494	24.408.672,44	4.101.487.944	40.201.582,89
• Pendapatan Migas lainnya (MAP 423439)	7.517.959	77.748,89	2.675.606	25.696,40
• Pendapatan Bunga Penagihan PPh Non Migas (MAP 411621)	-	-	-	-
• PPh Pasal 25 (MAP 411126) ^{d)}	20.041.199	190.351,31	487.000	4.462,38
• PBB Pertambangan Migas (MAP 411315)	-	-	176.203.353	1.954.800,00
Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD	8.748.552.331	88.844.746,78	16.572.807.006	161.012.438,26
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
a. Reimbursement PPN ke Kontraktor	601.432.690	6.146.966,48	817.641.443	7.931.361,14
b. Pembayaran DMO Fee KKKS ^{e)}	1.241.280.286	12.000.168,35	1.293.127.169	13.684.816,85
c. Pembayaran Fee Penjualan Migas Tahun 2007 & 2008 kepada PT Pertamina (Persero) ^{f)}	305.304.294	2.895.811,23	259.475.875	2.723.916,18
d. Pembayaran Fee / Anggaran BPMIGAS	77.615.407	805.711,39	-	-
e. Pembayaran Underlifting KKKS ^{g)}	424.560.211	4.352.978,53	1.665.181	15.326,98
f. Pengembalian Sisa Dana White & Case kepada PT Pertamina (Persero) ^{h)}	5.536.678	54.425,55	24.126.041	264.180,15
Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD	2.655.729.566	26.256.061,53	2.396.035.711	24.619.601,30
3. Koreksi Pembukuan Debit ^{g)}	66.957.720	744.431,41	847.796.385	7.802.997,95
4. Koreksi Kurs Pembukuan Debit	-	15.360.112,76	-	17.584.865,35
5. Pinjaman untuk Dana Talangan	-	-	-	-
Total Pengeluaran	11.471.239.618	131.205.352,48	19.816.639.102	211.019.902,86
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	(498.405.606)	(6.895.198,09)	1.408.628.512	15.450.964,75
V. Saldo Akhir (I + IV) ^{g)}	927.520.456	8.718.692,28	1.425.926.062	15.613.890,37

Penjelasan:

- a) Koreksi Pembukuan Kredit, merupakan koreksi-koreksi kredit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda, retur pengeluaran (retur pembayaran kewajiban-kewajiban

sektor migas), kesalahan transfer pihak ketiga, pembetulan atau koreksi karena kesalahan penggunaan kurs, dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi atas pembukuan ganda setoran PPh dari KKKS sebesar USD186,133,00 atau setara dengan Rp2.083.386.669,00;
 - Koreksi atas ganda pembukuan setoran SDA migas bagian Pemerintah sebesar USD34.143.174,83 atau setara dengan Rp409.035.234.443,80;
 - Koreksi atas pembukuan ganda pembayaran kewajiban migas sebesar USD10.011,82 atau setara dengan Rp95.162.349,10;
 - Koreksi pembukuan atas retur pembayaran PBB Migas sebesar USD17.069.953,33 atau setara dengan Rp168.037.235.868,00;
 - Koreksi pembukuan atas retur pembayaran *Reimbursement* PPN sebesar USD6.015.036,14 atau setara dengan Rp61.097.075.349,00;
 - Koreksi pembukuan atas retur pembayaran PDRD sebesar USD89.532,30 atau setara dengan Rp839.690.961,21;
 - Koreksi pembukuan atas retur pembayaran DMO Fee KKKS sebesar USD487.109,70 atau setara dengan Rp5.063.505.331,50;
 - Koreksi pembukuan atas retur pembayaran *overlifting* Pemerintah sebesar USD8.927.204,63 atau setara dengan Rp98.154.614.906,85;
- b) **Koreksi Kurs Pembukuan Kredit / Debit**, merupakan koreksi pemindahbukuan selisih kurs neraca harian yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- c) **Penerimaan Lain-lain**, merupakan penerimaan yang belum jelas klasifikasinya sebagai penerimaan PPh atau SDA migas (masih memerlukan klarifikasi dari instansi terkait), dan setoran *overpayment* DMO dari KKKS.
- d) **Pemindahbukuan Lain-lain atas PPh Pasal 25**, merupakan pemindahbukuan ke Direktorat Jenderal Pajak (Akun 411126) atas setoran Kodeco Energy atas permintaan KPP Badora I.
- e) **Pembayaran DMO Fee KKKS**

Termasuk di dalamnya pembayaran *DMO Fee* kepada PT Pertamina EP yang dilakukan melalui mekanisme *offsetting*, sebagai berikut:

- Pembayaran *DMO Fee* kepada PT Pertamina EP pada bulan Juni sebesar USD290,924,660.00 yang di-*set off* dengan penyelesaian piutang Koreksi Cost Recovery hasil audit BPK-RI atas PPh dan PNBPT PT Pertamina EP, sehingga pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN sebagai berikut:

Pendapatan	Jumlah	
	Dalam USD	Dalam Rupiah
PPh Minyak Bumi (Akun 411111)	220.924,464,35	2.220.953.640.110,55
PPh Gas Alam (Akun 411112)	69.692.195,65	700.615.642.869,45
Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas (Akun 423139)	308.000,00	3.096.324.000,00

- Pembayaran *DMO Fee* kepada PT Pertamina EP pada bulan Desember 2009 sebesar USD80,451,618.00 yang di-*set off* dengan penyelesaian piutang Koreksi Cost Recovery hasil audit BPK-RI unsur PBDR PT Pertamina (Persero), sehingga pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN sebagai berikut:

Pendapatan	Jumlah	
	Dalam USD	Dalam Rupiah
PPh Minyak Bumi (Akun 411111)	55.029.771,29	519.095.832.578,57
PPh Gas Alam (Akun 411112)	25.421.073,71	239.796.988.306,43
Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas (Akun 423139)	773,00	7.291.709,00

- Pembayaran DMO Fee kepada PT Pertamina EP pada bulan Desember sebesar USD661,118,713.99 yang di-*set off* dengan penyelesaian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah, sehingga pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN sebagai berikut:

Pendapatan	Jumlah	
	Dalam USD	Dalam Rupiah
Pendapatan Minyak Bumi (Akun 421111)	62.523.713,47	587.722.906.618,00
Pendapatan Gas Alam (Akun 421211)	598.595.000,52	5.626.793.004.888,00

f) **Pembayaran Fee Penjualan Migas Tahun 2007 dan 2008**

Atas pembayaran Fee Penjualan Migas Tahun 2007 dan 2008 sebesar USD305,304,294.09, di-*set off* dengan penyelesaian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah, sehingga pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN sebagai berikut:

Pendapatan	Jumlah	
	Dalam USD	Dalam Rupiah
Pendapatan Minyak Bumi (Akun 421111)	149.034.353,99	1.413.590.847.595,15
Pendapatan Gas Alam (Akun 421211)	106.629.585,89	1.011.381.622.166,65
PPh PT Pertamina (Persero) Pasal 23 (Akun 411124)	5.550.987,16	52.651.113.212,60
PPN PT Pertamina (Persero) (Akun 411211)	44.089.367,05	418.187.646.469,25

g) **Pembayaran *underlifting* KKKS**

Atas pembayaran *underlifting* kepada PT Pertamina EP sebesar US\$106.868.616,00 di-*set off* dengan penyelesaian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah, sehingga pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN sebagai setoran Pendapatan Gas Alam (Kode Akun 421211) sebesar USD106.868.616,00 atau setara dengan Rp1.075.098.276.960.

h) **Pembayaran pengembalian sisa dana cadangan White & Case kepada PT Pertamina (Persero)**

Atas pengembalian sisa dana cadangan White & Case kepada PT Pertamina (Persero) sebesar US\$5,536,678.39, di-*set off* dengan penyelesaian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) kepada Pemerintah, sehingga pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN sebagai setoran Pendapatan Gas Alam (Kode Akun 421211) sebesar USD5.536.678,39 atau setara dengan Rp54.425.548.573,70.

i) **Koreksi Pembukuan Debit**

merupakan koreksi-koreksi debit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda, retur pengeluaran (retur pembayaran kewajiban-kewajiban sektor migas), kesalahan transfer pihak ketiga, pembedaan atau koreksi karena kesalahan penggunaan kurs, dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi atas pembukuan ganda setoran PPh dari KKKS sebesar USD186.133,00 atau setara dengan Rp2.108.886.890,00;
- Koreksi atas pembukuan ganda setoran SDA migas bagian Pemerintah sebesar USD34.143.174,80 atau setara dengan Rp409.035.234.104,00;
- Koreksi atas double pembukuan pembayaran kewajiban migas sebesar USD69.905,5 atau setara dengan Rp749.002.293,90;
- Koreksi pembukuan atas retur pembayaran PBB Migas sebesar USD17.147.614,57 atau setara dengan Rp168.037.235.868,18;
- Koreksi pembukuan atas retur pembayaran *Reimbursement* PPN sebesar USD5.854.714,11 atau setara dengan Rp59.949.673.584,00;

- Koreksi pembukuan atas retur pembayaran PDRD sebesar USD141.864,04 atau setara dengan Rp1.333.253.121,21;
- Koreksi pembukuan atas retur pembayaran DMO Fee KKKS sebesar USD487.109,70 atau setara dengan Rp5.063.505.331,50; dan
- Koreksi pembukuan atas retur pembayaran *overlifting* Pemerintah sebesar USD8.927.204,63 atau setara dengan Rp98.154.614.906,85.

j) **Saldo Akhir**

Dari total saldo akhir sebesar USD927.520.455,69 atau setara dengan Rp8.718.692.283.486,00 akan digunakan sebagai cadangan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban kontraktual dan kewajiban-kewajiban lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas tahun 2009 yang belum diselesaikan sampai akhir Desember 2009.

*Ringkasan Hasil
Kegiatan Usaha Hulu
Migas dari Kontrak Kerja
Sama*

Laporan Penerimaan Migas dan *Reimbursement* PPN ke setiap KKKS dapat dilihat pada Daftar 6.

**Ringkasan Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas dari Kontrak Kerja Sama
Tahun 2009**

Berikut adalah ringkasan hasil kegiatan usaha hulu migas dari kontrak kerjasama selama tahun 2009 (periode *lifting* Januari s.d. Desember) pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS):

Uraian	Satuan	Jumlah	
		2009 ¹⁾	2008
Lifting Oil	MBBLS ²⁾	323.579	338.811
Lifting Gas	MSCF ³⁾	2.287.971	2.258.190
Price	USD		
Oil	USD/ICP ⁴⁾	61,44	96,0
Gas	USD/Harga Rata-rata Tertimbang	6,34	9,58
Gross Revenue	(USD 000)	34.394.129	54.152.069
First Tranche Petroleum	(USD 000)	6.025.349	9.676.296
Investment Credit	(USD 000)	(74.208)	(14.065)
Cost Recovery	(USD 000)	9.216.016	9.352.996
Total Recoverable	(USD 000)	9.141.808	9.338.931
Equity to be Split	(USD 000)	19.226.972	35.136.842
Government Share ⁵⁾	(USD 000)	19.646.187	27.470.295
Lifting Pemerintah	(USD 000)	14.225.407	27.357.038
Net Under Lifting Pemerintah	(USD 000)	796.564	113.257

Keterangan:

1) Merupakan data sementara berdasarkan konsolidasi FQR triwulan IV tahun 2009 per 19 Februari 2010

2) MBBLS = 000 Barrels

3) MSCF = 000 Square Cubic Feet

4) ICP = Indonesian Crude Price

5) Berdasarkan % split Production Sharing Contract.

Berdasarkan Laporan Satker Penerimaan Negara, realisasi *lifting* selama tahun 2009 (Desember 2008 s.d. November 2009) adalah sebesar 323.918 MBBLS (943,78 MBOPD).

Dari jumlah *lifting* Pemerintah sebesar USD14.225.407 ribu ditagihkan pada tahun 2009 sebesar USD15.316.034 ribu selisihnya merupakan pendapatan DMO, harga minyak mentah premium, dan adjustment tahun-tahun sebelumnya dan dilaporkan BPMIGAS kepada Pemerintah dalam Laporan Arus Migas tahun 2009.

Berikut adalah jumlah tagihan *lifting* Pemerintah pada tahun 2009 yang penyelesaiannya pada Rekening Migas No.600.000411 dan Kas Umum Negara (KUN) dilakukan pada tahun 2009 (Periode 1 Januari – 31 Desember 2009):

Uraian	Satuan	Jumlah
Total Lifting Pemerintah Tahun 2009	(USD 000)	15.316.034
Penyelesaian:		
Setoran ke Rekening 600.000411	(USD 000)	5.139.451
Setoran ke Rekening 600.502411	(USD 000)	523.205
Setoran ke Rekening 502.000000	(Rp Juta)	70.141.551

Sedangkan berikut adalah jumlah tagihan *lifting* Pemerintah tahun 2008 yang penyelesaiannya pada Rekening Migas No. 600.000411 dan KUN dilakukan pada tahun 2008 dan 2009:

Uraian	Satuan	Jumlah
Total Lifting Pemerintah Tahun 2008	(USD 000)	28.209.389
Penyelesaian:		
Tahun 2008 (periode 1 Januari - 31 Desember 2008)		
Setoran ke Rekening 600.000411	(USD 000)	9.776.441
Setoran ke Rekening 600.502411	(USD 000)	34.502
Setoran ke Rekening 502.000000	(Rp Juta)	144.822.437
Tahun 2009 (periode 1 Januari - 31 Desember 2009)		
Setoran ke Rekening 600.000411	(USD 000)	1.141.313
Setoran ke Rekening 600.502411	(USD 000)	506.198
Setoran ke Rekening 502.000000	(Rp Juta)	17.129.070
Total		
Setoran ke Rekening 600.000411	(USD 000)	10.917.754
Setoran ke Rekening 600.502411	(USD 000)	540.700
Setoran ke Rekening 502.000000	(Rp Juta)	161.951.507

Data Rincian hasil kegiatan usaha hulu migas tahun 2008 dan 2009 dari kontrak kerjasama per KKKS dan data penerimaan di luar PPH serta pengeluaran per KKKS ke Rekening Migas No.600.000411, Rekening No.600.502411, dan Rekening No.502.000000 atas tagihan dan kewajiban *lifting* tahun 2008 dan 2009 disajikan pada **Daftar 6**.

Rekening Pemerintah
Lainnya pada bank
umum Rp15 triliun

- Rekening Pemerintah Lainnya pada bank umum sebesar Rp15.035.470.833.324 terdiri dari Rekening Penempatan Uang Negara dalam rangka pengelolaan kas jangka pendek sebesar Rp15.000.000.000.000 dan rekening yang terkait dengan penampungan bunga dan jasa giro Program Dana Bergulir sebesar Rp35.470.833.324. Nilai sebesar Rp35.470.833.324 belum termasuk pendapatan bunga dan jasa giro bulan Agustus s.d Desember 2009 sebesar Rp1.271.562,91 atas Rekening Giro No. 010010000917-0 pada PT BPD Bali yang dikredit oleh BPD Bali pada Rekening tersebut pada bulan April 2010.

Kas di Bendahara
Pengeluaran

Rekening Penempatan Uang Negara dalam rangka pengelolaan kas jangka pendek berada di 3 (tiga) bank, yaitu:

Rp1,036 triliun

Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1. BNI Cab. Pecenongan	0155117558	5.000.000.000.000
2. BRI Cab. Jkt Veteran	0329-01-002277-30-4	5.000.000.000.000
3. Bank Mandiri Cab. Jkt Plaza Mandiri	070-0066888889	5.000.000.000.000
Jumlah		15.000.000.000.000

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp1,040 triliun

Rincian rekening yang terkait dengan penampungan bunga dan jasa giro Program Dana Bergulir sebesar dapat dilihat pada **Daftar 5**.

C.2.4. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp1.036.241.894.537 dan Rp1.154.712.127.961 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/ dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp901,89 miliar

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada **Daftar 7**.

C.2.5. Kas di Bendahara Penerimaan

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp1.040.200.195.970 dan Rp1.308.388.040.590 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, termasuk bunga dan jasa giro, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada **Daftar 8**.

C.2.6. Kas Lainnya dan Setara Kas

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2009 sebesar Rp901.887.427.630 merupakan kas yang berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, serta belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Kas Lainnya dan Setara Kas pada LKPP Tahun 2008 belum disajikan di neraca dan hanya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari:

Akun Lawan	Jumlah (Rp)
Bunga dan Jasa Giro, dan Pengembalian Belanja yang Belum Disetor ke Kas Negara	272.596.435.596
Kas yang Belum Dibayarkan kepada Pihak Ketiga	629.290.992.034
Jumlah	901.887.427.630

Kas pada BLU Rp5,68
triliun

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN adalah sebagai berikut:

Kementerian Negara/Lembaga/BUN	Jumlah (Rp)
--------------------------------	-------------

1. K/L	891.980.538.181
2. BUN	9.906.889.449
Jumlah	901.887.427.630

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada **Daftar 9**. Kas Lainnya dan Setara Kas yang berada di BUN sebesar Rp9.906.889.449 merupakan Kas Lainnya dan Setara Kas yang terdapat di Bagian Anggaran Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain.

C.2.7. Kas pada BLU

Jumlah Kas pada BLU per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp5.676.975.379.101 dan Rp2.389.096.828.525 merupakan saldo kas pada BLU, yang terdiri dari (dalam Rp):

BLU pada Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	488.720.118.967	136.612.762.104
2. BLU di Kementerian Keuangan	684.555.535.893	2.712.498.742
3. BLU di Kementerian Perindustrian	3.700.755.939	2.430.698.522
4. BLU di Kementerian Perhubungan	36.760.635.569	-
5. BLU di Kementerian Pendidikan Nasional	922.558.918.746	-
6. BLU di Kementerian Kesehatan	733.712.654.546	578.370.995.867
7. BLU di Kementerian Agama	104.273.729.179	24.478.849.329
8. BLU di Kementerian Nakertrans	1.571.896.718	187.716.592
9. BLU di Kementerian Pekerjaan Umum	104.217.408.625	50.311.891.122
10. BLU di Kementerian Negara Ristek	728.838.641	882.859.510
11. BLU di Kementerian Negara Koperasi dan UKM	75.654.326.567	20.464.390.728
12. BLU di Kementerian Komunikasi dan Informatika	2.513.291.437.536	1.570.003.709.414
13. BLU di BPPT	5.238.532.988	2.640.456.595
14. BLU di LAPAN	1.990.589.187	-
Jumlah	5.676.975.379.101	2.389.096.828.525

*Uang Muka dari
Rekening BUN Rp5,56
triliun*

Kas pada BLU di Sekretariat Negara sebesar Rp488.720.118.967 termasuk Investasi Jangka Pendek BLU sebesar Rp344.585.000.000 berupa deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang.

Pada Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum, Kas pada BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) disajikan sebesar Rp255.166.521.699. Dalam rangka konsolidasi ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sebagian Kas pada BLU di BPJT sebesar Rp150.949.113.074 direklasifikasi sebagai bagian dari nilai Investasi Non Permanen Lainnya di BUN. Lihat **Catatan C.2.21**.

Dalam total Kas pada BLU sebesar Rp5.676.975.379.101, Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN melalui SP2D Pengesahan atas Pendapatan dan Belanja Operasional BLU serta koreksi saldo awal kas pada BLU adalah sebesar Rp5.567.846.500.943. Lihat **Catatan D.1**.

*Piutang Pajak
Rp63,66 triliun*

C.2.8. Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2009 dan 31 Desember

2008 sebesar Rp5.560.724.882.615 dan Rp3.726.790.367.113 merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum ada penggantian dari *lender*. Rincian Uang Muka dari Rekening BUN menurut *lender* adalah sebagai berikut (dalam Rp):

<i>Lender</i>	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
1. IBRD	2.562.224.426.309	1.428.464.542.128
2. ADB	727.617.392.785	720.466.564.351
3. OECF/JBIC	644.628.824.335	636.884.008.741
4. Lainnya	1.626.254.239.186	940.975.251.893
Jumlah	5.560.724.882.615	3.726.790.367.113

C.2.9. Piutang Pajak

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp63.658.918.330.257 dan Rp55.545.222.477.952 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Unit Pengelola (Kementerian Keuangan)	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
1. Direktorat Jenderal Pajak	49.999.727.823.996	45.173.077.395.398
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	13.659.045.063.184	10.318.356.917.933
3. Direktorat Jenderal Anggaran	-	53.788.164.621
4. BUN (Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain)	145.443.077	-
Jumlah	63.658.918.330.257	55.545.222.477.952

1. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp49.999.727.823.996 dan Rp45.173.077.395.398 merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2009. Rincian piutang pajak per jenis pajak dapat dilihat pada Tabel 9.

*Piutang Pajak per Jenis
Pajak pada Ditjen Pajak*

Tabel 9
Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak
(Dalam Rp)

No.	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2009	31 Desember 2008
1.	Piutang PPh Pasal 21	951.534.554.486	1.229.968.846.712
2.	Piutang PPh Pasal 22	489.840.716.690	104.120.004.440
3.	Piutang PPh Pasal 23	1.688.528.889.756	3.054.716.319.783
4.	Piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi	1.053.689.834.133	1.006.960.630.021
5.	Piutang PPh Pasal 25 Badan	16.424.024.121.140	16.268.284.571.207
6.	Piutang PPh Pasal 26	1.586.493.805.101	125.143.589.474
7.	Piutang PPh Final	535.862.689.996	922.916.307.676
8.	Piutang PPh Non Migas Lainnya	-	95.145.000
9.	Piutang PPN Dalam Negeri	14.533.638.585.793	12.560.346.602.995
10.	Piutang PPN Impor	-	-
11.	Piutang PPnBM Dalam Negeri	280.485.129.787	280.039.959.243
12.	Piutang PBB Pedesaan	1.327.539.551.495	746.285.302.993
13.	Piutang PBB Perkotaan	7.542.885.445.040	4.527.189.629.491
14.	Piutang PBB Perkebunan	474.394.030.911	212.754.667.994
15.	Piutang PBB Kehutanan	492.606.633.014	477.992.946.905
16.	Piutang PBB Pertambangan	158.566.341.854	64.058.196.664
17.	Piutang BPHTP	179.947.361.649	803.339.377.782
18.	Piutang PTLL	16.386.067.497	815.162.918
19.	Piutang Bunga Penagihan PPh	2.263.304.065.654	2.788.050.134.100
	Jumlah	49.999.727.823.996	45.173.077.395.398

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJP dapat dirinci sebagai berikut:

Umur Piutang	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
• Kurang dari 1 Tahun	13,167,888,974,329	12,239,111,738,000
• 1 Tahun dan Kurang dari 3 Tahun	12,641,269,957,462	9,776,181,927,000
• 3 Tahun dan Kurang dari 5 Tahun	9,037,953,073,649	10,213,857,380,000
• 5 Tahun atau Lebih	15,152,615,818,556	12,943,926,315,000
Jumlah	49,999,727,823,996	45,173,077,360,000

Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai

- Dalam Piutang Pajak sebesar Rp49.999.727.823.996 tersebut, terdapat penyisihan piutang pajak sebesar Rp6.576.263.130.917 dan piutang yang telah daluwarsa penagihannya sebesar Rp2.024.660.971.072. Dari Piutang Pajak yang telah daluwarsa sebesar Rp2.024.660.971.072 tersebut, telah diusulkan penghapusan sebesar Rp265.222.496.449 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan sebesar Rp185.828.008.288. Rincian Piutang Pajak per Kanwil dan Umur Piutang dapat dilihat pada **Daftar 10.A**.
- Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak melayani Wajib Pajak yang mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Nominal surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan atas surat ketetapan pajak dan banding/gugatan yang belum mendapat keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 adalah Rp16.980.382.084.219 dan USD75.149.571 ekuivalen dengan Rp17.686.788.050.209. (Rincian pada **Daftar 10.B**).
- Dalam rangka melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penyitaan terhadap harta benda wajib pajak sebagai jaminan piutang pajak yang tidak dilunasi Wajib Pajak

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harga benda Wajib Pajak yang dilakukan penyitaan yang belum dilakukan penjualan secara lelang dan atau penjualan yang dikecualikan dari lelang dengan estimasi harga pasar Rp2.849.986.956.896 dari piutang pajak sebesar Rp8.898.001.049.618.

2. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp13.659.045.063.184 dan Rp10.318.356.917.933 merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian Piutang Pajak per jenis pajak dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10
Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai

No.	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2009	31 Desember 2008
1	Piutang PPh Pasal 22	-	605.746.817
2	Piutang PPh Pasal 22 Impor	46.369.265.166	60.097.792.650
3	Piutang PPN Dalam Negeri	1.910.119.388.044	15.831.619.020
4	Piutang PPN Impor	242.980.196.543	314.536.177.859
5	Piutang PPN Lainnya	40.102.155.164	40.699.539.992
6	Piutang PPnBM Impor	32.417.342.712	72.082.878.740
7	Piutang PPnBM Lainnya	492.321.416	492.321.416
8	Piutang Cukai Hasil Tembakau	9.777.543.116.859	8.340.260.529.183
9	Piutang Cukai Ethyl Alkohol	132.712.267.500	132.717.267.500
10	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	2.919.640.200	2.907.261.928
11	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	2.366.976.700	19.916.519.120
12	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	89.118.752.770	30.949.290
13	Piutang Bunga Penagihan PPN	26.296.597.609	548.229.952
14	Piutang Bea Masuk	577.719.582.938	594.584.854.793
15	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	575.232.281.854	654.724.926.398
16	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	188.582.383.945	68.320.303.275
17	Piutang Pajak/Pungutan Ekspor	14.072.793.764	53.788.164.621
Jumlah		13.659.045.063.184	10.372.145.082.554

*Piutang Bukan Pajak
Rp21,86 triliun*

3. Piutang Pajak/Pungutan Ekspor mulai TA 2009 dikelola dan ditatausahakan Ditjen Bea Cukai, sebelumnya dikelola oleh DJA. Pada LKPP tahun 2008, Piutang Pajak/Pungutan Ekspor dilaporkan di DJA sebesar Rp53.788.164.621. Dengan adanya perpindahan pengelolaan kepada Ditjen Bea Cukai maka nilai tersebut disajikan pada tabel di atas pada kolom per 31 Desember 2008.
4. Piutang pajak yang berada di BUN (Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain) sebesar Rp145.443.077 merupakan pajak yang belum dipungut dan disetor ke kas Negara pada Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga berdasarkan hasil audit BPKP atas PPN, PPh Ps.21, PPh Ps.22, dan PPh Ps.23 tahun 2008 yang diterbitkan tahun 2009.

*Piutang Bukan Pajak di
BUN Rp18,42 triliun*

C.2.10. Piutang Bukan Pajak

Piutang Transfer ke Daerah

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp21.859.930.458.886 dan Rp35.553.438.348.026. Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang tersebut terdiri dari (dalam Rp):

Jenis Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
1. Piutang pada K/L	3.437.022.301.893	35.268.484.471.047
2. Piutang pada BUN	18.422.908.156.993	284.953.876.979
Jumlah	21.859.930.458.886	35.553.438.348.026

1. Rincian Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2009 sebesar Rp3.437.022.301.893 dapat dilihat pada **Daftar 11**.
2. Piutang Bukan Pajak pada BUN per 31 Desember 2009 sebesar Rp18.422.908.156.993 terdiri dari (dalam Rp):

Piutang kepada PT PPA

	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
1. Piutang Transfer ke Daerah	407.815.573.045	276.042.168.098
2. Piutang pada Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain	91.475.363.139	1.196.400
3. Piutang kepada PT PPA	6.632.512.481	8.910.512.481
4. Piutang Migas	16.432.267.206.671	-
5. Piutang Panas Bumi	-	-
6. Piutang Dividen dan Denda	1.083.069.018.860	-
7. Piutang PBHP BBM	401.648.482.797	-
Jumlah	18.422.908.156.993	284.953.876.979

Piutang Migas, Piutang Panas Bumi, serta Piutang Denda dan Dividen pada LKPP Tahun 2008 merupakan bagian dari Piutang PNB di Kementerian Keuangan (BA 015), dan mulai LKPP Tahun 2009 dilaporkan sebagai Piutang BUN yang ditatausahakan pada Bagian Anggaran BUN 999.99 Transaksi Khusus.

- **Piutang Transfer ke Daerah** sebesar Rp407.815.573.045 merupakan piutang akibat lebih salur Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak (PPH dan PBB) serta DBH SDA (Migas, pertambangan Umum dan Kehutanan) TA 2008 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1.	Lebih Salur PPh TA 2008	165.823.571
2.	Lebih Salur DBH SDA Migas TA 2008	21.319.031.704
3.	Lebih Salur DBH SDA Pertum TA 2008	28.004.664
4.	Lebih Salur DBH SDA Kehutanan TA 2008	87.272.495.393
5.	Lebih Salur BP PBB TA 2008	719.259.464
6.	Lebih Salur DBH PPh Pasal 21 dan 25/29 TA 2009	4.869.335.541
7.	Lebih Salur BP PBB TA 2009	1.385.285.828
8.	Lebih Salur DBH SDA Migas TA 2009	37.232.743.076
9.	Lebih Salur DBH SDA Pertum TA 2009	67.306.166.911
10.	Lebih Salur DBH SDA Kehutanan TA 2009	184.272.109.329
11.	Lebih Salur Panas Bumi TA 2009	3.245.317.564
	Total	407.815.573.045

Piutang Migas

- **Piutang kepada PT PPA** merupakan kewajiban PT PPA atas Hasil Pengelolaan Aset (HPA) yang masih harus disetorkan kepada pemerintah dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Piutang Panas Bumi

Uraian	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
Saldo Awal (1)	8.910.512.481	39.996.029.058
Penerimaan:		
Hasil Pengelolaan Aset (HPA):		
Divestasi saham yang dikelola	0	1.046.652.097.404
Dividen atas saham yang dikelola	5.982.000.000	8.566.099.501
Pokok dan bunga atas tagihan yang dikelola	90.000.000	227.751.325.112
Pokok dan Bunga Bunga atas obligasi yang dikelola	67.063.000.000	32.050.000.000
Redemption Obligasi		
Hasil Penjualan Properti	0	120.631.818.393
Hasil sewa aset properti	0	12.848.485
HPA aset lainnya	0	42.292.400.000
Jumlah HPA	73.135.000.000	1.477.956.588.895
Dana Cadangan Biaya Pengelolaan		
Bunga dari dana HPA yg masih harus disetor	8.469.000.000	42.003.000.000
Lain-lain	0	164.173.387
Jumlah Penerimaan (2)	81.604.000.000	1.520.123.762.282
Pengurangan:		
Biaya pengelolaan yang dapat diperoleh kembali tahun berjalan dan telah dibayar tunai	1.414.000.000	126.195.000.000
Biaya pengelolaan yang dapat diperoleh kembali periode sebelumnya yang dibayar tunai pada tahun berjalan	0	2.792.318.780
Imbalan Pengelolaan Aset	60.934.000.000	84.780.000.000
PPN atas Imbalan Pengelolaan Aset	6.093.000.000	8.478.000.000
PPN atas Penggantian Biaya Pengelolaan	141.000.000	65.441.000.000
Tunggakan biaya/biaya aset dengan penugasan khusus	214.000.000	1.696.000.000
Jumlah Pengurangan (3)	68.796.000.000	289.382.318.780
HPA yang harus disetor ke Pemerintah ((4)=(1)+(2)-(3))	21.718.512.481	1.270.737.472.560
HPA yang telah disetor ke Pemerintah (5)	(15.086.000.000)	(1.261.826.960.079)
Jumlah HPA yang masih harus disetor (6) = (4) - (5)	6.632.512.481	8.910.512.481

- **Piutang Migas** per 31 Desember 2009 sebesar Rp16.432.267.206.671 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
1. Piutang pada PT Pertamina	14.702.738.684.323	26.167.177.124.880
2. Piutang Migas Lainnya	1.729.528.522.348	1.048.403.339.450
Jumlah	16.432.267.206.671	27.215.580.464.330

Piutang Migas pada tahun 2009 berkurang sebesar Rp10.783,31 miliar atau 39,62% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang disebabkan penurunan piutang dari PT Pertamina turun Rp11.464,44 miliar atau 43,81%, sedangkan piutang dari perusahaan lainnya bertambah 64,97% sebanyak Rp681,12 miliar.

Rincian Piutang Migas disajikan pada **Daftar 12**.

- Pada LKPP Tahun 2008 disajikan **Piutang Panas Bumi** per 31 Desember 2008 sebesar Rp117.641.765.300 (USD10.743.540,22). Piutang tersebut merupakan setoran bagian Pemerintah dan denda dari kegiatan usaha panas bumi, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pengusaha	USD	Rp (ekuivalen)
----------------	-----	----------------

1. Chevron Geothermal Salak, Ltd	9.980.936,67	109.291.256.537
2. Chevron Geothermal Indonesia, Ltd	570.191,06	6.243.592.107
3. Dayabumi Salak Pratama, Ltd	185.630,59	2.032.654.961
4. PT Darajat Geothermal Indonesia	6.781,90	74.261.805
Jumlah	10.743.540,22	117.641.765.300

Piutang Dividen dan Denda

Piutang panas bumi muncul setelah adanya temuan pemeriksaan BPK atas pengelolaan PNBPTA 2005 dan Semester I TA 2006 bahwa jumlah bagian Pemerintah yang disetor ke Rekening Panas Bumi tidak dihitung berdasarkan 34% dari *net operating income (NOI)* tetapi 34% dari NOI setelah dikurangi Pertamina Allowance (PA). BPK berpendapat bahwa perbedaan cara perhitungan ini mengakibatkan terjadinya kekurangan setoran bagian Pemerintah dari pengusaha panas bumi dan menyarankan agar dilakukan penagihan kepada pengusaha dimaksud.

Menindaklanjuti temuan tersebut, sejak bulan Mei 2007 Pemerintah telah melakukan beberapa kali penagihan kepada pengusaha panas bumi terakhir pada tanggal 14 Januari 2009. Penagihan tersebut diikuti pula dengan penangguhan pengembalian PPN kepada pengusaha panas bumi.

Terhadap penagihan tersebut, pengusaha panas bumi tetap berpendapat bahwa cara menghitung NOI yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas perbedaan pendapat ini, BPK telah melakukan kajian hukum dan telah menyampaikan hasil kajiannya melalui surat No. 022/S/XV/4/2009 tanggal 7 April 2009 yang intinya antara lain:

- 1) Sehubungan dengan adanya *dispute* mengenai penafsiran dan penerapan JOC dan sambil menunggu adanya perundingan kembali mengenai klausul dalam *Joint Operating Contract (JOC)* terkait dengan perlakuan PA, BPK berpendapat agar mekanisme perhitungan yang selama ini telah berjalan yaitu memperlakukan PA sebagai pengurang NOI dapat tetap dijalankan untuk menghindari permasalahan hukum yang mungkin dapat merugikan Pemerintah.
- 2) BPK menyempurnakan sarannya terdahulu menjadi "Pemerintah melakukan perundingan kembali JOC dengan Chevron Geothermal Salak (CGS) untuk memperjelas perlakuan PA dalam menentukan besarnya NOI sebagai dasar perhitungan *Government Share*".

Menindaklanjuti surat BPK tersebut, pada tanggal 29 April 2009 telah dilakukan rapat antara Pemerintah, BPK, CGS, dan Pertamina Geothermal Energy (PGE) dengan hasil rapat antara lain:

- 1) Perhitungan yang selama ini telah berjalan yaitu memperlakukan PA sebagai pengurang NOI dapat tetap dijalankan.
- 2) *Reimbursement* PPN panas bumi dapat diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Surat BPK No. 022/S/XV/4/2009 tanggal 7 April 2009 dan hasil rapat tanggal 29 April 2009, Piutang Panas Bumi sebesar Rp117.641.765.300 (USD10.743.540,21) tidak dilaporkan dalam LKPP Tahun 2009.

- Piutang Dividen dan Denda per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.083.069.018.860 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2009	31 Desember 2008
--------	------------------	------------------

Piutang atas PBHP BBM

	(<i>Audited</i>)	(<i>Audited</i>)
1. Pokok Dividen	1.021.533.653.399	154.006.304.779
2. Denda Bunga Deviden	61.535.365.461	63.060.536.065
Jumlah	1.083.069.018.860	217.066.840.844

Piutang Dividen dan Denda tersebut merupakan:

1. Piutang yang telah mendapat Penetapan Menteri Keuangan untuk diangsur sebesar Rp43.280.884.179;
2. Piutang yang belum mendapat penetapan Menteri Keuangan sebesar Rp134.344.790.769; dan
3. Tambahan Piutang Dividen PT Pertamina pada tahun 2009 sebesar Rp905.443.343.912.

Beberapa informasi penting lainnya yang terkait dengan piutang dividen dan denda antara lain:

- Piutang Dividen dan Denda kepada PT Istaka Karya dan PT Bina Karya telah diaudit oleh BPKP.
- Piutang Pokok Dividen kepada PT Perkebunan Nusantara II sebesar Rp37.605.130.291 telah diselesaikan melalui konversi menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) sesuai UU APBN-P TA 2009. Konversi piutang tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II yang disahkan pada tanggal 31 Desember 2009.
- PT Balai Pustaka mengajukan usulan agar Piutang Dividen kepada PT Balai Pustaka dikonversi menjadi PMN.
- Pemerintah telah melakukan koreksi terhadap Piutang Dividen kepada PT Nindya Karya sebesar Rp100.000.000 sebagai akibat tidak disampaikannya bukti penyetoran dividen dimaksud pada tahun 2008.
- PT Pertamina mengusulkan tunggakan dividen sebesar Rp905.443.343.912 di-*offset* dengan Piutang PT Pertamina kepada PT PLN atas pemakaian BBM oleh PT PLN dalam rangka subsidi listrik. Usulan PT Pertamina tersebut sampai dengan akhir tahun anggaran 2009 belum mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.

*Bagian Lancar TPA
Rp107,95 juta*

*Bagian Lancar Tagihan
TGR Rp30,62 miliar*

*Bagian Lancar Investasi
Jangka Panjang Rp5,07
triliun*

- **Piutang atas Pendapatan Bersih Hasil Penjualan (PBHP) BBM** per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp401.648.482.797. Piutang tersebut diperoleh berdasarkan:
 - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Subsidi Jenis BBM Tertentu Tahun 2008 pada PT Pertamina (Persero) No. 2/S/IX-XX/11/2009 tanggal 30 November 2009, yang menyatakan adanya kekurangan penyetoran PBHP BBM Jenis Premium Tahun 2008 sebesar Rp413.702.280.868.
 - Hasil verifikasi Jenis BBM Tertentu Triwulan I dan II TA 2009 yang menetapkan adanya kelebihan setor PBHP BBM oleh PT Pertamina (Persero) sebesar Rp12.053.818.071 dengan rincian sebagai berikut:
 - Kelebihan setor PBHP BBM Triwulan I TA 2009 pada bulan Januari 2009 sebesar Rp11.735.385.768;

Uang Muka Belanja
Rp197,62 miliar

- Kelebihan setor PBHP BBM Triwulan II TA 2009 pada bulan April 2009 sebesar Rp318.432.303;
- Dengan demikian, apabila memperhitungkan kelebihan setor PBHP BBM Tahun 2009 sebesar Rp12.053.818.071 di atas, maka kekurangan penyetoran PBHP BBM Tahun 2008 hasil audit menjadi Rp401.648.482.797.

Direktur Jenderal Anggaran melalui Surat No. S-3883/AG/2009 tanggal 29 Desember 2009 telah melakukan penagihan atas PBHP BBM sebesar Rp401.648.482.797 kepada PT Pertamina (Persero), namun sampai berakhirnya tahun 2009, PBHP BBM tersebut belum disetorkan ke kas negara.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.02/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2009, bahwa hasil final perhitungan subsidi BBM (termasuk PBHP BBM) Tahun Anggaran 2009 berdasarkan laporan hasil audit yang disampaikan oleh auditor yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C.2.11. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp107.946.353 dan Rp29.352.684 merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca yang berada di BAPPENAS.

C.2.12. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp30.620.839.227 dan Rp5.799.034.235 merupakan saldo Tagihan TGR pada K/L dan BUN (Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya) yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing K/L dan BUN (Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya) dapat dilihat pada **Daftar 13**.

C.2.13. Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang

Piutang Kegiatan BLU
Rp1,52 triliun

Jumlah Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp5.067.629.170.009 dan Rp22.657.399.160.000 merupakan bagian lancar Rekening Dana Investasi/Rekening Pemerintah Daerah (RDI/RPD) dan SLA kepada pemda, BUMN, dan BUMD yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut (dalam juta Rp):

Bagian Lancar RDI/RPD	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
Pokok Jatuh Tempo (01/01/2010 s.d 31/12/2010)	5.067.629,17	4.919.496,56
Tunggakan Kewajiban Pinjaman (s.d 31/12/2009)	-	17.136.615,72
Kewajiban Akrua Bunga, CC dan Denda (s.d 31/12 - 2009)	-	601.286,87
Jumlah	5.067.629,17	22.657.399,16

Penurunan yang signifikan terhadap Tunggakan Kewajiban Pinjaman (s.d. 31/12/2009) terjadi karena adanya reklasifikasi potensi tunggakan yang tidak tertagih

setelah 1 (satu) tahun laporan menjadi piutang lainnya dan investasi jangka panjang.

Kewajiban akrual Bunga, CC dan Denda (s.d 31/12 -2009) pada LKPP Tahun 2009 disajikan sebagai Piutang Lain-lain (Lihat *Catatan C.2.16*)

C.2.14. Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp197.622.609.348 dan Rp139.810.228.392 merupakan uang muka dan/atau pembayaran termin yang telah diterima oleh kontraktor atau pihak ketiga atas pekerjaannya dalam rangka penyediaan barang dan aset tetap, yang berada di beberapa K/L, yaitu (dalam Rp):

*Piutang lain-lain
Rp15,49 triliun*

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
1. BPK	10.437.630.216	24.024.677.924
2. MA	6.212.330.140	-
3. Kementerian Keuangan	35.148.473.050	-
4. Kementerian Kesehatan	55.563.200.000	-
5. BPPT	315.595.600	620.879.400
6. Kementerian Kehutanan	45.791.500	-
7. Kementerian Kominfo	53.350.000	-
8. BPS	120.006.897	-
9. BKN	20.034.107.145	118.958.328
10. Kementerian Perdagangan	41.110.990.542	42.138.570.000
11. KPK	249.002.600	45.314.500
12. BRR NAD-Nias	26.695.788.910	70.495.008.240
13. Komisi Yudisial	-	2.366.820.000
14. LIPI	9.720.000	-
15. BAPETEN	80.773.000	-
16. BPN2TKI	87.083.000	-
17. BUN (Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya)	1.458.766.748	-
Jumlah	197.622.609.348	139.810.228.392

2.15. Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp1.520.445.115.328 dan Rp1.453.920.244.591 merupakan piutang yang timbul dalam kegiatan operasional BLU sebesar Rp1.520.428.660.328 dan non operasional BLU sebesar Rp16.455.000.

Piutang Kegiatan Operasional BLU adalah sebesar Rp1.520.428.660.328 berada di (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
1. Sekretariat Negara	965.822.275.015	986.208.102.418
2. Kementerian Pendidikan Nasional	55.805.933.794	464.393.940.802
3. Kementerian Kesehatan	493.273.227.599	-
4. Kementerian Agama	1.340.899.294	-
5. Kementerian Ristek	150.850.000	-
6. Kementerian Negara Koperasi dan UKM	2.918.974.626	1.691.720.664
7. BPPT	1.116.500.000	902.695.000
Jumlah	1.520.428.660.328	1.453.196.458.884

Piutang Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp16.455.000 berada di (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
1. Kementerian Kesehatan	16.455.000	46.196.666
2. Kementerian Pekerjaan Umum	-	677.589.041
Jumlah	16.455.000	723.785.707

Piutang Kegiatan Operasional dan Non Operasional tersebut tidak termasuk:

- Piutang Kegiatan Operasional dan Non Operasional BLU PIP (Kementerian Keuangan) masing-masing sebesar Rp24.105.879.147 dan Rp16.724.647.449 karena direklasifikasi menjadi Investasi Non Permanen Lainnya. (Lihat *Catatan C.2.21*).
- Piutang dari Kegiatan Operasional BLU BPJT (Kementerian Pekerjaan Umum) sebesar Rp902.369.340.919 karena direklasifikasi sebagai bagian dari nilai Investasi Non Permanen Lainnya. (Lihat *Catatan C.2.21*).

C.2.16. Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp15.492.809.289.778 dan Rp12.023.319.207.884 merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang terdiri dari (dalam Rp):

Jenis Piutang	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
• Piutang di K/L	44.358.140.754	18.297.312.835
• Piutang di BUN	15.448.451.149.024	12.005.021.895.049
Jumlah	15.492.809.289.778	12.023.319.207.884

1. Piutang di K/L sebesar Rp44.358.140.754 dan Rp18.297.312.835 merupakan piutang yang berada di (Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
1. Kejaksaan Agung	32.824.418.507	-
2. Kementerian Pertahanan	11.016.754.047	14.068.926.394
3. BKPM	-	337.246.098
4. BPPT	-	3.300.000.000
5. Bakorsurtanal	-	74.172.143
6. BRR NAD-Nias	516.968.200	516.968.200
Jumlah	44.358.140.754	18.297.312.835

2. Piutang yang berada di BUN sebesar Rp15.448.451.149.024 terdiri dari Piutang Kredit Program sebesar Rp2.000.988.665.721, Piutang yang terkait dengan Penerusan Pinjaman sebesar Rp2.079.012.175.351, dan piutang kepada 20 Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp11.368.450.307.952.

Piutang Kredit Program sebesar Rp2.000.988.665.721 merupakan tagihan

kepada beberapa terkait dengan kredit program dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Hak Tagih Kredit Listrik Pedesaan (KLP)	1.747.092.000
Hak Tagih Peternakan	97.299.813.371
Tunggakan KKOP Pangan MP 2000	91.009.118.970
Tunggakan Pengadaan KUT TP 1999/2000	917.370.113.306
Dana Cadangan KUT TP 1999/2000	24.716.396.342
Hak Tagih Perkebunan	865.251.531.732
Proyek P2A	3.594.600.000
Jumlah	2.000.988.665.721

- Hak Tagih Kredit Listrik Pedesaan (KLP) sebesar Rp1.747.092.000 merupakan angka yang berasal dari PT BRI (Persero). Kredit Listrik Pedesaan dimaksudkan untuk pemerataan penerangan listrik bagi masyarakat pedesaan yang tidak mampu membayar penyambungan listrik PLN. Saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.742.226.000 disajikan sebagai bagian dari Dana Bergulir.
- Hak Tagih Peternakan sebesar Rp97.299.813.371 merupakan hak tagih pemerintah yang masih di petani terhadap kredit yang disalurkan kepada proyek peternakan (Redistribusi Ternak dan Proyek P3 Sapi Bali). Saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp114.063.628.750 disajikan sebagai bagian dari Dana Bergulir.
- Tunggakan KKOP Pangan sebesar Rp91.009.118.970 merupakan hak pemerintah atas Kredit kepada Koperasi dalam rangka Pengadaan Pangan (KKOP Pangan) Musim Panen 2000. Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, Pemerintah telah menandatangani perjanjian dengan 5 (lima) bank pelaksana dengan total plafond sebesar Rp500 milliar.
- Hak pemerintah sebesar Rp917.370.113.306 merupakan tunggakan yang terkait dengan program KUT Tahun 1999/2000. Dalam rangka pelaksanaan KUT TP 1999/2000 tersebut, Pemerintah telah melakukan kerjasama dengan 11 bank pelaksana dalam rangka penyediaan pendanaan dengan subsidi bunga dari pemerintah, dengan total plafond Rp1.903 miliar.
- Hak Tagih sebesar Rp865.251.531.732 merupakan hak tagih yang terdiri dari PIR Perkebunan sebesar Rp508.761.447.045 dan UPP Perkebunan sebesar Rp3 356.490.084.687.

Pada LKKP tahun 2008, hak tagih terkait dengan kredit program tersebut di atas disajikan sebagai bagian dari investasi Dana Bergulir. *Lihat Catatan C.2.20.*

Piutang lainnya yang terkait dengan Penerusan Pinjaman sebesar Rp2.079.012.175.351 terdiri dari Piutang Bunga atas *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang ditandatangani setelah tahun 2008 sebesar Rp233.271.000,00, serta Bunga Akrua dan Tunggakan Kewajiban RDI/RPD sebesar Rp2.078.778.904.35.

Piutang kepada kepada 20 Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp11.368.450.307.952 merupakan total kewajiban 20 BDL kepada Pemerintah sampai dengan triwulan IV tahun 2009, yang terdiri dari (dalam Rp):

31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
-------------------------------	-------------------------------

*Investasi Jangka Pendek
BLU Rp11,77 miliar*

Persediaan
Rp36,61 triliun

- 15 BDL eks dana talangan Pemerintah	8.466.331.021.609	8.606.906.001.002
- 5 BDL eks dana penjaminan Pemerintah	2.902.119.286.343	3.272.782.950.814
Jumlah	11.368.450.307.952	11.879.688.951.816

- Piutang pada 15 BDL eks dana talangan Pemerintah sebesar Rp8.466.331.021.609, berasal dari:

Uraian	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
Dana BLBI BDL yang di-cessie-kan	11.888.938.781.558	11.888.938.781.558
Dikurangi:		
- Pengembalian s.d. Desember 2006	(2.730.645.774.151)	(2.730.645.774.151)
- Pengembalian tahun 2007	(228.053.353.977)	(228.053.353.977)
- Pengembalian tahun 2008	(323.144.463.070)	(323.333.652.428)
- Pengembalian tahun 2009	(140.764.168.751)	-
Saldo BLBI	8.466.331.021.609	8.606.906.001.002

Dari 15 BDL, 12 BDL telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset dari Tim Likuidasi kepada Pemerintah cq. Kementerian Keuangan dengan, 1 (satu) BDL yaitu Bank Umum Majapahit Jaya telah melaksanakan RUPS pembubaran Tim Likuidasi, dan 2 (dua) BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta dan PT Bank Industri.

RDI/RPD Rp56,83 triliun

- Piutang pada 5 BDL Eks Dana Penjaminan sebesar Rp2.902.119.286.343 merupakan saldo penjaminan pemerintah terhadap 5 BDL yang diberikan melalui UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah) dengan bank pembayar PT BNI (Persero), dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
Total dana BLBI BDL yang di-cessie-kan	3.321.282.950.813	3.321.282.950.814
Dikurangi:		
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2006	(9.000.000.000)	(5.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2007	(28.500.000.000)	(28.500.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2008	(15.000.000.000)	(15.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2009	(366.663.664.470)	-
Saldo BLBI	2.902.119.286.343	3.272.782.950.814

Rincian Piutang 20 BDL lebih lengkap dapat dilihat pada Daftar 14.

C.2.17. Investasi Jangka Pendek BLU

Jumlah Investasi Jangka Pendek BLU per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp11.770.000.000 dan Rp328.585.000.000, merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam tahun 2010. Nilai investasi tahun 2009 tersebut berada di BLU Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp3.000.000.000 dan Kementerian Agama sebesar Rp8.770.000.000 berupa Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 bulan. Nilai investasi per 31

Desember 2008 sebesar Rp328.585.000.000 merupakan nilai deposito di BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK)-Sekretariat Negara.

Dalam rangka konsolidasi LKPP, Investasi Jangka Pendek BLU yang berada di BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) - Sekretariat Negara sebesar Rp344.585.000.000 yang berupa Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan direklasifikasi menjadi Kas pada BLU. Lihat *Catatan C.2.7*

C.2.18. Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp36.606.824.405.660 dan Rp17.701.765.092.694 dan merupakan nilai persediaan yang berdasarkan neraca K/L dan unit terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Persediaan	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
Persediaan di K/L	32.986.275.378.751	15.648.127.123.535
Persediaan di BLU	303.087.546.746	156.463.008.935
Persediaan di BUN	3.317.461.480.163	1.897.174.960.224
Jumlah	36.606.824.405.660	17.701.765.092.694

Persediaan di K/L termasuk persediaan yang diperoleh dari dana non APBN (hibah) Rincian Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada **Daftar 15**.

Persediaan di BUN per 31 Desember 2009 sebesar Rp3.317.461.480.163 terdiri dari antara lain terdiri:

- Cadangan Benih Nasional (CBN) pada Ditjen Tanaman Pangan-Kementerian Pertanian sebesar Rp31.819.246.125 yang terdiri dari benih padi, kedelai, dan jagung sejumlah total 17.031.341 Kg, yang berada di gudang sejumlah 3.393.962 Kg dan *stock* penangkaran di PT Sang Hyang Seri sejumlah 13.637.379 Kg.
- Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp2.830.571.480.000 setara dengan quantum 514.649.360 Kg dikalikan dengan HPB tahun 2009 yaitu Rp5.500/Kg.

C.2.19. Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD)

Jumlah Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah (RDI/RPD) per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp56.829.949.663.857 dan Rp50.671.978.070.000 merupakan jumlah pinjaman jangka panjang (pokok pinjaman dan potensi pinjaman yang tidak dapat ditagih tahun 2010) kepada Pemda, BUMD, dan BUMN yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca, terhadap perjanjian pinjaman/penerusan pinjaman yang ditandatangani sebelum tahun 2009. Berikut di bawah ini adalah rincian RDI/RPD (dalam Rp juta):

Piutang RDI/RPD	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
Outstanding Pokok Pinjaman	49.721.811,36	62.322.464,19
• Bagian Lancar Pokok Pinjaman	(5.067.629,17)	(4.919.496,56)
• Total Tunggakan	15.417.542,43	-
• Tunggakan yang menjadi Bagian Lancar	(1.560.055,04)	(6.730.989,55)
• Tunggakan macet	(1.681.719,92)	-

RDI/RPD Jangka Panjang	56.829.949,67	50.671.978,07
------------------------	---------------	---------------

Catatan:

Pada LKPP Tahun 2008, total tunggakan disajikan sebagai Bagian Lancar RDI. Sedangkan pada LKPP Tahun 2009, dari total tunggakan sebesar Rp15.417.542,43 juta, sebesar Rp1.560.055,037 juta disajikan sebagai Piutang Lain-lain, sebesar Rp1.681.719,92 yang sudah tidak dapat ditagih disajikan sebagai aset lainnya, sedangkan sisanya sebesar Rp12.175.767,47 juta disajikan sebagai Investasi Jangka Panjang RDI/RPD (Lihat Catatan C.2.16 dan C.2.26 Aset Lain-lain) karena merupakan tunggakan yang memiliki potensi tidak dapat ditagih pada tahun 2010, sehingga kemungkinan akan diselesaikan melalui mekanisme restrukturisasi.

Dana Bergulir
Rp5,45 triliun

Tunggakan Kewajiban Pinjaman sebesar Rp15.417.542,43 juta sampai dengan 31 Desember 2009 terdiri dari (dalam juta Rp):

Tunggakan Kewajiban Pinjaman	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
Pokok	5.766.977,85	6.730.989,55
Bunga	5.620.923,04	5.444.343,75
Biaya Lainnya	4.029.641,54	4.961.282,42
Jumlah	15.417.542,43	17.136.615,72

Berdasarkan tingkat kolektibilitas, Tunggakan Kewajiban Pinjaman sebesar Rp15.417.542,43 juta tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Dana Bergulir di KL

Kategori	31 Desember 2009 (Audited)		31 Desember 2008 (Audited)	
	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%
- Dalam perhatian	118.961,19	0,77	259.182,67	0,58
- Kurang lancar	136.843,77	0,89	444.287,05	2,67
- Diragukan	1.304.250,08	8,46	213,51	0,02
- Macet	13.857.487,39	89,88	16.432.932,49	96,73
Jumlah	15.417.542,43	100,00	17.136.615,72	100,00

Rincian saldo RDI/RPD (termasuk bagian lancar) dapat dilihat pada **Daftar 16**.

Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2008, secara total posisi piutang SLA/RDI/RPD terjadi penurunan Rp7.592.505.199.783. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain adanya fluktuasi kurs rupiah terhadap valuta asing.

Dalam upaya melakukan optimalisasi piutang negara yang bersumber dari tagihan kewajiban terhadap penerusan pinjaman luar negeri telah dilakukan program restrukturisasi pinjaman. Penyelesaian restrukturisasi PDAM didasarkan pada PMK No. 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM. Dalam PMK ini penyelesaian piutang pada PDAM didasarkan pada kinerja PDAM dan dilakukan dengan cara:

1. Penghapusan atas seluruh tunggakan non pokok atau kombinasi antara penghapusan atas sebagian tunggakan non pokok dan penghapusan melalui mekanisme *debt swap to investment*.
2. Penjadwalan kembali atas seluruh tunggakan non pokok.

Sampai dengan 31 Desember 2009 terdapat 15 PDAM telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dalam menyelesaikan piutang negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah.

Penyelesaian restrukturisasi Pemerintah Daerah didasarkan pada PMK 153/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah. Dalam PMK ini, restrukturisasi dilakukan dengan cara penjadwalan kembali terhadap tunggakan pokok yang disertai dengan penghapusan atas seluruh tunggakan non pokok atau kombinasi antara penghapusan atas sebagian tunggakan non pokok dan *debt swap*.

Untuk pelaksanaan restrukturisasi BUMN telah diterbitkan PMK No.17/PMK.05/2007 dengan tahapan penjadwalan ulang, perubahan persyaratan, penyertaan modal negara dan penghapusan dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 31/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada BUMN/Perseroan Terbatas.

Sampai dengan 31 Desember 2009 terdapat 10 BUMN yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dalam menyelesaikan piutang negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi

Beberapa penyelesaian Piutang Negara diselesaikan tersendiri, yaitu *pertama*, berkoordinasi dengan Tim Kerja eks BBO/BBKU dalam penyelesaian permasalahan BBKO dan BBKU; *kedua*, menunggu penyelesaian masalah hukum terkait likuidasi PT Bank Dagang Bali; *ketiga*, Utang Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diselesaikan dengan cara *Debt Swap* untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di NAD.

C.2.20. Dana Bergulir

Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp5.447.163.620.088 dan Rp7.357.677.113.340 merupakan dana Pemerintah yang disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota KSM, dan lain-lain yang dikelola oleh K/L dan Direktorat Sistem Manajemen Informasi, Kementerian Keuangan. Berikut adalah rincian Dana Bergulir (dalam Rp):

Dana Bergulir di BUN

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
1. KL	1.806.642.848.707	1.811.025.686.524
2. BUN	3.640.520.771.381	5.546.651.426.816
Jumlah	5.447.163.620.088	7.357.677.113.340

Penjelasan masing-masing Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

1. Dana Bergulir di KL sebesar Rp1.806.642.848.707 berada di beberapa K/L dengan rincian sebagai berikut:

- Dana bergulir di **Kementerian Perindustrian** per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp5.554.685.931 dan Rp9.703.964.922 merupakan dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada pengusaha kecil yang dikelola oleh 15 LPT-Indag, yang terdiri kas sebesar Rp4.311.528.420, piutang lancar sebesar Rp1.225.637.189. Sedangkan piutang macet adalah sebesar Rp31.330.363.720.

Mengingat Dana Bergulir tersebut mengalami kemacetan, maka pada bulan Juli 2008 Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) menginstruksikan

kepada LPT-Indag agar menghentikan perguliran dana tersebut.

Selanjutnya, Menteri Perindustrian melakukan pembubaran LPT-Indag sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri perindustrian RI Nomor 08-IND/Per/2009 tanggal 28 Januari 2009, dan dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/Per/5/2009 tanggal 22 Mei 2009 yang menetapkan antara lain bahwa pembubaran LPT-Indag pusat dan provinsi kepada negara selesai dilaksanakan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perindustrian tersebut di atas, maka dalam rangka penyelesaian pengalihan kekayaan negara dari LPT-Indag ke Kementerian Keuangan telah dibentuk Tim Penyelesaian Kekayaan Negara LPT-Indag dengan Peraturan Direktur Industri Kecil dan Menengah nomor 30/IKM/2/2009, tanggal 25 Februari 2009, yang diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Nomor 69/IKM/KEP/8/2009, tanggal 31 Agustus 2009.

Dalam rangka pengalihan piutang, seluruh piutang telah diserahkan dari LPT-Indag ke Ditjen. IKM yang selanjutnya untuk piutang macet akan diserahkan penyelesaiannya ke Kementerian Keuangan c.q Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) setempat. Sampai saat ini pengalihan penmagihan piutang (*cessie*) masih dalam proses, sedangkan saldo Kas/Bank Ditjen. IKM telah menginstruksikan kepada LPT Indag kode satker Ditjen. IKM dan kode akun 423931 (Pendapatan dan Penutupan Rekening).

- Dana Bergulir di **Kementerian Kelautan dan Perikanan** sebesar Rp12.206.756.931.
- Dana Bergulir di **Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH)** per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp38.604.024.698 dan Rp20.044.731.248 merupakan dana KLH yang ditempatkan di Bank Syariah Mandiri yang akan disalurkan kepada Usaha Ekonomi Lemah sebagai kredit untuk membiayai investasi di bidang lingkungan hidup.
- Dana Bergulir di **Kementerian Negara Koperasi dan UKM** per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2009 sebesar Rp1.750.277.381.147 dan Rp1.725.100.233.423 merupakan dana pemerintah yang disalurkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah melalui lembaga koperasi sebagai stimulan dalam pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Nilai sebesar Rp1.750.277.381.147 termasuk Dana Bergulir yang disalurkan oleh BUN kepada Lembaga Pengelolaan Dana bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp290.000.000.000, di mana Rp54.928.150.000 diantaranya sudah digulirkan, sedangkan sisanya sebesar Rp235.071.850.000 masih berupa Dana Kelolaan. (Lihat **Catatan C.2.26** bagian Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan).

Nilai yang disajikan tersebut berdasarkan hasil inventarisasi pihak independen atas perkembangan nilai dana bergulir sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu jumlah yang terdapat dalam rekening perguliran dan piutang yang diperkirakan dapat tertagih. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, bahwa seluruh dana bergulir harus diinventarisasi dan disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jumlah dana bergulir tersebut semula disajikan pada tahun 2007 sebesar

*Investasi Non Permanen
Lainnya Rp1,30 triliun*

Rp3.085.849.168.850 yang berasal antara lain dari belanja bantuan sosial, belanja subsidi, dan belanja modal dari APBN TA 2000 s.d. 2007 yang tidak jelas perlakuannya sebagai dana bergulir atau bantuan sosial sehingga perlu dilakukan koreksi pembukuan.

2. **Dana Bergulir di BUN** per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp3.640.520.771.381 dan Rp5.546.651.426.816 merupakan Dana Bergulir yang disalurkan oleh BUN dan dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Dana Bergulir merupakan dana yang disalurkan antara lain melalui Bank Pembangunan Daerah, PT Bank BUKOPIN, PT Bank BRI (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero). Jumlah tersebut terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
Kas di Bank Umum Pengelolaan Dana Bergulir	1.196.205.733.743	990.101.059.292
Tunggakan KKOP Pangan MP 2000	-	91.398.439.221
Tunggakan Pengadaan KUT TP 1999/2000	-	921.647.750.675
Tunggakan Kredit Listrik Pedesaan	-	1.742.226.000
Hak Tagih Perkebunan	-	882.033.853.390
Hak Tagih Peternakan	-	114.063.628.750
Dana Lingkungan Bergulir	53.337.949.475	53.284.394.311
Dana bergulir KKPA	1.761.716.913	9.000.000.000
Dana Cadangan KUT TP 1999/2000	-	24.716.396.342
Pinjaman KUMK dari SU-005	2.389.215.371.250	2.458.663.678.835
Jumlah	3.640.520.771.381	5.546.651.426.816

- **Kas di Bank Umum Pengelolaan Dana Bergulir** per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp1.196.205.733.743 dan Rp990.101.059.292 merupakan kas yang berada di 2 (dua) rekening yaitu rekening No. 0206.01.000002.30.9 sebesar Rp18.040.728.824 yang merupakan Rekening induk dana lingkungan bergulir dan rekening No. 0329.01.000510.30.8 sebesar Rp1.178.165.004.919 yang merupakan Rekening penampungan pencairan dana surat utang pemerintah.
- **Dana Lingkungan Bergulir (DLB)** per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp53.337.949.475 dan Rp53.284.394.311 terdiri dari Pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari dana hibah *Kreditanstalt für Wiederaufbau-Industrial Efficiency and Pollution Control Project* yang diteruskanpinjamkan kepada Bank Pelaksana (5 bank pelaksana: Bank Jabar Banten, Bank Jateng, Bank Nagari, BPD Bali, dan BNI), bunga dan biaya lainnya. Dana ini diberikan kepada Pemerintah untuk pembiayaan dalam bentuk pinjaman guna kepentingan pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan. Sebagai *executing agent* dalam kegiatan ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
- **Hak Tagih KKPA** per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.761.716.913 dan Rp9.000.000.000. Dalam rangka mendukung pengembangan usaha kecil dan koperasi yang tergabung dalam Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) dan Koperasi Syariah lainnya serta Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Pemerintah menyediakan bantuan pendanaan yang bersumber dari RDI sebesar Rp10.000.000.000 untuk disalurkan dengan pola KKPA. Bagi Hasil dan bergulir melalui Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dana bantuan tersebut ditampung dalam Rekening Usaha Kecil cq. Proyek KKPA dan bagi hasil yang menjadi hak Pemerintah ditampung dalam Rekening Dirjen Perbendaharaan di BMI sebesar Rp1.000.000.000 telah dikembalikan oleh BMI ke RDI pada tanggal 30 Maret 2004 dan telah ditransfer ke Rekening

PMN Rp555,42 triliun

PMN pada BUMN

No.513.000.000 pada Bank Indonesia, Thamrin, Jakarta. Dana bergulir KKPA per 31 Desember 2009 yang masih berputar di masyarakat/debitur adalah sebesar Rp1.761.716.913, sedangkan sisanya sebesar Rp7.238.283.027 masih berada di Rekening Usaha Kecil cq. Proyek KKPA dan disajikan sebagai aset lainnya. Lihat **Catatan C.2.26**.

- **Pinjaman Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK)** merupakan pinjaman yang disalurkan melalui BUMN dan lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai BUMN Pengelola dan/atau Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP). Pinjaman pendanaan KUMK merupakan kelanjutan pendanaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sehubungan dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 1999, BI tidak diperkenankan lagi untuk memberikan kredit likuiditas. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan Surat Utang No. SU-005/MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 dengan pagu sebesar Rp9,97 triliun. Jumlah pinjaman KUMK sebesar Rp2.389.215.371.250 terdiri dari *outstanding* Rp2.379.780.000.000 ditambah piutang dan denda sebesar Rp9.435.371.250. Rincian mengenai Pokok Pinjaman Pendanaan KUMK sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dapat dilihat pada **Daftar 17** dan rincian Piutang Bunga dan Denda Pinjaman dapat dilihat pada **Daftar 18**.
- Pada LKPP Tahun 2009, Tunggakan KKOP Pangan MP 2000, Tunggakan Pengadaan KUT TP 1999/2000, Hak Tagih Perkebunan, dana Dana Cadangan KUT TP 1999/2000 direklasifikasi menjadi Piutang Lain-lain. (*Lihat Catatan C.2.16*)

C.2.21. Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp1.297.107.854.426 dan Rp1.128.448.515.668 merupakan investasi yang berada di beberapa K/L dan BUN, yaitu (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
K/L	60.093.772.761	32.685.862.379
BUN	1.237.014.081.665	1.095.762.653.289
Jumlah	1.297.107.854.426	1.128.448.515.668

- Investasi Non Permanen Lainnya di K/L per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp60.093.772.761 dan Rp32.685.862.379 merupakan dana program peningkatan industri tekstil dan produk tekstil yang disalurkan kepada sebelas Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sebagai pembayaran pembelian mesin/peralatan yang dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani.
- Investasi Non Permanen Lainnya di BUN per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp1.237.014.081.665 dan Rp1.095.762.653.289 merupakan Investasi Non Permanen pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp1.095.762.653.289 terdiri dari (dalam Rp):

PMN pada BHMN

Pos Neraca pada BLU PIP (Kementerian Keuangan)	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
Kas pada BLU	-	218.566.826.494
Piutang Operasional BLU kpd BPJT	24.255.654.147	21.505.689.090
Piutang Non Operasional BLU	17.026.732.863	27.310.262.126
Investasi Non Permanen BLU:		

Pinjaman kepada BLU BPJT	1.026.131.694.655	707.595.178.400
Investasi Non Permanen Lainnya	169.600.000.000	120.784.697.179
Saldo akhir	1.237.014.081.665	1.095.762.653.289

Dalam rangka konsolidasi, pos-pos yang dilaporkan oleh BLU PIP (Kementerian Keuangan) tersebut direklasifikasi menjadi Investasi Non Permanen Lainnya pada LKPP. Selain itu, pada BLU BPJT (Kementerian Pekerjaan Umum), Kas pada BLU sebesar Rp150.949.113.074, Piutang Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp899.288.460.728, Utang Biaya Pinjaman sebesar Rp35.237.573.802, dan Utang Jangka Panjang sebesar Rp1.015.000.000.000, yang terkait dengan pinjaman dari BLU PIP juga dieliminasi, sehingga tidak terjadi pembukuan ganda (*double counting*).

Pada LKPP Tahun 2008, Investasi Non Permanen Lainnya oleh BLU PIP disajikan sebagai bagian dari Investasi oleh BA 015. Pada LKPP Tahun 2009, Kas BLU pada PIP berupa kas penerimaan dan kas dalam bentuk deposito direklasifikasi ke Dana Kelolaan BLU, tidak ada Kas BLU yang direklasifikasi ke Investasi Non Permanen Lainnya.

C.2.22. Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp555.416.111.508.201 dan Rp486.062.370.590.619 merupakan nilai penyertaan modal negara pada BUMN, Non BUMN, BHMN, dan Lembaga Internasional dengan jumlah (dalam Rp):

PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN)

PMN	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
1. BUMN	513.573.807.703.885	466.476.020.059.523
2. BHMN	1.906.624.988.050	3.432.537.716.160
3. Non BUMN	3.753.910.818.065	3.129.482.726.352
4. Lembaga Internasional	36.181.747.998.201	13.024.250.088.584
5. Badan Usaha Lainnya	20.000.000	20.000.000
Jumlah	555.416.111.508.201	486.062.370.590.619

Penyertaan pada Lembaga Internasional

1. Nilai **PMN pada BUMN** per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp513.573.807.703.885 dan Rp466.476.020.059.523 disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*), yaitu dihitung dari penjumlahan total ekuitas masing-masing BUMN setelah dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah pada BUMN yang bersangkutan. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2009 tersebut merupakan nilai PMN pada 145 BUMN dengan status laporan keuangan sebagai berikut:

Status Laporan Keuangan	Jumlah BUMN	Jumlah (Rp)
<i>Audited</i>	131	362.357.935.555.573
<i>Unaudited 2009</i>	8	150.143.967.128.674
<i>Prognosa</i>	3	134.637.580.000
<i>Unaudited 2008</i> ¹⁾	1	7.655.074.000
<i>Audited 2005</i> ²⁾	1	(70.387.634.362)
<i>N/A</i> ³⁾	1	1.000.000.000.000
Jumlah	145	513.573.807.703.885

Catatan:

1) PT Pelayaran Bahtera Adhiguna;

2) Merupakan Nilai Ekuitas PT Industri Soda yang telah ada penetapan pembubaran dengan PP Nomor 70 Tahun 2008 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) namun

proses likuidasi atas BUMN tersebut belum selesai sehingga tidak menyampaikan Laporan Keuangan-nya;

- 3) *Merupakan PMN untuk modal awal pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang dilakukan pada tahun 2009;*

Rincian penyertaan modal Negara pada BUMN dapat dilihat pada **Daftar 19.A**.

Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2009 tersebut termasuk Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada 24 BUMN dengan nilai sebesar Rp50.696.746 juta. (**Daftar 19.B**)

Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2009 termasuk PMN pada 4 (empat) BUMN yang berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Sarana Multigriya Financial, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Dari 145 BUMN, terdapat 15 (lima belas) BUMN yang belum *go public* namun kepemilikan saham Pemerintah kurang dari 100%. Rincian kepemilikan saham 15 BUMN tersebut dapat dilihat pada **Daftar 19.C**.

*Investasi Permanen BLU
Rp6,64 miliar*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No.17 Tahun 2003 dan Pasal 22 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2006, LKPP dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara yang memuat informasi lebih rinci tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih yang disajikan dalam **Daftar 36**.

2. **PMN pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN)** merupakan nilai ekuitas pada BHMN dengan rincian sebagai berikut:

*Investasi Permanen
Lainnya Rp118,04 triliun*

BHMN	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
1. Institut Pertanian Bogor (IPB)	1.207.033.824.203	2.205.448.613.020
2. Universitas Airlangga	682.983.555.507	1.176.933.306.825
3. BP MIGAS	16.607.608.340	50.155.796.315
Jumlah	1.906.624.988.050	3.432.537.716.160

Penurunan nilai PMN pada Perguruan Tinggi BHMN IPB dan Universitas Airlangga diakibatkan oleh koreksi atas pencatatan ganda (*double counting*) antara Aset PT BHMN dengan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional.

Sesuai dengan amanat PP No. 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi BHMN yang menyatakan bahwa Kekayaan Awal BHMN adalah seluruh kekayaan negara yang tertanam pada PTBHMN bersangkutan, kecuali tanah, yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan bersama oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Keuangan.

Aset Tetap Rp979 triliun

Nilai aktiva bersih pada PTBHMN IPB sebesar Rp1.207.033.824.203 yang disajikan pada Laporan Keuangan PTBHMN IPB *audited* tahun 2009 tidak termasuk nilai tanah yang sudah dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2009.

Nilai aktiva bersih yang disajikan pada Laporan Keuangan PT BHMN Universitas Airlangga *unaudited* tahun 2009 sebesar Rp1.249.508.678.755 termasuk nilai tanah milik Negara yang digunakan oleh PTBHMN Universitas Airlangga sebesar Rp566.525.123.248. Dengan demikian, nilai PMN pada PTBHMN Universitas Airlangga yang disajikan adalah Rp682.983.555.507.

Lihat juga catatan **C.2.25**.

Ikhtisar Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya disajikan pada **Daftar 37**.

3. PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN) sebesar Rp3.753.910.818.065 merupakan penyertaan pemerintah pada perusahaan dengan prosentase kepemilikan kurang dari 51%. Nilai penyertaan pada perusahaan minoritas dengan kepemilikan 20% atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*cost method*). Sampai dengan LKPP Tahun 2009 *Audited* ini disusun, dari 20 perusahaan non BUMN, 2 perusahaan belum mengirimkan laporan keuangannya (PT Atmindo dan PT PPLI), 2 perusahaan telah berhenti beroperasi (PT Semen Kupang dan PT Intirub), 2 perusahaan tidak jelas keberadaannya (PT Asean Copper Product dan PT Asean Bintulu Fertilizer), dan 1 perusahaan dalam proses likuidasi (PT Asean Aceh Fertilizer). Kondisi di atas menyebabkan angka yang disajikan sebagian masih menggunakan data LKPP 2008 (*Audited*). Rincian PMN pada perusahaan minoritas dapat dilihat pada **Daftar 20**.
4. Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia dalam rangka keanggotaan pada beberapa organisasi/lembaga keuangan internasional/regional baik yang telah disetor maupun yang masih dalam bentuk *promissory notes* sampai dengan 31 Desember 2009. PMN ini dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2009. Rincian PMN pada Lembaga Internasional dapat dilihat pada **Daftar 21**.

Sampai dengan 31 Desember 2009, dari total penyertaan (kuota) pada Lembaga Internasional sebesar Rp36.181.747.998.201, termasuk penyertaan dalam bentuk *promissory notes* sebesar Rp30.219.560.944.319, di antaranya sebesar Rp30.025.221.161.885 kepada International Monetary Fund (IMF) dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	1 (one) Promissory Note	25 Januari 1999	4.883.348.937.149
2	1 (one) Promissory Note	16 Februari 1999	4.682.474.007.721
3	1 (one) Promissory Note	15 Oktober 1999	697.548.488.574
4	1 (one) Promissory Note	08 November 2001	8.461.987.601.221
5	1 (one) Promissory Note	20 Agustus 2003	378.014.617.037
6	1 (one) Promissory Note	29 Juli 2004	1.100.098.914.602
7	1 (one) Promissory Note	07 Juli 2005	3.754.066.429.192
8	1 (one) Promissory Note	18 Januari 2008	1.809.251.902.881
9	1 (one) Promissory Note	30 Juni 2009	2.034.898.009.942
10.	1 (one) Promissory Note	19 September 2009	2.223.532.253.566
Jumlah			30.025.221.161.885

Aset Lainnya
Rp175,47 triliun

Penyertaan dalam bentuk Promissory Notes disajikan sebagai bagian utang. Lihat Catatan C.2.35 dan Catatan C.2.40.

5. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya sebesar Rp20.000.000 merupakan investasi permanen pemerintah pada perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk penerbitan SBSN tahun 2008.

C.2.23. Investasi Permanen BLU

Saldo Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008

dengan jumlah yang sama sebesar Rp6.637.194.500 merupakan penyertaan modal oleh BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) pada PT Senayan Trikarya Sempana (PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10%.

C.2.24. Investasi Permanen Lainnya

Jumlah Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp118.042.412.825.796 dan Rp166.808.229.147.871 merupakan nilai PMN pada badan-badan lainnya yang disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*), kecuali pada Otorita Asahan. Rincian Investasi Permanen Lainnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
1. Bank Indonesia	93.507.343.000.000	149.845.381.000.000
2. Otorita Batam	14.108.503.023.102	8.217.122.658.077
3. LPS	10.363.639.727.000	8.681.906.832.000
4. Taman Mini Indonesia Indah	29.335.529.796	28.295.642.401
5. Otorita Asahan	449.482.699	449.482.699
6. BP Gedung Manggala Wanabakti	23.616.276.978	28.589.286.044
7. Yayasan Gedung Veteran	9.525.786.221	6.484.246.650
Jumlah	118.042.412.825.796	166.808.229.147.871

C.2.25. Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp979.004.124.298.696 dan Rp673.341.421.634.984 merupakan nilai aset tetap berdasarkan neraca K/L dan Neraca BUN. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dan belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan).

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
Tanah	468.627.411.873.568	280.977.933.438.987
Peralatan dan Mesin	145.766.663.539.492	129.575.007.951.398
Gedung dan Bangunan	123.197.516.471.880	109.119.623.581.182
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	186.921.467.820.342	107.366.714.600.033
Aset Tetap Lainnya	5.885.891.367.838	6.706.750.989.988
Konstruksi Dalam Pengerjaan	48.605.173.225.576	39.595.391.073.396
Jumlah	979.004.124.298.696	673.341.421.634.984

Nilai Aset Tetap tersebut termasuk nilai Tanah yang dikuasakan kepada BHMN IPB dan Universitas Airlangga sebesar Rp1.496.350.309.000 dan Rp566.525.123.248 yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional. Lihat Catatan C.2.22.

Jumlah Aset Tetap tersebut tidak termasuk nilai Aset Tetap yang dilaporkan oleh Kementerian ESDM sebesar Rp20.019.895.961.704 yang diusulkan menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT PLN (Persero). Aset Tetap tersebut berupa pembangkit listrik, gardu induk, jaringan listrik, dan peralatan lain.

Dalam nilai Aset Tetap per 31 Desember 2009 tersebut termasuk Aset Tetap yang dikelola oleh BLU sebesar Rp 110.246.068.666.672, dengan rincian:

Jenis Aset Tetap	Jumlah (Rp)
------------------	-------------

Tanah	95.535.411.805.193
Peralatan dan Mesin	4.966.017.559.406
Gedung dan Bangunan	7.876.117.493.888
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	713.964.367.457
Aset Tetap Lainnya	265.921.678.218
Konstruksi Dalam Pengerjaan	888.635.762.510
Jumlah	110.246.068.666.672

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp305.662.702.663.712 dari nilai per 31 Desember 2008. Kenaikan nilai Aset Tetap ini terutama karena koreksi berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian aset tetap yang dilakukan oleh K/L sebesar Rp231.328.906.395.389, perolehan dari realisasi Belanja Modal TA 2009, aset tetap yang diperoleh dari dana non APBN (hibah), dan lainnya.

Sampai saat ini, telah dilakukan inventarisasi dan penilaian atas nilai wajar Aset Tetap pada seluruh K/L dengan tingkat penyelesaian 98,08 persen. Hasil inventarisasi dan penilaian tersebut telah dijadikan sebagai dasar koreksi atas nilai aset tetap pada sebagaimana telah dijelaskan di atas. Lihat **Catatan Penting Lainnya**.

Nilai Aset Tetap yang disajikan dalam LKPP merupakan konsolidasian dari LKKL dan LKBUN, yang telah dilakukan rekonsiliasi dengan Laporan BMN dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Perbedaan nilai antara LKKL dengan LBMN sebagian besar terjadi pada Aset Lain-lain berupa antara lain aset renovasi, sitaan, dan rampasan.

Rincian daftar Aset Tetap per K/L dan BUN disajikan pada **Daftar 22**.

C.2.26. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp175.467.502.161.107 dan Rp422.232.167.508.465 terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
Tagihan Penjualan Angsuran	217.273.759	554.504.816
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	47.520.521.456	32.729.236.792
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	83.647.500.000	501.250.000
Penerusan Pinjaman	78.561.103.000	-
Aset Tak Berwujud	7.031.604.402.391	4.347.118.670.932
Aset yang Dibatasi Penggunaannya	34.471.434.956.330	30.544.739.790.835
Dana Kelolaan BLU	5.565.054.549.000	4.572.815.302.821
Dana Penjaminan	172.808.669.214	167.595.976.198
Aset Lain-lain	128.016.653.185.957	382.566.112.776.071
Jumlah	175.467.502.161.107	422.232.167.508.465

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

TPA Rp217,27 juta

Saldo TPA per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp217.273.759 dan Rp554.504.816 merupakan saldo TPA yang berada di (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
1. Kementerian Perhubungan	216.000.000	432.000.000
2. Kementerian PPN/BAPPENAS	1.273.759	122.504.816
Jumlah	217.273.759	554.504.816

Tagihan TGR Rp47,52 miliar

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp47.520.521.456 dan Rp32.729.236.792 merupakan saldo Tagihan TGR yang berada di K/L. Rincian Tagihan TGR pada K/L dapat dilihat pada **Daftar 23**.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp83,65 miliar

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp83.647.500.000 dan Rp501.250.000 merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berada di (dalam Rp):

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
1. Kementerian Hukum dan HAM	-	220.000.000
2. Kementerian Negara PPN/ BAPPENAS	83.647.500.000	281.250.000
Jumlah	83.647.500.000	501.250.000

Penerusan Pinjaman Rp78,56 miliar

Penerusan Pinjaman

Saldo Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2009 sebesar Rp78.561.103.000 merupakan total pokok pinjaman yang akan jatuh tempo mulai tahun 2011 terhadap perjanjian penerusan pinjaman yang ditandatangani setelah 31 Desember 2008. Penerusan pinjaman ini merupakan penerusan pinjaman kepada BUMN.

Aset Tak Berwujud Rp7,03 triliun

Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp7.031.604.402.391 dan Rp4.347.118.670.932 merupakan aset yang berupa *software*, biaya survey/penelitian, dan hak paten yang berada di K/L dan BA 999.06. Rincian Aset Tak Berwujud pada K/L dapat dilihat pada **Daftar 24**.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp34,47 triliun

Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp34.471.434.956.330 dan Rp30.544.739.790.835 terdiri atas (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
1. Kementerian Luar Negeri	344.790.485.660	441.350.836.437
2. Kementerian Pertahanan	1.065.282.380.931	1.924.404.572.003
3. Kementerian ESDM	15.156.151.643	11.605.862.081
4. Kementerian Agama	1.549.610.795.295	1.635.169.829.354
5. Kementerian Nakertrans	244.136.650.000	240.527.000.000
6. Kementerian Kehutanan	17.693.469.394	18.560.981.651
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan	96.428.953.601	104.717.638.499
8. Kementerian Lingkungan Hidup	15.268.063.284	17.655.268.752
9. BRR NAD-Nias		67.315.316.490
10. BUN	31.123.068.006.522	26.083.432.485.568
Jumlah	34.471.434.956.330	30.544.739.790.835

Masing-masing Aset yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri sebesar

Rp344.790.485.660 merupakan saldo kas besi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dibentuk berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-2.18/424/0182 tanggal 13 Januari 1992 untuk keperluan berjaga-jaga terhadap keadaan/kejadian yang mungkin timbul, terutama untuk membiayai perwakilan apabila remise (*cash supply*) terlambat dan keperluan lainnya yang penggunaannya harus mendapat persetujuan/instruksi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri.

2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.065.282.380.931 merupakan dana devisa berupa L/C yang belum dicairkan oleh pihak ketiga.
3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian ESDM sebesar Rp15.156.151.643 merupakan rekening penjaminan berupa uang deposito untuk perusahaan-perusahaan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
4. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Agama sebesar Rp1.549.610.795.295 adalah Dana Abadi Umat (DAU) yang merupakan dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan haji dan dari sumber lain sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 1999. DAU dialokasikan untuk kemaslahatan umat Islam di bidang pendidikan, dakwah, pembangunan sarana dan prasarana ibadah serta bidang penyelenggaraan haji. Pada LKPP Tahun 2008, DAU disajikan sebagai bagian dari BUN.
5. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp244.136.650.000 merupakan rekening penjaminan berupa uang jaminan dari Perusahaan Penempatan TKI Swasta (PPTKIS/JTKI) dan jaminan dari Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.
6. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp17.693.469.394 merupakan Deposito Terbeku Dana Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS).
7. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp96.428.953.601 merupakan Dana Penguatan Modal.
8. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp15.268.063.284 merupakan dana yang berada di rekening untuk menampung penerimaan awal dari programan *Debt for Nature Swap (DNS)* dan menampung alokasi biaya peningkatan kemampuan kualitas Sumber daya Manusia dalam memahami pengelolaan lingkungan hidup dan pembiayaan di sector lingkungan hidup.
9. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN sebesar Rp31.123.068.006.522 terdiri dari Rekening Khusus, Rekening Cadangan, Aset Bapertarum, dan Dana pada BA 999.04 (Direktorat Sistem Manajemen Investasi-Kementerian Keuangan), dengan rincian:
 - Saldo Rekening Khusus sebesar Rp3.930.523.401.603 yang merupakan rekening khusus Pemerintah di BI. Rincian per rekening dapat dilihat pada **Daftar 25**.
 - Rekening Cadangan sebesar Rp24.266.868.283.889 merupakan rekening yang digunakan untuk menampung sisa anggaran belanja yang terdiri dari (dalam Rp):

Rekening Cadangan

Uraian	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
Rekening Cadangan Reboisasi	4.580.366.551.577	5.563.065.414.667

Reboisasi

Rekening Cadangan Subsidi/PSO	10.672.960.497.793	12.468.045.418.908
Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil	9.013.541.234.519	3.811.009.278.885
Rekening Cadangan PMN	-	1.000.000.000.000
Jumlah	24.266.868.283.889	22.842.120.112.460

Rekening Cadangan Subsidi

- **Rekening Cadangan Reboisasi**, adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa dana reboisasi setiap tahun dari bagian pemerintah pusat setelah dikurangi alokasi ke Kementerian Kehutanan. Dana yang terdapat dalam rekening cadangan reboisasi digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi seperti Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan No. 06.1/PMK.01/2007 dan No. 02/Menhut-II/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.
- **Rekening Cadangan Subsidi**, adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa pagu DIPA subsidi/PSO yang belum dapat dicairkan karena belum didukung oleh bukti-bukti yang sah. Pencairan dana yang terdapat dalam Rekening Cadangan Subsidi/PSO dibatasi sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berikutnya sebagaimana diatur dalam PMK No. 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara, kecuali rekening cadangan Subsidi/PSO yang berkaitan dengan BULOG pencairannya menunggu hasil audit BPK.

Rincian Rekening Cadangan Subsidi adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
Subsidi Premium	-	220.433.592.000
Subsidi Minyak Tanah	-	367.655.649.000
Subsidi Minyak Solar	-	278.453.350.000
Subsidi LPG	-	57.024.692.990
Subsidi BBM	2.139.196.658.861	-
Subsidi Listrik	-	4.705.443.232.963
Subsidi Pangan	1.018.854.936.573	913.470.485.100
Subsidi Perawatan Beras	-	39.115.727.252
Subsidi Benih	577.464.581.022	508.321.232.420
Subsidi Pupuk	4.238.281.790.561	2.844.357.844.858
Subsidi Minyak Goreng	-	1.245.992.000
Subsidi PELNI	150.000.000.000	268.842.667.873
Subsidi PT KAI	133.750.000.000	136.166.250.000
Subsidi PT Pos dan Giro	43.750.000.000	29.687.500.000
Subsidi Lainnya (Benih Ikan Budidaya)	-	19.270.251.000
Bunga, Biaya, dan Pajak (Neto)	-	1.211.547.218
Sub Jumlah	8.301.297.967.016	10.390.700.014.674
Konversi minyak tanah ke LPG-BPH Migas	2.357.600.621.501	2.054.036.151.700
PSO LKBN Antara	-	9.277.137.475
PSO Perum BULOG	14.061.909.276	14.032.115.059
Jumlah	10.672.960.497.793	12.468.045.418.908

Rekening Cadangan DBH

Lihat *Catatan B.2.2.1.5*.

- **Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil** sebesar Rp9.013.541.234.519,

adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa penerimaan sumber daya alam setiap tahun yang berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan yang belum disalurkan kepada Pemerintah Daerah karena belum teridentifikasi daerah penghasilnya. Rekening sebesar 9.013.485.322.284,00 ini seluruhnya merupakan Cadangan DBH.

- **Rekening Cadangan Penanaman Modal Negara (PMN)** merupakan rekening penampungan sisa dana PMN yang belum disalurkan kepada Perusahaan Pembiayaan di Bidang Infrastruktur karena dokumen belum lengkap. Sisa Dana PMN Tahun 2008 sebesar Rp1.000.000.000.000 telah disalurkan semua kepada PT Sarara Multi Infrastruktur pada awal tahun 2009.

Rincian masing-masing rekening cadangan disajikan pada **Daftar 26**.

- Rekening *escrow* sebesar Rp162.431.776.280 adalah rekening No. 1022-000320250-001 atas nama Dirjen Anggaran yang berada di Bank Mutiara (dulu Bank Century) yang setara dengan USD17,279,976.20 untuk menampung hibah dari Pemerintah Amerika Serikat. Pada LKPP Tahun 2008, rekening tersebut disajikan sebagai bagian dari Rekening Khusus.
- Aset Bapertarum sebesar Rp2.756.006.261.663 merupakan nilai ekuitas (kekayaan bersih) Bapertarum.
- Dana yang ada di BA 999.04 (Dit. SMI) sebesar Rp7.238.283.087 merupakan dana yang belum digulirkan yang ada di Rekening Usaha Kecil cq. Proyek KKPA No. 301.00275.15.

*Dana Kelolaan BLU
yang Belum Digulirkan
Rp5,56 triliun*

Dana Kelolaan BLU Yang Belum Digulirkan/Disalurkan

Dana Kelolaan BLU sebesar Rp5.565.054.549.000 merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan pada pihak ketiga, yang berada di 3 (tiga) K/L, yaitu:

Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah (Rp)
1. Kementerian Keuangan	3.315.400.000.000
2. Kementerian Kehutanan	2.014.582.699.000
3. Kementerian Koperasi dan UKM	235.071.850.000
Jumlah	5.565.054.549.000

Dana Kelolaan BLU yang berada di Kementerian Keuangan sebesar Rp3.315.400.000.000 merupakan dana yang ada di BLU PIP yang disimpan pada rekening giro dan deposito sebagai berikut:

No.	Nama Bank	Jumlah (Rp)
1.	Giro di Bank Mandiri	300.400.000.000
2.	Deposito Bank Mandiri	600.000.000.000
3.	Deposito Bank BRI	400.000.000.000
4.	Deposito Bank BRI	480.000.000.000
5.	Deposito Bank Syariah BRI	45.000.000.000
6.	Deposito Bank Bukopin	300.000.000.000
7.	Deposito Bank Jabar Banten	235.000.000.000
8.	Deposito Bank BNI	340.000.000.000
9.	Deposito Bank Syariah Mandiri	100.000.000.000
10.	Deposito Bank BTN	200.000.000.000

11.	Deposito Bank Muamalat	100.000.000.000
12.	Deposito Bank BTN	215.000.000.000
Jumlah		3.315.400.000.000

*Dana Penjaminan
Rp172,81 miliar*

Dana Kelolaan BLU di Kementerian Kehutanan sebesar Rp2.014.582.699.000 terdiri dari:

- Realisasi Belanja Modal (Belanja Dana Bergulir) TA 2008 yang akan digulirkan kepada pihak ketiga atau masyarakat oleh BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan sebesar Rp1.393.600.000.000.
- Dana yang disalurkan oleh BUN kepada Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Gd. Manggala Wanabakti dalam rangka Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman sebesar RpRp620.982.699.000 akan tetapi belum digulirkan.

*Aset Lain-lain Rp409,22
triliun*

Dana Kelolaan BLU yang berada di Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp235.071.850.000 merupakan Dana yang berasal dari BUN akan tetapi belum digulirkan.

Dana Penjaminan

Dana Penjaminan per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp172.808.669.214 dan Rp167.595.976.198 merupakan dana penjaminan yang berada Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang dikelola oleh perusahaan penjamin yaitu Perum Jaminan Kredit Indonesia sebesar Rp172.771.617.314 dan Mahkamah Agung Rp37.051.900.

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain berdasarkan instansi/unit terkait dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Instansi/Unit Terkait	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
1. K/L	48.858.748.373.919	37.780.918.347.995
2. BA BUN 999.04	1.831.854.601.991	
3. BA BUN 999.06	95.341.030.453	38.580.214.458.187
4. PT PPA (Persero)	2.863.675.218.429	5.056.865.904.061
5. Aset PT PPA yang sudah dikembalikan ke Menteri Keuangan	1.854.973.326.509	-
6. Tim Koordinasi	30.684.557.738.627	7.360.075.725.532
7. Aset KKKS	13.786.901.149.851	303.389.996.550.000
8. Aset eks Pertamina	28.040.601.746.178	28.040.601.746.178
9. Direktorat SMI	-	138.358.392.113
Jumlah	128.016.653.185.957	382.566.112.776.071

Penjelasan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

1. Aset Lain-lain yang berada di K/L sebesar Rp48.858.748.373.919 antara lain berupa:
 - Piutang uang pengganti kerugian negara di Kejaksaan Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 belum diselesaikan sebesar Rp10.979.094.909.091;
 - Piutang PNB di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar ekuivalen Rp7.319.435.648.545 (Rp1.649.151.709.341 dan USD603,221,695.66) periode 2001-2007 yang berasal dari 6 (enam)

kontraktor batubara Generasi I dan telah diaudit oleh Tim BPKP. Sampai saat ini, piutang tersebut belum dapat ditagih penuh karena perusahaan tambang batubara dimaksud masih menahan setoran ini sebagai potongan atas restitusi pajak (PPN) yang harus dibayar oleh Pemerintah pada periode tersebut;

- Di Kementerian Diknas sebesar Rp13.247.703.748.068 merupakan BMN yang akan diserahkan ke Pemda sebesar Rp5.912.917.025.353 dan BMN yang berasal dari dana bantuan sosial (*block grant* dan BOS) sebesar Rp7.082.164.434.949
- Dana Hutan Tanaman Industri, Dana Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai, Dana Kredit Usaha Persuteraan Alam dan Dana Kredit Usaha Hutan Rakyat di Kementerian Kehutanan sebesar Rp1.829.572.124.083. Saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.286.222.205.850;
- Piutang macet di beberapa K/L yang penagihannya dialihkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
- Aset Tetap yang sudah rusak berat dan tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Rincian Aset Lain-lain di K/L disajikan pada **Daftar 27**.

2. Aset Lain-Lain BA BUN 999.04 sebesar Rp1.831.854.601.991 berupa:
 - Tunggakan dari debitur Bank Beku Operasi dan Bank Beku Kuasa Usaha (BBO/BBKU) yang sudah tidak dapat ditagih sebesar Rp1.681.719.918.000.
 - Dana Pemerintah yang ditempatkan pada Perum Jaminan Kredit Indonesia (dahulu Perum Sarana Pengembangan Umum) sebesar Rp150.134.683.991 yang terdiri dari Dana Cadangan Risiko sebesar Rp89.099.918.681; Dana Jaminan Ulang sebesar Rp43.213.220.535; Dana Kelolaan sebesar Rp3.900.104.794; dan Dana Risiko/Dana Penampungan Sementara KUT sebesar Rp13.921.439.981.
3. Jumlah Aset Lain-Lain BA BUN 999.06 sebesar Rp95.291.230.453 merupakan nilai Aset Lain-Lain berdasarkan data K/L dan Satker Khusus pengguna dana BA BUN – BSBL (BA 999.06)
4. Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA (Persero) sebesar Rp2.863.675.218.429 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang masih dikelola PT PPA (Persero) menunggu untuk dijual dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBPN. Nilai aset tersebut merupakan nilai pengalihan eks BPPN ke Menteri Keuangan. Rincian Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA disajikan pada **Daftar 28.A**.
5. Aset lain-lain eks PT PPA sebesar Rp1.854.973.326.509 merupakan aset eks PT PPA yang masih berada di Kementerian Keuangan setelah perjanjian PT PPA tahap pertama diselesaikan yang terdiri dari:

No.	Jenis Aset	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Aset Hak Tagih/Kredit	315	183.270.155.768
2	Asst Properti	3.360	1.651.585.078.161
3	Aset Saham Non Bank	15	3.460.850.371
4	Aset Surat Berharga	9	16.657.242.209
	Total	3.699	1.854.973.326.509

Pada tanggal 28 Februari 2009, PT PPA menyerahkan aset senilai Rp4.139.593.855.138 dan USD65,324,967 kepada Kementerian Keuangan. Selanjutnya PT PPA menerima kembali sebagian dari aset tersebut

(Rp2.284.620.528.629 dan USD65,324,967) pada tanggal 12 Juni 2009 yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Maret 2009.

Rincian Aset PT PPA yang diserahkan kepada Menteri Keuangan dapat dilihat pada **Daftar 28.B**.

6. Aset Lain-lain yang berasal dari Tim Koordinasi sebesar Rp30.684.557.738.627 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah (belum bersih), sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA (Persero). Termasuk di dalamnya adalah tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sebesar Rp21.378.322.454.854 yang merupakan piutang BPPN yang timbul sehubungan dengan PKPS kepada perusahaan induk yang didirikan oleh eks Pemegang Saham Pengendali (PSP) BTO dan BBO dalam rangka penyelesaian terhadap kewajiban eks PSP tersebut berdasarkan perjanjian MSAA, MRNIA, dan piutang BPPN kepada eks PSP BBKU dan BTO II dalam perjanjian APU.

Sampai dengan 31 Desember 2009 telah dilakukan inventarisasi terhadap asset eks BPPN dengan hasil sebagai berikut:

JENIS ASET	JUMLAH	NILAI			
		Rp	USD	JPY	DM
Aset Kredit (termasuk PKPS)	16.270	25.621.949.357.118	232.633.139,50	9.610.910,20	500.000,00
Aset Properti	264	381.519.605.272	-	-	-
Aset Nostro	142	478.622.000.000	-	-	-
Aset Inventaris	59.003	16.273.756.036	-	-	-

Rincian jumlah aset dan nilai pengalihan disajikan pada **Daftar 29**.

Catatan:

Aset Kredit yang diinventarisasi termasuk tagihahan PKPS eks Kejaksaan Agung RI yang telah diserahkan kepengurusannya ke PUPN berdasarkan putusan pengadilan yaitu Bank Deka. Sedangkan JKPS bank lainnya masih dalam proses perhitungan dengan BPK RI.

7. Aset KKKS sebesar Rp13.786.901.149.851 merupakan aset negara yang digunakan dalam rangka kontrak kerja sama minyak bumi dan gas alam yang dikelola oleh KKKS. Aset KKKS tersebut adalah berupa tanah yang nilainya berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian terhadap 41 KKKS seluas 655.904.455 m².

Sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu yang dibeli kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana. Namun, dalam rangka penyajian Aset KKKS pada Neraca LKPP, nilai Aset KKKS harus andal dan didukung dengan bukti kepemilikan dan/atau telah ada penyerahan kepada Pemerintah. Aset KKKS berupa aset non tanah dan persediaan tidak disajikan pada LKPP Tahun 2009 karena belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, belum dapat diidentifikasi nilai *cost recovery*-nya, serta belum ada penyerahan kepada Pemerintah.

Pada LKPP Tahun 2008, Aset KKKS per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp303.389.996.550.000, yang merupakan aset non tanah dan persediaan. Aset non tanah dan persediaan per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp281.200.615.492.998 yang dihitung berdasarkan nilai perolehan dan tidak memperhitungkan nilai depresiasi.

Rincian Nilai Aset KKKS Migas per 31 Desember 2009 disajikan pada **Daftar 30**.

8. Aset eks Pertamina sebesar Rp28.040.601.746.178 merupakan nilai aset

Utang PFK Rp906,09 miliar

Utang Kepada Pihak
Ketiga Rp22,31 triliun

sebagai akibat penetapan Neraca Pembukaan PT Pertamina (Persero) Per 17 September 2003. Aset tersebut terdiri atas:

- Aktiva Tetap LNG BADAQ-Bontang Rp21.386.569.198.000 dan LNG ARUN-Lhokseumawe Rp6.259.705.405.000.
- Perolehan aset LNG Arun dan LNG Badak berasal dari pinjaman sindikasi bank yang tertuang dalam *PSC Agreement* antara Pertamina (saat itu bertindak selaku Pemerintah) dengan PSC untuk pembangunan LNG Arun dan LNG Badak. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2011 untuk pembangunan LNG Badak, sedangkan untuk pembangunan LNG Arun sudah lunas. Adapun sumber dana untuk pembayaran pinjaman dimaksud berasal dari hasil penjualan gas LNG Arun dan LNG Badak sehingga kemungkinan default atas pembayaran tersebut sangat kecil.
- Aset kilang LNG Arun dan LNG Badak dioperasikan oleh PT Arun NGL dan PT Badak NGL di bawah pengawasan PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai penanggung jawab sementara atas kedua aset LNG dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008.
- Aktiva Tetap yang tidak dialihkan kepada PT Pertamina (Persero) pada 10 lokasi dengan total nilai sebesar Rp394.327.143.178.

Nilai Aset eks Pertamina tersebut di atas dihitung berdasarkan hasil penilaian PT Ujatek yang telah direviu oleh Ditjen Pajak.

C.2.27. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp906.088.090.285 dan Rp233.349.390.887 merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran PFK tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
- PFK 10% Gaji PNS	13.166.812.240.787	12.485.205.458.073	681.606.782.714
- PFK 2% Gaji Terusan	3.335.904.377	3.077.383.257	258.521.120
- Penerimaan PFK Beras Bulog			
- PFK 2% Iuran Kes. Pemda	1.693.866.145.942	1.491.683.583.700	202.182.562.242
- PFK 2% Iuran As. Bidan/Dokter PTT	4.433.989.103	2.959.509.000	1.474.480.103
- PFK 2% Iuran Askes TNI/Polri	102.137.145.106	101.225.115.000	912.030.106
- PFK Lain-Lain	351.535.674.000	331.881.960.000	19.653.714.000
JUMLAH	15.322.121.099.315	14.416.033.009.030	906.088.090.285

C.2.28. Utang Kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp22.310.440.584.286 dan Rp15.593.144.334.899 merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut:

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
K/L	1.521.740.584.985	1.008.320.890.750
BUN	20.788.699.999.301	14.584.823.444.149
Jumlah	22.310.440.584.286	15.593.144.334.899

1. Utang kepada pihak ketiga yang berada di K/L sebesar Rp1.521.740.584.985

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan Rp1,94
triliun

antara lain berupa dana yang harus dibayarkan atas pekerjaan gedung dan pembelian peralatan dan mesin, honor yang belum dibayarkan kepada pegawai, keterlambatan penagihan dari pihak ketiga, akun lawan Rekening Penjaminan yang berada di Kementerian Nakertrans dan Kementerian ESDM sebesar Rp259.292.801.643, dan lain-lain. Rincian utang kepada pihak ketiga dapat dilihat pada **Daftar 31**.

Pada LKPP Tahun 2008, Rekening Penjaminan yang berada di Kementerian Nakertrans sebesar Rp240.527.000.000 dan di Kementerian ESDM sebesar Rp11.605.862.081 tidak disajikan sebagai bagian dari K/L.

2. Utang kepada pihak ketiga yang berada di BUN sebesar Rp20.788.699.999.301 antara lain terdiri dari:

- Kewajiban kepada Pemda yang terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan dan dananya masih disimpan pada Rekening Cadangan DBH sebesar Rp9.013.541.234.519.
- Kewajiban kepada Pemda sehubungan dengan kurang salur DBH sebesar Rp8.717.087.995.471 yang terdiri dari:

No	Jenis Kewajiban	Jumlah
1.	Kurang Salur DBH SDA MIGAS TA 2008	8.128.062.157.004
2.	Kurang Salur DAK TA 2008	80.200.000.000
3.	Kurang Salur DISP TA 2008	32.000.000.000
4.	Kurang Salur BP PBB TA 2009	969.294.943
5.	Kurang Salur DBH PPh Pasal 21 dan 25/29 TA 2009	4.869.335.541
6.	Kurang Salur DBH SDA Pertambangan Umum TA 2009	371.955.706.869
7.	Kurang Salur DBH SDA Panas Bumi TA 2009	66.124.254.316
8.	Kurang Salur DBH PBB Bagian Daerah	32.838.206.916
9.	Kurang Salur DBH BPHTB Bagian Daerah	69.039.882
Total		8.717.087.995.471

Bagian Lancar Utang
Jangka Panjang
Rp92,51 triliun

- Kontra akun ekuitas BAPERTARUM sebesar Rp2.756.006.261.663.
- Utang karena kesalahan pemindahbukuan rekening dari rekening BUN ke rekening pihak ketiga sebesar Rp277.710.469.149. Jumlah ini berasal dari penerimaan pemindahbukuan sebesar Rp521.054.698.191 dikurangi pengeluaran pemindahbukuan sebesar Rp243.344.229.042. Lihat **Catatan D.2.28**.

C.2.29. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp1.943.343.103.544 dan Rp249.306.008.127 merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang dilakukan oleh penyeter namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

Unit	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
K/L	294.292.518.256	249.306.008.127
BUN	1.649.050.585.288	-
Jumlah	1.943.343.103.544	249.306.008.127

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan di K/L sebesar Rp294.292.518.256

berada di Mahkamah Agung sebesar Rp348.950 dan Kementerian Keuangan sebesar Rp294.292.169.306 yang merupakan SPM-KP yang belum diterbitkan SP2D-nya.

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan di BUN sebesar Rp1.649.050.585.288 merupakan Dividen interim tahun 2010 yang diterima tahun 2009.

C.2.30. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp92.505.447.212.104 dan Rp106.497.354.480.067 merupakan utang Pemerintah yang diperhitungkan akan dibayar atau jatuh tempo 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca, yang terdiri dari (dalam Rp):

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
Bagian Lancar Utang Luar Negeri	52.103.964.634.352	74.113.043.910.604
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri	40.401.482.577.752	32.384.310.569.463
Jumlah	92.505.447.212.104	106.497.354.480.067

Rincian Bagian Lancar Utang Luar Negeri adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Utang	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
Bilateral	22.416.189.271.596	36.082.569.384.210
Multilateral	17.629.136.043.330	22.023.164.977.197
Kredit Ekspor	11.513.593.244.123	15.881.011.441.457
Kredit Komersil	545.046.075.303	104.687.183.565
Leasing	-	21.610.924.175
Jumlah	52.103.964.634.352	74.113.043.910.604

Utang Biaya Pinjaman
Rp18,53 triliun

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri merupakan reklasifikasi Surat Berharga Negara (SBN) dalam negeri yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis SBN	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
I. Fixed Rate Bonds dan ORI		
Nominal	30.824.567.000.000	17.703.143.000.000
Unamortized Premium (Discount)	(27.605.081.000)	-
Nilai bersih (nilai buku)	30.796.961.919.000	17.703.143.000.000
II. Zero Coupon Bond		
Nominal	5.887.000.000.000	2.709.000.000.000
Unamortized Premium (Discount)	(61.327.364.000)	(150.541.555.000)
Nilai bersih (nilai buku)	5.825.672.636.000	2.558.458.445.000
III. Surat Utang Pemerintah kepada BI		
Nominal yg harus diamortisasi	3.442.848.022.752	3.638.992.124.463
Accrued Indexation	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	3.442.848.022.752	3.638.992.124.463
IV. SBSN (SDHI)		
Nominal	336.000.000.000	8.483.717.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	-

Utang Bunga Obligasi

Nilai bersih (nilai buku)	336.000.000.000	8.483.717.000.000
Total SBN (I + II + III+IV)	40.401.482.577.752	32.384.310.569.463

Catatan:

- Fixed Rate Bond dan ORI terdiri dari Fixed Rate Bond (7 seri) dan ORI (1 seri), yaitu ORI002
- Zero Coupon Bond terdiri dari 1 seri, yaitu ZC0004
- Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004 dan SU-007
- SBSN terdiri dari 1 seri, yaitu SDHI 2010C

*Utang Bunga Pinjaman
Luar Negeri*

Rincian lebih lanjut Bagian Lancar Utang Obligasi DN dapat dilihat pada **Daftar 32**.

C.2.31. Utang Biaya Pinjaman

Jumlah Utang Biaya Pinjaman per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp18.526.547.819.139 dan Rp20.627.684.251.052 merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
Utang Bunga Obligasi	15.597.015.919.292	16.433.183.812.189
Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri	2.929.531.899.847	4.194.500.438.863
Jumlah	18.526.547.819.139	20.627.684.251.052

*Utang Subsidi Rp15,72
triliun*

Utang Biaya Pinjaman tersebut tidak termasuk Utang Biaya Pinjaman pada BLU BPJT Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp35.237.573.802 karena telah dieliminasi dengan Piutang pada BLU PIP (Kementerian Keuangan). Lihat **Catatan C.2.21**.

Penjelasan masing-masing Utang Bunga adalah sebagai berikut:

1. Utang Bunga Obligasi sebesar Rp15.597.015.919.292 dan Rp16.433.183.812.189 dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
Fixed Rate Bonds	10.253.389.705.433	8.828.468.825.667
ORI	172.337.129.915	157.830.533.125
SBSN	267.442.510.990	210.593.838.700
Variable Rate Bonds	1.078.887.218.618	1.907.928.711.120
SUP kepada BI	83.829.456.792	2.143.873.771.277
SBN Valas	3.741.129.897.544	3.184.488.132.300
Jumlah	15.597.015.919.292	16.433.183.812.189

Rincian lebih lanjut Utang Bunga Obligasi dapat dilihat pada **Daftar 33**.

2. Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp2.929.531.899.847 dan Rp4.194.500.438.863 dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
Utang Bilateral	1.293.353.413.564	1.694.250.735.361
Kredit Komersial	50.822.753.443	3.835.306.622
Kredit Ekspor	491.702.580.282	778.771.176.897
Leasing		51.784.698

*Utang SPN/OBN Jangka
Pendek Rp26,52 triliun*

Pendapatan Diterima

Dimuka Rp4,76 miliar

Multilateral	1.093.653.152.558	1.717.591.435.285
Jumlah	2.929.531.899.847	4.194.500.438.863

C.2.32. Utang Subsidi

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp15.717.145.891.103 dan Rp12.503.315.266.224, yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
Utang Subsidi/PSO yang Belum Disalurkan	10.672.960.497.793	12.468.045.418.908
Utang Subsidi Bunga Ketahanan Pangan & Kredit Program	44.886.631.000	35.269.847.316
Utang Subsidi Listrik	4.999.298.762.310	-
Jumlah	15.717.145.891.103	12.503.315.266.224

Utang Subsidi/PSO yang Belum Disalurkan merupakan Belanja Subsidi yang telah terealisasi, namun belum disalurkan dan disimpan dalam Rekening Cadangan. Lihat *Catatan C.2.26*.

Utang Subsidi Listrik sebesar Rp4.999.298.762.310 merupakan koreksi subsidi listrik bulan Oktober 2009 sebesar Rp437.266.646.134, kekurangan pembayaran subsidi listrik bulan November 2009 sebesar Rp628.532.982.356, dan subsidi listrik bulan Desember 2009 sebesar Rp3.933.499.133.820.

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp9,41 triliun**C.2.33. Utang Surat Perbendaharaan Negara**

Jumlah Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/Obligasi Negara Jangka Pendek per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp26.515.739.064.000 dan Rp9.581.589.685.000. SPN merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo pada tahun 2009. Sampai akhir tahun 2009, terdapat 9 (sembilan) seri SPN senilai Rp24.165.739.064.000 dan 2 (dua) Seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) senilai Rp2.350.000.000.000. Rincian SPN dan SDHI dapat dilihat dalam **Daftar 34**.

C.2.34. Pendapatan Diterima di Muka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2009 sebesar Rp4.763.707.423 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Rincian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagai berikut:

Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah
1. Dewan Perwakilan Rakyat	201.774.500
2. Badan Pemeriksa Keuangan	397.000.000
2. Kementerian Dalam Negeri	87.072.750
3. Kementerian Keuangan	1.803.878.207
4. Kementerian Perindustrian	192.957.000
5. Kementerian ESDM	62.727.273
6. Kementerian Kesehatan	11.455.822
7. Kementerian Negara BUMN	68.000.000
8. Kementerian Kominfo	136.720.083
9. POLRI	57.659.214
10. Mahkamah Konstitusi	20.288.436
11. Badan Standarisasi Nasional	406.400.140
12. Lembaga Administrasi Negara	568.659.613

13. BPKP	230.071.496
14. Kementerian Perdagangan	151.874.989
15. BNP2TKI	367.167.900
Jumlah	4.763.707.423

LKPP Tahun 2008 belum menyajikan Pendapatan Diterima di Muka.

C.2.35. Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp9.409.771.849.034 dan Rp16.057.521.906.234, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
1. Kejaksaan Agung	1.107.134.365	
2. Sekretariat Negara	27.422.680.297	24.392.173.619
3. Kementerian Pertahanan	6.452.456.075.718	4.656.534.787.722
4. Kementerian ESDM	40.800.000	
5. Kementerian Kesehatan	374.080.443	364.959.294
6. Kementerian Agama	19.319.622	
7. Kementerian PU	26.602.885.062	
8. Badan Pusat Statistik	45.104.149	-
9. <i>Promissory Notes</i>	172.237.676.816	
10. Kewajiban kepada KKKS	2.699.948.679.303	11.376.229.985.599
11. BUN (Belanja Subsidi & Belanja Lain-lain)	29.517.413.259	
Jumlah	9.409.771.849.034	16.057.521.906.234

*Utang Jangka Panjang
DN SBN Rp901,50 triliun*

Utang pada Kementerian Pertahanan merupakan tunggakan kepada *supplier* Bahan Bakar Minyak Pelumas, Listrik, Telekomunikasi, Gas, dan Air.

Utang *Promissory Notes* adalah utang yang terkait dengan penyertaan Pemerintah pada lembaga-lembaga keuangan internasional yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal neraca. Berdasarkan posisi per 31 Desember 2009, total kuota Pemerintah Indonesia pada lembaga-lembaga Keuangan Internasional adalah sebesar Rp36.184.296.390.631. Dari jumlah tersebut sebesar Rp172.237.676.816 merupakan *Promissory Notes* akan dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan, yaitu atas *Promissory Notes* kepada *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) sebesar Rp168.260.000.000 dan *Asian Development Bank* (ADB) sebesar Rp3.977.676.816. LKPP Tahun 2008 belum menyajikan utang *Promissory Notes* karena pencatatan PMN pada Lembaga Internasional hanya sebesar jumlah yang telah dibayar tunai. Lihat **Catatan C.2.22**.

Kewajiban kepada KKKS per 31 Desember 2009 sebesar Rp2.699.948.679.303 merupakan estimasi kewajiban kontraktual Pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerjasama dengan KKKS berupa *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB terkait dengan penerimaan migas pada rekening 600.000.411.

Total saldo penerimaan migas yang berada di rekening 600.000.411 per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp8.718.692.283.486,00. Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah yang diestimasi akan dibayarkan kepada KKKS adalah sebesar Rp2.699.948.679.303, dan sisanya sebesar Rp6.018.743.604.183 yang sudah dapat diperhitungkan menjadi hak Negara dan telah disetorkan ke Kas Negara pada bulan Januari 2010 disajikan sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan. Rincian kewajiban Pemerintah kepada KKKS adalah:

Uraian	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
Fee Penjualan PT Pertamina (Persero)	1.496.554.286.363	3.637.038.742.398
DMO Fee	156.353.535.120	181.284.243.984
DMO Fee PT Pertamina EP	979.491.715.220	7.399.527.480.147
Underlifting KKKS	67.549.142.600	97.752.890.699
Penyelesaian Hukum Karaha Bodas Company (KBC)	-	60.626.628.371
Jumlah	2.699.948.679.303	11.376.229.985.599

C.2.36. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp901.496.354.102.092 dan Rp855.087.515.005.382 merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2009 sebesar Rp855.087.515.005.382 ini terdiri dari SBN berdenominasi dalam rupiah sebesar Rp732.486.745.275.382 dan SBN Internasional (valas) sebesar Rp142.875.885.572.000.

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis SBN	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
I. Fixed Rate Bonds		
Principle Outstanding	328.762.182.000.000	304.086.549.000.000
Unamortized Premium (Discount)	(9.505.672.462.000)	(7.463.796.881.000)
Nilai Bersih (Nilai Buku)	319.256.509.538.000	296.622.752.119.000
II. ORI		
Principle Outstanding	33.956.065.000.000	31.768.535.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	33.956.065.000.000	31.768.535.000.000
III. Zero Coupon Bonds		
Principle Outstanding	2.799.000.000.000	8.782.000.000.000
Unamortized Premium (Discount)	(622.417.073.000)	(1.357.704.157.000)
Nilai Bersih (Nilai Buku)	2.176.582.927.000	7.424.295.843.000
IV. Variable Rate Bonds		
Principle Outstanding	143.286.082.000.000	137.450.082.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	143.286.082.000.000	137.450.082.000.000
V. Surat Utang Pemerintah kepada BI		
Principle Outstanding	248.432.177.309.092	254.521.380.313.382
Accrued Indexation	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	248.432.177.309.092	254.521.380.313.382
VI. SBSN		
Principle Outstanding	11.532.990.000.000	4.699.700.000.000
Accrued Indexation	(19.938.244.000)	-
Nilai Bersih (Nilai Buku))	11.513.051.756.000	4.699.700.000.000
Subtotal SBN Denominasi Rupiah	758.620.468.530.092	732.486.745.275.382
VII. Obligasi Negara dalam Valas		
Principles Outstanding	151.759.653.246.903	104.964.419.519.000
Accrued Indexation	(8.599.653.246.903)	17.675.580.481.000
Net Unamortized Premium	(284.114.428.000)	(39.230.270.000)

Utang Kepada Dana
Pensiun dan THT Rp0

(Discount)		
Subtotal Obligasi Negara dalam Valas	142.875.885.572.000	122.600.769.730.000
Total SBN Jangka Panjang	901.496.354.102.092	855.087.515.005.382

Catatan:

- *Fixed Rate Bonds* terdiri dari 34 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2011 – 2038.
- ORI terdiri dari 4 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2011 – 2013.
- *Zero Coupon Bonds* terdiri dari 2 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2012 dan 2013.
- *Variable Rate Bonds* terdiri dari 16 seri, dengan masa jatuh tempo tahun 2011 – 2020.
- *Fixed Rate Bonds*, ORI, *Zero Coupon Bonds*, dan *Variable Rate Bonds* diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada Bank Indonesia (BI) terdiri dari SU002, SU004, SU007 dan SRBI01, dengan masa jatuh tempo tahun 2025 – 2033. SUP tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*).
- Pelunasan SRBI dapat bersumber dari surplus BI yang menjadi bagian Pemerintah dan akan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter BI telah mencapai di atas 10%. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter BI kurang dari 3%, maka Pemerintah akan membayar charge kepada BI sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut.
- SBSN terdiri dari 4 seri *fixed rate* dengan masa jatuh tempo tahun 2013 - 2018 dan 1 seri Sukuk Ritel (SR-001) dengan dengan masa jatuh tempo tahun 2012.
- Obligasi Negara dalam Valas terdiri dari 10 seri berdenominasi USD dengan masa jatuh tempo tahun 2014 – 2038, 1 seri berdenominasi JPY yang jatuh tempo tahun 2019, dan 1 seri SBSN berdenominasi USD yang jatuh tempo tahun 2014.
- *Fixed Rate Bonds*, ORI, *Zero Coupon Bonds*, dan *Variable Rate Bonds* diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Rincian Utang Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang dapat dilihat pada **Daftar 35**. Penjelasan lebih lengkap tentang SBN dapat dilihat pada Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara Tahun 2009 pada **Daftar 42**.

*Utang Jangka Panjang
DN Lainnya Rp2,83
triliun*

C.2.37. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) merupakan kewajiban Pemerintah terhadap Program Dana Pensiun dan THT. Pada LKPP Tahun 2009, Utang Kepada Dana Pensiun dan THT berjumlah Rp0 karena ada pelunasan pada tahun 2009.

Saldo Utang Kepada Dana Pensiun dan THT pada LKPP Tahun 2008 adalah Rp1.398.608.374.973 yang merupakan Kewajiban Pemerintah terhadap Program THT. Utang tersebut sehubungan dengan saldo *unfunded liability* tahun 2004 kepada PT TASPEN (Persero) akibat perubahan formula perhitungan manfaat dari SK Menkeu No. 500/KMK.06/2004. Perhitungan Utang Kepada Dana Pensiun dan THT adalah sebagai berikut:

Utang Jangka Panjang
LN Perbankan Rp559,50
triliun

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2008	1.398.608.374.973
Pelunasan sisa <i>unfunded liability</i> pada tahun 2009	1.398.608.374.973
Saldo per 31 Desember 2009	0

Sebagai tindak lanjut dari surat No: S-312/AG/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Percepatan Pelunasan *Unfunded Liability* Tahun 2004, Pemerintah telah melunasi sisa *Unfunded Liability* sebesar Rp1.398.608.374.973 pada tanggal 31 Maret 2009.

Di samping itu, berdasarkan Laporan Keuangan PT TASPEN, terdapat *unfunded liability* sebesar Rp7.340.632.796.315 yang merupakan *unfunded liability* akibat kenaikan gaji PNS tahun 2007, 2008, dan 2009 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Utang Jangka Panjang
Luar Negeri Lainnya
Rp30,05 triliun

Uraian	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP No. 9 Tahun 2007	1.639.066.231.444	1.639.066.231.444
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP No. 14 Tahun 2008		
- Akibat PP No. 14 Tahun 2008	2.451.864.039.858	2.451.864.039.858
- Perubahan tingkat bunga tahun 2008	93.946.230.524	93.946.230.524
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP No. 8 Tahun 2009	3.026.994.536.010	0
Perubahan tingkat bunga tahun 2009	12.0761.758.479	0
Jumlah	7.340.632.796.315	4.184.876.501.826

Namun, *unfunded liability* sebesar Rp7.340.632.796.315 tersebut tidak disajikan pada LKPP Tahun 2009 karena masih merupakan perhitungan sepihak PT TASPEN (lihat Catatan D.11).

C.2.38. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp2.826.956.396.635 merupakan Utang Pemerintah Indonesia kepada BI dalam rangka Penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional.

Dalam rangka penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional, sejak tahun 1972 s.d. 1999, Bank Indonesia (BI) atas nama Pemerintah juga telah melakukan pembayaran secara tunai atas penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional. Jumlah yang telah dibayarkan oleh BI adalah sebesar Rp2.826.956.396.635, termasuk diantaranya Rp2.764.860.843.169 kepada IMF. Pembayaran oleh BI dilakukan sebelum terbit UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI. BI mencatat pembayaran tersebut sebagai dana talangan/piutang kepada Pemerintah. Pemerintah belum menyepakati nilai dan status dana talangan/piutang tersebut. Pemerintah mengusulkan kepada BI, agar dana talangan/piutang tersebut dihapuskan dan tidak ditagihkan kepada Pemerintah. Terkait dengan itu, Menteri Keuangan telah mengirim surat kepada BI beberapa kali, terakhir dengan surat No. S-08/MK.11/2010 tanggal 9 Maret 2010 untuk meminta jawaban mengenai penyelesaian status dana talangan sesuai dengan usulan Pemerintah agar dapat dihapuskan. Dari hasil pertemuan Kementerian Keuangan dengan BI pada tanggal 7 Mei 2010, akan dilakukan beberapa langkah berikut: (1) Pemerintah dan BI akan segera melakukan verifikasi atas seluruh data dan transaksi dan talangan tersebut untuk memastikan jumlah dan status klaim BI; (2) Bila status dan jumlah dana talangan tersebut telah disepakati bersama, maka Pemerintah dan BI akan segera melakukan langkah penyelesaian status dana talangan; (3) Proses pada poin (1) dan (2) diharapkan selesai pada tahun 2010 dan akan mengkomunikasikannya dengan BPK.

Posisi Utang Luar
negeri, SBN, dan PN

C.2.39. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp559.498.473.496.215 dan Rp655.861.868.010.166 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang LN Perbankan adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Utang	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
Bilateral	293.256.375.603.449	354.857.222.064.976
Multilateral	185.092.514.769.756	200.835.569.707.657
Kredit Ekspor	77.789.218.434.627	99.779.130.817.811
Kredit Komersial	3.360.364.688.383	389.945.419.723
Jumlah	559.498.473.496.215	655.861.868.010.166

C.2.40. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2009 sebesar Rp30.047.323.267.503 merupakan *Promissory Notes* yang terkait dengan Penyertaan Pemerintah Lembaga Keuangan Internasional. Berdasarkan posisi per 31 Desember 2009, total kuota Pemerintah Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional adalah sebesar Rp36.184.296.390.631. Dari total *Promissory Notes* tersebut, sebesar Rp30.047.323.267.503 merupakan *Promissory Notes* yang tidak jatuh tempo/dibayar dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal laporan. (Lihat *Catatan C.2.22*).

Rincian *Promissory Notes* tersebut adalah sebagai berikut:

Lembaga Keuangan Internasional	Jumlah (Rp)
International Monetary Fund	30.025.221.161.884
International Bank for Reconstruction and Development	3.249.459.262
International Development Association	5.173.139.668
Multilateral Investment Guarantee Agency	10.669.169.200
Common Fund for Commodities	3.010.337.488
Total	30.047.323.267.503

LKPP Tahun 2008 belum menyajikan utang *Promissory Notes* karena PMN pada Lembaga Keuangan Internasional disajikan hanya sebesar yang telah dibayar/dilunasi.

Kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri, SBN, dan *Promissory Notes* dalam mata uang Rupiah, serta kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri (tidak termasuk utang bunga) dalam valuta asing secara keseluruhan disajikan pada Tabel 11 dan Tabel 12.

Tabel 11
Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan *Promissory Notes*
(Dalam Rp Juta)

Jenis Utang	31 Desember 2009	31 Desember 2008	Kenaikan (Penurunan)
-------------	------------------	------------------	-------------------------

*Posisi Utang Luar negeri
Menurut Valuta Asing*

*SAL Setelah
Penyesuaian Rp43,35
triliun*

Utang Luar Negeri (LN):			
Utang LN – Bagian Lancar	52.103.964,63	74.113.043,91	(22.009.079,28)
Utang LN – Jangka Panjang	559.498.473,50	655.861.868,01	(96.363.394,51)
Total Utang LN	611.602.438,13	729.974.911,92	(118.372.473,79)
Surat Berharga Negara (SBN):			
Obligasi Negara – Bagian Lancar	40.065.482,58	32.384.310,56	7.681.172,02
SBSN (SDHI) – Bagian Lancar	336.000,00	-	336.000,00
SPN	24.165.739,06	9.581.589,68	14.584.149,38
SDHI	2.350.000,00	-	2.350.000,00
Obligasi Negara – Jangka Panjang	747.107.416,78	732.486.745,28	14.620.671,50
Obligasi Negara – Jangka Panjang (Valas)	136.765.885,57	122.600.769,73	14.165.114,84
SBSN – Jangka Panjang	11.513.051,76	-	11.513.051,76
SBSN – Jangka Panjang (Valas)	6.110.000,00	-	6.110.000,00
Total SBN	968.413.575,75	897.053.415,25	71.360.160,50
Promissory Notes (PN):			
PN Jangka Pendek	172.237,68	-	172.237,68
PN Jangka Panjang	30.047.323,27	-	30.047.323,27
Total PN	30.219.560,95	-	30.219.560,95

Berdasarkan tabel di atas, posisi utang luar negeri dalam rupiah secara total turun sebesar Rp88.654.645,86 juta, yang terjadi karena adanya pelunasan dan apresiasi rupiah terhadap nilai valuta asing. Posisi utang luar negeri berdasarkan valuta uang asing yang bersangkutan juga mengalami penurunan, terutama utang dalam valuta Yen Jepang (JPY), Euro (EUR), dan World Bank Dollar (WBD) sebagaimana disajikan pada Tabel 12.

SILPA setelah
Penyesuaian Rp23,18
triliun

Tabel 12
Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing

Valuta	31 Desember 2009	31 Desember 2008	Kenaikan (Penurunan)
ACU	236.465.090	74.117.725	45.107.431
ADB	159.685.629	199.838.304	(40.152.675)
AUD	252.227.928	142.996.678	109.231.250
CAD	166.408.714	178.102.835	(11.694.121)
CHF	332.695.913	380.881.464	(48.185.551)
DKK	56.448.135	70.529.094	(14.080.959)
EUR	5.976.434.768	6.644.798.698	(668.363.930)
GBP	508.798.112	578.749.692	(69.951.580)
JPY	2.677.167.077.889	2.820.476.703.104	(143.309.625.215)
KRW	184.822.322.290	168.465.965.850	16.356.356.440
KWD	13.126.300	14.912.300	(1.786.000)
SAR	125.931.599	139.186.162	(13.254.563)
SDR	2.017.406.425	1.736.837.772	280.568.653
USD	20.983.066.384	19.541.865.143	1.441.201.241
WBD	1.123.076.519	1.714.649.771	(591.573.252)

Dana Lancar Lainnya
Rp2,82 triliun

C.2.41. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian

Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp43.347.021.844.114 merupakan saldo awal

SAL Tahun Anggaran 2009 setelah penyesuaian. Pada TA 2009 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah penyesuaian sebesar Rp23.176.900.581.685, sehingga saldo akhir SAL per 31 Desember 2009 menjadi sebesar Rp66.523.922.425.800 sebagaimana disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13
Saldo Anggaran Lebih TA 2009 dan 2008

Uraian	TA 2009 (Rp)	TA 2008 (Rp)
Saldo Awal SAL	94.616.144.685.098	13.370.514.138.408
Penggunaan SAL	(51.857.136.912.000)	-
Penambahan dari Selisih Lebih Kas Tahun Lalu	461.520.691.590	1.295.200.241.161
Koreksi Saldo Awal Kas BLU 2009	126.493.379.426	-
SAL setelah Penyesuaian	43.347.021.844.114	14.665.714.379.569
SiLPA (SiKPA) Sebelum Penyesuaian	23.964.527.041.131	79.950.430.305.529
Penyesuaian SiLPA (SiKPA):		
Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu	(666.602.712.196)	-
Penyesuaian UP Disetor pada KPPN Bukan Mitra Kerja	(43.513.387.221)	-
Penyesuaian <i>Front End Fee</i> Tahun 2008	(77.510.360.029)	-
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	23.176.900.581.685	-
Saldo Akhir SAL	66.523.922.425.799	94.616.144.685.098
Rincian SAL terdiri dari:		
Rek SAL pada BI	5.870.514.138.408	3.370.514.138.408
Rek BUN pada BI	32.185.520.242.213	67.707.599.065.065
Rek KPPN	8.309.379.301.258	6.755.052.343.270
Rek. Penempatan pada Bank Umum	15.000.000.000.000	15.000.000.000.000
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.036.241.894.537	1.154.712.127.961
Kas pada BLU *)	5.567.846.500.943	1.351.265.552.098
Utang PFK	(906.088.090.285)	(233.349.390.887)
Utang Kepada Pihak Ketiga	(277.710.469.149)	(28.128.459.228)
Selisih Kas (Lebih) Kurang	(261.781.092.126)	(461.520.691.590)
SAL Akhir SAL	66.523.922.425.799	94.616.144.685.098

Cadangan Piutang
Rp113,39 triliun

Cadangan Persediaan
Rp36,61 triliun

Pendapatan yang
Ditangguhkan Rp7,52
triliun

*) Kas BLU sebesar Rp5.567.846.500.943 merupakan Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN melalui SP2D Pengesahan dan koreksi saldo awal.

C.2.42. SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp23.176.900.581.685 dan Rp79.950.430.305.529 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan dan pengeluaran anggaran selama TA 2009 setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Pendapatan Negara dan Hibah	848.763.235.195.483	981.609.433.362.137
Belanja Negara	937.382.019.569.767	985.730.751.086.613
Surplus (Defisit)	(88.618.784.374.284)	(4.121.317.760.476)
Pembiayaan Neto	112.583.311.415.415	84.071.748.066.005
SiLPA (SiKPA) Sebelum Penyesuaian	23.964.527.041.131	79.950.430.305.529
Penyesuaian SiLPA:		
Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu	(666.602.712.196)	-
Penyesuaian UP Disetor Pada KPPN Bukan Mitra Kerja	(43.513.387.221)	-
Penyesuaian <i>Front End Fee</i> Tahun 2008	(77.510.360.029)	-
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	23.176.900.581.685	79.950.430.305.529

C.2.43. Dana Lancar Lainnya

Jumlah Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp2.821.340.491.184 dan Rp4.723.164.674.583 merupakan Kas dan Bank Pemerintah di luar Rekening BUN Nomor 502.000000 dan Rekening Kas di KPPN, yang terdiri dari (Rp):

*Dana yang Harus
Disediakan untuk
Pembayaran Utang
Jangka Pendek minus
Rp175,18 triliun*

	31 Desember 2009 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2008 (<i>Audited</i>)
Rekening Pemerintah Lainnya (<i>Selain Rek. SAL, Rek. Migas, Rek. Panas Bumi, dan Rek. Penempatan</i>)	2.438.660.520.900	1.571.899.006.177
Kas BLU yang Belum Disahkan sebagai SILPA	109.128.878.158	1.037.831.276.427
Investasi Jangka Pendek BLU	11.770.000.000	328.585.000.000
Koreksi Selisih SAL:		
Utang Kepada Pihak Ketiga ¹⁾	-	28.128.459.228
Selisih Kas Lebih Tahun Lalu ²⁾	-	1.295.200.241.161
Selisih Kas Lebih Tahun ini	261.781.092.126	461.520.691.590
Jumlah	2.821.340.491.184	4.723.164.674.583

Catatan:

- 1) Pada LKPP Tahun 2009, Utang kepada Pihak Ketiga karena kesalahan pemidambukuan rekening BUN sebesar Rp277.842.848.329 disajikan sebagai akun lawan utang tersebut adalah Dana yang Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (lihat **Catatan C.2.46**).
- 2) Pada LKPP Tahun 2009, Selisih Kas Lebih Tahun Lalu sebesar Rp461.520.691.590 disajikan sebagai bagian dari SAL Awal.

C.2.44. Cadangan Piutang

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2009 dan per 31 Desember 2008 sebesar Rp113.388.808.641.800 dan Rp131.105.728.420.877 merupakan akun lawan dari Piutang, termasuk Uang Muka dari Rekening BUN.

C.2.45. Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp36.606.824.405.660 dan Rp17.701.765.092.694 merupakan pasangan perkiraan persediaan yang dilaporkan K/L dan instansi terkait lainnya, termasuk persediaan pada BLU.

*Barang/Jasa yang Masih
Harus Diserahkan minus
Rp4,76 miliar*

C.2.46. Pendapatan yang Ditangguhkan

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp7.522.179.004.649 dan Rp5.632.683.677.853 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) K/L yang belum disetorkan ke Kas Negara serta pendapatan dan piutang terkait penerimaan migas dan panas bumi yang belum dapat diakui sebagai PNBP karena *earning process*-nya belum selesai. Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun lawan (pasangan) atas (dalam Rp):

*Selisih Kurs Bagian
lancar Utang minus
Rp8,14 triliun*

Akun Lawan	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
Kas di Bendahara Penerimaan	1.040.200.195.970	1.308.388.040.590
Kas Lainnya dan Setara Kas *)	272.596.435.596	-
Rek. Migas No. 600.000411 **)	6.018.743.604.183	4.237.660.389.030
Rek. Penerimaan Panas Bumi	190.638.768.900	86.635.248.233
Jumlah	7.522.179.004.649	5.632.683.677.853

*) Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan dana yang berasal dari penerimaan hibah yang belum disahkan, pengembalian belanja, pungutan pajak dan bunga jasa giro yang belum disetor yang berada pada Bendahara pengeluaran

**) Merupakan sebagian dari jumlah dari rekening migas yang telah teridentifikasi sebagai potensi penerimaan Negara, yaitu sebesar Rp8.718.692.283.486 dikurangi estimasi Kewajiban kepada KKKS sebesar Rp2.699.948.679.303 (lihat Catatan C.2.33).

Diinvestasikan dalam
Investasi Jangka
Panjang Rp737,04 triliun

LKPP Tahun 2008 belum menyajikan akun Kas Lainnya dan Setara Kas.

C.2.47. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar minus Rp175.176.238.495.688 dan minus Rp149.373.584.063.086. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Jumlah ini merupakan total nilai Utang Jangka Pendek dikurangi Utang PFK. Pada posisi per 31 Desember 2009, saldo ini berasal dari Utang Jangka Pendek dikurangi Utang PFK, Utang kepada pihak ketiga yang merupakan lawan akun kas lainnya dan setara kas, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang kesalahan pembukuan LAK, Kewajiban kepada KKKS, dan Selisih Kurs Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

Diinvestasikan dalam
Aset Tetap Rp979,00
triliun

Diinvestasikan dalam
Aset Lainnya Rp175,47
triliun

Rincian penghitungan Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Dana yang Harus
Disediakan untuk
Pembayaran Utang
Jangka Panjang minus
Rp1.397,80 triliun

Uraian	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
Total Utang Jangka Pendek	187.839.287.320.918	181.343.265.322.490
Dikurangi:		
Utang PFK	(906.088.090.285)	(233.349.390.887)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Kas Lainnya dan Setara Kas	(629.290.992.034)	-
Pendapatan Diterima di Muka	(4.763.707.423)	-
Utang karena Kesalahan Pemindahbukuan	-	-
Rekening BUN	(277.710.469.149)	-
Kewajiban kepada KKKS	(2.699.948.679.303)	(11.376.229.985.599)
Selisih Kurs Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	(8.145.246.887.035)	(20.360.101.882.918)
Jumlah	175.176.238.495.688	149.373.584.063.086

Pada LKPP Tahun 2008, saldo Dana Yang Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek disajikan sebesar minus Rp149.373.584.063.086. Saldo tersebut termasuk Dana Yang Disediakan untuk Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga karena Kesalahan Pemindahbukuan rekening BUN sebesar Rp28.128.459.228.

Selisih Kurs Utang
Jangka Panjang minus
Rp96,06 triliun

C.2.48. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2009 sebesar minus Rp4.763.707.423 merupakan akun lawan dari Pendapatan yang Diterima di Muka. LKPP Tahun 2008 belum menyajikan akun Pendapatan yang Diterima di Muka.

C.2.49. Selisih Kurs Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Selisih kurs terhadap Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2009 sebesar minus Rp8.145.246.887.035 dan minus Rp20.360.101.882.918 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI) yang terkait dengan utang luar negeri, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
Bilateral	3.504.251.493.432	11.960.559.433.670
Multilateral	2.755.906.704.715	3.969.444.370.887
Kredit Ekspor	1.799.883.371.417	4.217.086.282.470
Kredit Komersial	85.205.317.471	6.714.206.315
Leasing	-	36.292.165.810
Jumlah	8.145.246.887.035	20.360.101.882.918

Selisih kurs dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang untuk setiap jenis mata uang asing dimana utang tersebut dinyatakan baik yang berjangka panjang dan bagian lancarnya.

C.2.50. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

Jumlah Perkiraan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp737.039.382.666.868 dan Rp712.035.340.631.998 dan merupakan dana Pemerintah Pusat yang diinvestasikan dalam bentuk investasi permanen dan investasi non permanen yang merupakan lawan dari perkiraan Investasi Jangka Panjang.

C.2.51. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp979.004.124.298.695 dan Rp673.341.421.634.984 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Tetap.

C.2.52. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar Rp175.467.502.161.107 dan Rp422.232.167.508.465 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya. Jumlah ini merupakan akun lawan dari Aset Lainnya.

C.2.53. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang per 31

Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar minus Rp1.397.804.839.153.172 dan minus Rp1.314.489.164.736.406 merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Jumlah ini merupakan akumulasi utang jangka panjang yang terdiri dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Luar Negeri dikurangi selisih kurs, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	904.323.310.498.727	856.486.123.380.355
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	589.545.796.763.718	655.861.868.010.166
Selisih Kurs Utang Jangka Panjang	(96.064.268.109.273)	(197.858.826.654.115)
Jumlah	1.397.804.839.153.172	1.314.489.164.736.406

C.2.54. Selisih Kurs Utang Jangka Panjang

Selisih kurs per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 sebesar minus Rp96.064.268.109.273 dan Rp197.858.826.654.115 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI) yang terkait dengan utang luar negeri dan SBN Internasional (Valas). Rincian selisih kurs per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah (dalam Rp):

Selisih Kurs	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
Utang Luar Negeri:		
Bilateral	45.843.835.440.355	117.627.180.309.185
Multilateral	28.934.923.480.812	36.198.503.824.283
Kredit Ekspor	12.160.540.829.206	26.495.617.448.528
Kredit Komersial	525.315.111.996	25.009.498.874
Leasing	-	16.011
Subtotal	87.464.614.862.370	180.176.305.673.115
Obligasi Internasional (Valas)	8.599.653.246.903	17.682.520.981.000
Jumlah	96.064.268.109.273	197.858.826.654.115

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Panas Bumi (Rek. 508.000.084)

Pada Catatan C.2.3 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp190.638.768.899 dan Rp86.635.248.233. Rekening Panas Bumi (No. 508.000084) adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi:

	URAIAN	31 Desember 2009 (Audited)	31 Desember 2008 (Audited)
I.	Saldo Awal ¹⁾	86.635.248.233	291.316.908.993
II.	Penerimaan:		

1.	Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	821.152.357.725	841.217.455.057
2.	Koreksi Pembukuan Kredit ²⁾	781.832.710	5.058.818.262
	Total Penerimaan	821.934.190.435	846.276.273.319
III.	Pengeluaran:		
1.	Pembayaran PBB Panas Bumi ³⁾	245.017.477.786	98.472.701.523
2.	Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi ⁴⁾	70.764.929.954	7.015.092.758
3.	Pemindahbukuan PNBPT Pertambangan Panas Bumi ke Rek. BUN ⁵⁾	400.393.666.556	941.384.084.298
4.	Pinjaman untuk Dana Talangan	-	4.086.055.500
5.	Koreksi Pembukuan Debit ⁶⁾	1.754.595.472	-
	Total Pengeluaran	717.930.669.768	1.050.957.934.079
IV.	Kenaikan/Penurunan (II - III)	104.003.520.666	(204.681.660.760)
V.	Saldo Akhir (I + IV) ⁷⁾	190.638.768.899	86.635.248.233

Penjelasan:

- 1) Saldo awal sebesar Rp86.635.248.233 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban terkait dengan kegiatan usaha panas bumi yang terdiri dari:
 - a. Cadangan Pembayaran Kembali (*Reimbursement*) PPN Panas Bumi sebesar Rp22.732.765.471 tahun anggaran 2007 dan 2008 kepada:
 1. Chevron Geothermal Salak Rp16.359.577.189
 2. Dayabumi Salak Pratama Rp 4.244.393.833
 3. PT Pertamina (Persero) Rp 2.128.794.449

Sampai dengan akhir Desember 2008, *reimbursement* PPN tersebut belum dapat dibayarkan, mengingat Chevron Geothermal Salak, Ltd dan Dayabumi Salak Pratama, Ltd masih mempunyai tunggakan kewajiban berupa kekurangan setoran Bagian Pemerintah, sedangkan PT Pertamina (Persero) masih dalam proses penyelesaian.
 - b. Cadangan Pembayaran PBB Pertambangan panas bumi Tahun 2008 untuk 5 Wilayah Kerja Panas Bumi yang baru sebesar Rp62.929.720.000.
 - c. Cadangan Pembayaran PBB Pertambangan panas bumi Triwulan IV Tahun 2008 yang diretur pada transaksi tanggal 26 Desember 2008 dengan alasan nomor rekening salah dan rekening tutup sebesar Rp972.762.762 untuk 2 (dua) kabupaten yaitu:
 1. Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp765.103.839
 2. Kabupaten Wonosobo sebesar Rp207.658.923
- 2) Koreksi pembukuan kredit sebesar Rp781.832.710,00 adalah koreksi kredit akibat retur pemindahbukuan pembayaran PBB Panas Bumi Triwulan II Tahun 2009 untuk Kabupaten Tapanuli Utara.
- 3) Pembayaran PBB Panas Bumi sebesar Rp245.017.477.786 terdiri dari:
 1. Pembayaran PBB Panas Bumi Tahun 2009 sebesar Rp182.087.757.786.
 2. Pembayaran PBB Panas Bumi Tahun 2008 untuk 5 Wilayah Kerja Panas Bumi yang baru sebesar Rp62.929.720.000.
- 4) Pembayaran kembali PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp70.764.929.954 terdiri dari:
 1. Pembayaran kembali PPN yang pengajuannya pada Tahun 2009 Sebesar Rp66.400.278.177
 2. Pembayaran kembali PPN yang telah dicadangkan pada akhir Tahun 2008 sebesar Rp4.364.651.777.
- 5) Pemindahbukuan PNBPT Pertambangan Panas Bumi ke Rekening BUN sebesar Rp400.393.666.556 terdiri dari:
 1. PNBPT Pertambangan Panas Bumi Triwulan I 2009 sebesar Rp79.217.756.617;
 2. PNBPT Pertambangan Panas Bumi Triwulan II 2009 sebesar Rp81.321.190.657;

3. PNBP Pertambangan Panas Bumi Triwulan III 2009 sebesar Rp119.589.811.699;
4. PNBP Pertambangan Panas Bumi Triwulan IV 2009 sebesar Rp120.264.907.583;
- 6) Koreksi pembukuan debit sebesar Rp1.754.595.472 adalah koreksi debit akibat retur pemindahbukuan pembayaran PBB Panas Bumi tahun 2008 sebesar Rp972.762.762 dan PBB Panas Bumi Triwulan II Tahun 2009 untuk Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp781.832.710.
- 7) Saldo akhir sebesar Rp190.638.768.899,49 merupakan cadangan pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN panas bumi kepada:
 1. PT Pertamina (Persero) sebesar Rp55.961.720.143,73
 2. Chevron Geothermal Salak, Ltd sebesar Rp69.363.197.207,50
 3. Chevron Geothermal Indonesia, Ltd sebesar Rp61.973.409.367,75
 4. Dayabumi Salak Pratama, Ltd sebesar Rp3.340.442.180,51

2. Penertiban Barang Milik Negara

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2004, LKPP Tahun 2005, LKPP Tahun 2006, dan LKPP Tahun 2007 terdapat beberapa temuan yang terkait dengan Barang Milik Negara (BMN), antara lain: (i) BMN yang disajikan pada Neraca belum dapat diyakini kewajarannya, (ii) Aset Tetap Kementerian Negara/Lembaga belum disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (iii) prosedur pencatatan dan pelaporan barang milik negara tidak dilakukan sesuai dengan sistem akuntansi yang telah ditetapkan, dan (vi) sistem pengendalian intern pengelolaan atas BMN masih lemah.

Sebagai tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tersebut, Pemerintah telah dan sedang melakukan penertiban BMN. Sebagai langkah awal, telah diterbitkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2007 jo. Keppres 13 Tahun 2009 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara. Penertiban BMN dilaksanakan melalui inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi seluruh BMN pada K/L, sehingga diharapkan terwujud penertiban dan pengamanan BMN secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel baik secara administratif, fisik maupun hukum.

Lingkup obyek penertiban terdiri dari seluruh aset tetap/BMN yang perolehannya berasal dari APBN dan perolehan yang sah serta kekayaan negara lain-lain yang diungkapkan dalam temuan BPK. Pelaksanaan penertiban BMN dilakukan mulai Oktober 2007 s.d. 31 Maret 2010 terhadap 74 K/L, Lembaga Pelayanan Publik, dan aset kekayaan negara lain-lain seperti Aset KKKS, BMKT, Aset Asing/Cina, Aset eks Kepabeanaan, Aset eks BPPN, Aset eks BDL, dan Aset eks Kelolaan PPA. Hasil inventarisasi dan penilaian BMN akan dijadikan sebagai dasar koreksi atas nilai BMN yang telah disajikan pada Neraca Awal Pemerintah per 31 Desember 2004.

Hasil inventarisasi dan penilaian per 31 Desember 2009 berdasarkan data Penertiban BMN per 20 April 2010 adalah adanya koreksi penambahan aset tetap sebesar Rp333.118.812.707.841. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp321.613.315.688.146 (96,55%) telah dibukukan oleh K/L sebagai koreksi dan sebesar Rp11.505.497.019.695 (3,45%) belum dibukukan. Koreksi pembukuan oleh K/L tersebut dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK-BMN) dan jurnal aset. Rincian koreksi yang telah dibukukan sebesar Rp321.613.315.688.146 adalah:

- Sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp90.284.409.292.757; dan
- Tahun 2009 sebesar Rp231.328.906.395.389.

Hasil inventarisasi dan penilaian yang belum dibukukan sebagai koreksi, akan dibukukan pada tahun 2010.

Terhadap satker yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian BMN juga telah dilaksanakan rekonsiliasi guna memastikan satker yang bersangkutan telah mengoreksi laporan BMN sesuai dengan hasil inventarisasi dan penilaian serta telah menerapkan aplikasi SIMAK-BMN. Hal tersebut dikecualikan untuk satker-satker Kementerian Pertahanan yang masih dalam proses terkait adanya perbedaan aplikasi antara SIMAK-BMN dengan SIMAK Kemenhan/TNI.

Rincian 70 K/L yang telah 100% selesai melaksanakan inventarisasi dan penilaian adalah:

- | | |
|---|--|
| 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat | 36. Badan Pertanahan Nasional |
| 2. Dewan Perwakilan Rakyat | 37. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia |
| 3. Badan Pemeriksa Keuangan | 38. Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| 4. Mahkamah Agung | 39. Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| 5. Kejaksaan Agung | 40. Badan Pengawas Obat dan Makanan |
| 6. Sekretariat Negara | 41. Lembaga Ketahanan Nasional |
| 7. Kementerian Dalam Negeri | 42. Badan Koordinasi Penanaman Modal |
| 8. Kementerian Luar Negeri | 43. Badan Narkotika Nasional |
| 9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 44. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal |
| 10. Kementerian Pertanian | 45. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional |
| 11. Kementerian Perindustrian | 46. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia |
| 12. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 47. Badan Meteorologi, Geofisika, dan Klimatologi |
| 13. Kementerian Pendidikan Nasional | 48. Komisi Pemilihan Umum |
| 14. Kementerian Kesehatan | 49. Mahkamah Konstitusi RI |
| 15. Kementerian Agama | 50. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan |
| 16. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 51. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
| 17. Kementerian Sosial | 52. Badan Tenaga Nuklir Nasional |
| 18. Kementerian Kehutanan | 53. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi |
| 19. Kementerian Kelautan dan Perikanan | 54. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional |
| 20. Kementerian Pekerjaan Umum | 55. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional |
| 21. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan | 56. Badan Standarisasi Nasional |
| 22. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 57. Badan Pengawas Tenaga Nuklir |
| 23. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat | 58. Lembaga Administrasi Negara |
| 24. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata | 59. Arsip Nasional Republik Indonesia |
| 25. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara | 60. Badan Kepegawaian Negara |
| 26. Kementerian Negara Riset dan Teknologi | 61. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
| 27. Kementerian Negara Lingkungan Hidup | 62. Kementerian Perdagangan |
| 28. Kementerian Negara Koperasi dan UKM | 63. Kementerian Negara Perumahan Rakyat |
| 29. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan | 64. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga |
| 30. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara | 65. Komisi Pemberantasan Korupsi |
| 31. Badan Intelijen Negara | 66. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nadi Nias |
| 32. Lembaga Sandi Negara | 67. Dewan Perwakilan Daerah |
| 33. Dewan Ketahanan Nasional | 68. Komisi Yudisial |
| 34. Badan Pusat Statistik | 69. BKNPB |
| 35. Kementerian Negara PPN/Bappenas | 70. BNP2TKI |

Sementara itu, K/L yang belum selesai melakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) adalah:

1. Kementerian Keuangan telah mencapai penyelesaian inventarisasi dan

penilaian 99,71% dengan nilai koreksi sebesar Rp13.968.825.567.140;

2. Kementerian Perhubungan telah mencapai penyelesaian inventarisasi dan penilaian 98% dengan nilai koreksi sebesar Rp16.846.956.710.806; dan

3. Kementerian Pertahanan telah mencapai penyelesaian inventarisasi dan penilaian 73% dengan nilai koreksi Rp76.653.637.644.891.

Sedangkan aset pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tidak dilakukan IP.

Rincian mengenai Hasil Penertiban BMN per K/L dapat dilihat pada **Daftar 39**.

3. Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

Dalam rangka melanjutkan penertiban rekening Pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara serta untuk memenuhi amanat undang-undang yang menjadi landasan bagi reformasi pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan melakukan langkah-langkah lanjutan penertiban rekening pemerintah pada seluruh instansi K/L melalui 3 PMK, yaitu:

- Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
- Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 459/KMK.05/2009 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.05/2007 tentang Pembentukan Tim Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Tim Penertiban Rekening Pemerintah (TPRP) telah melakukan langkah-langkah penertiban rekening yaitu:

- a. Mendata rekening-rekening di 76 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan BUN yang berjumlah 39.960 rekening, dan dari jumlah tersebut telah ditutup 6.796 rekening dengan saldo rekening yang disetor ke kas negara sebesar Rp6.326.686.906.777,- dan USD15.748.867.
- b. Rekening operasional K/L (untuk digunakan permanen dan/atau sementara/masih perlu ditindaklanjuti) yang dikelola oleh kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2009 sebanyak 30.464 rekening, 28.216 diantaranya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku BUN. TPRP harus mencari keterangan terhadap rekening yang sudah dilaporkan oleh K/L namun belum mendapat persetujuan dari BUN.
- c. Rekening yang dibekukan sebanyak 3.003 rekening, 182 rekening telah diaktifkan kembali berdasarkan klarifikasi dari K/L yang bersangkutan, 230 rekening telah ditutup oleh pemilik rekening, dan masih terdapat 2.591 rekening yang masih dibekukan karena belum ada klarifikasi dan

permintaan pengaktifan kembali dari K/L yang bersangkutan atau rekening tersebut tidak memenuhi syarat untuk diaktifkan kembali. Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 02/PB/2010 tentang Tindak Lanjut Atas Pengenaan Sanksi Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja, Tim akan segera mengusulkan penutupan terhadap 1.225 rekening yang masih dibekukan karena tidak mendapatkan tanggapan/respons dari K/L sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

- d. Rekening yang diinvestigasi 4.803 rekening, 3.258 rekening dinyatakan telah selesai, dan 1.545 rekening masih belum dapat ditetapkan statusnya, karena sampai 31 Desember 2009, KPK dan APIP K/L belum tuntas melakukan penyelidikan terhadap keseluruhan rekening yang diserahkan oleh Tim maupun rekening tambahan yang ditemukan dalam proses penyelidikan.

Rekening pada 33 KL (707 rekening operasional) dinyatakan *clear and free*, dan akan segera diserahkan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) - Ditjen Perbendaharaan sebagai unit yang secara struktural bertugas membina dan memonitor ketertiban KL dalam mengelola rekening Pemerintah agar tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Rekening pada 43 K/L lainnya, sebagian besar telah dapat dikategorikan sebagai rekening-rekening yang *clear and free*, namun belum dapat dilakukan karena masih terdapat beberapa rekening pada K/L bersangkutan yang belum dinyatakan *clear and free*. TPRP terus mengupayakan penyelesaian terhadap rekening-rekening tersebut agar statusnya segera ditetapkan sebagai rekening yang *clear and free*. Termasuk di dalamnya adalah K/L yang memiliki kantor vertikal (diantaranya satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang sangat banyak antara lain: Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, dan Kepolisian RI.

Penertiban Rekening Pemerintah masih terus dilanjutkan pada TA 2010, dengan tugas antara lain Updating data; Tindak lanjut terhadap rekening-rekening diinvestigasi; Penyusunan daftar rekening yang telah disetujui; Inventarisasi Rekening Bendahara Umum Negara (BUN), termasuk Rekening Kas Umum Negara (RKUN); Percepatan penyelesaian data rekening pada 43 K/L, antara lain Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, dan Kepolisian RI; dan Pengujian/pengkajian ulang rekening-rekening yang telah diberi persetujuan.

Laporan lengkap mengenai Penertiban Rekening Pemerintah Tahun 2009 disajikan tersendiri dalam bentuk Suplemen.

4. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

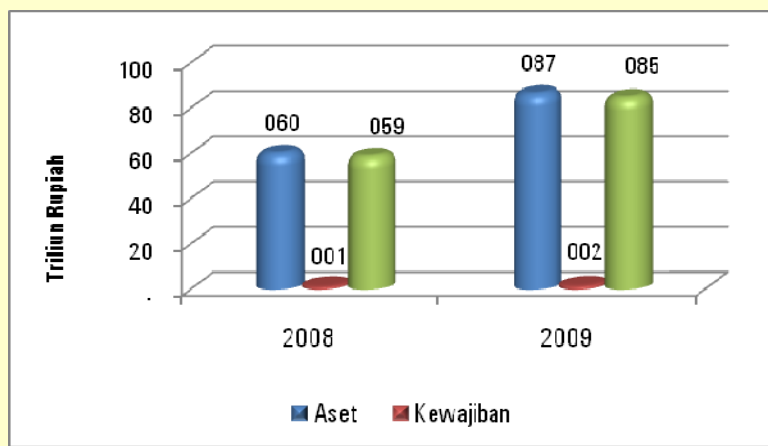
Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

- a. Kementerian Perhubungan berupa Tugu Peringatan.
- b. Kementerian Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah.

- c. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:
 - Arsip Kertas sebanyak 27.247 km linier
 - Arsip Kartografik dan Kearsitekturan sebanyak 99.794 lembar
 - Arsip Film sebanyak 70.060 reel
 - Arsip Video sebanyak 30.125 buah
 - Arsip Optical Disc sebanyak 427 keping
 - Arsip Mikrofilm sebanyak 13.648 reel
 - Arsip Rekaman Suara sebanyak 37.349 kaset
 - Arsip Foto sebanyak 1.663.000 lembar
- d. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, berupa tumbuhan langka yang terdapat pada Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor, Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas, Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi, dan Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Eka Karya Bali.
- e. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Survei Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.

5. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan BLU telah dijelaskan sebelumnya pada Catatan Penting Lainnya dalam Laporan Realisasi APBN. Perbandingan aset, kewajiban, dan ekuitas Saker BLU tahun 2008 dan tahun 2009 disajikan dalam grafik di bawah ini:



Grafik 42: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum
31 Desember 2008 dan 2009

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan pada Daftar 38.

6. Neraca Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darusalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR-NAD-Nias)

BRR-NAD Nias dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2005 tanggal 16 April 2005 tentang Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi yang selanjutnya menjadi UU dengan diterbitkannya UU No. 10 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005.

Masa tugas BRR berlaku 4 (empat) tahun dan pengakhiran masa Tugas BRR NAD-Nias diatur dalam PP No. 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yaitu pada tanggal 16 April 2009.

Dalam rangka penyelesaian Aset-aset BRR NAD-Nias yang berakhir tanggal 16 April 2009, Pemerintah membentuk Tim Likuidasi BRR-NAD-Nias. Tim Likuidasi BRR NAD-Nias dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.05/2009 tentang Pembentukan Tim Likuidasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Tim Likuidasi memiliki masa kerja dari 15 Maret 2009 dan berakhir pada 31 Desember 2009.

SK Menteri Keuangan tersebut merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Penutup dan Laporan Keuangan Likuidasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Tugas Tim Likuidasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.05/2009 antara lain menyusun Laporan Keuangan Likuidasi Bagian Anggaran 094 (BRR NAD-Nias). Namun demikian, sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2009, LK Likuidasi belum diterbitkan, sehingga Neraca BRR NAD-Nias yang disajikan dalam LKPP Tahun 2009 merupakan Neraca Penutup yang disusun berdasarkan Neraca per 31 Desember 2008 (*Unaudited*), sebagai berikut:

**NERACA PENUTUP
PER 31 DESEMBER 2009**

Uraian	Jumlah (Rp)
Aset	
Aset Lancar	
Kas PMU Rekompak	33.830.599.610

Kas Komite Beasiswa	33.484.716.880
Piutang Kepada Pihak Ketiga	516.968.200
Uang Muka Belanja	68.345.423.730
Belanja Dibayar Di Muka	2.149.584.510
Jumlah Aset Lancar	138.327.292.930
Aset Tetap	
Tanah	976.421.508.321
Peralatan Dan Mesin	1.518.387.322.744
Gedung Dan Bangunan	3.132.980.074.828
Jalan Irigasi Dan Jaringan	4.552.016.228.688
Aset Tetap Lainnya	26.628.707.111
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.061.530.672.825
Jumlah Aset Tetap	11.267.964.514.517
Aset Lainnya	
Aset Lain-Lain	729.419.877.785
Jumlah Aset Lainnya	729.419.877.785
Jumlah Aset	12.135.711.685.232
Kewajiban	
Kewajiban Jangka Pendek	
Utang Kepada Pihak Ketiga	67.315.316.490
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	67.315.316.490
Jumlah Kewajiban	67.315.316.490
Ekuitas Dana	
Ekuitas Dana Lancar	
Cadangan Piutang	71.011.976.440
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	71.011.976.440
Ekuitas Dana Investasi	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	11.267.964.514.517
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	729.419.877.785
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	11.997.384.392.302
Jumlah Ekuitas Dana	12.068.396.368.742
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	12.135.711.685.232

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, setelah berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias, seluruh BMN Eks BRR NAD-Nias menjadi berada dalam pengelolaan Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN.

Selanjutnya, terhadap Aset berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) diselesaikan dengan alokasi dana pada Bagian Anggaran 999 (Bendahara Umum Negara) dan dilaporkan dalam LK BA BUN 999.06.

Sampai saat ini BPK belum menyelesaikan proses audit terhadap LK BRR NAD – Nias Tahun 2008, dan Tim Likuidasi belum dapat menyusun LK Likuidasi BRR NAD-Nias. Tim Likuidasi BRR NAD – Nias baru dapat menyajikan Neraca Proforma Likuidasi per 30 April 2009 sebagai berikut:

NERACA PROFORMA LIKUIDASI
Per 30 APRIL 2009

Uraian	Jumlah (Rp)
Aset	
Aset Lancar	
Uang Muka Belanja	68.345.423.730
Jumlah Aset Lancar	68.345.423.730
Aset Tetap	

Tanah	976.421.508.321
Peralatan Dan Mesin	1.518.387.322.744
Gedung Dan Bangunan	3.132.980.074.828
Jalan Irigasi Dan Jaringan	4.552.016.228.688
Aset Tetap Lainnya	26.628.707.111
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.061.530.672.825
Jumlah Aset Tetap	11.267.964.514.517
Aset Lainnya	
Aset Lain-Lain	729.419.877.785
Jumlah Aset Lainnya	729.419.877.785
Jumlah Aset	12.065.729.816.032
Kewajiban	0
Ekuitas Dana	
Ekuitas Dana Lancar	
Cadangan Piutang	68.345.423.730
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	68.345.423.730
Ekuitas Dana Investasi	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	11.267.964.514.517
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	729.419.877.785
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	11.997.384.392.302
Jumlah Ekuitas Dana	12.065.729.816.032
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	12.065.729.816.032

7. Lembaga Non Struktural dan Yayasan di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga

Lembaga Non Struktural merupakan bagian eksekutif (berada di bawah atau bertanggung jawab kepada presiden atau menteri), namun bukan merupakan struktur/bagian dari kementerian negara/lembaga (K/L). Eksistensi dan fungsinya diatur dalam UU, PP, Keppres maupun Peraturan Presiden. Pembentukan lembaga negara non struktural dimaksudkan untuk membantu pemerintah menangani masalah yang belum bisa dilaksanakan dan diselesaikan oleh lembaga negara formal.

Istilah non struktural dikaitkan dengan tidak adanya hubungan organisatoris antara lembaga ini dengan K/L selain hubungan kerja meskipun pendanaannya menginduk ke K/L. Istilah tersebut secara eksplisit juga diungkap dalam peraturan perundangan yang membentuknya. Kata "independen" atau mandiri, otonom terkadang menjadi kata tambahan dalam peraturan pembentukan lembaga tertentu. Biasanya dikaitkan dengan keterlibatan pihak-pihak diluar pemerintahan seperti: praktisi, pakar dan tokoh masyarakat dalam komposisi keanggotaan atau pengurus LNS.

Nomenklatur lembaga itu bermacam-macam. Ada Akademi, badan, dewan, komisi, komite, konsil, korps, lembaga, majelis, otorita, dan unit kerja. Kesekretariatan LNS/I biasanya berada di K/L atau instansi resmi pemerintah yang sudah ada sebelumnya, sedangkan pegawai seluruhnya berasal atau merupakan pinjaman dari K/L. Gaji pegawai sekretariat LNS sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap dibayar oleh instansi asal, sedangkan dari LNS biasanya mereka mendapat tunjangan tambahan.

Hingga akhir Tahun 2009, Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi 90 lembaga non struktural. Dari 90 lembaga tersebut, lebih dari sepertiganya (35 lembaga) merupakan amanat yang tertulis dalam Undang-Undang. Menilik legalitas pembentukannya, sebanyak 20% dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah. Sedangkan yang dibentuk berdasarkan keputusan

presiden sebanyak 60% dan 20 % berdasarkan peraturan presiden.

Komposisi sumber dana untuk membiayai kegiatan operasional LNS bisa dikategorikan dalam 3 jenis:

1. Sekitar 75% (68 LNS) dibiayai dari APBN. Sebanyak 43 Sekretariat LNS merupakan Satker yang berada dibawah Kementerian Negara/Lembaga (K/L), sedangkan 25 Sekretariat LNS dibiayai dari Kegiatan K/L. Dari 43 satker tersebut, diantaranya adalah 13 Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (BP KAPET) yang didanai APBN melalui Dana Dekonsentrasi di SKPD Dinas PU & Kimpraswil.
2. Empat LNS yakni: Bapertarum, Badan Pengelola Dana Abadi Umat, Otorita Asahan, dan LPS mendanai kegiatannya dari penerimaan tertentu tanpa kucuran dana dari APBN.
3. Empat Lembaga Non Struktural yang menerima dana dari APBN dan Non APBN yakni: Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN).

Enam LNS saat ini sudah tidak aktif lagi namun peraturan perundang-undangan tentang pembentukan LNS tersebut belum dicabut. Sedangkan 8 LNS belum aktif karena belum lama dibentuk pemerintah.

Lembaga Non Struktural yang dibiayai dari APBN murni, akuntansi atas transaksi keuangan dan laporan keuangannya sudah dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian/lembaga maupun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Lembaga non struktural yang menjadi satuan kerja atau entitas akuntansi tersendiri, pengurusan administrasi keuangannya ditangani oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat atau pejabat struktural K/L yang menaungi dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Lembaga Non Struktural sebagai entitas akuntansi tunduk pada ketentuan pasal 27 ayat 1 PP 8/2006 bahwa Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interim sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Selanjutnya, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja interim Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan Laporan Keuangan dan Kinerja interim Kuasa Pengguna Anggaran dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Sampai dengan akhir Tahun 2009, total aset LNS sebesar Rp26,82 triliun. Pemilik aset terbesar berturut-turut: Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-PNS, LPP RRI, LPP TVRI, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKAS).

Ikhtisar Laporan Keuangan LNS disajikan pada **Daftar 37**.

Yayasan di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga

UU No. 17 Tahun 2003 pasal 2 memasukkan yayasan di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dalam ruang lingkup keuangan negara. Terdapat kata "pihak lain" pada butir g dan l yaitu:

- "Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah".
- "Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah".

Dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud pasal 2 butir 1 UU 17/2003 meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Berdasarkan ruang lingkup keuangan negara di atas, yayasan di lingkungan kementerian/lembaga adalah yayasan yang terafiliasi dengan kementerian negara/lembaga, yang menurut Akta Notaris dan Anggaran Dasarnya didirikan atau dipimpin oleh pejabat pemerintah aktif di kementerian negara/lembaga tertentu atau yayasan yang menerima dan memanfaatkan aset negara dalam melaksanakan kegiatannya. Identifikasi atas yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga ini diperlukan untuk kemajuan tata kelola pemerintahan melalui transparansi dan akuntabilitas sektor publik.

Identifikasi lebih lanjut atas yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga dipisahkan dari yayasan-yayasan yang bernaung dibawah institusi TNI. Hal ini karena karena pasal 76 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI telah mengamanatkan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, pemerintah harus mengambil alih seluruh aktifitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini ada 900-an unit bisnis baik berupa yayasan maupun koperasi di bawah naungan TNI yang telah teridentifikasi oleh Badan Pengelola Transformasi Bisnis TNI yang diketuai oleh Sekretaris Kementerian Negara BUMN untuk diserahkan kepada Presiden. Selanjutnya yayasan maupun koperasi tersebut ditransformasikan dalam korporasi atau dimasukkan dalam mekanisme APBN, sehingga TNI bisa berkonsentrasi mengembangkan profesionalitas tentara dan meninggalkan bisnis.

Sejauh ini, yayasan dalam lingkup keuangan negara yang sudah teridentifikasi dan menyampaikan laporan keuangan yakni:

1. Yayasan Harapan Kita dalam hal ini Badan Pengelola dan Pengembangan TMII yang mengelola Taman Mini Indonesia Indonesia Indah.
2. Yayasan Sarana Wana Jaya dalam hal ini Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti yang berada di Kementerian Kehutanan.
3. Yayasan Gedung Veteran RI yang mengelola gedung "Graha Purna Yudha" di Jalan Sudirman, Semanggi – Jakarta Pusat.
4. Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bhumi Bhakti Adhiguna di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
5. Yayasan Gedung Arsip Nasional RI
6. Yayasan Yustitia Dharmayukti Karini di lingkungan Mahkamah Agung
7. Yayasan Purna Bhakti (YARNATI) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
8. Yayasan Pengembangan BUMN di lingkungan Kementerian Negara

BUMN

Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bhumi Bhakti Adhiguna (YBBA) di lingkungan Badan Pertanahan Nasional telah dibubarkan sesuai Akta Notaris S.Rachma C.Hardiyanto Hoesodo, SH Nomor 3 tanggal 18 Desember 2008 dan menunjuk Tim Likuidasi yang bertugas melakukan likuidasi atau pembebasan hak-hak dan kewajiban yayasan meliputi administrasi, kekayaan, dan keuangan yayasan. Saat ini tim likuidasi yayasan telah melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyangkut tata cara penyerahan dan pelimpahan aset-aset YBBA.

Badan Pemeriksa Keuangan mengkonfirmasi telah melakukan pembekuan kegiatan yayasan di lingkup BPK-RI yaitu Yayasan Cakra Bhakti dan PT Pentas Cakra Bhakti dalam pengelolaan aset milik negara di BPK-RI, yang ditindaklanjuti dengan SK Sekjen No. 244a/K/X-XIII.2/10/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pencabutan Pengelolaan Sebagian Fasilitas Pendukung Milik Badan Pemeriksa Keuangan yang berada di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dari Yayasan Cakra Bhakti.

Aset yayasan/badan pengelola tersebut berjumlah Rp227,95 miliar. Ikhtisar laporan keuangan yayasan tersebut disajikan pada **Daftar 37**.

8. Aset Bekas Milik Asing/Cina

Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) merupakan Aset yang dikuasai Negara yang berasal dari bekas:

1. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
2. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
3. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G.30.S/PKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66.

Penyelesaian ABMA/C diatur dalam PMK No. 188/PMK.06/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan No. S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2006, jumlah ABMA/C yang belum selesai kejelasan status hukumnya adalah 942 aset dari jumlah keseluruhan 1.345 sesuai Surat Menteri Keuangan No. 394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989. Setelah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh DJKN di seluruh Indonesia pada tahun 2007, 2008, terdapat 1.009 aset yang belum selesai status hukumnya, dan selanjutnya dituangkan dalam

Lampiran PMK No. 188/PMK.06/2008 tanggal 20 November 2008, dengan petunjuk penyelesaian sebagai berikut:

- a. disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia (apabila telah selesai, maka dicatat dan dilaporkan sebagai BMN);
- b. disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah (apabila telah selesai, maka dicatat dan dilaporkan sebagai BMD);
- c. dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara;
- d. dipertukarkan dengan aset yang dimiliki oleh pihak ketiga;
- e. dihibahkan;
- f. dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
- g. dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina.

Sampai dengan 31 Desember 2009, dari total 1.009 aset yang belum teridentifikasi berdasarkan Lampiran PMK No. 188/PMK.06/2008 tanggal 20 November 2008, telah teridentifikasi sebanyak 5 aset, sehingga jumlah aset yang belum teridentifikasi adalah 1.004 aset.

Asset- aset yang sudah teridentifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan status hukum ABMA/C di Jalan Kartini No. 16 Denpasar Bali menjadi Barang Milik Negara yang digunakan
2. Pemantapan status hukum ABMA/C di Jalan Kartini No. 36 Denpasar Bali menjadi Barang Milik Negara yang digunakan TNI AD berdasarkan SKMK No. 197/KM.6/2009.
3. Pelepasan ABMA/C di Jl. Kelenteng No. 178 Tg Pandan Belitung kepada Yayasan Budi Darma Hok Tek dengan kompensasi Rp346,407,500,00 berdasarkan SKMK No. 167/KM.6/2009.
4. Pengeluaran ABMA/C berupa tanah gedung Perkumpulan Kematian Cina Dharma Bhakti di Jalan P. Hidayatullah Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan SKMK No. 169/KM.6/2009
5. Pengeluaran ABMA/C berupa tanah kosong (lapangan pemuda) di Jalan Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan SKMK No. 176/KM.6/2009

Pemerintah masih terus melakukan inventarisasi dan penilaian ABMA/C dalam rangka *updating* data. Pada tahun 2007 telah dilakukan penilaian atas sejumlah 67 aset dengan nilai total Rp613.619.131.523 yang telah diungkapkan pada LKPP Tahun 2007. Pada tahun 2008, telah dilakukan penilaian atas sejumlah 139 aset dengan nilai total Rp733.820.331.364. Pada tahun 2009 telah dilakukan penilaian atas sejumlah 69 aset dengan nilai total Rp102.497.551.696, sehingga jumlah ABMA/C yang telah dinilai pada tahun 2007, 2008, dan 2009 adalah sejumlah 275 unit dengan nilai total Rp1.449.937.014.583.

Dengan demikian, dari jumlah keseluruhan 1.009 aset yang belum selesai status hukumnya per 31 Desember 2008, 5 (lima) aset telah diselesaikan, 645 aset atau 64% aset telah dilakukan cek fisik, dan 275 aset atau 27% telah dilakukan penilaian.

Selama semester II tahun 2009 tidak ada peningkatan jumlah ABMA/C yang telah dinilai, karena adanya hambatan dari pihak penghuni, serta prioritas pekerjaan saat ini adalah ditujukan untuk penyelesaian status hukum

ABMA/C sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008. Hambatan dari pihak penghuni dalam pelaksanaan penilaian di lapangan menyebabkan Penilai DJKN tidak dapat melaksanakan survei fisik atas aset (penghuni/penguasa/pihak ketiga yang menempati tidak memperkenankan Penilai DJKN masuk ke objek yang akan dinilai). Dalam rangka penilaian aset, jika survei fisik aset tidak dapat dilakukan maka dengan sendirinya penilaian tidak dapat dilaksanakan.

Menteri Keuangan dengan surat No.S-05/MK.6/2009 tanggal 09 Januari 2009, telah menetapkan pemberian hak prioritas pelepasan ABMA/C berupa Tanah Seluas 947,47 m² di Jl. S Parman (Klenteng 178) kepada Yayasan Budi Dharma "Hok Tek" Tanjung Pandan (YBDH Tanjung Pandan) dengan pembayaran kompensasi sebesar 50% dari harga taksiran atau sebesar Rp346.407.500. YBDH Tanjung Pandan telah melakukan kewajibannya membayar kompensasi yang sebesar Rp346.407.500 (bukti pembayaran adalah SSBP KPPN Tanjung Pandan tanggal 8 April 2009 sebesar Rp200.000.000 dan tanggal 29 April 2009 sebesar Rp146.407.500).

Rincian ABMA/C disajikan pada **Daftar 40**.

9. Kewajiban Kontinjensi

Merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:

1. tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
2. jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Sesuai Perpres No.91/2007, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW berbahan bakar batubara oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan. Jaminan pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur.

Kewajiban pemerintah untuk membayar kepada kreditur PT PLN (Persero) baru akan timbul jika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya. Sehingga terdapat unsur ketidakpastian atas timbulnya kewajiban Pemerintah. Selain itu, jumlah kewajiban yang mungkin timbul atas penjaminan kepada PT PLN (Persero) tidak dapat diukur secara pasti. Jumlah pastinya baru akan diketahui pada masa yang akan datang.

Besaran kewajiban kontinjensi atas penjaminan kepada PT PLN (Persero) tidak dapat diukur secara handal. Estimasi besaran kewajiban didasarkan pada jumlah kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur proyek 10.000 MW serta probabilitas gagal bayar dari kewajiban tersebut. Kewajiban PT PLN (Persero) tahun 2009 adalah pembayaran bunga mengingat masih berada pada disbursement period. Sesuai dengan PMK Nomor 44 tahun 2008, perhitungan estimasi besaran kewajiban kontinjensi dilakukan oleh

Badan Kebijakan Fiskal. Adapun estimasi besaran kewajiban kontinjensi untuk tahun 2009 yang dialokasikan dalam APBN-P TA 2009 sebesar Rp1.000.000.000.000, namun tidak terealisasi.

Terdapat ketidakpastian atas waktu dan jumlah kewajiban yang mungkin timbul terkait dengan penjaminan kepada PT PLN (Persero). Kewajiban Pemerintah kepada kreditur PT PLN (Persero) baru akan timbul jika PT PLN (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya/gagal bayar. Terjadinya gagal bayar PT PLN (Persero) tergantung dengan kondisi keuangan PT PLN (Persero). Untuk memperkirakan terjadinya gagal bayar, digunakan rasio CICR (*Consolidated Interest Coverage Ratio*) dan DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*).

Sesuai dengan PMK 44 Tahun 2008, apabila terjadi gagal bayar, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur PT PLN (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang pemerintah kepada PT PLN (Persero).

Berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ditunjuk sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dalam kegiatan penjaminan Pemerintah pada proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW berbahan bakar batubara oleh PT PLN (Persero).

- ***Jaminan Pembangunan Proyek Monorail Jakarta***

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta yang ditetapkan tanggal 13 Desember 2006, Pemerintah memberikan jaminan melalui mekanisme APBN terhadap pembangunan Proyek Monorail Jakarta yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kerja sama dengan Badan Usaha. Jaminan diberikan sebesar 50% dari shortfall atas batas penumpang minimum sebanyak 160.000 penumpang per hari atau 50% dari nilai maksimum sebesar USD22,500,000 pertahun selama lima tahun.

Jaminan berlaku efektif sejak tanggal 15 Maret 2007 untuk jangka waktu 36 bulan. Apabila ketentuan dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka berdasarkan PMK Nomor 30/PMK.02/2007 pemberian jaminan dinyatakan batal dan tidak berlaku. Sampai pertengahan tahun 2008, investor Proyek Pembangunan Monorail Jakarta belum berhasil mendapatkan fasilitas pembiayaan (*financial close*) sesuai dengan perjanjian perjasama yang telah ditandatangani bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan hal tersebut, terdapat kemungkinan proyek ini akan ditinjau kembali oleh pihak-pihak terkait. Mengingat hal tersebut, untuk tahun 2009 diperkirakan belum ada risiko fiskal terkait dengan proyek ini karena proyek monorail belum beroperasi pada tahun 2009 mendatang.

- ***Jaminan Risiko Land Capping atas Proyek Pembangunan Jalan Tol***

Dalam rangka proyek pembangunan jalan tol, Pemerintah menanggung sebagian dari kelebihan biaya pengadaan tanah sebagai akibat adanya

kenaikan harga pada saat pembebasan lahan. Jumlah proyek pembangunan jalan tol mendapat dukungan Pemerintah sebanyak 28 proyek, diantaranya adalah proyek-proyek Jalan Tol Trans Jawa dan Jakarta Outer Ring Road II (JORR II).

Pemberian dukungan Pemerintah atas kenaikan biaya pengadaan tanah pada 28 ruas jalan tol dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan jalan tol yang tersendat karena permasalahan kenaikan harga dalam pembebasan tanah yang akan digunakan dalam pembangunan jalan tol. Di samping itu, dukungan juga dimaksudkan untuk menjaga tingkat kelayakan finansial dari proyek jalan tol sehingga diharapkan investor segera menyelesaikan pembangunannya.

Pemberian dukungan pemerintah dimaksud akan dialokasikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun anggaran yakni tahun 2008 hingga tahun 2010 dengan total nilai dukungan sebesar Rp4,89 triliun. Mengingat jangka waktu tersebut, kiranya dukungan pemerintah ini bersifat temporer. Arah kebijakan mendatang untuk percepatan pembangunan jalan tol, risiko *land capping* akan ditanggulangi dengan melakukan penyediaan lahan terlebih dahulu oleh kementerian negara/lembaga.

10. Unfunded Liability

Dalam pelaksanaan pemberian kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil, disamping Negara dapat menanggung pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan PNS, juga melibatkan PNS dalam menanggung pembiayaan untuk penyelenggaraannya melalui iuran PNS bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, sesuai Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1974, maka dari setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara dipungut iuran 10% dari penghasilan setiap bulannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3¼% dari 10% tersebut merupakan iuran Tabungan Hari Tua. Sesuai dengan penjelasan Pasal 6 PP No. 25 Tahun 1981, Penghasilan adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diterima peserta setiap bulan tanpa pangan, satu dan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 478/KMK.06/2002, skema THT adalah manfaat pasti, di mana setiap PNS pada saat pensiun atau meninggal dunia akan menerima manfaat asuransi dwiguna dan atau manfaat asuransi kematian dan formulanya sudah ditetapkan.

Pasal 14 PP 25 Tahun 1981 menyatakan bahwa dalam hal penyelenggara asuransi sosial yaitu Badan Usaha Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka Negara bertanggungjawab penuh untuk itu.

Sesuai dengan Pasal 1 poin 3 PMK 65 Tahun 2008, Utang Kepada Dana Pensiun dan THT (*unfunded liability*) THT adalah pos belanja yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah dalam rangka penyesuaian perhitungan besarnya manfaat THT PNS dan Hakim.

Pada Laporan Keuangan PT TASPEN (program THT) Tahun 2009 diungkapkan bahwa terdapat Piutang PSL Pemberi Kerja atas THT yang diestimasi, akibat kenaikan gaji pokok PNS tahun 2007, 2008 dan 2009 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
PSL Pemberi Kerja akibat PP 9/2007	1.639.066.231.444
PSL Pemberi Kerja akibat PP 14/2008	
Perubahan gaji pokok	2.451.864.039.858
Perubahan tingkat bunga tahun 2008	93.946.230.524
Jumlah	2.545.810.270.382
PSL Pemberi Kerja akibat PP 8/2009	
Perubahan gaji pokok	3.026.994.536.010
Perubahan tingkat bunga tahun 2008	128.761.758.479
Jumlah	3.155.756.294.489
Total	7.340.632.796.315

Atas Utang Kepada Dana Pensiun dan THT (*unfunded liability*) tersebut, PT TASPEN (Persero) telah menyampaikan surat nomor SRT-37/Dir.1/2010 tanggal 9 April 2010 hal penyelesaian Utang Kepada Dana Pensiun dan THT (*unfunded liability*) Pemerintah akibat kenaikan gaji pokok PNS tahun 2007, 2008, dan 2009 kepada PT TASPEN (Persero).

Dalam menanggapi surat tersebut, Dirjen Anggaran bersama Ketua BAPEPAM LK melalui Nota Dinas Bersama kepada Menteri Keuangan Nomor ND-370/AG/2010 – ND-45/BL/2010 pada huruf d menyatakan bahwa sesuai prinsip pertanggungjawaban Pemerintah atas kelangsungan penyelenggaraan program THT PNS, dan prinsip "*compliance*", maka untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan program THT PNS Tahun Buku 2009, Pemerintah perlu menyatakan bertanggungjawab atas kewajiban yang timbul tanpa harus secara langsung menyebutkan besarnya sampai dengan disepakatinya besaran kewajiban berkenaan.

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT (*unfunded liability*) sebesar Rp7.340.632.796.315 merupakan estimasi sepihak oleh PT TASPEN (Persero), belum bersifat definitif. Pemerintah sedang melakukan perhitungan ulang dan verifikasi sehingga angka tersebut dapat berubah sesuai hasil verifikasi Pemerintah. Pemerintah juga sedang melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap program THT untuk menjamin penyelenggaraan yang berkelanjutan berdasarkan best practices yang berkeadilan dan akuntabel.

Penyelesaian Utang Kepada Dana Pensiun dan THT (*unfunded liability*) tersebut akan disesuaikan dengan perhitungan ulang oleh Pemerintah dan ditetapkan dalam APBN pada tahun-tahun yang akan datang.

11. Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri

Program Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dana Pensiun dibentuk berdasarkan kontribusi Pemerintah, sebagai pemberi kerja, dan PNS, sebagai peserta. Namun demikian, selama ini untuk penyelenggaraan program pensiun dan program Tabungan Hari Tua (THT), iuran hanya disetor oleh peserta masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji pokok. Pemerintah selaku pemberi kerja belum mengiur.

Pemerintah menganut sistem pembayaran secara *current cost financing* yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun dengan sistem

sharing dengan Dana Pensiun. Pada APBN-P TA 2009 pembayaran pensiun 100% beban APBN.

Sistem pembayaran sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kekurangan pendanaan penyelenggaraan program pensiun dan THT (*past service liabilities*). Berdasarkan Hasil Valuasi Aktuaria Independen per 31 Desember 2003 terdapat defisit kewajiban Aktuaria Program Dana Pensiun sebesar Rp365,47 triliun sebagai akibat kekurangan pendanaan pemerintah pada Dana Pensiun. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan seluruh PNS, termasuk Veteran, TNI dan Polri (yang telah menjalani masa pensiun sampai dengan 31 Maret 1989), serta pejabat negara.

Sejak 1 April 1989, pembayaran pensiun TNI dan Polri dikelola oleh PT Asabri (Persero). Berdasarkan hasil perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh konsultan PT Binaputera Jaga Hikmah per 25 April 2007 menunjukkan bahwa *past service liabilities* (gabungan program pensiun dan beras) pada PT Asabri (Persero) per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp70,22 triliun.

Berdasarkan penjelasan di atas, total saldo *past service liabilities* untuk seluruh pensiun PNS, Veteran, TNI dan Polri adalah sebesar Rp435,69 triliun. Saldo *past service liabilities* ini belum disajikan sebagai kewajiban dalam LKPP Tahun 2009.

12. Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP Tahun 2008

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Pemerintah telah melakukan tindak lanjut terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2008. Tindak lanjut dimaksud dapat dilihat pada Daftar 41.

C.4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Pencairan Dana Cadangan Subsidi/PSO, Dana Cadangan PMN, dan Dana Cadangan DBH

Sampai dengan LKPP Tahun 2009 ini disusun, dari total Rp19.686.501.732.312 dana cadangan subsidi/PSO dan dana cadangan DBH (lihat **Catatan C.2.26. Aset Lainnya-Dana yang Dibatasi Penggunaannya**) yang telah disalurkan kepada pihak ketiga sebesar Rp13.582.041.873.038 dan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp6.090.096.302.655. Dengan demikian, masih terdapat saldo sebesar Rp14.032.115.059 yang merupakan subsidi Pangan Program Raskin (PSO Perum Bulog) tahun anggaran yang lalu.

Rincian dana cadangan yang disalurkan kepada pihak ketiga, disetorkan ke Kas Negara, saldo adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Dana Cadangan	Disalurkan kepada Pihak Ketiga	Disetorkan ke Kas Negara	Total
Subsidi Premium	-	672.697.576.336	672.697.576.336

Subsidi Minyak Tanah	-	360.903.902.457	360.903.902.457
Subsidi Minyak Solar	-	509.086.127.020	509.086.127.020
Subsidi LPG	-	596.428.709.593	596.428.709.593
Subsidi Pangan	722.872.125.300	295.926.992.400	1.018.799.117.700
Subsidi Benih	388.308.655.468	189.155.925.554	577.464.581.022
Subsidi Pupuk	2.141.902.683.817	2.096.269.534.003	4.238.172.217.820
Subsidi PELNI	150.000.000.000	-	150.000.000.000
Subsidi PT KAI	123.146.034.378	10.603.965.622	133.750.000.000
Subsidi PT Pos dan Giro	43.750.000.000		43.750.000.000
Konversi minyak tanah ke LPG-BPH Migas	2.233.275.517.842	124.325.103.659	2.357.600.621.501
DBH	7.778.786.856.233	1.234.698.466.051	9.013.485.322.284
Jumlah	13.582.041.873.038	6.090.096.302.695	19.672.138.175.733

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

SALDO AWAL KAS

*Saldo Awal Kas per
1 Januari 2009
sebesar Rp77,58
triliun*

Saldo Awal Kas BUN, KPPN, dan BLU per 1 Januari 2009 sebesar Rp77.582.813.784.962 yang merupakan Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU per 31 Desember 2008 ditambah koreksi saldo awal Kas pada BLU TA 2009. Rincian Saldo Awal Kas BUN, KPPN, dan BLU adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Saldo Awal Kas KPPN, BUN, & BLU:		
Kas di BI	67.707.599.065.065	18.170.046.148.742
Kas di KPPN	6.755.052.343.271	5.492.896.654.079
Kas pada BLU	1.367.545.965.572	399.472.197.235
Saldo Awal Kas KPPN, BUN, & BLU Sebelum Koreksi	75.830.197.373.908	24.062.415.000.056
Koreksi Saldo Awal		
Koreksi Saldo Awal Kas pada BLU	252.842.539.718	-
Koreksi Saldo Awal BLU Sebelum TA 2009	1.499.773.871.336	-
Total Koreksi	1.752.616.411.054	-
Saldo Awal Kas KPPN, BUN & BLU Setelah Koreksi	77.582.813.784.962	24.062.415.000.056

PERUBAHAN KAS

*Penurunan Kas
pada TA 2009
sebesar Rp31,52
triliun*

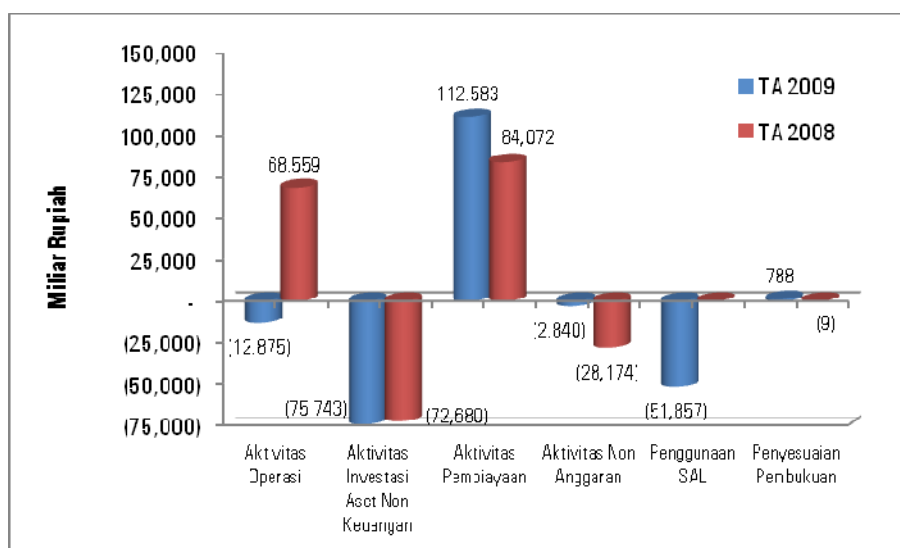
Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2009 dan TA 2008 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	(12.875.854.630.543)	68.558.665.438.284
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(75.742.929.743.741)	(72.679.983.198.760)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pembiayaan	112.583.311.415.415	84.071.748.066.005
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Non Anggaran	(2.839.831.410.233)	(28.174.128.678.312)
Penggunaan SAL TA 2008	(51.857.136.912.000)	-
Penyesuaian Pembukuan *)	(787.626.459.446)	(8.519.253.365)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(31.520.067.740.548)	51.767.782.373.852

*) Penyesuaian Pembukuan terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pengembalian Pendapatan TA yang lalu dan SP2D Retur	(648.859.364.437)
Front End Fee TA 2008 yang belum dibukukan	(77.510.360.029)
Koreksi Pengembalian Uang Persediaan	(43.513.387.221)
Koreksi Kas pada BLU RS Cicendo & RS Rotinsulu	(17.743.347.759)
Total Penyesuaian Pembukuan	(787.626.459.446)

Komposisi Arus Kas Bersih dari tiap aktivitas disajikan dalam Grafik 43.



Grafik 43: Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

SALDO AKHIR KAS DAN BANK

Saldo Akhir Kas per
31 Desember 2009
sebesar Rp81,37
triliun

Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2009 sebesar Rp81.368.710.152.403 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Kas BUN, KPPN & BLU *)	46.062.746.044.414	75.830.197.373.908
Rekening Pemerintah Lainnya	32.218.505.711.694	35.642.938.767.447
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.036.241.894.537	1.154.712.127.961
Kas di Bendahara Penerimaan	1.040.200.195.970	1.308.388.040.590
Kas Lainnya dan Setara Kas	901.887.427.630	-
Kas pada BLU **)	109.128.878.158	1.021.550.862.953
Jumlah Saldo Akhir Kas	81.368.710.152.403	114.957.787.172.859

*) Saldo Akhir Kas BUN, KPPN & BLU terdiri dari:

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Rekening Kas BUN di BI	32.185.520.242.213	67.707.599.065.065
Rekening Kas di KPPN	8.309.379.301.258	6.755.052.343.271
Kas di BLU	5.567.846.500.943	1.367.545.965.572
Jumlah	46.062.746.044.414	75.830.197.373.908

Keterangan:

Rekening Kas BUN di BI termasuk Rekening atas Penerimaan Hibah Sumatera sebesar Rp483.880.666.908.

**) Kas pada BLU sebesar Rp109.128.878.158 merupakan Kas pada BLU yang belum disahkan oleh KPPN, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Total Kas pada BLU menurut K/L (Lihat Catatan C.2.7)	5.676.975.379.101	2.389.096.828.525
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	(5.567.846.500.943)	(1.367.545.965.572)

Kas pada BLU yang belum disahkan KPPN	109.128.878.158	1.021.550.862.953
---------------------------------------	-----------------	-------------------

Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN sebesar Rp5.567.846.500.943 berasal dari perhitungan sebagai berikut (Rp):

Saldo Awal Kas pada BLU TA 2009	1.367.545.965.572
Koreksi Tambah Saldo Awal kas pada BLU	1.752.616.411.054
Koreksi Kurang pada BLU RS Cicendo dan RS Rotinsulu	(17.743.347.759)
Pendapatan BLU TA 2009	8.369.529.106.041
Belanja BLU TA 2009	(5.904.101.633.965)
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	5.567.846.500.943

Keterangan:

Koreksi tambah saldo awal Kas pada BLU sebesar Rp1.752.616.411.054 terdiri dari koreksi atas kas sebelum tahun 2009 sebesar Rp1.499.773.871.336 dan koreksi awal tahun 2009 sebesar Rp252.842.539.718.

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2009 diuraikan sebagai berikut:

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp12,88 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2009. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar minus Rp12.875.854.630.543, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Arus Kas Masuk	848.646.609.964.902	981.520.576.889.701
Dikurangi Arus Kas Keluar	861.522.464.595.445	912.961.911.451.417
Arus Kas Bersih	(12.875.854.630.543)	68.558.665.438.284

Arus Kas Bersih minus berarti arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi minus menunjukkan bahwa pendapatan operasional Pemerintah tidak cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasional Pemerintah, sehingga Pemerintah harus menggunakan sumber pembiayaan. Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2008, terdapat penurunan arus kas bersih sebesar Rp81.434.520.068.827 atau 118,78 persen.

Penerimaan Perpajakan (Neto) Rp619,91 triliun

D.2.1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan pada TA 2009 sebesar Rp619.914.985.063.499 terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp601.251.757.069.894 dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp18.663.227.993.605. Penerimaan Perpajakan ini merupakan penerimaan Pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2009 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Rincian Penerimaan Perpajakan TA 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Pajak Dalam Negeri		
Pajak Penghasilan (PPh)	317.614.988.311.624	327.497.716.210.755
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM)	193.067.541.998.775	209.647.424.433.640

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	24.270.191.705.513	25.354.279.618.301
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.464.517.415.416	5.573.095.008.708
Cukai	56.718.468.581.956	51.251.752.624.651
Pajak Lainnya	3.116.049.056.610	3.034.423.417.186
Jumlah Penerimaan Pajak DN (Neto) Pajak Perdagangan Internasional	601.251.757.069.894	622.358.691.313.241
Bea Masuk	18.098.273.245.280	22.763.778.701.766
Bea Keluar	564.954.748.325	13.578.320.649.229
Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	18.663.227.993.605	36.342.099.350.995
Penerimaan Perpajakan	619.914.985.063.499	658.700.790.664.236

Dengan demikian, penerimaan Perpajakan dalam TA 2009 lebih kecil Rp38.785.805.600.737 atau 5,89 persen dari TA 2008.

a. Pajak Penghasilan

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada TA 2009 adalah sebesar Rp317.614.988.311.624 yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas. Rincian penerimaan kas dari PPh pada TA 2009 dan TA 2008 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
PPh Migas		
PPh Minyak Bumi	18.360.480.065.849	29.634.966.041.552
PPh Gas Alam	31.683.194.144.689	47.383.937.086.253
PPh Lainnya Minyak Bumi	-	-
PPh Migas Lainnya	-	-
Jumlah PPh Migas	50.043.674.210.538	77.018.903.127.805
PPh Non Migas		
PPh Pasal 21	52.072.653.972.683	51.709.584.474.271
PPh Pasal 22	4.368.552.138.289	4.950.928.530.134
PPh Pasal 22 Impor	19.202.894.609.796	25.061.597.326.045
PPh Pasal 23	16.032.496.664.217	18.073.368.980.207
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	3.346.803.263.201	3.608.085.804.988
PPh Pasal 25/29 Badan	120.312.764.156.957	106.368.031.139.110
PPh Pasal 26	18.365.176.514.472	14.880.319.679.351
PPh Final dan Fiskal LN	33.847.137.287.436	25.804.063.323.806
PPh Non Migas Lainnya	22.835.494.035	22.833.825.038
Jumlah PPh Non Migas	267.571.314.101.086	250.478.813.082.950
Jumlah Pajak Penghasilan	317.614.988.311.624	327.497.716.210.755

Dengan demikian, penerimaan Pajak Penghasilan pada TA 2009 lebih kecil Rp9.882.727.899.131 atau 3,02 persen dari penerimaan TA 2008.

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) untuk TA 2009 adalah sebesar Rp193.067.541.998.775. Rincian Penerimaan PPN & PPnBM adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	126.524.801.302.850	124.260.306.814.536
PPN dan PPnBM Impor	66.255.615.400.539	85.074.488.797.871
PPN dan PPnBM lainnya	287.125.295.386	312.628.821.233
Jumlah PPN dan PPnBM (Neto)	193.067.541.998.775	209.647.424.433.640

Dengan demikian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah pada TA 2009 lebih kecil Rp16.579.882.434.865 atau 7,91 persen dari TA 2008.

c. Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2009 adalah sebesar Rp24.270.191.705.513. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
PBB Pedesaan	1.434.162.381.044	1.426.127.033.997
PBB Perkotaan	5.510.387.938.885	4.970.599.840.866
PBB Perkebunan	705.413.144.414	617.640.514.160
PBB Kehutanan	158.094.180.964	155.806.089.441
PBB Pertambangan	514.805.691.913	18.161.293.908.705
PBB Migas	15.947.328.368.293	-
PBB Lainnya	-	22.812.231.132
Jumlah PBB (Neto)	24.270.191.705.513	25.354.279.618.301

Dengan demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada TA 2009 lebih kecil Rp1.084.087.912.788 atau 4,28 persen dari TA 2008.

d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada TA 2009 adalah sebesar Rp6.464.517.415.416 atau lebih besar Rp891.422.406.708 atau 16,00 persen dari penerimaan BPHTB TA 2008 sebesar Rp5.573.095.008.708.

e. Cukai

Penerimaan Cukai pada TA 2009 adalah sebesar Rp56.718.468.581.956, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Cukai Hasil Tembakau	55.379.914.472.652	49.926.361.206.384
Cukai Ethyl Alkohol	385.069.410.227	420.655.726.793
Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	927.224.651.121	878.524.341.908
Denda Administrasi Cukai	15.946.685.476	11.664.567.796
Cukai Lainnya	10.313.362.480	14.546.781.770
Jumlah Penerimaan Cukai (Neto)	56.718.468.581.956	51.251.752.624.651

Dengan demikian, penerimaan Cukai pada TA 2009 lebih besar Rp5.466.715.957.305 atau 10,67 persen dari Penerimaan Cukai TA 2008.

f. Pajak Lainnya

Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2009 adalah sebesar Rp3.116.049.056.610. Rincian Penerimaan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Penjualan Benda dan Bea Materai	3.035.798.665.298	2.830.223.587.094
Pajak Tidak Langsung	1.199.386.323	1.241.408.827
Bunga Penagihan Pajak:		
- Bunga Penagihan PPh	32.277.412.571	139.912.417.040
- Bunga Penagihan PPN	44.936.249.306	62.912.525.736
- Bunga Penagihan PPnBM	68.297.251	58.962.447
- Bunga Penagihan PTLL	1.769.045.861	74.516.042
Jumlah Bunga Penagihan Pajak	79.051.004.989	202.958.421.265
Jumlah Pajak Lainnya (Neto)	3.116.049.056.610	3.034.423.417.186

Dengan demikian, penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2009 lebih besar Rp81.625.639.424 atau 2,69 persen dari TA 2008.

g. Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2009 adalah sebesar Rp18.663.227.993.605, yang terdiri dari Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp18.098.273.245.280 dan Penerimaan Bea Keluar sebesar Rp564.954.748.325. Rincian Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Bea Masuk		
Bea Masuk	17.737.630.922.391	22.341.742.521.621
Bea Masuk DTP atas Hibah (SPM Nihil)	3.656.606.296	910.079.236
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	680.420.327.241	662.021.390.304
Bea Masuk dalam rangka KITE	(366.083.630.565)	(271.416.637.071)
Bea Masuk - DTP	-	3.573.882.791
Pabean Lainnya	42.649.019.917	26.947.464.885
Jumlah Bea Masuk (Neto)	18.098.273.245.280	22.763.778.701.766
Bea Keluar	564.954.748.325	13.578.320.649.229
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	18.663.227.993.605	36.342.099.350.995

*PNBP sebesar
Rp227,06 triliun*

Dengan demikian, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2009 lebih kecil Rp17.678.871.357.390 atau 48,65 persen dari TA 2008.

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) pada TA 2009 sebesar Rp7.187.562.916 tidak dicatat pada Laporan Arus Kas karena merupakan transaksi non kas.

D.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TA 2009 adalah sebesar Rp227.064.981.397.006, atau lebih kecil Rp93.450.791.729.238 atau 29,16 persen dari TA 2008 sebesar Rp320.515.773.126.244.

PNBP tersebut berasal dari semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN dan PNBP Lainnya.

Rincian atas penerimaan negara bukan pajak adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2009 adalah sebesar Rp138.959.235.946.131. Penerimaan ini merupakan penerimaan negara yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi SDA, yang terdiri dari:

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	90.055.956.098.738	169.022.232.949.516
Pendapatan Gas Alam	35.696.003.511.600	42.594.738.596.246
Pendapatan Pertambangan Umum	10.369.410.930.584	9.511.320.109.439
Pendapatan Kehutanan	2.345.432.302.758	2.315.527.436.916
Pendapatan Perikanan	92.039.435.895	77.803.662.790
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	400.393.666.556	941.384.084.298
Jumlah Penerimaan SDA (Neto)	138.959.235.946.131	224.463.006.839.205

Dengan demikian, penerimaan Sumber Daya Alam pada TA 2009 lebih kecil Rp85.503.770.893.074 atau 38,09 persen dari TA 2008.

b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada TA 2009 adalah sebesar Rp26.049.543.069.440, yang berarti lebih kecil Rp3.038.827.046.309 atau 10,45 persen dari TA 2008 sebesar Rp29.088.370.115.749. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara.

c. Penerimaan PNBPN Lainnya

Penerimaan PNBPN Lainnya pada TA 2009 adalah sebesar Rp62.056.202.381.435. Penerimaan ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/ Sitaan	5.245.174.719.960	2.780.709.999.300
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	11.007.170.053.975	16.945.896.959.837
Pendapatan Sewa	124.823.250.679	105.804.495.424
Pendapatan Jasa I	13.317.228.679.684	13.603.569.484.065
Pendapatan Jasa II	1.614.683.875.661	1.542.435.111.832
Pendapatan Jasa Luar Negeri	436.564.995.570	337.097.503.805
Pendapatan Jasa Perbankan	971.796.825	2.779.997.726
Pendapatan atas Pengelolaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	3.001.226.634.244	353.540.863.222
Pendapatan Jasa Kepolisian	1.756.304.250.420	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	71.163.765.630	-
Pendapatan Jasa Lainnya	175.245.203.121	269.696.992.630
Pendapatan Bunga	1.575.215.565.189	206.222.008.716
Pendapatan Gain On Bond Redemption	790.983.202.537	214.711.500.000
Pendapatan Fee atas Security Landing	31.033.105	-
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	373.158.620.000	78.023.491.000
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan	163.745.970.532	483.533.775.811
Pendapatan Pendidikan	3.257.742.968.625	4.144.460.220.207
Pendapatan Gratifikasi dan Uang	635.620.302.960	581.543.822.550

Penerimaan Hibah

sebesar Rp1,67
triliun

Sitaan Hasil Korupsi		
Pendapatan Iuran dan Denda	605.357.951.326	648.294.535.990
Pendapatan Pelunasan Piutang	60.516.516.546	8.252.846.640.991
Pendapatan dari Penutupan Rekening	217.842.978.081	1.968.682.102.559
Pendapatan Lain-lain	9.255.900.940.724	10.710.252.479.518
Pendapatan BLU	8.369.529.106.041	3.734.294.186.107
Jumlah PNBP Lainnya (Neto)	62.056.202.381.435	66.964.396.171.290

Dengan demikian, penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2009 lebih kecil Rp4.908.193.789.855 atau 7,33 persen dari TA 2008.

D.2.3. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah pada TA 2009 adalah sebesar Rp1.666.643.504.397. Pendapatan ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya. Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Belanja Pegawai
sebesar Rp127,66
triliun

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Hibah Dalam Negeri		
Hibah Dalam Negeri – Perorangan	77.350.000	430.000
Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha	11.628.100.575	15.361.000
Hibah Dalam Negeri Lainnya	385.173.221	17.994.568.266
Jumlah Hibah Dalam Negeri	12.090.623.796	18.010.359.266
Hibah Luar Negeri		
Hibah Luar Negeri – Perorangan	167.684.688	3.741.828.840
Hibah Luar Negeri – Bilateral	223.447.187.873	256.463.093.220
Hibah Luar Negeri – Multilateral	1.430.862.250.905	2.020.207.941.290
Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya	75.757.135	5.589.876.605
Jumlah Hibah Luar Negeri	1.654.552.880.601	2.286.002.739.955
Jumlah Hibah	1.666.643.504.397	2.304.013.099.221

Dengan demikian, penerimaan Hibah pada TA 2009 lebih kecil Rp637.369.594.824 atau 27,66 persen dari TA 2008.

D.2.4. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada TA 2009 adalah sebesar Rp127.663.323.688.725. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Belanja Barang
sebesar Rp80,66
triliun

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	36.219.858.779.829	31.352.082.400.175
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	33.244.614.465.152	29.711.485.664.995
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	690.795.819.499	684.609.479.009
Belanja Gaji Dokter PTT	348.074.150.000	348.662.780.000
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	153.865.532.989	102.804.311.885
Belanja Honorarium	1.941.399.446.994	7.188.474.771.114
Belanja Lembur	391.846.896.592	300.337.913.297
Belanja Vaksinasi	231.790.734.047	279.198.783.848
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai	5.929.832.181.705	5.544.525.991.215

Transito		
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	46.836.483.165.806	36.042.884.061.635
Belanja Asuransi Kesehatan	1.390.972.995.080	1.022.147.961.887
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	131.075.484.000	131.050.844.600
Belanja Cadangan Perubahan <i>Sharing</i>	(112.370.167)	(1.249.559.227)
Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dephub Pada PT KAI	152.826.407.199	66.486.179.850
Belanja Pegawai (Neto)	127.663.323.688.725	112.773.501.584.283

Dengan demikian, Belanja Pegawai pada TA 2009 lebih besar Rp14.889.822.104.442 atau 13,20 persen dari TA 2008.

D.2.5. Belanja Barang

Belanja Barang pada TA 2009 adalah sebesar Rp80.664.398.161.767 yang merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Belanja Barang	43.032.180.554.518	28.330.706.664.660
Belanja Jasa	10.381.776.334.174	8.998.990.429.539
Belanja Pemeliharaan	6.910.589.163.767	4.914.036.805.821
Belanja Perjalanan	15.156.091.211.519	11.109.638.927.693
Belanja Barang BLU	5.183.760.897.789	2.534.399.610.100
Jumlah Belanja Barang (Neto)	80.664.398.161.767	55.887.772.437.813

Dengan demikian, Belanja Barang TA 2009 ini lebih besar Rp24.776.625.723.954 atau 44,33 persen dari TA 2008.

D.2.6. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang pada TA 2009 sebesar Rp93.781.932.422.813 merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Belanja Bunga Utang mengalami kenaikan Rp5.429.606.579.693 atau 6,15 persen dari Belanja Bunga Utang TA 2008 sebesar Rp88.352.325.843.120.

Rincian Belanja Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri dan Luar Negeri masing-masing sebesar Rp75.339.942.858.629 dan Rp18.441.989.564.184 dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp75.339.942.858.629 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik berdominasi rupiah maupun valas, serta pembayaran imbalan denda, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
---------------	---------------------------------	---------------------------------

Subsidi sebesar
Rp138,07 triliun

Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara DN	55.835.119.571.928	50.656.177.098.456
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	1.242.704.483.099	9.644.400.000
Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara DN	5.400.184.906.000	8.190.473.166.800
Belanja Pembayaran <i>Loss On Bond Redemption</i>	200.531.500.000	68.887.500.000
Belanja Pembayaran Discount SBSN DN	20.511.309.000	-
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara Valas	11.057.884.166.031	5.609.586.833.745
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Valas	286.651.303.585	-
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> Obligasi Negara Valas	239.658.250.000	693.213.930.000
Belanja Pembayaran Denda	1.056.697.368.986	909.162.449.308
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN (Neto)	75.339.942.858.629	66.137.145.378.309

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp18.441.989.564.184 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Belanja Bunga Pinjaman Program	4.012.667.518.042	3.629.784.771.174
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	14.429.322.046.142	18.585.395.693.637
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN (Neto)	18.441.989.564.184	22.215.180.464.811

D.2.7. Subsidi

Belanja Subsidi pada TA 2009 sebesar Rp138.074.972.708.413 merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengeksport atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Rincian Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Bantuan Sosial
sebesar Rp73,80
triliun

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Subsidi Perusahaan Negara		
Subsidi Lembaga Non Keuangan BBM	45.039.390.590.990	139.106.706.629.016
Subsidi Non Lembaga Keuangan - Non BBM:		
Subsidi Non BBM - Harga/biaya	82.459.702.822.490	112.169.131.623.737
Subsidi Non BBM - Pajak	7.671.278.126.014	21.018.204.523.594
Subsidi Non BBM - Lainnya	495.139.763.106	101.865.316.900
Subsidi Non BBM - Harga/biaya II	-	225.708.976.000
Subtotal	90.626.120.711.610	133.514.910.440.231
Subsidi dalam Rangka PSO	1.339.429.839.461	1.729.115.000.000
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	137.004.941.142.061	274.350.732.069.247
Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	1.070.031.566.352	939.243.823.542
Jumlah Subsidi Perusahaan Swasta	1.070.031.566.352	939.243.823.542
Jumlah Belanja Subsidi (Neto)	138.074.972.708.413	275.289.975.892.789

Dengan demikian, Subsidi TA 2009 ini lebih kecil Rp137.215.003.184.376 atau 49,84 persen dari TA 2008 sebesar Rp275.289.975.892.789.

Belanja Lain-lain
sebesar Rp38,96
triliun

Subsidi Non BBM Pajak berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) pada TA 2009 sebesar Rp7.187.562.916 tidak dicatat pada Laporan Arus Kas karena merupakan

transaksi non kas.

D.2.8. Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp73.796.894.379.034 merupakan uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Kompensasi Kenaikan Harga BBM	4.430.598.244.500	3.851.998.034.848
Bantuan Langsung Sekolah/Lembaga/Guru	43.919.937.543.541	28.036.643.311.159
Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga	3.991.797.084.200	3.543.219.733.040
Beasiswa	4.984.713.937.103	3.415.549.045.545
Lembaga Peribadatan	69.281.135.000	240.270.875.991
Lembaga Sosial Lainnya	16.400.566.434.690	17.842.109.831.005
Jumlah Bantuan Sosial (Neto)	73.796.894.379.034	56.929.790.831.588

*DBH Pajak sebesar
Rp39,27 triliun*

Dengan demikian, Belanja Bantuan Sosial TA 2009 ini lebih besar Rp16.867.103.547.446 atau 29, 63 persen dari TA 2008.

D.2.9. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain pada TA 2009 adalah sebesar Rp38.955.711.251.756, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Belanja Rekonstruksi Aceh	2.168.250.071.603	1.761.238.677
Kerjasama Teknis Internasional	(9.856.000)	9.815.016.163
Pengeluaran Tak Tersangka	-	(168.474.382)
Cadangan Umum	-	(128.292.188)
Pemilu Tahunan	548.819.540.925	1.967.422.531.623
Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri	2.560.316.000	12.302.535.600
Cadangan Dana Reboisasi	305.973.497.740	1.853.993.336.158
Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	-	22.960.310.040
Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)	166.961.798.926	-
Belanja Lainnya	35.763.155.882.562	27.228.698.836.370
Jumlah Belanja Lain-lain (Neto)	38.955.711.251.756	31.096.657.038.061

*DBH SDA sebesar
Rp36,86 triliun*

Dengan demikian, Belanja Lain-lain TA 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp7.859.054.213.695 atau 25,27 persen dari TA 2008.

D.2.10. Dana Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berupa penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Transfer Bagi Hasil Pajak pada TA 2009 adalah sebesar Rp39.269.126.575.424, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Bagi Hasil Pajak Penghasilan	10.219.078.886.979	9.988.288.799.168
Bagi Hasil PBB	23.073.895.100.055	22.251.771.746.068
Bagi Hasil BPHTB	5.976.152.588.390	5.638.895.057.611
Jumlah Bagi Hasil Pajak (Neto)	39.269.126.575.424	37.878.955.602.847

*DAU sebesar
Rp186,41 triliun*

Dengan demikian, Bagi Hasil Pajak TA 2009 lebih besar Rp1.390.170.972.577 atau 3,67 persen dari TA 2008.

D.2.11. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

*DAK sebesar
Rp24,71 triliun*

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berupa penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam dalam TA 2009 adalah sebesar Rp36.860.821.003.513 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

*Dana Otonomi
Khusus sebesar
Rp9,53 triliun*

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Bagi Hasil Minyak Bumi	14.613.344.635.284	18.916.323.740.451
Bagi Hasil Gas Alam	11.515.305.364.716	14.178.199.225.782
Bagi Hasil Pertambangan Umum	7.197.559.262.497	6.191.652.830.572
Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	1.093.168.337.439	0
Bagi Hasil Kehutanan	1.307.096.277.783	1.389.443.104.456
Bagi Hasil Perikanan	69.277.945.794	64.000.000.000
Bagi Hasil Cukai Tembakau	1.065.069.180.000	0
Jumlah Bagi Hasil SDA (Neto)	36.860.821.003.513	40.739.618.901.261

Dengan demikian, DBH SDA TA 2009 lebih kecil Rp3.878.797.897.748 atau 9,52 persen dari TA 2008.

D.2.12. Dana Alokasi Umum

*Dana Penyesuaian
sebesar Rp11,81
triliun*

Dana Alokasi Umum merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan propinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2009 sebesar Rp186.414.100.000.000, jumlah tersebut lebih besar Rp6.906.955.129.000 atau 3,85 persen dari TA 2008 sebesar Rp179.507.144.871.000.

D.2.13. Dana Alokasi Khusus

*Penurunan kas dari
Aktivitas Investasi
Aset Nonkeuangan
sebesar Rp75,74
triliun*

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada propinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Alokasi Khusus pada TA 2009 sebesar Rp24.707.415.400.000, jumlah tersebut lebih besar Rp3.920.068.700.000 atau 18,86 persen dari TA 2008 sebesar Rp20.787.346.700.000.

D.2.14. Dana Otonomi Khusus

*Penjualan Aset
sebesar Rp109,44
miliar*

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Transfer Dana Otonomi Khusus pada TA 2009 sebesar Rp9.526.564.000.000, jumlah tersebut lebih besar Rp2.016.278.206.000 atau 26,85 persen dari TA 2008 sebesar Rp7.510.285.794.000.

D.2.15. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Transfer Dana Penyesuaian pada TA 2009

adalah sebesar Rp11.807.205.004.000, lebih besar Rp5.598.669.049.345 atau 90,18 persen dari TA 2008 sebesar Rp6.208.535.954.655.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Pada TA 2009 menunjukkan arus kas keluar neto sebesar Rp75.742.929.743.741 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

*Belanja Aset Tetap
sebesar Rp75,85
triliun*

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Arus Masuk	109.437.667.665	88.856.436.436
Dikurangi Arus Keluar	75.852.367.411.406	72.768.839.635.196
Arus Kas Bersih	(75.742.929.743.741)	(72.679.983.198.760)

Dengan demikian, Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2009 lebih besar Rp3.062.946.544.981 atau 4,21 persen dari TA 2008.

D.2.16. Penjualan Aset

Pendapatan Penjualan Aset merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa rumah tinggal, kendaraan bermotor, dan aset yang rusak atau berlebihan. Pendapatan yang berasal dari Penjualan Aset Tetap pada TA 2009 adalah sebesar Rp109.437.667.665 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan, dan Tanah	28.539.972.711	2.508.711.855
Penjualan Kendaraan Bermotor	1.250.275.075	1.380.325.056
Penjualan Sewa Beli	45.972.247.413	50.342.104.439
Penjualan Aset Tetap Lainnya	417.757.500	2.523.973.328
Penjualan Aset Lainnya	33.257.414.966	32.101.321.758
Jumlah Penjualan Aset (Neto)	109.437.667.665	88.856.436.436

Dengan demikian, Pendapatan ini pada TA 2009 lebih besar Rp20.581.231.229 atau 23,16 persen dari TA 2008.

*Kenaikan kas dari
Aktivitas
Pembiayaan
sebesar Rp112,58
triliun*

D.2.17. Belanja Aset Tetap

Belanja Aset Tetap pada TA 2009 adalah sebesar Rp75.852.367.411.406 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Belanja Modal Tanah	1.713.705.981.324	1.353.416.610.290
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.164.010.627.379	20.094.404.266.955
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.296.296.467.812	13.842.369.999.536
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	37.529.420.819.921	31.503.297.109.251
Belanja Pemeliharaan Yang Dikapitalisasi	-	1.057.910.007.841
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.428.592.778.794	4.685.620.833.654
Belanja Modal BLU	720.340.736.176	231.820.807.669
Jumlah Belanja Aset Tetap (Neto)	75.852.367.411.406	72.768.839.635.196

Penerimaan

Belanja ini pada TA 2009 lebih besar Rp3.083.527.776.210 atau 4,24 persen dari TA

Pembiayaan DN
sebesar Rp202,28
triliun

2008.

Dengan Arus Kas Masuk Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp12.875.854.630.543 dan Arus Kas Bersih Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar minus Rp75.742.929.743.741 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp88.618.784.374.284. Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas Pemerintah dan tuntutan Pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Pembiayaan Neto dalam TA 2009 adalah sebesar Rp112.583.311.415.415. Jumlah tersebut berasal dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Arus Masuk	302.425.694.268.267	241.535.371.694.559
Dikurangi Arus Keluar	189.842.382.852.852	157.463.623.628.554
Arus Kas Bersih	112.583.311.415.415	84.071.748.066.005

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan TA 2009 lebih besar Rp28.511.563.349.410 atau 33,91 persen dari TA 2008.

D.2.18. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2009 adalah sebesar Rp202.277.266.498.995. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Rekening Pemerintah	53.049.247.755.837	299.999.999.959
Privatisasi dan Penjualan Aset Restrukturisasi	690.333.091.255	2.902.038.528.402
Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)	148.537.685.651.903	132.695.303.303.844
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN	202.277.266.498.995	135.897.341.832.205

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2009 lebih besar Rp66.379.924.666.790 atau 48,85 persen dibandingkan dengan TA 2008.

a. Rekening Pemerintah

Penerimaan pembiayaan dari Rekening Pemerintah pada TA 2009 sebesar Rp53.049.247.755.837 merupakan penerimaan pembiayaan dari rekening yang dimiliki oleh Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Penerimaan dari Rekening SAL	51.857.136.912.000	-
Penerimaan dari Rekening Dana Investasi	571.128.144.837	299.999.999.959
Penerimaan dari Rekening Pembangunan Hutan	620.982.699.000	-
Total Penerimaan dari Rekening Pemerintah	53.049.247.755.837	299.999.999.959

*Penerimaan
Pembiayaan LN
sebesar Rp58,66
triliun*

Penerimaan pembiayaan dari Rekening Pemerintah TA 2009 lebih besar Rp52.749.247.755.878 atau 17.583,08 persen dari TA 2008.

b. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2009 adalah sebesar Rp690.333.091.255, berarti lebih kecil Rp2.211.705.437.147 atau 76,21 persen dari penerimaan pada TA 2008 sebesar Rp2.902.038.528.402. Penerimaan ini berasal dari penjualan aset program restrukturisasi dan penjualan/penyelesaian aset eks BPPN dan aset bekas milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL).

c. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)

Penerimaan pembiayaan SBN merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik berdominasi rupiah maupun valas. Penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2009 sebesar Rp148.537.685.651.903, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Penerbitan/Penjualan SPN	25.200.000.000.000	10.012.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	65.974.730.000.000	76.791.640.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	1.027.625.034.000	1.248.846.053.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas	39.770.426.000.000	39.309.830.431.500
Penerbitan/Penjualan SBSN - DN	9.519.290.000.000	4.699.700.000.000
Penerbitan/Penjualan SBSN - Valas	7.031.748.227.903	616.621.652.444
Imbalan Dibayar di muka SBSN - DN	13.866.390.000	16.665.166.900
Total Penerimaan SBN	148.537.685.651.903	132.695.303.303.844

Dengan demikian, penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2009 lebih besar Rp15.842.382.348.059 atau 11,94 persen dibanding TA 2008.

D.2.19. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2009 sebesar Rp58.662.045.806.549 merupakan seluruh penerimaan Pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, serta penjadualan kembali bunga utang luar negeri. Rincian Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Pinjaman Program	28.937.702.908.655	30.100.439.755.174
Pinjaman Proyek	29.724.342.897.894	20.118.310.176.732
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	58.662.045.806.549	50.218.749.931.906

Dengan demikian, penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2009 lebih besar Rp8.443.295.874.643 atau 16,81 persen dari TA 2008.

a. Pinjaman Program

*Penerimaan
Pengembalian
Penerusan
Pinjaman sebesar*

Rp3,13 triliun

Pinjaman Program yang diterima dalam TA 2009 adalah sebesar Rp28.937.702.908.655, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Program Bilateral	9.136.727.594.800	8.021.748.614.400
Program Multilateral	19.800.975.313.855	22.078.691.140.774
Jumlah Pinjaman Program	28.937.702.908.655	30.100.439.755.174

Dengan demikian, Pinjaman Program TA 2009 lebih kecil Rp1.162.736.846.519 atau 3,86 persen dari TA 2008.

*Penerimaan
Pembiayaan Lain-
lain sebesar
Rp38,35 triliun*

b. Pinjaman Proyek

Pinjaman Proyek yang diterima dalam TA 2009 adalah sebesar Rp29.724.342.897.894, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Pinjaman Proyek dari Bilateral	12.322.925.734.667	7.677.549.041.030
Pinjaman Proyek dari Multilateral	8.224.672.697.242	5.873.858.103.991
Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	5.270.208.271.880	4.274.539.437.119
Pinjaman Proyek Lainnya	3.906.536.194.105	2.292.363.594.592
Jumlah Pinjaman Proyek	29.724.342.897.894	20.118.310.176.732

Dengan demikian, Pinjaman Proyek TA 2009 lebih besar Rp9.606.032.721.162 atau 47,75 persen dibandingkan TA 2008.

Penarikan Pinjaman Proyek menurut Notice of Disbursement (NOD) adalah sebesar Rp23.580.954.828.736, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp4.440.423.248.087. (Lihat *Catatan B.2.4.2.1.2*)

*Pengeluaran
Pembiayaan DN
sebesar Rp49,07
triliun*

D.2.20. Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman pada TA 2009 adalah sebesar Rp3.133.897.417.553 merupakan seluruh penerimaan Pemerintah sehubungan dengan cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman luar negeri kepada Pemda, BUMD dan BUMN. Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN TAYL kepada Pemda	54.241.853.891
Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN TAYL kepada BUMD	209.662.828.985
Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN TAYL kepada BUMN	2.869.992.734.677
Jumlah Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	3.133.897.417.553

*Pengeluaran
Pembiayaan LN
sebesar Rp68,03
triliun*

D.2.21. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

Penerimaan Pembiayaan Lain-lain dalam TA 2009 adalah sebesar Rp38.352.484.545.170 yang berasal dari penyesuaian penambahan saldo rekening khusus karena selisih kurs. Pada TA 2008 Penerimaan Pembiayaan lain-lain sebesar

PMN/Dana Investasi
Pemerintah sebesar
Rp13,08 triliun

Rp55.419.279.930.448.

Dengan demikian, Penerimaan Pembiayaan Lain-lain dalam TA 2009 lebih kecil Rp17.066.795.385.278 atau 30,80 persen dari TA 2008.

D.2.22. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2009 adalah sebesar Rp49.066.788.007.901 yang digunakan untuk pelunasan SPN, Obligasi Negara, dan SBSN, serta untuk pembiayaan dana bergulir, dengan rincian sebagai berikut (Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Pelunasan Obligasi Negara Valas	-	610.586.443.082
Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	10.512.000.000.000	4.168.800.000.000
Pelunasan Obligasi Negara Rupiah	38.538.122.841.001	41.999.655.534.000
Pelunasan SBSN	16.665.166.900	-
Jumlah Pembiayaan Dalam Negeri	49.066.788.007.901	46.779.041.977.082

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2009 lebih besar Rp2.287.746.030.819 atau 4,89 persen dibandingkan TA 2008 sebesar Rp46.779.041.977.082.

Penerusan
Pinjaman (RDI/RPD)
sebesar Rp6,18
triliun

D.2.23. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2009 sebesar Rp68.031.113.857.077 merupakan pembiayaan cicilan pokok utang luar negeri, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Pinjaman Program	8.755.976.968.919	5.866.722.194.538
Pinjaman Proyek	59.275.136.888.158	57.490.860.565.371
Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran <i>Ineligible</i> sampai dengan Tahun 2008	-	77.727.982.168
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	68.031.113.857.077	63.435.310.742.077

Pengeluaran
Pembiayaan Lain-
lain sebesar
Rp53,48 triliun

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2009 lebih besar Rp4.595.803.115.000 atau 7,24 persen dibandingkan dengan TA 2008 sebesar Rp63.435.310.742.077.

Penurunan Kas dari
Aktivitas
Nonanggaran
sebesar Rp2,84
triliun

D.2.24. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, serta investasi dalam bentuk dana bergulir. PMN/Dana Investasi Pemerintah dalam TA 2009 adalah sebesar Rp13.084.949.775.291, yang terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
PMN untuk BUMN	11.673.967.076.291
Investasi Pemerintah untuk BLU PIP	500.000.000.000
Dana Bergulir	910.982.699.000
Jumlah	13.084.949.775.291

Dengan demikian, PMN/Dana Investasi Pemerintah TA 2009 lebih besar

*PFK (Neto) sebesar
minus Rp0,96 triliun*

Rp10.584.929.775.291 atau 423,39 persen dari TA 2008 sebesar Rp2.500.020.000.000.

Sejak TA 2009, investasi Pemerintah dalam bentuk dana bergulir dianggarkan sebagai pembiayaan.

D.2.25. Penerusan Pinjaman

Pembiayaan RDI/RPD merupakan pengeluaran Pemerintah atas pemberian pinjaman dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Penerusan pinjaman luar negeri pada TA 2009 adalah sebesar Rp6.180.700.434.079 untuk pemda dan BUMN. Jumlah tersebut lebih besar Rp991.384.230.197 atau 19,10 persen dibandingkan dengan TA 2008 sebesar Rp5.189.316.203.882.

D.2.26. Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain

Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain pada TA 2009 adalah sebesar Rp53.478.830.778.504 berupa pengeluaran pemerintah akibat penyesuaian penurunan saldo rekening khusus karena selisih kurs. Jumlah tersebut lebih besar Rp13.918.896.072.991 atau 35,18 persen dibandingkan TA 2008 sebesar Rp39.559.934.705.513.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Dalam TA 2009, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran adalah sebesar minus Rp2.839.831.410.233, dengan rincian sebagai berikut:

*PFK Prefinancing
sebesar minus
Rp2,50 triliun*

Uraian	TA 2008 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	956.696.291.231	(244.155.293.370)
Jumlah PFK Prefinancing (Neto)	(2.500.000.000.000)	(13.385.978.626.337)
Jumlah KU (Neto)	(1.545.543.155.898)	(9.716.396.322.032)
Jumlah Transito (Neto)	249.015.454.434	172.401.563.427
Penempatan Dana Pemerintah	-	(5.000.000.000.000)
Arus Kas Bersih	(2.839.831.410.233)	(28.174.128.678.312)

D.2.27. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam TA 2009 sebesar Rp956.696.291.231 berasal dari penerimaan pemerintah yang berasal dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk fihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada fihak ketiga yang berhak menerimanya dan Non Anggaran Fihak Ketiga. Adapun Rincian penerimaan dan pengeluaran PFK pada TA 2009 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (<i>Audited</i>)	TA 2008 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Non Anggaran PFK		
Penerimaan PFK 10% Gaji	13.167.818.220.274	10.876.021.944.240
Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	3.766.019.825	5.959.579.031

Kiriman Uang
sebesar minus
Rp1,55 triliun

Penerimaan PFK Beras BULOG	172.521.810.942	158.614.322.538
Penerimaan PFK 2% Pemda	1.799.950.017.900	1.463.012.152.751
Penerimaan PFK Penutupan Rekening	881.870	343.646.885
Penerimaan PFK Lain-lain	355.865.935.419	340.450.159.591
Penerimaan Non Anggaran PFK karena Kesalahan Rekening	521.054.698.191	213.389.292.982
Jumlah Penerimaan PFK	16.020.977.584.421	13.057.791.098.018
Pengeluaran Non Anggaran PFK		
Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji	(12.578.656.020.477)	(11.181.895.504.354)
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	(8.204.704.170)	(4.175.286.849)
Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog	(174.361.917.476)	(154.143.899.301)
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Pemda	(1.698.969.644.025)	(1.423.298.147.804)
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(360.744.778.000)	(353.172.719.326)
Pengeluaran Non Anggaran PFK karena Kesalahan Rekening	(243.344.229.042)	(185.260.833.754)
Jumlah Pengeluaran PFK	(15.064.281.293.190)	(13.301.946.391.388)
PFK (Neto)	956.696.291.231	(244.155.293.370)

D.2.28. PFK Prefinancing dan PFK Lainnya

PFK Prefinancing dan PFK Lainnya TA 2009 sebesar minus Rp2.500.000.000.000 merupakan transaksi yang dilakukan BUN berupa *prefinancing* (pembiayaan pendahuluan), penerimaan/ pengembalian dana talangan, dan pembayaran rekening khusus kosong (reksus kosong), dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Transito Rp249,01
miliar

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Penerimaan PFK Prefinancing:		
Penerimaan Dana Talangan	10.000.000.000.000	1.000.000.000.000
Jumlah Penerimaan PFK Prefinancing	10.000.000.000.000	1.000.000.000.000
Dikurangi:		
Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya dan Pengembalian Dana Talangan:		
Pembayaran kepada PPHLN - Pengeluaran <i>In-Eligible</i>	-	(727.175.050)
Pembayaran dari Rekening BUN - Reksus Kosong	-	(65.996.721.774)
Pengembalian Dana Talangan ke Rekening SAL	(12.500.000.000.000)	(13.319.254.729.513)
Pengembalian Dana Talangan ke Dana Moratorium	-	(1.000.000.000.000)
Jumlah Pembayaran PFK Prefinancing	(12.500.000.000.000)	(14.385.978.626.337)
Jumlah PFK Prefinancing (Neto)	(2.500.000.000.000)	(13.385.978.626.337)

D.2.29. Kiriman Uang

Kiriman Uang (KU) Neto TA 2009 sebesar minus Rp1.545.543.155.898 antara lain merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Departemen Keuangan dan sebaliknya, Pemindahbukuan intern rekening BUN, pemindahbukuan intern KPPN, dan Wesel Pemerintah.

Penempatan Dana
Pemerintah Rp0

Dalam transaksi KU TA 2009 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran KU yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, dan ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Rincian KU adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
--------	-------------------	-------------------

Penerimaan Kiriman Uang	587.188.187.776.413	579.985.787.982.268
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka TSA	485.551.004.467.303	443.632.666.104.179
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	193.533.422.980	43.092.185.232
Penerimaan Pemindahbukuan	742.252.369.032.078	722.937.549.558.797
Penerimaan Pemindahbukuan Penutupan Rekening	1.274.445	365.000
Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan	2.202.017.618.830.220	-
Penerimaan Wesel Pemerintah	-	324.000
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	72.564.947.475	30.566.111.100
Jumlah Penerimaan KU	4.017.275.279.750.910	1.746.629.662.630.576
Dikurangi:		
Pengeluaran Kiriman Uang	(580.363.687.655.370)	(578.748.039.350.181)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka TSA	(492.045.583.099.721)	(453.986.769.301.540)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	(217.811.557.253)	(200.782.978.418)
Pengeluaran Pemindahbukuan	(744.110.339.294.908)	(723.163.755.768.627)
Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan	(2.202.017.618.830.220)	-
Pelunasan Wesel Pemerintah	-	(324.000)
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	(65.782.469.340)	(246.711.229.842)
Jumlah Pengeluaran KU	(4.018.820.822.906.810)	(1.756.346.058.952.608)
Jumlah KU (Neto)	(1.545.543.155.898)	(9.716.396.322.032)

D.2.30. Transito

Transito (Neto) TA 2009 sebesar Rp249.015.454.434 merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2009 (Audited)	TA 2008 (Audited)
Penerimaan Transito	18.791.181.250.000	17.608.121.593.435
Pengeluaran Transito	(18.542.165.795.566)	(17.435.720.030.008)
Jumlah Transito (Neto)	249.015.454.434	172.401.563.427

D.2.31. Penempatan Dana Pemerintah

Dalam rangka strategi manajemen kas untuk memanfaatkan kelebihan kas, Bendahara Umum Negara (BUN) dapat menempatkan kas pada bank sentral/bank umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku. Penempatan kas/uang negara pada bank umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUN dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada saat diperlukan..

Pada TA 2009, tidak terdapat transaksi Penempatan Dana Pemerintah. Pada TA 2008 terdapat Penempatan Dana Pemerintah pada bank umum dan dilaporkan dalam Laporan Arus Kas TA 2008 sebesar Rp5.000.000.000.000.



REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR